

MODEL PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PEMBELAJARAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Dr. Drs. H. Sukadari, SE., SH., MM.

**Kanwa
Publisher**

Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus/
Dr. Drs. H. Sukadari, SE., SH., MM.– Cet. I -- Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2019.
viii + 254 hlm; 17 x 25 cm

ISBN: 978-623-91599-1-7

I. Pendidikan II. Judul III. Dr. Drs. H. Sukadari, SE., SH., MM.
300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Memfoto copy atau memperbanyak dengan cara apapun,
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit adalah
tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus

Penulis : Dr. Drs. H. Sukadari, SE., SH., MM.
Penyunting : Dr. H. Haryanto, M.Pd.
Editor : Linda Tri Utami, SH., S.Pd.
Cetakan Pertama : Oktober 2019
Penerbit : Kanwa Publisher

Alamat:

Griya Sekawan No. 1, Mudal RT 03 / RW 20, Sariharjo,
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, HP: 0856-4365-2602
e-mail: kanwapublisher@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku *Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus* ini telah disusun dan dipersembahkan bagi guru di sekolah regular inklusi.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru memberikan jaminan bahwa setiap anak bangsa benar-benar memperoleh pendidikan, pelayanan, pendampingan yang layak dan berkualitas. Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, maka sebagai bentuk tanggung jawab profesi sebagai seorang pengajar, perlu menyusun buku *Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus* ini dipersembahkan bagi guru yang menangani Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini membantu guru di sekolah inklusi dalam mengajar anak berkebutuhan khusus dapat bermanfaat dan menuai hikmah menuju generasi bangsa Indonesia yang lebih baik.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pakar yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, Direktorat PKLK Depdiknas Jakarta, kepala sekolah inklusi, pengawas, guru, dan praktisi pendidikan inklusi. Berkat bantuan dan kerja sama yang baik dari mereka, buku ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Yogyakarta, Oktober 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
IDENTITAS BUKU	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I MENGENAL ABK DALAM MODEL PENDIDIKAN INKLUSI	
A. Pendahuluan	1
B. Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi	2
C. Identifikasi ABK dalam Proses Pendidikan Inklusi	3
D. Asesmen Sebagai Tindak Lanjut Identifikasi	7
BAB II MENGENAL PENDIDIKAN INKLUSI	
A. Konsep Dasar Pendidikan Inklusi	11
B. Sejarah Pendidikan Khusus dalam Pendidikan Inklusi	14
C. Tujuan Sekolah Inklusi	36
D. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	37
E. Dilema yang Dihadapi dalam Pendidikan Inklusi	40
F. Isu dan Permasalahan yang Dihadapi Pendidikan Inklusi	41
BAB III KURIKULUM DAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN INKLUSI	
A. Konsep Dasar Kurikulum Inklusi	47
B. Kurikulum, Peserta Didik, dan Program Pembelajaran	48
C. Pengembangan Kurikulum Program Inklusi	51
D. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran	54
E. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran	63
F. Model Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Inklusi	67
G. Unsur Pelaksana	68
H. Model Modifikasi Bahan Ajar	70
I. Pelaksanaan	75
J. Cara Melaksanakan Modifikasi Bahan Ajar	76
K. Faktor Pendukung	77
L. Faktor Penghambat	77
M. Pengalaman	78
N. Hasil Yang Diharapkan	78

BAB IV PENGADAAN DAN PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang	79
B. Tujuan	80
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tujuan	80
D. Sistem Ketenagaan Sekolah Inklusi	85
E. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi Tenaga Pendidik	86
F. Pembinaan Tenaga Pendidik	92

BAB V PENERAPAN PEMBELAJARAN DALAM MODEL PENDIDIKAN INKLUSI

A. Latar Belakang	95
B. Komponen Pendidikan Inklusi	97
C. Pengembangan Model Pembelajaran di Sekolah Inklusi	99
D. Langkah-langkah Operasional Penyusunan PPI	103
E. Sistem Pendukung (<i>Support System</i>)	106
F. Kendala-kendala Implementasi Pendidikan Inklusi	108
G. Manajemen Kelas dalam Pembelajaran di Sekolah Inklusi	113
H. Metode Pembelajaran	115
I. Layanan Kebutuhan Khusus Dalam Pembelajaran di Sekolah Inklusi .	116
J. Pedoman Praktis di Kelas Sekolah Inklusi	118

BAB VI KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang	121
B. Kebutuhan Sarana dan Prasarana	122
C. Pra Sarana Khusus	141
D. Pengelolaan Sarana dan Prasarana khusus	141

BAB VII KEGIATAN PEMBELAJARAN SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang	143
B. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran	144
C. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran	152
D. Merencanakan Kegiatan pembelajaran	154

BAB VIII MANAJEMEN SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang	159
B. Konsepsi Manajemen Sekolah	159
C. Pelaksanaan Manajemen Sekolah Inklusif	161

D. Manajemen Mutu Total	166
E. Struktur Organisasi Sekolah	167
F. Pembagian Tugas Pimpinan Sekolah	169
G. Tata Usaha	171
H. Berbagai Guru Sekolah Inklusi	172
I. Pembinaan Sekolah Inklusi	173

BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang	175
B. Pemberdayaan Masyarakat	177
C. Wadah Partisipasi Masyarakat	184

BAB X PENILAIAN HASIL BELAJAR MODEL SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang	193
B. Konsep Dasar Penilaian Kelas	193
C. Teknik Penilaian	197
D. Pengelolaan Hasil Penilaian	210
E. Interpretasi Hasil Penilaian dalam Menetapkan Ketuntasan Belajar	216
F. Pemanfaatan dan Pelaporan Hasil Penilaian Kelas	218

BAB XI MODEL BIMBINGAN KONSELING SISWA ABK DI SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang	225
B. Konsep Dasar Bimbingan Konseling	226
C. Pelaksanaan Bimbingan Konseling	232

DAFTAR PUSTAKA	241
-----------------------------	-----

BIOGRAFI PENULIS	253
-------------------------------	-----

BAB I

MENGENAL ABK

DALAM MODEL PENDIDIKAN INKLUSI

A. Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru di sekolah reguler perlu dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Di antaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah, maupun di masyarakat sekitar sekolah.

Identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat diberikan. Pelayanan tersebut dapat berupa penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi mereka.

Dalam rangka mengidentifikasi (menemukan) anak berkebutuhan khusus, diperlukan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak, di antaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial dan emosi. Selain jenis kelainan tersebut terdapat anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau sering disebut sebagai anak yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa. Masing-masing memiliki ciri dan tanda-tanda khusus atau karakteristik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.

Buku ini disusun untuk membantu guru dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusi yang diawali kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus. Alat ini berupa daftar pernyataan yang berisi gejala-gejala yang nampak pada anak untuk setiap jenis kelainan. Dengan mengamati anak yang mengalami gejala tersebut, guru dapat menentukan anak yang membutuhkan layanan khusus.

Alat ini sifatnya masih sederhana, sebatas melihat gejala yang nampak. Untuk mendiagnosis yang secara menyeluruh dan mendalam, dibutuhkan tenaga profesional yang berwenang, seperti dokter anak, psikolog, ortopedagogik, psikiater, dan sebagainya. Jika pada sekolah tidak tersedia tenaga profesional dimaksud maka dengan alat identifikasi ini, guru, orang tua, dan orang terdekat lainnya dapat melakukan identifikasi, asal dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati. Selanjutnya hasil identifikasi tersebut dapat dijadikan acuan memberikan layanan Pendidikan Khusus secara inklusif.

B. Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.

Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu : anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusuhan dan bencana alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami kedwibahasaan (perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah), anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan karena kemiskinan dsb. Anak berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa menjadi permanen.

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) faktor lingkungan; (2) faktor dalam diri anak sendiri; dan (3) kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Sesuai kebutuhan lapangan maka pada buku ini hanya dibahas secara singkat pada kelompok anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen.

2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi anak berkebutuhan khusus temporer dan permanen. Anak berkebutuhan khusus permanen meliputi: Anak dengan gangguan fisik, dikelompokkan lagi menjadi:

- a. Anak dengan gangguan penglihatan (*tunanetra*)
 - 1) Anak kurang awas (*low vision*)
 - 2) Anak buta (*blind*)
- b. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (*tunarungu/ wicara*)
 - 1) Anak kurang dengar (*hard of hearing*)
 - 2) Anak tuli (*deaf*)

- c. Anak dengan kelainan kecerdasan
 - 1) Anak dengan gangguan kecerdasan (intelektual) di bawah rata-rata (tunagrahita)
 - a) Anak tunagrahita ringan (IQ 50 -70)
 - b) Anak tunagrahita sedang (IQ 25 - 49)
 - c) Anak tunagrahita berat (IQ 25 - ke bawah)
 - 2) Anak dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata
 - a) Gifted dan genius, yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata
 - b) Talented, yaitu anak yang memiliki keberbakatan khusus
- d. Anak dengan gangguan anggota gerak (tunadaksa).
 - 1) Anak layuh anggota gerak tubuh (polio)
 - 2) Anak dengan gangguan fungsi syaraf otak (*cerebral palsy*)
- e. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (tunalaras)
 - 1) Anak dengan gangguan perilaku
 - a) Anak dengan gangguan perilaku taraf ringan
 - b) Anak dengan gangguan perilaku taraf sedang
 - c) Anak dengan gangguan perilaku taraf berat
 - 2) Anak dengan gangguan emosi
 - a) Anak dengan gangguan emosi taraf ringan
 - b) Anak dengan gangguan emosi taraf sedang
 - c) Anak dengan gangguan emosi taraf berat
- f. Anak gangguan belajar spesifik
- g. Anak lamban belajar (*slow learner*)
- h. Anak Autis
- i. Anak ADHD

C. Identifikasi ABK dalam Proses Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Identifikasi

Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan atau menemukannya. Dalam buku ini istilah identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha seseorang (orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya) untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan sensoris neurologis dalam pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya (anak-anak normal).

Marendra (2003) berpendapat, setelah dilakukan identifikasi dapat diketahui kondisi seseorang anak, apakah pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan atau tidak. Bila mengalami kelainan, dapat diketahui pula apakah anak

tergolong: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, lamban belajar, mengalami kesulitan belajar spesifik, autisme, berbakat, ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorders*), gangguan perhatian dan hiperaktif.

Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih menekankan pada menemukan (secara kasar) apakah seorang anak tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan. Menurut Scot Danforth (2006), dalam pelaksanaan identifikasi biasanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat (sering berhubungan/bergaul) dengan anak, seperti orang tuanya, pengasuh, guru dan pihak lain yang terkait dengannya. Setelah dilakukan identifikasi langkah selanjutnya, yang sering disebut asesmen, dan bila diperlukan dapat dilakukan oleh tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, neurolog, ortopedagogik, terapis, dan tenaga ahli lainnya.

2. Tujuan Identifikasi

Secara umum tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional). Anak disebut mengalami kelainan/penyimpangan tentunya jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Menurut Endang Warsigi Ghozali (2003) hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuan anak berkebutuhan khusus.

Manning (2001) berpendapat, dalam usaha pelaksanaan asesmen, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk lima keperluan atau tujuan, yaitu: (1) *screening* (penyaringan); (2) *referral* (pengalih-tanganan); (3) klasifikasi; (4) perencanaan pembelajaran; dan (5) pemantauan kemajuan belajar.

a. *Screening* (penyaringan)

Penyaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Pada tahap ini identifikasi berfungsi menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan/penyimpangan tertentu, sehingga tergolong ABK (Anak Berkebutuhan Khusus).

Dengan alat identifikasi ini guru, orang tua, maupun tenaga profesional terkait, dapat melakukan kegiatan penjaringan secara baik dan hasilnya dapat digunakan untuk bahan penanganan ABK lebih lanjut.

b. *Referral* (pengalih-tanganan)

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penjaringan, selanjutnya anak-anak dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, ada anak

yang perlu dirujuk ke ahli lain (tenaga profesional) dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Kedua, ada anak yang perlu dikonsultasikan ke ahli lain terlebih dulu (*referral*) seperti psikolog, dokter, orthopedagog (ahli pendidikan khusus), dan therapist, kemudian ditangani oleh guru.

Proses perujukan anak oleh guru ke tenaga profesional lain untuk membantu mengatasi masalah anak yang bersangkutan disebut proses *referral* (pengalihan-tanganan). Bantuan ke tenaga lain yang ada seperti Guru Pembimbing Khusus (Guru PLB) atau konselor.

c. Klasifikasi

Pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ketenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus.

Apabila berdasar pemeriksaan tenaga profesional ditemukan masalah yang perlu penanganan lebih lanjut (misalnya pengobatan, terapi, latihan-latihan khusus, dan sebagainya) maka guru tinggal mengkomunikasikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan. Pada tahap klasifikasi ini guru tidak mengobati dan/atau memberi terapi sendiri, melainkan memfasilitasi dan meneruskan kepada orang tua tentang kondisi anak yang bersangkutan. Guru hanya memberi pelayanan pendidikan sesuai dengan kondisi anak. Apabila tidak ditemukan tanda-tanda yang cukup kuat bahwa anak yang bersangkutan memerlukan penanganan lebih lanjut, maka anak dapat dikembalikan ke kelas semula untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus dikelas reguler.

d. Perencanaan pembelajaran

Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualkan (PPI). Dasarnya adalah hasil dari klasifikasi. Setiap jenis dan gradasi (tingkat kelainan) anak berkebutuhan khusus memerlukan program pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Mengenai Program Pembelajaran Individual (PPI) akan dibahas secara khusus pada bab lain.

e. Pemantauan kemajuan belajar

Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Apabila dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan (berarti), maka perlu ditinjau kembali. Beberapa hal yang perlu ditelaah apakah diagnosis yang dibuat oleh guru tepat atau tidak, begitu pula dengan Program Pembelajaran Individual (PPI) serta metode pembelajaran yang digunakan sesuai atau tidak.

Sebaliknya, apabila intervensi yang diberikan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan maka pemberian layanan atau intervensi diteruskan dan dikembangkan. Dengan lima tujuan khusus diatas, identifikasi perlu dilakukan secara terus-menerus oleh guru, dan jika perlu dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan tenaga profesional yang dekat dengan masalah yang dihadapi anak.

3. Pelaksanaan Identifikasi

Ada beberapa langkah identifikasi anak berkebutuhan khusus. Munawir Yusuf (2007), identifikasi anak usia sekolah yang belum bersekolah atau *drop out*, maka sekolah yang bersangkutan perlu melakukan pendataan di masyarakat, kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, RT, RW setempat dan Posyandu. Jika pendataan tersebut ditemukan anak berkebutuhan khusus, maka proses berikutnya dapat dilakukan pembicaraan dengan orang tua, komite sekolah maupun perangkat desa setempat untuk mendata-patkan tindak lanjutnya.

Patto JR. (2003) berpendapat, untuk anak-anak yang sudah masuk dan menjadi siswa di sekolah, identifikasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: menghimpun data anak; pada tahap ini petugas (guru) menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas (berdasarkan gejala yang nampak pada siswa) dengan menggunakan Alat Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (AIALB).

Pada pelaksanaan identifikasi dan mengklasifikasikan anak; di mana data tahap ini tujuannya adalah untuk menemukan anak-anak yang teridentifikasi tergolong Anak Berkebutuhan Khusus (yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus). Buatlah daftar nama anak yang diindikasikan berkelainan sesuai dengan ciri-ciri. Yesseldyke J.E. (2001) berpendapat, jika ada anak yang memenuhi syarat untuk disebut atau berindikasi kelainan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dimasukkan ke dalam daftar nama-nama anak yang berindikasi kelainan sesuai dengan format khusus yang disediakan.

Untuk anak-anak yang tidak terindikasi menunjukkan gejala atau tanda-tanda berkelainan, tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar khusus tersebut. Langkah selanjutnya menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi. Pada tahap ini, hasil analisis dan klasifikasi yang telah dibuat guru dilaporkan kepada Kepala Sekolah, orang tua siswa, dewan komite sekolah untuk mendata-patkan saran-saran pemecahan atau tindak lanjutnya.

Khususnya dalam menyelenggarakan pembahasan kasus (*case conference*); pada tahap ini, kegiatan dikoordinir oleh Kepala Sekolah setelah data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terhimpun dari seluruh kelas. Haryanto, (2007) berpendapat, untuk membahas kasus, sekolah dapat melibatkan: (1) Kepala Sekolah

sendiri; (2) dewan guru; (3) orang tua/wali siswa; (4) tenaga profesional terkait, jika tersedia dan memungkinkan; (5) guru pembimbing khusus (guru PLB) jika tersedia dan memungkinkan. Materi pertemuan kasus adalah membicarakan temuan dari masing-masing guru mengenai hasil identifikasi untuk mendapatkan tanggapan dan cara pemecahan masalah, pencegahan, serta penanggulangannya.

Langkah berikutnya yang tidak kalah penting dalam penanganan khusus anak, menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Pada tahap ini, tanggapan dan cara-cara pemecahan masalah dan penanggulangannya perlu dirumuskan dalam laporan hasil pertemuan kasus. Format hasil pertemuan kasus dapat menggunakan contoh seperti pada lampiran.

4. Petugas Identifikasi

Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong Anak Berkebutuhan Khusus atau bukan, dapat dilakukan oleh:

- a. Guru kelas;
- b. Guru Pembimbing Khusus
- c. Orang tua anak; dan/atau
- d. Tenaga profesional terkait.

D. Asesmen Sebagai Tindak Lanjut Identifikasi

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai, maka dilakukan tindak lanjut asesmen sebagai berikut.

1. Pengertian Asesmen

Istilah asesmen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *asessment* yang berarti penilaian suatu keadaan. Penilaian yang dimaksud dalam hal ini berbeda dengan evaluasi. Jika evaluasi dilaksanakan setelah anak itu belajar dan bertujuan untuk menilai keberhasilan anak dalam mengikuti pelajaran, maka asesmen tidak demikian. Menurut Lerner (1998), dalam asesmen penilaian dilakukan pada saat anak belum diberikan pelajaran atau setelah dari hasil deteksi ditemukan bahwa ia diperkirakan anak berkebutuhan khusus. Asesmen bukan pula tes, akan tetapi tes merupakan bagian dari asesmen. Sejalan dengan uraian sebelumnya, menurut Marnat, G. (2003) mendefinisikan asesmen sebagai berikut: *Assessment refers to the gathering of relevant information to help an individual make decisions. Assessment in educational settings is a multifaceted process that involves for more than the administration of a test.*

Uraian di atas menjelaskan bahwa asesmen merupakan usaha untuk menghimpun informasi yang relevan guna memahami atau menentukan keadaan individu. Dalam bidang pendidikan asesmen merupakan berbagai proses yang rumit untuk lebih melengkapi hasil dari tes yang diberikan kepada siswa. Istilah asesmen memiliki makna yang berbeda dan jauh lebih luas dibandingkan dengan istilah diagnostik, tes dan evaluasi.

Pada sisi lain Marnat, G. (2003) berpendapat, dalam proses asesmen terdapat empat aspek pertanyaan penting yang harus diungkap terkait dengan kondisi seorang individu yaitu: (a) kemampuan atau keterampilan apa yang sudah dimiliki; (b) hambatan atau kesulitan apa yang dialami; (c) mengapa hambatan atau kesulitan itu dialami; (d) kebutuhan-kebutuhan (dalam hal pendidikan dan belajar) apa yang seharusnya dipenuhi.

Hays, P.A. (2007) mendefinisikan asesmen sebagai proses pengumpulan informasi tentang kondisi seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Tujuan utama dari asesmen adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran bagi anak yang bersangkutan.

Pendapat Lerner (1998), asesmen adalah proses penilaian, pengukuran dan/atau *screening* terhadap anak untuk mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek perkembangan dan perilaku anak berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat dilakukan diagnosis dan intervensi secara tepat sesuai kebutuhannya. Dalam uraian ini kegiatan asesmen merupakan tindak lanjut dari kegiatan identifikasi. Kegiatan asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, mendalam dan terukur, tentang aspek tertentu dari anak berkebutuhan khusus. Menurut Hays, P.A. (2007) aspek yang menentukan asesmen di antaranya dapat mencakup: (a) kecerdasan; (b) kepribadian; (c) persepsi; (d) kematangan; (e) emosi; (f) bahasa; (g) motorik; (h) prestasi akademik non akademik; (i) aspek lain sesuai keperluan.

Karena sifatnya lebih rinci, mendalam dan terukur, maka alat yang digunakan dalam asesmen lebih terstandar dibandingkan dengan alat yang digunakan dalam identifikasi. Kegiatan asesmen biasanya dilakukan oleh tenaga profesional yaitu mereka yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kewenangan khusus untuk pelaksanaan asesmen. Di antaranya adalah psikolog, ortopedagogik, dokter, terapis dan ahli lain. Untuk memahami konsep asesmen dengan benar, tulisan ini akan dimulai dengan membandingkan pengertian asesmen dengan pengertian diagnostik, tes, dan evaluasi.

2. Tindakan Asesmen

Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen dapat dilakukan oleh guru, orang tua (untuk beberapa hal), dan tenaga profesional lain yang tersedia sesuai dengan kompetensinya. Menurut Kauffman JM. (2008) kegiatan asesmen meliputi beberapa bidang, antara lain seperti berikut.

a. Asesmen akademik

Asesmen akademik sekurang-kurangnya meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

b. Asesmen sensoris dan motorik

Assesmen sensoris untuk mengetahui gangguan penglihatan, pendengaran. Sedangkan assesmen motorik untuk mengetahui gangguan motorik kasar, motorik halus, keseimbangan dan locomotor yang dapat mengganggu pembelajaran bidang lain.

c. Asesmen psikologis, emosi, dan sosial

Assesmen psikologis dapat digunakan untuk mengetahui potensi intelektual dan kepribadian anak. Juga dapat diperluas dengan tingkat emosi dan sosial anak.

Ada bagian-bagian tertentu yang dalam pelaksanaan asesmen membutuhkan tenaga profesional sesuai dengan kewenangannya. Guru dapat membantu dan memfasilitasi terselenggaranya asesmen tersebut sesuai dengan kemampuan orang tua dan sekolah.

3. Perencanaan Pembelajaran

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan meliputi: menganalisis hasil asesmen untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan untuk selanjutnya, dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Langkah selanjutnya menganalisis kurikulum, dengan menganalisis kurikulum maka kita dapat memilah bidang studi yang perlu ada penyesuaian. Hasil analisis kurikulum ini kemudian diselaraskan dengan program hasil asesmen sehingga tersusun sebuah program yang utuh yang berupa Program Pembelajaran Individual (PPI).

Penyusunan PPI dilakukan dalam sebuah tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari guru kelas dan mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua/wali serta guru pembimbing khusus. Pertemuan perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan yang sesuai dengan anak serta penentuan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

4. Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap ini guru melaksanakan program pembelajaran serta pengorganisasian siswa berkelainan di kelas regular sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui individualisasi pengajaran. Artinya, anak belajar pada topik yang sama waktu dan ruang yang sama, namun dengan materi yang berbeda-beda. Cara lain proses pembelajaran dilakukan secara individual artinya anak diberi layanan secara individual dengan bantuan guru khusus. Proses ini dapat dilakukan jika dianggap memiliki rentang materi/keterampilan yang sifatnya mendasar (*prerequisite*). Proses layanan ini dapat dilakukan secara terpisah atau masih kelas tersebut sepanjang tidak mengganggu situasi belajar secara keseluruhan

5. Pemantauan Kemajuan Belajar dan Evaluasi

Untuk mengetahui keberhasilan guru dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kemajuan dan/atau bahkan kemunduran belajar anak. Jika anak mengalami kemajuan dalam belajar, pendekatan yang dipilih guru perlu terus dipertahankan, tetapi jika tidak terdapat kemajuan, perlu diadakan peninjauan kembali, baik mengenai materi, pendekatan, maupun media yang digunakan anak yang bersangkutan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Dengan demikian diharapkan pada akhirnya semua problema belajar anak secara bertahap dapat diperbaiki sehingga anak terhindar dari putus sekolah.

BAB II

MENGENAL PENDIDIKAN INKLUSI

A. Konsep Dasar Pendidikan Inklusi

Inklusi dari kata bahasa Inggris, yaitu *inclusion*, yang mendeskripsikan sesuatu yang positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh (Smith, 2006).

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak yang sebayanya di sekolah reguler dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif (Moelyono, 2008)

Dalam Toolkit LIRP atau Lingkungan Inklusi Ramah Pembelajaran, UNESCO (2007), memberikan batasan yang lebih luas, inklusi berarti mengikutsertakan anak berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lamban dalam belajar, dan sebagainya.

Inklusi dapat pula berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan, yaitu tujuan pendidikan bagi siswa yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah. Fuch dan Fuchs dalam Smith (2006). Sebagian banyak menggunakan istilah inklusi sebagai banner untuk menyerukan "*full inclusion*" atau "*uncompromising inclusion*", yang berarti penghapusan pendidikan khusus.

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan setiap anggota masyarakat, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai kebutuhan permanen dan atau sementara untuk memperoleh layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Kebutuhan ini dapat muncul karena kelainan bawaan atau diperoleh setelah lahir, kondisi sosial, ekonomi dan atau politik (Hidayat, 2003).

Apabila berdasarkan pengertian paedagogis, pendidikan inklusi mengaitkan pada sistem persekolahan, dimana bentuk-bentuk pengajarannya mengandung aspek-aspek bekerja berpasangan, berkelompok, dan mandiri pada mereka yang berkebutuhan khusus dan yang tidak berkebutuhan khusus. Di dalam inklusi ini anak bekerja sesuai kebutuhan masing-masing, sehingga secara faktual tidak ada kegagalan, bahkan berbagai kekhususan (kelainan) hampir tak nampak kalau

bukan karena mereka cacat fisik atau menaiki kursi roda, maka kita sulit menentukan siapa yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi adalah proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam sekolah umum (*regular*), dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka hidup di dalam masyarakat. Penekanan pendidikan inklusi adalah pengkajian ulang dan perubahan sistem pendidikan agar menyesuaikan diri pada siswa" (Nasichin, 2003).

Dalam pendidikan inklusif, semua anak belajar dan memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran dengan anak-anak *regular*. Apabila ada kegagalan dalam belajar, maka kegagalan itu adalah kegagalan sistem. Pendidikan inklusif juga dapat menangani semua jenis individu, bukan hanya anak yang mengalami kelainan. Dengan demikian, guru dan sekolah bertanggung jawab terhadap pembelajaran anak, dan pembelajaran berfokus pada kurikulum yang fleksibel.

Soebagyo Brotosedjati (2003), memberikan batasan tentang pendidikan inklusi yaitu suatu model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan (berkebutuhan khusus) yang diselenggarakan bersama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga yang bersangkutan.

Sapon-Shevin dalam Sunardi (2003), Pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama. Berdasarkan pendapat Sapon-Shevin adalah adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan murid. Sunardi (2003) juga mengutip pendapat Stainback dan Stainback, "Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama". Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah yang inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat yang lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi.

Definisi sejenis dibuat oleh Staub dan Peck masih dalam Sunardi (2003), mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang dan secara penuh di kelas biasa. Vaughn, Bos dan Schuman dalam Sunardi (2003), pada praktiknya istilah inklusi sering dipakai bergantian dengan istilah *mainstreaming* yang secara teori diartikan sebagai penyediaan

layanan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan individunya.

Pendidikan inklusi adalah merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Hambatan yang ada bisa terkait dengan masalah etnik, gender, status sosial, kemiskinan dan lain-lain. Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh pendidikan adalah siswa penyandang cacat. Tapi ini bukanlah kelompok yang homogen. Sekolah dan layanan pendidikan lainnya harus fleksibel dan akomodatif untuk memenuhi keberagaman kebutuhan siswa. Mereka juga diharapkan dapat mencari anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.

Pendidikan inklusi adalah sebuah sistem pendidikan dimana anak berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah umum yang ada dilingkungan mereka dan sekolah tersebut dilengkapi dengan layanan pendukung serta pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan anak (Konferensi Tingkat Menteri Pendidikan Negara-negara Afrika - MINEDAF VIII).

Dalam simposium internasional di Indonesia, Martin Omagor Loican, memberikan definisi tentang inklusi yaitu penyesuaian dan pengubahan praktek di rumah-rumah, sekolah-sekolah dan masyarakat luas, membuat perubahan-perubahan yang diperlukan; memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak; tanpa memandang perbedaan mereka dan memastikannya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh serta setara pada apa yang terjadi dalam komunitas mereka.

Pendekatan inklusi merupakan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam pembersamaan klasikal (Gunarhadi, 2001). Dalam pendekatan ini akan tidak dilihat dari segi ketidakmampuannya dan tidak pula dari segi kecacatannya. Seorang anak berkelainan mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berbeda dengan anak-anak lainnya.

Sekolah inklusif menerima semua anak tanpa memandang kemampuan, kecacatan, gender, latar belakang sosial, ekonomi, etnik, agama maupun bahasanya. Sekolah inklusi merupakan sebuah sistem yang berdaptasi dengan kebutuhan setiap anak. Anak belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing untuk mencapai perkembangan akademik, sosial, emosi, dan fisiknya secara optimal. Anak penyandang kelainan dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya serta para orang tua dan gurunya mempunyai akses ke sebuah sistem pendukung berbasis sekolah atau masyarakat maupun sistem pendukung eksternal (tanpa biaya).

Sistem tersebut dirancang untuk secara efektif merespon kebutuhan yang mungkin dihadapi anak-anak tersebut.

Pendidikan inklusif atau pembelajaran inklusif mengacu pada inklusi dan pengajaran semua anak dalam lingkungan belajar formal atau non-formal tanpa mempertimbangan gender, intelektual, emosi, linguistik, budaya, agama atau karakteristik lainnya (Toolkit LIRP, 2007).

Dalam filsafat kehidupan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang tercermin di dalam pendidikannya amat ditekankan betapa penting berbagai kemampuan manusia dimekarkan sehingga menjadi makhluk individu yang mandiri. Tetapi sekaligus dituntut pengakuan terhadap perannya di masyarakat sebagai makhluk sosial.

B. Sejarah Pendidikan Khusus dalam Pendidikan Inklusi

1. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khusus di Indonesia

Model pendidikan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia akhir-akhir ini cenderung mengalami perkembangan mengarah pada perubahan sistem yang telah ada sesuai dengan paradigma jenis kekhususan. Para ilmuwan yang bergerak dalam pendidikan khusus menghendaki agar pendidikan para penyandang kelainan tidak dilakukan secara khusus (*segregated*), tetapi secara terpadu (*mainstreaming*) dengan pendidikan umum. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun memberi peluang kepada semua anak usia sekolah, tanpa kecuali penyandang kelainan, untuk memperoleh pendidikan minimal SLTP. Dengan demikian, penyandang kelainan dapat belajar secara bersama-sama atau terpadu dengan anak normal lainnya pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, bahkan sampai Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pendidikan terpadu khususnya bagi peserta didik penyandang tunanetra telah dimulai dilaksanakan di beberapa sekolah dasar reguler pada tahun 1987 (Sunardi, 1994). Hal tersebut telah ditetapkan pula dengan SK Mendikbud No. 0222/0/1979 tentang Penyelenggaraan Perintisan dan Pengembangan Pendidikan Terpadu bagi penyandang kelainan pada sekolah dasar.

Secara historis, sebagian besar penyelenggara pendidikan penyandang kelainan di negara-negara maju pada pertengahan tahun 70-an dilaksanakan secara terpisah, yakni sekolah tersebut memberikan pelayanan khusus bagi sekelompok anak yang memiliki kelainan tertentu yang sejenis (Hallahan 1988). Kelainan yang dimaksud adalah kelainan penglihatan (tunanetra), kelainan pendengaran (tunarungu), kelainan bicara (tunawicara), kelainan intelektual (tunagrahita), kelainan fisik (tunadaksa). Ada kalanya, terutama dalam pemberian pelayanan dan pen-

dekatan PBM, masing-masing kelainan tersebut didasarkan atas hipotesis bahwa kemungkinan besar anak yang memiliki kelainan akan belajar di tempat atau lingkungan yang terpisah. Secara teoretis, untuk menyelenggarakan pendidikan penyandang kelainan yang terpisah, minimal disediakan kelas kecil untuk pengajaran dan peralatan yang sesuai dengan kelainannya.

Setelah tahun 1970-an terjadi perubahan yang kuat ke arah pendidikan penyandang kelainan di sekolah reguler. Beberapa istilah yang dipergunakan dalam hubungannya dengan proses perubahan tersebut adalah pendidikan khusus (*segregasi*), pendidikan terpadu (*mainstreaming*), inklusi (*inclusion*), dan normalisasi (*normalization*) (Hallahan, DP & Kauffman, JM., 1988). Setiap istilah tersebut memiliki makna berbeda, tetapi kesemuanya secara tidak langsung menyatakan bahwa peserta didik yang memiliki kelainan akan menggunakan sarana pendidikan sama dengan yang digunakan oleh anak-anak normal lainnya yang tinggal di masyarakat.

Perkembangan pendidikan bagi penyandang kelainan di Indonesia secara berangsur-angsur mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, terutama setelah adanya UU Pendidikan Nomor 12 tahun 1954. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran untuk penyandang kelainan. Kenyataan yang ada, lembaga yang mengelola, mengawasi, dan menyupervisi mengalami perubahan seiring dengan perubahan tata usaha negara. Mulai tahun 1954 sampai dengan tahun 1963 lembaga pendidikan untuk penyandang kelainan, misalnya SLB (Sekolah Luar Biasa) untuk penyandang kelainan, dan lembaga pendidikan guru untuk penyandang kelainan, yaitu SGPLB, dikelola dan diawasi oleh instansi yang sama, dan organisasi pengawasannya mengalami perkembangan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa lembaga yang mengawasi pendidikan untuk penyandang kelainan adalah (a) tahun 1954 diawasi oleh seksi Pengajaran Luar Biasa (Bagian dari Balai Pendidikan Guru yang berkedudukan di Bandung); (b) tahun 1955 diawasi oleh Urusan Pendidikan Luar Biasa yang merupakan bagian dari Jawatan Pengajaran dan berkedudukan di Jakarta; (c) tahun 1957 diawasi oleh Urusan Pendidikan Luar Biasa yang merupakan bagian dari Jawatan Pendidikan Umum dan berkedudukan di Jakarta.

Tahun 1963 terjadi perubahan struktur organisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terjadi pemisahan pengawasan antara SLB dengan SGPLB, yakni (a) pendidikan untuk penyandang kelainan diawasi oleh Dinas PLB yang merupakan bagian dari Direktorat Pendidikan Prasekolah (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Luar Biasa (SLB); (b) Lembaga Pendidikan Guru untuk pendidikan penyandang kelainan dikelola oleh Dinas Pendidikan Guru dan Tenaga

Teknis yang merupakan bagian dari Direktorat Pendidikan Menengah dan Guru; (c) IKIP Bandung memelopori program Sarjana Muda PLB dengan lebih menekankan pada upaya menghasilkan tenaga ahli dalam PLB dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pada tahun 1980 terjadi pemisahan pengelolaan PLB dan LPK PLB, yakni pendidikan penyandang kelainan dikelola oleh Sub Direktorat Pembinaan SLB di bawah Direktorat Pendidikan Dasar pada Ditjen Dikdasmen, sedangkan lembaga pendidikan guru SLB dikelola oleh Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis, Ditjen Dikdasmen, dan program Sarjana PLB tetap dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sampai dengan tahun 1984 telah didirikan sekitar 400 SLB untuk anak-anak penyandang kelainan, dan sebagian besar dikelola oleh organisasi swasta berbentuk Yayasan. SLB diklasifikasikan menjadi enam kelompok berdasarkan jenis kecacatan, yakni SLB-A untuk penyandang cacat netra, SLB-B untuk penyandang cacat rungu wicara atau bisu tuli, SLB-C untuk penyandang kelainan mental atau tunagrahita, SLB-D untuk penyandang kelainan fisik atau tunadaksa, SLB-E untuk penyandang kelainan sosial atau tunalaras, dan SLB-G untuk penyandang kelainan ganda.

Tahun 1984 memiliki arti penting bagi perkembangan pendidikan penyandang kelainan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya kemauan politik pemerintah (*political will*) untuk menyelenggarakan program wajib belajar 6 tahun. Ini berarti bahwa semua anak usia sekolah harus menyelesaikan pendidikannya minimal sampai dengan pendidikan sekolah dasar (SD). Program tersebut ditindaklanjuti dengan perintisan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang perintisannya dimulai tahun 1989 dan diimplementasikan pada tahun 1994. Dengan demikian, semua anak usia sekolah tanpa kecuali diharapkan memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan sampai dengan SLTP.

Gerakan wajib belajar tersebut secara langsung mempunyai dampak positif bagi penyandang kelainan, sebab anak penyandang kelainan tertentu tidak semuanya dapat tertampung di SLB yang ada, sehingga harus disalurkan/ditampung di sekolah umum atau kelompok belajar. Oleh karena jumlah SLB yang menampung anak penyandang kelainan sangat terbatas dan letaknya sebagian besar berada di perkotaan, serta sebagian besar SLB dikelola oleh swasta, kondisi tersebut mendorong pemerintah (Depdiknas) untuk mencari upaya pemecahannya dengan beberapa alternatif, yaitu pengenalan bentuk pelayanan pendidikan penyandang kelainan yang baru melalui SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa). Hal ini dilakukan melalui dana Proyek Inpres tahun 1984 dan telah didirikan 208 buah SDLB di 200 kabupaten/kotamadya yang sama sekali belum memiliki SLB.

Ujicoba di beberapa SD umum untuk menerima anak yang memiliki kecacatan tertentu (cacat netra, cacat rungu wicara, cacat mental atau tunagrahita, kelainan pisik atau tunadaksa) dengan syarat anak yang bersangkutan memiliki kemampuan akademik yang normal. Sekolah yang demikian selanjutnya disebut Sekolah Dasar (SD) terpadu.

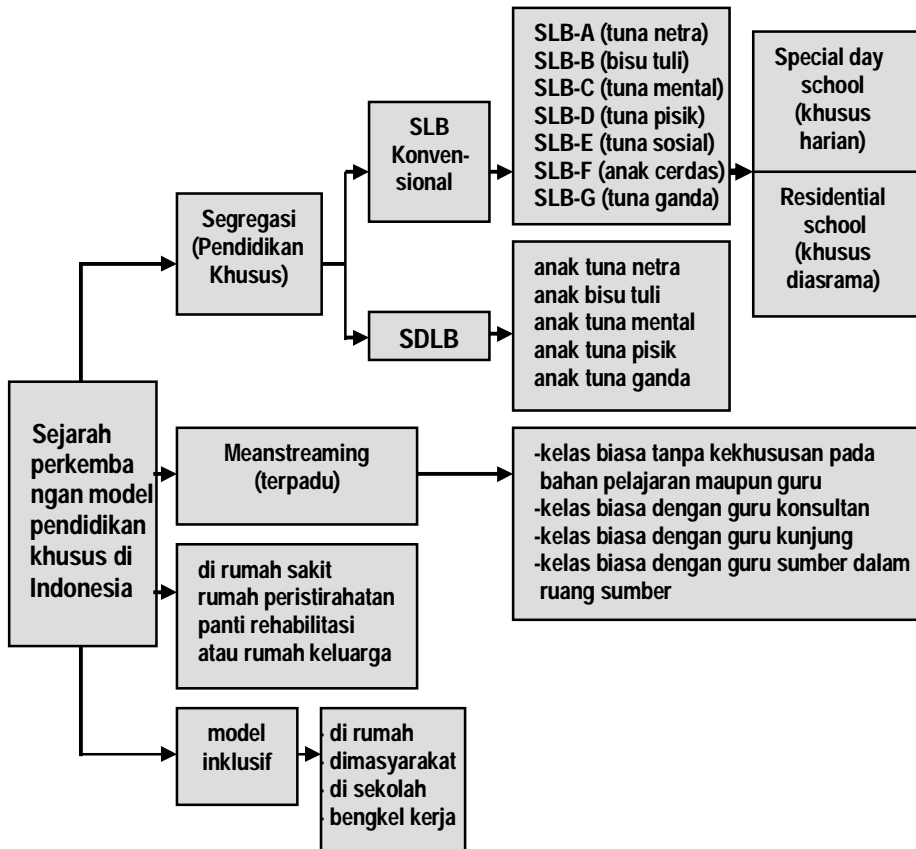
Pendirian SLB Pembina untuk penyandang kelainan di berbagai daerah di Indonesia sekaligus mempunyai tujuan untuk penelitian, pelatihan, dan pendidikan dalam bidang PLB (Pendidikan Luar Biasa). Menurut Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis (Digutentis) yang dikutip Sunardi (1994:98) sampai dengan tahun 1990, jumlah SLB (Sekolah Luar Biasa) di Indonesia yang menampung penyandang kelainan mencapai 525 unit, dengan rincian 502 SLB dikelola oleh Yayasan Swasta dan 23 SLB negeri dikelola oleh Depdikbud. Jumlah tersebut telah mencakup penyelenggara PLB di tingkat SLTP dan SLTA.

Lebih lanjut pada tahun 1994 diberlakukan kebijakan Depdiknas tentang penggunaan kurikulum 1994, khusus untuk PLB. Kebijakan tersebut telah memilah-milah jenjang PLB, yaitu SDLB, SLTPLB, dan SMLB. Dengan berlakunya kebijakan itu, ada kecenderungan anak penyandang kelainan yang memiliki kemampuan akademik normal didorong untuk berintegrasi dengan SD, SLTP, dan SMU. SLTP dan SMU memberi peluang lebih besar kepada anak yang memiliki kelainan untuk berkembang lebih baik, mengingat kurikulum jenjang tersebut memberikan banyak program keterampilan. Di samping itu, jenjang pendidikan calon guru pendidikan penyandang kelainan yang dianggap layak dari dua tahun setelah SMTA diubah menjadi program sarjana di IKIP/FKIP Universitas.

Dampak dari kebijakan tersebut adalah dialihfungsikannya tugas guru SGPLB ke SLTP, SMTA, dan Pengawas, sedangkan lainnya dialihkan ke jurusan PLB pada IKIP/FKIP Universitas terdekat. Selanjutnya, kurikulum program sarjana PLB disempurnakan dan ditingkatkan untuk menghasilkan calon guru PLB yang sesuai dengan kemajemukan penyandang kelainan dan tuntutan kemajuan ipteks.

Sistem layanan pendidikan untuk penyandang kelainan yang terbaik hingga kini masih diperdebatkan. Sebagai contoh, di kalangan pendukung konsep *inclusion* menghindari pemakaian istilah luar biasa, sementara kelompok yang lain tetap menginginkan pemakaian istilah tersebut. Apapun yang masih menjadi polemik di kalangan para ahli pendidikan penyandang kelainan, tampaknya semuanya mengarah pada perbaikan dan/atau pengembangan pendidikan penyandang kelainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ditunjang oleh berbagai aturan/kebijakan dan kebutuhan masa kini dan masa mendatang.

Mencermati uraian perkembangan panjang tentang pendidikan khusus bagi penyandang kelainan di Indonesia, secara skematis dari perkembangan model tersebut dapat disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 1. Model Pendidikan bagi Penyandang Cacat di Indonesia
Sumber: Tangyong, (1986) (modivikasi Haryanto, 20017)

2. Perkembangan Model Pendidikan Khusus di Indonesia

a. Model *Segregasi* (Sekolah Khusus)

Yang termasuk model *segregasi* (sekolah khusus) adalah (1) Sekolah Luar Biasa (SLB) konvensional untuk anak-anak penyandang kelainan; (2) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dalam pelaksanaannya terbagi dua macam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu: *special day school* (sekolah khusus harian) dan *residential school* (sekolah khusus berasrama) bagi anak-anak penyandang cacat.

1) Model Sekolah Luar Biasa (SLB) Konvensional

Dikemukakan oleh Amin Gentimet (1992) bahwa SLB konvensional adalah lembaga pendidikan yang menampung murid dengan jenis kelainan yang sama. Sekolah Luar Biasa konvensional sesuai dengan jenis kelainan anak didik meliputi SLB bagian A untuk anak penyandang kelainan netra, SLB bagian B untuk anak kelainan rungu wicara, SLB bagian C untuk anak berkelainan mental atau tunagrahita, SLB bagian D untuk anak berkelainan fisik, SLB bagian E untuk anak kelainan sosial, SLB bagian G untuk anak kelainan ganda.

Penyelenggaraan SLB bagi penyandang cacat secara konvensional di Indonesia menerapkan sistem unit, yaitu penyelenggaraan pendidikan dari tingkat kelas persiapan sampai lanjutan, dan kejuruan, sehingga anak cacat tidak perlu berpindah-pindah sekolah. Kurikulum yang digunakan adalah khusus, yaitu kurikulum SLB sesuai dengan jenis kecacatannya. Hal ini dilaksanakan karena adanya penekanan mengenai pentingnya pelajaran atau keterampilan tertentu bagi anak-anak cacat berdasar kebutuhannya.

Pelaksanaan model SLB untuk anak-anak penyandang cacat kebanyakan menggunakan *residential school* (sekolah khusus berasrama). Hal ini disebabkan kebanyakan orang tua kurang mampu mendidik anaknya yang cacat, lebih baik diserahkan atau ditampung di asrama. Di samping itu, anak kadang-kadang menemukan perasaan persaudaraan yang akrab di antara mereka, rasa satu nasib sering tumbuh dengan subur, usaha saling menolong untuk hidup dengan wajar.

Pertimbangan transportasi dan letak geografis tempat tinggal anak dengan sekolah merupakan alasan utama diselenggarakannya model *residential school* (sekolah khusus berasrama). Kenyataan yang ada di masyarakat, tidak semua sekolah penyandang cacat mampu menyediakan asrama, akibatnya anak-anak yang jauh dari sekolah, tinggal di pedesaan terpencil tidak dapat ditampung di asrama untuk bersekolah.

2) Model SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)

Dikemukakan oleh Ismed Syarif (1992) bahwa Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan suatu model pelayanan pendidikan bagi berbagai jenis kecacatan (cacat netra, cacat rungu wicara, cacat mental, cacat fisik, dan cacat ganda) yang diselenggarakan dalam satu lembaga dengan kurikulum SLB (Sekolah Luar Biasa).

Sebagaimana tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan SDLB 1984/1985 (Tangyong, 1986) program SDLB terdiri atas beberapa komponen, yakni (1) makro, antara lain pendataan penyandang kelainan, penentuan lokasi, persyaratan gedung; (2) mikro, terdiri dari ketenagaan, kurikulum, pendekatan, pengajaran, sarana pendidikan, peran faktor-faktor lingkungan.

Pendataan memegang peranan penting dalam menyusun perencanaan pendidikan penyandang kelainan. Data diperlukan dalam rangka estimasi besarnya kebutuhan pelayanan pendidikan penyandang kelainan yang menyangkut jumlah tenaga kependidikan dan tenaga ahli lainnya, sarana, prasarana, fasilitas pendidikan, dan biaya operasional yang harus disediakan.

Dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan menjadi data mikro dan makro. Data mikro diperoleh langsung dari sumber data, biasanya data ini untuk keperluan alokasi dan pelaksanaan di lapangan. Data makro diperoleh sebagai hasil pengolahan suatu perhitungan atau proyeksi untuk keperluan menetapkan kebijaksanaan dan alokasi sarana dan prasarana pendidikan secara umum (Tangyong, 1986).

Dalam hal merancang pendataan, untuk menentukan angka prevalensi penyandang kelainan yang membutuhkan pelayanan pendidikan (usia 7-12 tahun) bukanlah pekerjaan yang mudah. Yasseldyke dan Algozzin (1984) memberikan alasan, antara lain *first, there are many different definitions of the categories used to group children; second, have not identified all of the children who require special services.*

Sejalan dengan pendapat di atas, Hallahan (1988) mengemukakan faktor-faktor yang mempersulit untuk menentukan angka prevalensi penyandang kelainan pada kategori tertentu secara tepat, yaitu (1) problem yang menyangkut masalah pendefinisian; (2) masalah diagnosis; (3) kekeliruan sampel; dan (4) masalah stigma (noda atau cacat).

Mengingat faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesalahan dalam proses pendataan penyandang kelainan sebagaimana diuraikan di atas, dalam sistem pendataan seyogyanya dirumuskan secara baku kriteria penyandang cacat dengan memperhatikan faktor-faktor kendala di atas, sehingga tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah (1) tenaga pelaksana pendataan hendaknya benar-benar mengerti anak berkelainan; (2) adanya batasan yang jelas dan tegas mengenai jenis dan tingkat kecacatan anak; (3) diagnosis terhadap jenis dan tingkat kecacatan anak dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, atau tenaga yang terlibat dalam bidang tersebut; (4) alat pengumpul data disusun sederhana dan selengkap mungkin, sehingga mudah penggunaannya, dan dapat mengidentifikasi anak kelainan selengkap mungkin.

Langkah-langkah pelaksanaan penjarangan data bagi penyandang kelainan, dapat disusun menjadi (1) persiapan, meliputi pengadaan alat pengumpul data, menentukan kriteria penilaian, menentukan lokasi penjarangan, membentuk satu tugas kelompok kerja; (2) penjarangan atau pengumpulan data melalui kunjungan ke rumah-rumah, menemui pamong desa, mengamati laporan keadaan

penduduk/statistik penduduk; (3) *need assessment* tentang jenis, tingkat, dan kebutuhan penyandang kelainan; (4) pengelompokan data; (5) tindak lanjut.

Penentuan lokasi, perlu dipertimbangkan dalam mendirikan gedung SDLB. Kenyataan menunjukkan bahwa penyebaran anak kelainan tidak mengelompok pada suatu daerah tertentu, tetapi menyebar di berbagai tempat. Mereka berada di sisi kehidupan dan penghidupan manusia, merupakan kelompok yang heterogen, tersebar di berbagai strata sosial, di daerah perkotaan dan pedesaan, bahkan di daerah-daerah terpencil (Bratanata, SA. 1995).

Memperhatikan hasil penelitian Haryanto (1997) terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan model SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) bagi penyandang kelainan, yaitu (1) berkaitan dengan pendataan anak berkelainan yang masih sangat minim, misalnya dalam survei untuk menjangkau anak cacat usia sekolah yang melibatkan berbagai macam instansi terkait, dan didukung oleh tim ahli dan tenaga ahli terlatih; (2) masih banyak kendala dalam kegiatan belajar-mengajar, misalnya sangat terbatasnya guru spesialis, psikolog, fisiotherapis, dokter spesialis, sosiolog, dan sebagainya; (3) masih sangat terbatasnya sarana dan peralatan khusus sesuai dengan kebutuhan anak berkelainan, misalnya ruang keterampilan khusus, ruang dan alat latihan artikulasi, ruang dan peralatan latihan fisioterapi, dan sebagainya; (4) berkaitan dengan kesiswaan; kenyataan di lapangan, populasi anak cacat menyebar di pelosok desa, sementara gedung sekolah untuk penyandang kelainan yang telah berdiri sekarang berada di kota kabupaten atau kecamatan. Kenyataan yang ada jumlah penyandang cacat yang belum tertampung di sekolah-sekolah berada dan menyebar di pedesaan yang sulit dijangkau sarana transportasi.

b. Model *Mainstreaming* (Pendidikan Terpadu)

Model *mainstreaming* merupakan pendidikan bagi penyandang kelainan yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum (Sunardi, 1994). Seperti pendidikan terpadu di SD, SMTP, SMTA, dan Perguruan Tinggi, dengan bermacam-macam variasi berdasar jenis, tingkat kecacatan, dan kondisi terkait, mengandung maksud sejauh mungkin penyandang kelainan dapat berintegrasi dengan rekan-rekannya yang normal.

Model *mainstreaming* bukanlah sekedar menempatkan anak cacat di kelas biasa begitu saja dan memberikan mereka “berenang atau tenggelam” sendiri, seperti adanya anak berkelainan yang tanpa disadari berada di sekolah biasa di Indonesia sekarang ini. Seperti dikemukakan oleh Charles dan Malian (1980), *mainstreaming* memerlukan modifikasi di kelas yang meliputi kurikulum, lingkungan dan fisik sekolah, proses dan hubungan sosial di kelas, struktur administrasi

sekolah. Inovasi dalam bidang teknologi pendidikan yang sebagian besar telah dikuasai oleh guru di Indonesia lewat berbagai bentuk penataran harus diterapkan dalam konsep *mainstreaming*. Inovasi ini berupa penggunaan *peer teaching*, *team teaching*, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), kerja kelompok, teknik pengajaran kooperatif kompetitif, pengajaran individual, modul, dan sebagainya.

Reynolds dan Birch sebagaimana dikutip oleh Sunardi (1994) mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong munculnya konsep *mainstreaming*, yaitu (a) adanya jaminan dalam undang-undang di berbagai negara akan persamaan hak dan kesempatan bagi setiap individu; (b) faktor filosofis yang dikenal dengan normalisasi, bahwa setiap bentuk pelayanan bagi anak berkelainan, baik pendidikan, kesehatan, bimbingan dan sebagainya harus disediakan dalam lingkungan yang normal, sebab penyandang cacat juga merupakan bagian dari masyarakat normal; (c) munculnya berbagai gerakan hak azasi (terutama di AS) yang memperjuangkan persamaan hak bagi golongan minoritas, termasuk penyandang kelainan, dalam memperoleh hak pendidikan bersama anak normal di sekolah biasa; (d) perkembangan di dalam metodologi dan teknologi pendidikan telah memungkinkan penggolongan pengajaran dalam satu kelas; (e) semakin terbentuknya kerjasama dan komunikasi antar profesi dalam menangani anak berkelainan, seperti guru kelas, guru BP, psikolog, tenaga medis, psikiater, dan sebagainya; (f) hasil penelitian semakin mendukung dikembangkannya sistem pengajaran bagi anak cacat dalam lingkungan anak normal.

Dalam praktiknya di negara-negara yang telah menerapkan model *mainstreaming*, ada beberapa kemungkinan penempatan penyandang kelainan berdasarkan kondisi dan jenisnya. Charles dan Malian (1980) mengemukakan macam-macam model *mainstreaming*, yaitu (a) kelas biasa tanpa kekhususan pada bahan pelajaran maupun guru; (b) kelas biasa dengan guru konsultan; (c) kelas biasa dengan guru kunjung; (d) kelas biasa dengan guru sumber dalam ruang sumber; (e) kelas khusus separuh waktu; (f) kelas khusus penuh.

Penyelenggaraan model *mainstreaming* di Indonesia pertama diperuntukkan pada penyandang cacat netra dan dilaksanakan di Sekolah Dasar (Achmad Ali, 1983). Sampai sekarang model pendidikan terpadu tidak hanya untuk anak cacat netra yang duduk di Sekolah Dasar, tetapi sudah menjangkau pada anak-anak jenis kecacatan lain, misalnya anak cacat rungu wicara, anak berkelainan fisik, yang duduk di SLTP, SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi. Model pelayanan yang diterapkan adalah kelas biasa dengan guru kunjung.

Kendala model pendidikan *mainstreaming* kurang dapat menampung anak-anak penyandang kelainan yang tinggal di pedesaan, karena mereka mengalami hambatan transportasi untuk menjangkau sekolah tersebut, juga sering pihak

sekolah masih ada anggapan anak-anak penyandang kelainan akan merepotkan pihak sekolah. Selain itu, juga kurang tersedianya sarana, media, dan guru yang dapat menangani anak-anak penyandang kelainan di sekolah tersebut.

c. Model Pendidikan di Rumah Sakit/Lembaga Perawatan

Model pendidikan ini mencakup pemberian pelayanan di rumah sakit, rumah peristirahatan, atau di rumah keluarga penyandang kelainan, karena alasan kondisi anak yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam satu lembaga pendidikan yang ada. Model pelayanan seperti ini sering dipergunakan bagi penderita penyakit kronis, kelainan fisik, kelainan mental berat (anak idiot), sangat rendah kemampuan inteligensinya. Mereka tidak dapat belajar berbicara dan tidak mampu mengatur dirinya sendiri.

Penyandang kelainan mental berat memerlukan pengawasan dan pemeliharaan sepanjang hidupnya, tidak dapat dilatih keterampilan yang sangat sederhana sekalipun. Mereka tidak mampu memper-tahankan kehidupan tanpa bantuan orang lain, pada umumnya tingkat inteligensi mereka berkisar 0 sampai 20 atau 25 (Sam Isbani, 1981). Termasuk pelayanan model pendidikan di rumah sakit atau lembaga perawatan adalah penderita gangguan emosi, sering disebabkan perasaan takut, perasaan kurang, atau perasaan dosa yang berakar sangat dalam (Amin Jentimet, 1992).

Model pelayanan anak cacat di rumah sakit atau lembaga perawatan, di Indonesia sudah banyak dilaksanakan. Sebagai contoh, yayasan "Panti Asih" di desa Pakem Jalan Kaliurang menampung anak berrkelainan mental berat (anak idiot), panti ini dikelola oleh Rumah Sakit Bhetesda, Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mental (RPCM) di Sragen dan Temanggung yang dikelola oleh Departemen Sosial, Rehabilitasi Centrum (RC) dan Yayasan Penderita Anak Cacat (YPAC) di Surakarta menampung penyandang kelainan fisik, dikelola oleh Rumah Sakit Dr. Muwardi.

Dalam model pendidikan penyandang kelainan tingkat berat di rumah sakit, anak menjalani perawatan untuk beberapa waktu sambil diberi pelajaran. Guru yang mengajar anak tersebut tetap mengadakan hubungan dengan guru kelasnya di sekolah, agar selama anak dalam perawatan, pembelajarannya tetap relevan dengan pelajaran di sekolahnya. Model ini menerapkan guru kunjung, yaitu guru mengunjungi anak-anak kelainan di rumah sakit, panti perawatan, atau rumah keluarga. Khusus anak kelainan mental berat tinggal di asrama atau panti asuhan untuk dirawat bertahun-tahun lamanya, orang tua biasanya tidak mau menerima kembali kedatangan anaknya yang kelainan mental berat tersebut untuk tinggal bersama dalam keluarga.

Kelemahan model pendidikan di rumah sakit, yakni hanya terbatas untuk penyandang kelainan berat, misalnya kelainan mental yang tergolong idiot yang memiliki inteligensi rendah, mereka tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Sepanjang hidupnya, mereka membutuhkan pelayanan dari orang lain. Karena keterbatasan sosial ekonomi keluarga penyandang kelainan, model pendidikan yang ditampung di rumah sakit ini sangat sulit dijangkau oleh penyandang kelainan yang tinggal di pedesaan.

d. Model Pendidikan Inklusi

1) Konteks dan Asal Muasal Pendidikan Inklusi

Pendidikan sebagai hak bagi semua anak telah tercantum dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948). Instrumen-instrumen selanjutnya menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu, termasuk anak penyandang kelainan, sangat rentan untuk diselenggarakan. Hak untuk memperoleh pendidikan di dalam sistem pendidikan umum dan tidak didiskriminasikan telah disorot dalam instrumen-instrumen yang lebih rinci seperti deklarasi Jomtien dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, namun hak atas pendidikan tidak secara otomatis mengimplikasikan inklusi.

Hak atas Pendidikan Inklusif yang paling jelas telah dinyatakan dalam Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi yang menekankan bahwa sekolah membutuhkan perubahan dan penyesuaian. Pentingnya penggalangan sumber-sumber yang tepat untuk inklusi dinyatakan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (1989). Implementasi instrumen PBB tersebut telah dievaluasi oleh sejumlah LSM internasional yang menyatakan bahwa pendidikan untuk semua belum terlaksana dan tidak akan terlaksana kecuali adanya partisipasi di tingkat akar rumput dan adanya alokasi sumber-sumber secara nyata.

Dalam kaitannya dengan praktik pendidikan untuk penyandang kelainan, pendidikan inklusif dipandang telah berhasil meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan kebutuhan khusus. Peningkatan mutu sekolah merupakan persiapan yang sangat baik untuk pendidikan inklusif, tetapi sering kali tidak baik untuk benar-benar menginklusi kelompok anak yang paling termarginalisasi.

Pendidikan penyandang kelainan telah menyumbangkan keahlian yang sangat praktis dan beberapa yang telah mengubah haluan ke pendidikan inklusif dapat menjadi pendukung yang sangat kuat, tetapi juga dapat menjadi kendala karena filosofi dasarnya tidak memberikan landasan yang tepat untuk keberlangsungan pendidikan inklusif. Kedua pergerakan ini mempunyai manifestasi yang berbeda di negara-negara maju dan berkembang, tetapi banyak elemen-elemen yang sama. Pengaruh lainnya seperti kelompok-kelompok aktivis *stakeholder* utama (penyan-

dang kelainan, orang tua, tokoh masyarakat), inisiatif masyarakat dan berbagai contoh keberhasilan dan kegagalan juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan inklusif.

2) Memahami Pendidikan Inklusif

Miriam Donath Skjorten (2001) mengemukakan bahwa kaum pragmatis mungkin bosan dengan segala perdebatan tentang definisi, tetapi pendidikan inklusif memiliki bermacam-macam pemahaman dan interpretasi yang berimplikasi pada keberhasilan atau kegagalan dalam keberlangsungannya. Isu utama dalam pendidikan inklusif adalah bahwa pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi dan model sosial, sistem harus disesuaikan dengan anak, bukan anak yang menyesuaikan diri dengan sistem. Pelajaran yang dapat diambil dari negara kurang mampu di Amerika menekankan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya mengenai sekolah, melainkan lebih luas, yakni mencakup inisiatif keterlibatan masyarakat luas.

Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Penyandang Kelainan UNESCO (1994) menyatakan bahwa khususnya di negara-negara sedang berkembang, ada pergerakan historis dari pendidikan penyandang kelainan ke integrasi menuju inklusi. Namun, model ini bukan suatu keharusan, dan bila memungkinkan, akan menghemat waktu dan sumber-sumber jika langsung melaksanakan inklusi. Praktek mengadakan 'unit kecil' di sekolah umum sering kali disebut inklusi dan justru hal ini dapat mengakibatkan eksklusi lagi. Ini sebuah contoh model di negara maju, sering membawa hasil yang sangat tidak diharapkan.

Konsep inti model pendidikan inklusi telah diungkapkan dalam pernyataan Salamanca UNESCO (1994) yang meliputi (1) penyandang kelainan memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya; (2) perbedaan itu normal adanya; (3) sekolah perlu mengakomodasi semua anak, termasuk penyandang kelainan; (4) penyandang kelainan seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya; (5) partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi model inklusi; (6) pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi; (7) kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan sebaliknya; (8) pendidikan model inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat; (9) sekolah model inklusi memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif; (10) inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan.

Banyak orang mengira bahwa untuk menuangkan ide pendidikan inklusi ke dalam praktiknya hanyalah sekedar memperkenalkan teknik dan metode yang spesifik agar setiap anak dapat belajar. Metode ini ada tempatnya sendiri dan

dapat memancing perdebatan lebih mendalam tentang pendidikan inklusif; tetapi dengan metode saja tidak akan menghasilkan program pendidikan inklusi yang tepat dan berkesinambungan. Tiga bahan utama diajukan untuk menghasilkan organisme yang dinamis dan kuat dapat beradaptasi, tumbuh dan bertahan dalam berbagai konteks.

Ketiga bahan utama itu adalah (1) kerangka kerja yang kuat - rangka (nilai, keyakinan, prinsip dan indikator keberhasilan); (2) implementasi dalam konteks dan budaya lokal mempertimbangkan situasi praktis, penggunaan sumber-sumber yang tersedia dan faktor-faktor budaya setempat; (3) partisipasi secara berkesinambungan dan refleksi diri yang kritis, siapa yang harus dilibatkan, bagaimana, apa dan kapan. Secara bersama-sama, ketiga bahan utama tersebut dapat menghasilkan sistem pendidikan yang fleksibel, kuat, sesuai tempat dan berkesinambungan yang menginklusi semua anak.

3) Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Berawal dari pendidikan resmi pertama di negara Norwegia pada tahun 1874, seiring dengan itu dibuka pula sekolah khusus bagi tunagrahita dengan dipelopori oleh Johan A. Lippestad (di tahun 1844 hingga 1931) menurut Johnsen dalam Smith (2006). Hal ini membuka pemikiran bahwa semua anak tidak dapat belajar mengikuti silabus yang ditetapkan sebelumnya, akibatnya tingkat kemampuan intelektual mereka yang berbeda-beda. Saudara perempuan Lippestad, Emma Hjorth (ditahun 1858 hingga 1981) membeli sebidang tanah di luar ibu kota dan mendirikan sebuah lembaga bagi anak tunagrahita berat, yang kemudian diserahkan kepada kementerian pendidikan menurut Tutvedt dalam Smith, (2006).

Beberapa tahun setelah pendirian sekolah khusus pertama bagi siswa tuna grahita. Norwegia menetapkan undang-undang Pendidikan Khusus pertama, tahun 1881. Ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan sekolah khusus bagi anak-anak tunanetra atau tunagrahita. Perubahan lambat laun terjadi, gelombang pertama minat terhadap pendidikan khusus yang melanda Eropa penuh dengan optimisme. Namun saat bersamaan pula munculah polemik sekitar peserta didik. Pertanyaan tersebut adalah siapa yang dapat dididik, dan siapa yang tidak dapat?. Sekolah khusus dikembangkan bagi anak-anak yang disebut sebagai anak-anak yang mampu didik sedangkan mereka yang pada waktu itu dianggap tidak mampu didik ditempatkan di lembaga kesehatan sosial atau dilupakan.

Stigma negatif juga muncul dan berkembang sebelum terbentuknya inklusi, yang disebut herediter dengan berpandangan bahwa anak yang tidak mampu didik merupakan tahapan degenerasi atau penurunan. Sikap pesimistik terhadap kemungkinan belajar serta rasa takut akan degenerasi tersebut dimanifestasikan

dalam undang-undang dan sejumlah buku putih serta perdebatan-perdebatan resmi. Pemisahan dari pendidikan itu menjadi total selama beberapa dekade, dan menurut sikap yang pesimistik, mereka tidak dianggap sebagai bagian dari perhatian khusus, menurut Becker, dalam Smith (2006). Walaupun pergerakan genetika mempunyai posisi kuat, terdapat juga orang lain yang mempunyai sikap yang lebih sayang terhadap anak-anak dan remaja yang dengan berbagai alasan tidak ikut dalam institusi masyarakat biasa, yang bersaing untuk diperlihatkan dalam debat resmi.

Normalisasi berarti berbagai ritme hari yang normal, dengan privasi, berbagai aktivitas, dan tanggung jawab bersama, ritme mingguan yang normal, dengan rumah sebagai tempat tinggal sekolah atau tempat kerja, dan waktu luang dengan interaksi sosial, ritme tahunan, dengan mode dan cara hidup yang terus berubah, dan kebiasaan keluarga dan masyarakat yang berubah-ubah seiring dengan pergantian musim sepanjang tahun" menurut Flynn & Nitsch dalam Smith (2006).

Kutipan di atas adalah bagian awal dari penjelasan yang rinci tentang konsep normalisasi ini ke masyarakat Amerika. Perubahan ideologi ini berkembang sebagai satu fenomena umum yang terkait dengan sistem kesejahteraan sosial-demokratik pada abad ke-20. Lambat laun munculah berbagai sekolah khusus. Hal tersebut sebanding dengan jumlah kebutuhan khusus yang teridentifikasi dan dikategorikan, selanjutnya mengarah pada pendirian sekolah dan lembaga-lembaga yang lebih terspesialisasi berdasarkan jenis kelainan dan kesulitan yang dihadapi anak.

Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak.

Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori yaitu : anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusakan dan bencana alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, anak yang mengalami kedwibahasaan (perbedaan bahasa di rumah dan di sekolah), anak yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan karena isolasi budaya dan karena kemiskinan dsb. Anak

berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa menjadi permanen.

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, memiliki perkembangan hambatan belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) faktor lingkungan, (2) faktor dalam diri anak sendiri, dan (3) kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Sesuai kebutuhan lapangan maka pada buku ini hanya dibahas secara singkat pada kelompok anak berkebutuhan khusus yang sifatnya permanen.

Pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari Anak Berkebutuhan Khusus dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas.

Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik Anak Berkebutuhan Khusus di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang normal, dengan dukungan yang sesuai kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya. Secara mendasar konsep dan praktek penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada dokumen internasional Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi pada Pendidikan Luar Biasa (1994). Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa:

- a) Prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah bahwa, selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Seyogyanya terdapat dukungan dan pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan Anak Berkebutuhan Khusus yang dijumpai di tiap sekolah.
- b) Di dalam sekolah inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara Anak Berkebutuhan Khusus dengan teman-teman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa atau kelas khusus atau bagian khusus di sebuah sekolah reguler

seyogyanya merupakan suatu kekecualian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu di mana terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.

Dalam dokumen di atas juga dikemukakan beberapa prinsip dasar inklusi yang fundamental, yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen internasional sebelumnya.

Beberapa konsep inti Inklusi yang tercantum dalam Pernyataan Salamanca itu meliputi:

- a) anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya;
- b) perbedaan itu normal adanya dan oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak;
- c) sekolah perlu mengakomodasi semua anak;
- d) anak penyandang kelainan seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
- e) partisipasi masyarakat sangat penting bagi inklusi;
- f) pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi;
- g) kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus, bukan kebalikannya; dan
- h) inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat.

Seminar Agra (1998) telah dirumuskan bahwa esensi pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus, hakikatnya:

- a) lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan nonformal dan informal;
- b) mengakui bahwa semua anak dapat belajar;
- c) memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak;
- d) mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak berkebutuhan khusus berdasar usia, jender, etnik, bahasa, kelainan;
- e) merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya; dan
- f) merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif (Alimin, 2005).

Alimin (2005) menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua penyandang kelainan melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan me-

ngurangi eksklusivitas di dalam pendidikan. Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif juga dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spektrum kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru maupun siswa, keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah.

Pendidikan inklusif juga akan terus berubah secara pelan-pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam prakteknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak azasi manusia. Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung di dalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (*special education*). Konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus (*special education*). Inklusi atau pendidikan inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus.

Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (*education for all*) dan konsep tentang perbaikan sekolah (*schools improvement*). Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif di Agra India tahun 1988. Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut.

- a) Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, nonformal dan sistem informal.
- b) Menghargai bahwa semua anak dapat belajar.
- c) Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar semua anak.
- d) Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kelainan, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan.
- e) Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya.
- f) Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif.

Definisi di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang berdasarkan konsep-konsep tentang: anak, sistem pendidikan, keragaman dan dis-

kriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Konsep tentang anak

- (1) Hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri.
- (2) Semua anak dapat belajar dan anak dapat mengalami kesulitan dalam belajar.
- (3) Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar.
- (4) Pembelajaran berpusat pada anak menguntungkan semua anak.

b) Konsep tentang Sistem Pendidikan Penca dan Sekolah

- (1) Pendidikan lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah (*formal schooling*).
- (2) Fleksibel, sistem pendidikan bersifat responsif.
- (3) Lingkungan pendidikan ramah terhadap anak.
- (4) Perbaikan mutu sekolah dan sekolah yang efektif.
- (5) Pendekatan yang menyeluruh, kolaborasi dengan mitra kerja.

c) Konsep tentang Keberagaman dan Diskriminasi

- (1) Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan (*exclusion*).
- (2) Memandang keragaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah.
- (3) Pendidikan inklusif menyiapkan siswa yang dapat menghargai perbedaan-perbedaan.

d) Konsep tentang Proses Memajukan Inklusi

- (1) Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam inklusi.
- (2) Meningkatkan partisipasi nyata dari semua pihak.
- (3) Kolaborasi dan kemitraan.
- (4) Metodologi partisipatori, penelitian tindakan dan kolaboratif inkuiri.

e) Konsep tentang Sumberdaya

- (1) Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia (*local resources*).
- (2) Mendistribusikan sumber daya yang tersedia.
- (3) Memandang manusia (anak, orang tua, guru, kelompok orang yang termarginalkan dsb) sebagai sumberdaya kunci.
- (4) Sumberdaya yang tepat di sekolah dan masyarakat dibutuhkan untuk anak-anak yang berbeda. Sebagai contoh Braille, alat-alat bantuan (*assistive device*).

Secara konseptual terdapat perbedaan dan kaitan yang erat antara pengertian sekolah inklusif, pendidikan inklusif dan masyarakat inklusif. Pengertian dan kaitan di antara ketiganya menurut UNESCO (Alimin, 2005) dapat digambarkan sebagai berikut. Kaitan antara Sekolah Inklusif, Pendidikan Inklusif dan Masyarakat

Inklusif di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif secara resmi didefinisikan sebagai berikut: Pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PSLB, 2004). Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan bahwa: Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Sedangkan dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan inklusif bertujuan: (1) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; (2) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Definisi di atas, menunjukkan bahwa sekalipun secara konseptual pendidikan inklusi mengikutkan semua anak berkebutuhan khusus, tetapi di negara kita lebih banyak dipahami atau ditekankan sebagai upaya mengikutkan anak berkelainan dalam setting sekolah reguler. Definisi di atas juga relevan dengan pendapat Staub dan Peck (1995) bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler, serta pendapat Sapon-Shevin (O'Neil, 1995) yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusiaanya, ataupun Pernyataan Salamanca (1994) dan Kerangka Aksi Dakar (1997) paragraph 4 yang menyatakan bahwa *Inclusive education seeks to address the learning needs of all children, youth and adults with a specific focus on those who are vulnerable to marginalisation and exclusion* (Unesco, 2006).

Konsep di atas dapat dipahami mengingat, di negara kita hal tersebut merupakan permasalahan yang paling sensitif, kontroversial, dan mendapat tantangan paling berat, sehingga mereka merupakan kelompok yang selama ini paling ter-

eksklusi dari pendidikan umum. Pendidikan inklusi telah merubah pikiran masyarakat dengan membuka akses pendidikan bagi *disabled children* untuk memperoleh hak pendidikan di sekolah terdekat. Ditinjau dari aspek implementasi, praksis pendidikan inklusi di banyak negara juga menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak terhambat oleh banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas, kurangnya sumber daya materi, maupun ekonomi. Bahkan, hambatan sikap jauh lebih besar daripada hambatan ekonomi. Tenaga ahli pendukung tidak harus tenaga tetap sekolah yang bersangkutan. Pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan untuk peningkatan mutu sekolah, serta fakta bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari pergerakan yang lebih besar menuju inklusi sosial.

Dalam perspektif pendidikan luar biasa, pendidikan inklusi akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan: (1) sikap, komitmen, dan keyakinan yang positif dari seluruh guru, staf sekolah dan orang tua; (2) ketersediaan layanan khusus dan adaptasi lingkungan fisik dan peralatan; (3) sistem dukungan, seperti ketersediaan guru khusus, terdapat kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memonitor kemajuan setiap siswa penyandang cacat, termasuk untuk asesmen dan evaluasi; (4) adanya kolaborasi harmonis antara guru khusus dan guru kelas dalam merancang dan menerapkan Program Pengajaran yang diindividualisasikan (*individualized educational program* - IEP); dan (5) kurikulum fleksibel dan metode pembelajaran yang tepat, serta (7) kesadaran, partisipasi, dan dukungan masyarakat.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, dalam praksis pendidikan inklusif, penerimaan siswa baru harus memprioritaskan penerimaan didasarkan pada lokasi terdekat pada sekolah, tidak membatasi pada jenis dan derajat kelainan anak. Kurikulum harus disusun secara fleksibel sesuai kebutuhan anak (ABK) dan kondisi sekolah, dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mendorong pengawas untuk membina secara rutin dan kebebasan untuk berinovasi.

Ditinjau dari proses pembelajaran: (1) perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasar hasil asesmen dan dibuat bersama antara guru kelas dan guru khusus dalam bentuk program pembelajaran individual (IEP); (2) pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif, memberi kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antara guru khusus dan guru kelas, serta dengan menggunakan media, sumber daya dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan ABK. Sedangkan dalam evaluasi: (1) perlu penyesuaian cara, waktu dan isi kurikulum; (2) mengacu kepada hasil asesmen; (3) mempertimbangkan penggunaan Penilaian Acuan Diri; (3) dilaksanakan secara fleksibel, multi-

metode dan berkelanjutan; dan (4) secara rutin mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua.

Dalam kaitan dengan guru, ia hendaklah mempunyai pandangan yang positif terhadap anak dan pendidikannya, sensitif dan proaktif terhadap kebutuhan ABK, peduli terhadap kemajuan belajarnya, kreatif, memiliki kompetensi yang cukup memadai, serta terbuka untuk diskusi, menerima masukan, dan berkolaborasi. Kolaborasi tersebut mulai dari pelaksanaan asesmen, pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang disertai dengan pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab dalam pembelajaran. Kolaborasi dalam mencari cara-cara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta pengadaan media dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi ABK. Dalam kaitan dengan sistem dukungan, terdapat beberapa peran orang tua, sekolah khusus (SLB) dan pemerintah yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Orang tua dituntut dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan rencana pembelajaran, pengadaan alat, media, dan sumber daya yang dibutuhkan sekolah. Aktif berkomunikasi dan berkolaborasi tentang permasalahan dan kemajuan belajar anaknya, kolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar anaknya, serta pengembangan potensi anak melalui program-program lain di luar sekolah.
- b) SLB dituntut mampu berperan sebagai pusat sumber guna membantu melayani kebutuhan informasi dan konsultasi bagi sekolah, dalam memahami kebutuhan khusus ABK dan layanan pembelajaran, serta dalam pengadaan guru khusus, sosialisasi, dan pendampingan.
- c) Pemerintah dituntut untuk membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan di bidang pendidikan inklusi, menyediakan guru khusus, memberikan subsidi berupa bantuan anggaran khusus dan dalam pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, program pendampingan, monitoring dan evaluasi program, maupun dalam sosialisasi ke masyarakat luas.

4) Faktor Penentu Keberhasilan Pendidikan Inklusi

Dalam merencanakan pendidikan inklusi bagi penyandang cacat, tidak cukup dengan memahami konsepnya saja. Sebuah rencana juga harus realistis dan tepat untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat dipraktikkan dalam berbagai budaya dan konteks. Pengalaman pendidikan inklusif yang sukses menunjukkan ada tiga faktor penentu utama yang perlu diperhatikan agar implementasi pendidikan inklusi bertahan lama.

a) Adanya kerangka yang kuat

Pendidikan inklusi perlu didukung oleh kerangka nilai-nilai, keyakinan, prinsip-prinsip, dan indikator keberhasilan. Hal ini akan berkembang seiring dengan implementasinya dan tidak harus 'disempurnakan' sebelumnya. Namun, jika pihak yang terlibat misalnya mempunyai konflik nilai-nilai dan jika konflik tersebut tidak diselesaikan, pendidikan inklusif akan mudah hancur.

b) Implementasi berdasarkan budaya dan konteks lokal

Pendidikan inklusi bukan merupakan suatu cetak biru, satu kesalahan utama adalah asumsi bahwa solusi yang diekspor dari suatu budaya/konteks dapat mengatasi permasalahan dalam budaya/konteks lain yang sama sekali berbeda. Lagi-lagi, berbagai pengalaman menunjukkan bahwa solusi harus dikembangkan secara lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal; jika tidak, solusi tersebut tidak akan bertahan lama.

c) Partisipasi yang berkesinambungan dan refleksi diri

Pendidikan inklusi tidak akan berhasil jika hanya sebagai struktur yang mati. Pendidikan inklusi merupakan proses yang dinamis. Agar pendidikan inklusi terus hidup, diperlukan adanya monitoring partisipatori yang berkesinambungan, yang melibatkan semua stakeholder dalam refleksi diri yang kritis. Satu prinsip inti dari pendidikan adalah refleksi diri yang kritis. Satu prinsip inti dari pendidikan inklusif adalah harus tanggap terhadap keberagaman secara fleksibel, yang senantiasa berubah dan tidak dapat diprediksi. Jadi, pendidikan inklusif harus tetap hidup dan mengalir. Secara bersama-sama, ketiga faktor penentu utama tersebut membentuk organisme hidup kuat, yang dapat beradaptasi dan tumbuh dalam budaya dan konteks lokal.

5) Model Pendidikan Inklusi dalam Kondisi Pedesaan

Sebagaimana terjadi di Distrik Douentza Mali, salah satu daerah pedesaan termiskin di dunia, 90% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Kurang lebih 8% anak yang bersekolah, 87% anak usia tujuh tahun bekerja sekitar 6 jam per hari. Sue Stubbs (2002) berpendapat, pada sisi lain hanya 6% dari desa-desa memiliki sekolah dan guru-gurunya tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dan beban kerjanya sangat tinggi.

Dalam konteks ini, program rintisan pendidikan dikembangkan, yang di dalamnya juga terdapat inklusi sebagai komponen inti, yakni (1) program rintisan dimulai dengan studi kelayakan yang seksama dengan melibatkan semua *stakeholder* di masyarakat untuk menampung perspektifnya tentang pendidikan dan persekolahan; (2) masyarakat tersebut memprioritaskan pendidikan dan komite sekolah dibentuk yang mencakup seorang wanita yang bertanggungjawab untuk

memperhatikan pendidikan bagi anak perempuan dan penyandang kelainan. Keputusan untuk melibatkan penyandang kelainan jarang diprioritaskan secara spontan oleh masyarakat miskin, karena mereka tidak memiliki contoh positif yang menunjukkan bahwa anak tersebut dapat belajar dan produktif. Tenaga pendorong dari luar, misalnya LSM atau relawan dibutuhkan untuk memberi perhatian terhadap penyandang kelainan.

Implementasi model pendidikan inklusi untuk penyandang kelainan dapat dilaksanakan melalui pelayanan di sekolah, rumah, masyarakat, dan bengkel kerja. Berkaitan dengan pengembangan uji coba model pendidikan keterampilan kerja bagi penyandang kelainan melalui pelayanan keliling berbasis partisipasi masyarakat, peneliti mengadopsi pengembangan model inklusi dari tiga aspek, yaitu pelayanan keliling pendidikan di rumah, masyarakat, dan bengkel kerja.

6) Tantangan Model Pendidikan Inklusi

Walaupun pendidikan inklusi memberikan pengayaan kepada semua yang terlibat, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak mengesampingkan tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan yang berdampak khusus pada penyandang kelainan adalah (1) tantangan sosial emosional; mengembangkan interaksi dan komunikasi yang bermakna yang merupakan dasar bagi semua hubungan sosial dan pembelajaran, mengembangkan hubungan pertemanan yang tulus, mengatasi kesepian, jauh dari rasa cinta dan mendapatkan respon atau tanggapan, mengembangkan harga diri yang baik; (2) tantangan yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan; mengembangkan keterampilan bahasa fungsional; memperoleh penguasaan dan kompetensi melalui hubungan teman sebaya; (3) tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional yang bekerja dalam setting inklusif, memperoleh pengalaman yang cukup, memperoleh pengetahuan baru.

C. Tujuan Sekolah Inklusi

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan (difabel) seperti yang tertuang pada UUD 1945 pasal 31 (1). Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik

maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok difabel dalam menyuarakan hak-haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru.

D. Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Landasan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Secara terperinci, landasan-landasan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara Burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi dan budaya merupakan kekayaan bang-

sa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

b. Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa:

1) Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam Al Qur'an sebagai berikut:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al Hujurat Ayat 13).

2) Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta. Al Qur'an menceritakan kisah tersebut sebagai berikut:

a) Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling; (2) karena telah datang seorang buta kepadanya; (3) tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa); (4) atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?; (5) adapun orang yang merasa dirinya serba cukup; (6) maka kamu melayaninya; (7) padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman); (8) dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran); (9) sedang ia takut kepada (Allah); (10) maka kamu mengabaikannya; (11) sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan; (12) maka Barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikan; (13) di dalam Kitab-Kitab yang dimuliakan; (14) yang ditinggikan lagi disucikan; (15) di tangan para penulis (malaikat); (16) yang mulia lagi berbakti (QS. 'Abasa Ayat 1-16).

b) Allah tidak melihat bentuk (fisik) seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya. Hal ini dinyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya yaitu:

Artinya: dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian (Al Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj, (2001).

c) Tidak ada keutamaan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nabi Muhammad mengajarkan hal tersebut dalam hadis: yang artinya:

- Artinya: Seseorang yang mendengar khutbah Rasulullah SAW di tengah hari Tasyriq bercerita kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Wahai manusia, sungguh Tuhan kalian itu satu, bapak kalian satu, maka sungguh tidak ada keutamaan orang Arab atas orang 'Ajam, begitu pula sebaliknya, tidak ada keutamaan yang merah atas yang hitam, begitu pula sebaliknya, kecuali taqwa (Ahmad Ibn Hanbal).
- 3) Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan.

2. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pendidikan inklusi dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- 9) Khusus untuk DKI Jakarta, landasan yuridis yang berlaku yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

3. Landasan Empiris

Landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu:

- 1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*)
- 2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*)
- 3) Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*)

- 4) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for person with disabilities*)
- 5) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*)
- 6) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*)
- 7) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen "*Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif*"
- 8) Rekomendasi Bukittinggi 2005 mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah.

E. Dilema yang Dihadapi dalam Pendidikan Inklusi

1. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).
2. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disabled *children* ke sekolah regular, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap tereklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Pada hal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, men-cintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.
3. Munculnya label-label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusifisme, seperti Sekolah Unggulan, Sekolah Berstandar Internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (*second class*), karena menerima ABK sama dengan special school (Imam Subkhan, 2009).
4. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu, 2005).

F. Isu dan Permasalahan yang Dihadapi Pendidikan Inklusi

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembarakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian Sunardi (2009) terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan support sistem. Salah satu bagian penting dari support sistem adalah tentang penyiapan anak. Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

1. Pemahaman inklusi dan implikasinya

- a. Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah regular dalam rangka *give education right* and kemudahan *access education, and againt discrimination*.
- b. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
- c. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan.

2. Kebijakan sekolah

- a. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkelainan, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung *belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait*.
- b. Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.

3. Proses pembelajaran

- a. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk *team teaching*, tidak dilakukan secara terkoordinasi.
- b. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam meru-muskan *flexible curriculum*, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
- c. Masih terjadi kesalahan praktik bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar.
- d. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembel-ajaran belum menggunakan media, *resource*, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.
- e. Belum adanya panduan yang jelas tentang sistem penilaian. Sistem penilai-an belum menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam.
- f. Masih terdapat persepsi bahwa sistem penilaian hasil belajar ABK sama dengan anak normal lainnya, sehingga berkembang anggapan bahwa mereka tidak menunjukkan kemajuan belajar yang berarti.

4. Kondisi Guru

- a. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang *not sensitive and proactive yet to the special needs children*.
- b. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK.
- c. Belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tang-gung jawab masing-masing guru.
- d. Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta duku-ngan anggaran yang memadai.

5. Sistem Dukungan

- a. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah, tenaga ahli, perguruan tinggi – LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas.
- b. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pen-didikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya yang cacat.
- c. Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai *resource centre* bagi sekolah-sekolah inklusi di lingku-ngannya, belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerja sama maupun alasan geografik.

- d. Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal.
- e. LPTK PLB dalam diseminasi hasil penelitian, penelitian kolaborasi maupun dalam implementasi terhadap hasil-hasil peneltiaian belum dapat diwujudkan dengan baik.

Peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi aturan maupun bantuan teknis, dinilai masih kurang perhatian dan kurang proaktif terhadap permasalahan nyata di lapangan.

- f. Kalaupun pemerintah saat ini sudah mengikutkan guru-guru dalam pelatihan atau memberikan bantuan yang sifatnya fisik atau keuangan, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata.
- g. Sekolah umumnya juga belum didukung fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aksesibilitas dan keberhasilan pembelajaran secara memadai.

Hasil-hasil penelitian tentang isu dan permasalahan pendidikan inklusi di atas, sejalan dengan hasil penelitian Juang Sunanto (2009) terhadap dua Sekolah Dasar inklusi di kota Bandung. Pertama, sekolah yang secara alami mengembangkan pendidikan inklusif, tanpa predikat inklusif, misinya kemanusiaan, dan kini memiliki 10 siswa with disabilities. Kedua, sekolah percontohan inklusif, ditunjuk resmi sebagai sekolah inklusif oleh pemerintah, dan kini memiliki 32 siswa with disabilities. Hasilnya, dapat diringkas sebagai di bawah ini. Pada sekolah yang secara alami mengembangkan pendidikan inklusif, beberapa kecenderungan yang terjadi di lapangan, di antaranya seperti berikut.

- 1) Secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi
- 2) Para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah.
- 3) Adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas.
- 4) Tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, saling berbagai.
- 5) Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman.
- 6) Mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua.
- 7) Sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan.

8) Pembelajaran *children with disabilities* dilakukan secara tersendiri, dengan menciptakan suasana yang memungkinkan semuanya dapat belajar, serta penerapan pendekatan perhatian dan kasih sayang.

Sedangkan pada sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah percontohan inklusi, hal-hal menarik yang terjadi di sekolah ini, di antaranya seperti berikut.

- 1) Awalnya berjalan alami, kemudian ditunjuk resmi sebagai sekolah inklusif oleh pemerintah. Awalnya mendapat bantuan 1 orang guru pendamping atau guru khusus, tapi kemudian keluar. Akhirnya muncul inisiatif dari orang tua untuk membawa sendiri guru pendamping untuk anaknya dan fenomena ini terus berkembang sampai sekarang dan bahkan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi orang tua.
- 2) Pembelajaran pada ABK yang awalnya diterima sebagai tantangan oleh guru kelas, kini bergeser kepada ketergantungan pada guru khusus atau guru pendamping. Kondisi ini menjadikan kreativitas guru tidak berkembang.
- 3) Kebijakan menjadikan sebagai sekolah berpredikat inklusi dan banyaknya pelatihan yang diterima justru menjadikan semakin tidak jelas, bahkan bias. Penataran/pelatihan yang diterima belum banyak berdampak di kelas dan belum memberi solusi terhadap permasalahan pendidikan yang dihadapi.
- 4) Motivasi, kerja sama dalam mengatasi masalah tidak tampak, sebab seluruh aktivitas belajar *disabled children* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping.
- 5) Inklusi dimaknai sekedar memasukkan ABK ke kelas reguler, belajar dengan materi, guru, dan cara masing-masing. ABK belum ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas dan aktivitas di dalam kelas. Masih sebagai "tamun", diterima secara pasif.
- 6) Kebijakan sekolah menetapkan bahwa urusan *children with disabilities* adalah urusan guru pendamping, sepenuhnya menjadi wewenang guru pendamping. Pembuatan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasinya tidak dilakukan melalui kolaborasi dan kerja sama.

Uraian di atas memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya di Bandung masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks dan sifatnya masih mendasar, terutama terkait dengan pemahaman inklusi itu sendiri dan implementasinya di lapangan, kebijakan pemerintah dan kepala sekolah, pembinaan profesional guru, proses pembelajaran, sistem dukungan, maupun penyiapan siswa. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sekolah yang secara resmi telah berpredikat sebagai sekolah inklusi, bahkan sekolah percontohan sekalipun, belum menjamin

bahwa sekolah tersebut telah melaksanakan pendidikan inklusi secara benar dan baik sesuai dengan konsep-konsep pendidikan inklusi yang mendasarinya.

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya isu dan permasalahan dalam pendidikan inklusi di Indonesia saat ini, maka penting bagi pemerintah untuk segera menindaklanjutinya, di antaranya melalui kegiatan pengkajian (monitoring dan evaluasi) secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia dan hasilnya dijadikan rujukan untuk membuat langkah-langkah strategis menuju pendidikan inklusi, peninjauan kembali kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusi, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan LPTK PLB sebagai pusat sumber dan dalam pendampingan, mengganti pola penataran-pelatihan guru dari model ceramah kepada model *lesson study* atau minimal memasukkan *lesson study* sebagai bagian inti dari penataran-pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman, serta menggalakkan program sosialisasi dan desiminasi.

BAB III

KURIKULUM DAN BAHAN AJAR

PENDIDIKAN INKLUSI

A. Konsep Dasar Kurikulum Inklusi

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui kurikulum, sumber daya manusia dapat diarahkan, dan kemajuan suatu bangsa akan ditentukan. Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejak akhir milenium kedua ada kecenderungan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan di sekolah-sekolah reguler. Pendidikan semacam ini disebut pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan anak yang berasal dari latar belakang etnik/suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, afiliasi politik, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama/ kepercayaan, dan perbedaan kondisi fisik atau mental. Dalam kebersamaan tersebut perlu ada penyesuaian komponen-komponen pendidikan terhadap kebutuhan khusus peserta didik.

Pendidikan inklusif sebagai wacana baru dalam bidang pendidikan memerlukan pedoman dalam sistem penyelenggaraannya. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun pedoman dalam pengembangan kurikulum dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah.

Dalam hal ini diversifikasi kurikulum diperlukan mengingat keberagaman karakteristik peserta didik, daerah dan sekolah sehingga cara penyampaian dan pencapaian kompetensi harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah. Jadi, pengertian diversifikasi kurikulum adalah pelayanan pendidikan

dengan cara menyesuaikan, memperluas, dan memperdalam kompetensi dan materi pelajaran dalam rangka untuk melayani keberagaman penyelenggaraan satuan pendidikan, kebutuhan serta kemampuan daerah dan sekolah ditinjau dari segi geografis, budaya, serta kemampuan, kebutuhan dan minat peserta didik. Diversifikasi kurikulum yang melayani keberagaman kemampuan peserta didik ini dikelompokkan ke dalam: normal, sedang, dan tinggi.

Diversifikasi kurikulum yang melayani minat peserta didik dan kebutuhan daerah dirancang oleh daerah dan sekolah. Diversifikasi kurikulum juga dilaksanakan untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena adanya kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Diversifikasi kurikulum juga perlu dilaksanakan untuk melayani peserta didik dari daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi

B. Kurikulum, Peserta Didik, dan Program Pembelajaran

1. Kurikulum

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, teknik penilaian, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Isi dan Standar Kompetensi lulusan, yang meliputi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Untuk pengembangan kurikulum selanjutnya diserahkan pada satuan pendidikan masing-masing yang nantinya dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Substansi pengembangan kurikulum yang lebih rinci dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kelompok Mata Pelajaran, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran. Kurikulum ini dikembangkan di tingkat satuan pendidikan dengan mengingat kondisi daerah dan kondisi kemampuan peserta didik.

2. Peserta Didik

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi memiliki peserta didik yang berbeda dengan sekolah lain pada umumnya. Ada tiga hal yang perlu dibahas sekilas tentang peserta didik sekolah inklusi, yaitu: pengertian peserta didik ber-

kebutuhan khusus dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik; dan tingkat kecerdasan.

a. Pengertian Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan/ perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dibanding dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Jika peserta didik yang mengalami kelainan atau penyimpangan yang tidak signifikan dan telah dapat dikoreksi dengan alat bantu tidak memerlukan pendidikan khusus, peserta didik tersebut tidak termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Untuk keperluan pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus atau yang memiliki kelainan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Tunanetra
- 2) Tunarungu
- 3) Tunawicara
- 4) Tunagrahita
- 5) Tunadaksa
- 6) Tunalaras
- 7) Berkesulitan belajar spesifik
- 8) Lamban belajar
- 9) Autistik
- 10) Gangguan motorik
- 11) Korban penyalahgunaan narkoba
- 12) Anak dengan penyakit kronis
- 13) Gabungan dari dua atau lebih jenis kelainan seperti disebut di atas.
- 14) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (peserta didik dengan kecerdasan luar biasa, peserta didik dengan kreativitas luar biasa, peserta didik dengan bakat seni dan/atau olahraga luar biasa, dan/atau gabungan dari dua atau lebih jenis-jenis kelebihan di atas).

b. Hambatan-hambatan peserta didik berkebutuhan khusus

Setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hambatan tertentu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan hambatan-hambatan tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan kebutuhan layanan pendidikan bagi setiap peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan/ kesanggupan maupun ketidakmampuan peserta didik secara individual.

Untuk keperluan pengembangan pengajaran pendidikan inklusi, kebutuhan khusus peserta didik perlu dilakukan asesmen dan identifikasi keunggulan dan hambatan-hambatannya serta kebutuhan khusus peserta didik.

3. Program Pendidikan/ Pengajaran Individual

Guru kelas atau guru bidang studi di sekolah reguler bersama-sama guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau Pendidikan Khusus (PKh) sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus terlebih dahulu perlu menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam rencana pembelajaran reguler, modifikasi pembelajaran serta program pengajaran individual (PPI) untuk anak berkebutuhan khusus.

PPI merupakan rencana pengajaran yang dirancang untuk satu orang peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kecerdasan/ bakat istimewa. PPI harus merupakan program yang dinamis artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik, dan disusun oleh sebuah tim terdiri dari orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus/PLB, dan peserta didik yang bersangkutan yang disusun secara bersama-sama.

Idealnya PPI tersebut disusun oleh tim terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Tenaga ahli dan Profesi terkait, orang tua/wali murid, guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pendidikan khusus/PLB, serta peserta didik yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip PPI

- a. Berorientasi pada peserta didik
- b. Sesuai potensi dan kebutuhan anak
- c. Memperhatikan kecepatan belajar masing-masing
- d. Mengejar ketertinggalan dan mengoptimalkan kemampuan

Komponen PPI secara garis besar meliputi:

- a. Deskripsi tingkat kemampuan peserta didik sekarang
- b. Tujuan jangka panjang (umum) dan tujuan jangka pendek (khusus)
- c. Rincian layanan pendidikan khusus dan layanan lain yang terkait, termasuk seberapa besar peserta didik dapat berpartisipasi di kelas reguler
- d. Sasaran
- e. Metode
- f. Ketercapaian sasaran
- g. Evaluasi

C. Pengembangan Kurikulum Program Inklusi

1. Dasar Pengembangan Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program inklusi pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya di lapangan, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Untuk melakukan modifikasi dan pengembangan kurikulum dalam program inklusi harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum dalam program inklusi, antara lain sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya:
 - 1) Pasal 5 ayat (1): setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
 - 2) Pasal 5 ayat (2): warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - 3) Pasal 5 ayat (3): warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
 - 4) Pasal 5 ayat (4): warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
 - 5) Pasal 6 ayat (1) setiap warganegara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
 - 6) Pasal 12 ayat (1.b): setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
 - 7) Pasal 36 ayat (1): pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - 8) Pasal 36 ayat (2): kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, serta peserta didik.
 - 9) Penjelasan Pasal 15: Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau be-

- rupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- b. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya:
 - 1) Pasal 1 ayat (13): Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
 - 2) Pasal 1 ayat (15): Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
 - 3) Pasal 17 ayat (1): Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK/atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/ karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
 - 4) Pasal 17 ayat (2): sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dan Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
 - c. Peraturan Mendiknas No. 22/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Peraturan Mendiknas No. 23/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - e. Peraturan Mendiknas No. 24/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas No. 22/2006 dan No. 23/2006.

2. Tujuan Pengembangan Kurikulum

- a. Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami semaksimal mungkin dalam setting sekolah inklusi.
- b. Membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di rumah.
- c. Menjadi pedoman bagi sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai dan menyempurnakan program pendidikan inklusi.

3. Model Pengembangan Kurikulum

a. Model kurikulum reguler penuh

Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi dan ketekunan belajarnya.

b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi

Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi, media pembelajaran, jenis penilaian dan pelaporan, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada substansi kurikulum reguler.

Modifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan anak berkebutuhan khusus yang dikarenakan dari akibat langsung kelainannya. Dengan modifikasi diharapkan anak berkebutuhan khusus mampu mengikuti pembelajaran dengan kurikulum reguler.

c. Model kurikulum PPI

Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.

Model ini diperuntukan pada peserta didik yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar (sekalipun telah dimodifikasi) berdasarkan kurikulum reguler dan atau anak dengan kecerdasan serta bakat istimewa. Peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setiap kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan, potensi/bakat yang dimiliki, serta kebutuhannya.

Standar kompetensi dalam PPI dapat diambilkan dari kelas di bawah/ di atas dimana anak berkebutuhan khusus berada. Misalnya anak dengan anak umur 12 tahun dengan kecerdasan mental 8 tahun, sekalipun anak tersebut telah duduk di kelas VI, maka standar kompetensinya dapat diambilkan dari kelas III atau IV dan sebaliknya.

d. Implementasi Pengembangan Kurikulum dalam Setting Inklusi

Implementasi pengembangan kurikulum dari ketiga model di atas dituangkan dalam format Lampiran 1.

D. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

1. Rancangan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan dan karakteristik peserta didik, serta mengacu kepada kurikulum yang dikembangkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusi antara lain seperti berikut.

a. Menyusun Rencana Pembelajaran

- 1) Menetapkan tujuan
- 2) Merencanakan pengelolaan kelas; termasuk mengatur lingkungan fisik dan sosial.
- 3) Merencanakan pengorganisasian bahan/materi; topik apa yang ingin disampaikan.
- 4) Merencanakan strategi pendekatan kegiatan pembelajaran; bagaimana bentuk kegiatannya, apakah peserta didik mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran.
- 5) Merencanakan prosedur kegiatan pembelajaran; bagaimana bentuk dan urutan kegiatannya, apakah kegiatan itu sesuai untuk semua peserta didik, dan bagaimana peserta didik mencatat, mendokumentasikan, dan menampilkan hasil belajarnya.
- 6) Merencanakan penggunaan sumber dan media belajar; sumber belajar mana akan digunakan, media apa yang sesuai dengan peserta didik, dan apakah media tersebut tidak membahayakan.
- 7) Merencanakan penilaian; bagaimana cara peserta didik telah menyelesaikan tugasnya dalam suatu proses pembelajaran, dan apa bentuk tindak lanjut yang diinginkan.

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

- 1) Melaksanakan apersepsi.
- 2) Menyajikan materi/bahan pelajaran.
- 3) Mengimplementasikan metode, sumber/media belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan kompetensi pembelajaran.
- 4) Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif.
- 5) Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan.
- 6) Mengelola pembelajaran kelompok yang kooperatif.

- 7) Membina hubungan antarpribadi, bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa, menampilkan kegairahan dan kesungguhan, dan mengelola interaksi antar pribadi.
- c. Melaksanakan evaluasi
- 1) Melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan setelah kegiatan pembelajaran, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui pengamatan.
 - 2) Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, penilaian dilakukan dengan membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan prestasi sebelumnya.
 - 3) Mengadakan tindak lanjut

2. Prinsip-prinsip Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai kompetensi dasar mata pelajaran. Agar kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif dan efisien, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran di kelas inklusif secara umum sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku bagi anak pada umumnya. Namun demikian, karena di dalam kelas inklusif terdapat anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis, maka guru yang mengajar di kelas inklusif di samping menerapkan prinsip-prinsip umum pembelajaran juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus.

a. Prinsip Umum

- 1) Prinsip motivasi
Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
- 2) Prinsip latar/konteks
Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak.
- 3) Prinsip keterarahan
Setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat.

4) Prinsip hubungan sosial

Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah.

5) Prinsip belajar sambil bekerja

Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktik atau percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya.

6) Prinsip individualisasi

Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak meandapat perhatian dan perlakuan yang sesuai.

7) Prinsip menemukan

Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan/ atau emosional.

8) Prinsip pemecahan masalah

Guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan/problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkannya sesuai dengan kemampuannya.

b. Prinsip Khusus

1) Tunanetra

a) Prinsip kekonkritan

Anak Tunanetra belajar terutama melalui pendengaran dan perabaan. Bagi mereka, untuk mengerti dunia sekelilingnya harus bekerja dengan benda-benda konkret yang dapat diraba dan dapat dimanipulasikan. Melalui observasi perabaan benda-benda riil, dalam tempatnya yang alami, mereka dapat memahami bentuk, ukuran, berat, kekerasan, sifat-sifat permukaan, kelenturan, suhu dan sebagainya.

Dengan menyadari kondisi seperti ini, maka dalam proses pembelajaran guru dituntut semaksimal mungkin dapat menggunakan benda-benda konkrit sebagai alat bantu atau media dan sumber pencapaian tujuan pembelajaran.

b) Prinsip Pengalaman yang Menyatukan

Pengalaman visual cenderung menyatukan informasi. Seorang anak normal yang masuk ke toko, tidak saja melihat rak-rak dan benda-benda ril, tetapi juga dalam sekejap mampu melihat hubungan antara rak-rak dengan benda-benda di ruangan. Anak Tunanetra tidak mengerti hubungan ini kecuali jika guru menyajikannya dengan mengajarkan anak untuk "mengalami" suasana tersebut secara nyata dan menerangkan hubungan tersebut.

c) Prinsip belajar sambil melakukan

Prinsip ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip belajar sambil bekerja. Perbedaannya adalah bagi anak tunanetra melakukan sesuatu adalah pengalaman nyata yang tidak mudah terlupakan seperti anak normal melihat sesuatu sebagai kebutuhan utama dalam menangkap informasi. Anak normal belajar mengenai keindahan lingkungan cukup hanya dengan melihat gambar atau foto. Anak Tunanetra menuntut penjelasan dan penjelajahan secara langsung di lingkungan nyata.

Prinsip ini menuntut guru agar dalam proses pembelajaran tidak hanya bersifat informatif, akan tetapi semaksimal mungkin anak diajak ke dalam situasi nyata sesuai dengan tuntutan tujuan yang ingin dicapai dan bahan yang diajarkannya.

2) Tunarungu/Gangguan Komunikasi

a) Prinsip keterarahan wajah

Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengarannya (kurang dengar atau bahkan tuli). Sehingga organ pendengarannya kurang/tidak berfungsi dengan baik. Bagi yang sudah terlatih, mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan cara melihat gerak bibir (*lip reading*) lawan bicaranya. Oleh karena itu ada yang menyebut anak tunarungu dengan istilah "permata". Karena matanya seolah-olah tanpa berkedip melihat gerak bibir lawan bicaranya.

Prinsip ini menuntut guru ketika memberi penjelasan hendaknya menghadap ke anak (*face to face*) sehingga anak dapat melihat gerak bibir guru.

Demikian pula halnya dengan anak yang mengalami gangguan komunikasi, karena organ bicaranya kurang berfungsi sempurna, akibatnya bicaranya sulit dipahami (karena kurang sempurna) oleh lawan bicaranya. Agar guru dapat memahaminya, maka anak diminta menghadap guru (*face to face*) ketika berbicara.

b) Prinsip keterarahan suara

Setiap kali ada suara/bunyi, pasti ada sumber suara/ bunyinya. Dengan sisa pendengarannya, anak hendaknya dibiasakan mengkonsentrasikan sisa pendengarannya ke arah sumber suara/bunyi, sehingga anak dapat merasakan adanya getaran suara. Suara/bunyi yang dihayatinya sangat membantu proses pembelajaran anak terutama dalam pembentukan sikap, pribadi, tingkah laku, dan perkembangan bahasanya.

Dalam proses pembelajaran, ketika berbicara guru hendaknya menggunakan lafal/ejaan yang jelas dan cukup keras, sehingga arah suaranya dapat dikenali anak.

Demikian pula, bagi anak yang mengalami gangguan komunikasi agar bicaranya dapat dipahami oleh lawan bicaranya maka anak hendaknya ketika berbicara selalu menghadap ke arah lawan bicaranya agar suaranya terarah.

c) Prinsip keperagaan

Anak tunarungu karena mengalami gangguan organ pendengarannya maka mereka lebih banyak menggunakan indera penglihatannya dalam belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran hendaknya disertai peragaan (menggunakan alat peraga) agar lebih mudah dipahami anak, di samping dapat menarik perhatian anak.

3) Anak Berbakat

a) Prinsip percepatan (akselerasi) belajar

Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan (*intelligensi*), kreativitas, dan tanggung jawab (*task commitment*) terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Salah satu karakteristik yang sangat menonjol adalah mereka memiliki kecepatan belajar di atas kecepatan belajar anak seusianya. Dengan diterangkan sekali saja oleh guru, mereka telah dapat menangkap maksudnya; sementara anak-anak yang lainnya masih perlu dijelaskan lagi oleh guru. Pada saat guru mengulangi penjelasan kepada teman-temannya itu, mereka memiliki waktu terluang. Bila tidak diantisipasi oleh guru, kadang-kadang waktu luang tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas sekehendaknya, misalnya melempar benda-benda kecil kepada teman dekatnya, mencubit teman kanan-kirinya, dan sebagainya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki, dalam proses pembelajaran hendaknya guru dapat memanfaatkan waktu luang anak berbakat dengan memberi materi pelajaran tambahan (materi pelajaran berikutnya). Sehingga kalau terakumulasi semua, mungkin materi pelajaran selama satu semester dapat selesai dalam waktu 4 bulan; materi 1 tahun selesai dalam

waktu 8 bulan; materi 6 tahun selesai dalam waktu 4 tahun. Hal ini disebut dengan istilah percepatan (akselerasi) belajar.

b) Prinsip pengayaan (enrichment)

Ada anak berbakat yang tidak tertarik dengan program percepatan belajar. Mereka kurang berminat mempelajari materi berikutnya dan mendahului teman-temannya. Mereka merasa lebih menikmati dengan tetap berada bersama dengan teman sekelasnya. Materi yang diberikan lebih diperdalam dan diperluas dengan mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi (analisis, sintesis, evaluasi, dan pemecahan masalah). Anak berbakat tidak hanya mengembangkan proses berfikir tingkat rendah (pengetahuan dan pemahaman), tetapi mereka lebih menonjol dalam proses berfikir tingkat tinggi. Hal ini menuntut guru agar dalam kegiatan pembelajaran dapat memanfaatkan waktu luang dengan cara memberi program-program pengayaan kepada mereka, dengan mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi mereka.

4) Tunagrahita

a) Prinsip Kasih Sayang

Tunagrahita adalah anak yang mengalami kelainan dalam segi intelektual, inteligensi mereka di bawah rata-rata. Akibatnya, dalam tugas-tugas akademik yang menggunakan intelektual, mereka sering mengalami kesulitan. Dalam kegiatan pembelajaran, anak tunagrahita membutuhkan kasih sayang yang tulus dari guru. Guru hendaknya berbahasa yang lembut, sabar, rela berkorban, dan memberi contoh perilaku yang baik, ramah, dan supel, sehingga tumbuh kepercayaan dari siswa, yang pada akhirnya mereka memiliki semangat untuk melakukan kegiatan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru.

b) Prinsip Keperagaan

Kelemahan anak tunagrahita antara lain adalah dalam hal kemampuan berfikir abstrak, mereka sulit membayangkan sesuatu. Dengan segala keterbatasannya itu, siswa tunagrahita akan lebih mudah tertarik perhatiannya apabila dalam kegiatan pembelajaran menggunakan benda-benda konkrit maupun berbagai alat peraga (model) yang sesuai. Hal ini menuntut guru agar dalam kegiatan pembelajaran selalu mengaitkan relevansinya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, anak perlu dibawa kelingkungan sosial, maupun lingkungan alam. Bila tidak memungkinkan, guru dapat membawa berbagai alat peraga.

c) Prinsip Habilitasi dan Rehabilitasi

Meskipun dalam bidang akademik anak tunagrahita memiliki kemampuan yang terbatas, namun dalam bidang-bidang lainnya mereka masih memiliki kemampuan atau potensi yang masih dapat dikembangkan.

Habilitasi adalah usaha yang dilakukan seseorang agar anak menyadari bahwa mereka masih memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan meski kemampuan atau potensi tersebut terbatas. Rehabilitasi adalah usaha yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan cara, sedikit demi sedikit mengembalikan kemampuan yang hilang atau belum berfungsi optimal. Dalam kegiatan pembelajaran, guru hendaknya berusaha mengembangkan kemampuan atau potensi anak seoptimal mungkin, melalui berbagai cara yang dapat ditempuh.

5) Tunadaksa

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bagi anak tunadaksa tidak lepas dari tiga bentuk pelayanan, yaitu:

a) Pelayanan Medik

Sebelum masa sekolah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari dokter agar tidak salah penempatan. Hal ini meliputi

- (1) Menentukan bentuk terapi dan frekuensi latihan.
- (2) Menjalin kerjasama dengan guru yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelayanan dengan tepat. Contoh: posisi duduk, posisi menulis, posisi jalan dan lain-lain.

b) Pelayanan pendidikan

(1) Mendorong anak untuk pergi ke psikolog sampai mendapatkan rekomendasi penempatan anak disekolah. Contoh: tunadaksa ringan (D) atau tuna daksa sedang (D1).

(2) Sistem pendidikan yang berjenjang .

(3) Pembuatan program pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak.

c) Pelayanan Sosial dilakukan dalam upaya pengembangan diri, dimana anak dilatih bagai mana cara bergaul, berkomunikasi. Sehingga anak memiliki rasa percaya diri.

6) Tunalaras

a) Prinsip Kebutuhan dan Keaktifan

Anak tunalaras selalu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, ia menggunakan kesempatan yang ada tanpa mengingat kepentingan

orang lain. Kalau perlu melanggar semua peraturan yang ada meskipun ia harus mencuri misalnya. Hal ini jelas merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.

Oleh karena itu, guru hendaknya mendorong peserta didik untuk lebih aktif agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memper-timbangkan norma-norma sosial, agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b) Prinsip kebebasan yang terarah

Anak tunalaras memiliki sikap tidak mau dikekang. Ia selalu menggunakan peluang untuk berbuat sesuatu. Oleh karena itu, guru harus memperhitungkan tindakan yang akan dilakukannya dalam membina peserta didik yang tuna laras. Di samping itu, guru hendaknya mengarahkan dan menyalurkan segala perilaku anak ke arah positif yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

c) Prinsip Penggunaan Waktu Luang

Anak tunalaras biasanya tidak bisa diam. Ada saja yang dikerjakan, bahkan seolah-oleh mereka kekurangan waktu sehingga lupa tidur, istirahat dan sebagainya. Oleh karena itu, guru harus membimbing anak dengan mengisi waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

d) Prinsip Kekeluargaan dan Kepatuhan

Anak tunalaras biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis, atau hubungan orang tua retak (*broken home*). Akibatnya emosinya kurang stabil, jiwanya tidak tenang, rasa kekeluargaannya tidak berkembang, merasa hidupnya tidak berguna. Akibat lebih jauh mereka bersifat perusak, dan benci kepada orang lain.

Oleh karena itu, guru harus dapat menyelami anak, di mana letak ketidak-selarasan kehidupan emosinya. Selanjutnya, mengembalikannya kepada kehidupan emosi yang tenang, laras, sehingga rasa kekeluargaannya menjadi pulih kembali. Misalnya siswa disuruh membaca cerita yang edukatif, memelihara binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya.

e) Prinsip Setia Kawan dan Idola serta Perlindungan

Karena tinggal di rumah tidak tahan, anak tunalaras biasanya lari keluar rumah. Kemudian ia bertemu dengan orang-orang (kelompok) yang dirasa dapat membuat dirinya merasa aman. Di dalam kelompok tersebut ia merasa menemukan tempat berlindung menggantikan orang tuanya, ia merasa tenteram, timbul rasa setia kawan. Karena setianya kepada kelompok, ia berbuat apa saja sesuai perintah ketua kelompoknya yang dijadi-

kan idolanya. Oleh karena itu, guru hendaknya secara pelahan-lahan berupaya menggantikan posisi ketua kelompoknya, menjadi tokoh idola siswa, dengan cara melindungi siswa, dan berangsur-angsur kelompoknya berganti dengan teman-teman sekelasnya, dan setia kawannya berganti kepada teman-teman sekelasnya, yang pada akhirnya mereka akan merasa senang bersekolah.

f) Prinsip Minat dan Kemampuan

Guru harus memperhatikan minat dan kemampuan anak terutama yang berhubungan dengan pelajaran. Jangan sampai karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak, akhirnya justru mereka benci kepada guru atau benci kepada pelajaran tertentu. Sebaliknya, guru harus menggali minat dan kemampuan siswa terhadap pelajaran, untuk dijadikan acuan untuk memberi tugas-tugas tertentu. Dengan memberi tugas yang sesuai, mereka akan merasa senang, yang pada akhirnya lama-kelamaan mereka akan terbiasa belajar.

g) Prinsip Emosional, sosial, dan Perilaku

Karena problem emosi yang disandang anak tunalaras, maka ia mengalami ketidaksinambungan emosi. Akibatnya siswa berperilaku menyimpang baik secara individual maupun secara sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, guru harus berusaha mengidentifikasi problem emosi yang disandang anak, kemudian berupaya menghilangkannya untuk diganti dengan sifat-sifat yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan cara diberi tugas-tugas tertentu, baik secara individual maupun secara kelompok.

h) Prinsip Disiplin

Pada umumnya anak tunalaras ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memenuhi keinginannya, tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku, sehingga ia hidup lepas dari disiplin. Sikap ketidak taatan dan lepas dari aturan merupakan sikap hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, guru perlu membiasakan siswa untuk hidup teratur dengan selalu diberi keteladanan dan pembinaan dengan sabar.

i) Prinsip Kasih Sayang

Anak tunalaras umumnya haus akan kasih sayang, baik dari orang tua maupun dari keluarganya. Akibatnya anak akan selalu mencari kasih sayang dan menumpahkan keluhannya di luar rumah. Kalau ia tidak menemukannya akan menjadi agresif, cenderung hiperaktif, atau sebaliknya ia menjadi rendah diri, pendiam, atau menyendiri. Oleh karena itu, pendekatan kasih sayang, dan kesabaran yang dilakukan guru diharapkan dapat mengisi ke-

kosongan jiwa anak. Dengan pendekatan kasih sayang akan membuat anak merasa nyaman sehingga mereka akan rajin ke sekolah dan merasa ada tempat untuk mencurahkan perasaannya yang pada akhirnya mereka akan patuh pada guru.

E. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada seting inklusi secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas reguler. Namun demikian, karena di dalam seting inklusi terdapat peserta didik yang sangat heterogen, maka dalam kegiatan pembelajarannya di samping menerapkan prinsip-prinsip umum juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah setempat sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan model penempatan yang dipilih. Seperti dijelaskan pada buku 1 (mengenal Pendidikan Inklusif), penempatan anak luar biasa di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut.

1. Kelas reguler (inklusi penuh)
2. Kelas reguler dengan cluster
3. Kelas reguler dengan *pull out*
4. Kelas reguler dengan cluster dan *pull out*
5. Kelas khusus dengan berbagai pengintergrasian
6. Kelas khusus penuh

Kegiatan pembelajaran dalam seting inklusi akan berbeda baik dalam strategi, kegiatan, media, dan metode. Dalam seting inklusi, guru hendaknya dapat mengakomodasi semua kebutuhan siswa di kelas yang bersangkutan termasuk membantu mereka memperoleh pemahaman yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.

Hambatan belajar dapat berasal dari kesulitan menentukan strategi belajar dan metode belajar lainnya sebagai akibat dari faktor-faktor biologis, psikologis, lingkungan, atau gabungan dari beberapa faktor tersebut. Sebagai contoh gangguan sensoris seperti hilangnya penglihatan atau pendengaran, merupakan hambatan dalam memperoleh masukkan informasi dari luar. Disfungsi minimal otak mungkin akan berakibat yang cukup serius terhadap konsentrasi.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada model kelas tertentu mungkin berbeda dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada model kelas yang lain. Pada model Kelas Reguler (Inklusi Penuh), bahan belajar antara anak luar biasa

dengan anak normal mungkin tidak berbeda secara signifikan; namun pada model Kelas Reguler dengan Cluster, bahan belajar antara anak luar biasa dengan anak normal biasanya tidak sama, bahkan antara sesama anak luar biasa pun dapat berbeda. Oleh karena itu, setelah ditetapkan model penempatan anak luar biasa, yang perlu dilakukan berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas inklusi antara lain seperti di bawah ini.

1. Merencanakan Kegiatan pembelajaran

a. Menetapkan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai merupakan tahap awal merencanakan kegiatan pembelajaran.

b. Merencanakan Pengelolaan Kelas

- 1) Menentukan penataan ruang kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- 2) Menentukan cara pengorganisasian siswa agar setiap siswa dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya: (1) individual; (2) berpasangan; (3) kelompok kecil; dan (4) klasikal.

c. Merencanakan pengorganisasian bahan, melalui:

- 1) menetapkan bahan utama (pokok) yang akan diajarkan;
- 2) menentukan bahan pengayaan untuk siswa yang pandai; dan
- 3) menentukan bahan remedi untuk siswa yang kurang pandai.

d. Merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, melalui:

- 1) merumuskan tujuan pembelajaran;
- 2) menentukan metode mengajar;
- 3) menentukan urutan/langkah-langkah mengajar, misalnya; (1) pembukaan/apersepsi; (2) kegiatan inti; dan (3) penutup/evaluasi.

e. Merencanakan penggunaan sumber belajar, dengan cara:

- 1) menentukan sumber bahan pelajaran (misalnya buku paket, buku pelengkap, dan sebagainya); dan
- 2) menentukan sumber belajar (misalnya globe, foto, benda asli, benda tiruan, lingkungan alam, dan sebagainya).

f. Merencanakan penilaian, dengan cara:

- 1) menentukan bentuk penilaian (misalnya tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan);
- 2) membuat alat penilaian (menuliskan soal-soalnya); dan
- 3) menentukan tindak lanjut.

2. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran

a. Berkomunikasi dengan siswa

- 1) Tujuan mengajar.
- 2) Melakukan apersepsi.
- 3) Menjelaskan isi/materi pelajaran.
- 4) Mengklarifikasi penjelasan apabila siswa salah mengerti atau belum paham;
- 5) Menanggapi respon atau pertanyaan siswa.
- 6) Menutup pelajaran (misalnya merangkum, meringkas, menyimpulkan, dan sebagainya).

b. Mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

- 1) Menggunakan metode mengajar yang bervariasi (misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan sebagainya).
- 2) Menggunakan berbagai sumber belajar (misalnya globe, foto, benda asli, benda tiruan, lingkungan alam, dan sebagainya).
- 3) Memberikan latihan dengan memperhatikan perbedaan individual.
- 4) Menggunakan ekspresi lisan dan/atau penjelasan tertulis yang dapat mempermudah siswa untuk memahami materi yang diajarkan.

3. Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif

- a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif (misalnya dengan mengajukan pertanyaan, memberi tugas tertentu, mengadakan percobaan, berdiskusi secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, belajar berkooperatif).
- b. Memberi penguatan kepada siswa agar terus terlibat secara aktif;
- c. Memberikan pengayaan (tugas-tugas tambahan) kepada siswa yang pandai;
- d. Memberikan latihan khusus (remidi) bagi siswa yang dianggap memerlukan

4. Mendemonstrasikan penguasaan materi dan relevansinya dalam kehidupan

- a. Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran secara meyakinkan (tidak ragu-ragu); dengan menggunakan media yang sesuai.
- b. Menjelaskan relevansinya materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari.

5. Mengelola waktu, bahan, dan perlengkapan pengajaran

- a. Menggunakan waktu pengajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan.

- b. Mengelola ruang kelas sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran.
- c. Menggunakan bahan pengajaran (misalnya bahan praktikum) secara efisien;
- d. Menggunakan perlengkapan pengajaran (misalnya peralatan percobaan) secara efektif dan efisien.

6. Mengelola pembelajaran kelompok yang kooperatif

Pembelajaran yang efektif berarti mengkombinasikan berbagai pendekatan dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran seperti ini diharapkan dapat menjadikan kelas lebih hidup, penuh tantangan dan menyenangkan. Berbagai pendekatan dalam kelompok:

a. Pembelajaran langsung pada seluruh kelas

Pendekatan ini cocok untuk memperkenalkan berbagai topik. Guru menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Guru dapat menggunakan kelas untuk bercerita atau menunjukkan karya mereka seperti membuat puisi, lagu, bercerita atau membuat permainan secara bersama-sama. Guru harus berupaya menciptakan strategi pembelajaran dengan materi yang sesuai yang dapat mengakomodasi semua keragaman. Untuk dapat mendorong semua siswa aktif, guru dapat memberikan tugas yang berbeda pada setiap kelompok atau memberikan tugas yang sama dengan hasil yang diharapkan berbeda.

b. Pembelajaran individual

Pembelajaran individual diberikan pada peserta didik tertentu untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya seperti pada peserta didik berbakat dengan mendorong mereka memberikan tugas yang lebih menantang.

c. Pembelajaran untuk kelompok kecil

Guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil dengan menggunakan strategi yang efektif yang dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Guru dapat mendorong peserta didik agar dapat bekerja lebih kooperatif.

c. Pembelajaran yang kooperatif

Pembelajaran yang kooperatif terjadi ketika peserta didik berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Guru hendaknya berupaya menghindari pembelajaran yang kompetitif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memegang peranan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar sehingga peserta didik merasa mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri dan merasa dihargai.

Pembelajaran yang kooperatif dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman dan rasa senang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri,

terhadap kelompoknya, dan terhadap pekerjaannya. Setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilannya seperti peserta didik perempuan menjadi presenter, dan peserta didik laki-laki menjadi notulis dan kegiatan lainnya sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari aktivitas kerja kelompok yang kooperatif.

- d. Melakukan evaluasi: (1) melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung (baik secara lisan, tertulis, maupun pengamatan); dan (2) mengadakan tindak lanjut hasil penilaian

7. Membina Hubungan Antar Pribadi

a. Bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa

- 1) menunjukkan sikap terbuka terhadap pendapat siswa;
- 2) menunjukkan sikap toleran (mau mengerti) terhadap siswa;
- 3) menunjukkan sikap simpati terhadap permasalahan/kesulitan yang dihadapi siswa;
- 4) menunjukkan sikap santun tidak kasar (tidak mudah marah) dan kasih sayang terhadap siswa.

b. Menampilkan kegairahan dan kesungguhan

- 1) menunjukkan kegairahan dalam mengajar;
- 2) merangsang minat siswa untuk belajar;
- 3) memberikan kesan kepada siswa bahwa ia menguasai bahan yang diajarkan.

c. Mengelola interaksi antarpribadi

- 1) Memberikan ganjaran terhadap siswa yang berhasil;
- 2) Memberikan bimbingan khusus terhadap siswa yang belum berhasil;
- 3) Memberikan dorongan agar terjadi interaksi antarsiswa;
- 4) Memberikan dorongan agar terjadi interaksi antara siswa dengan guru

F. Model Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Inklusi

1. Pengertian Model

- a. Model: merupakan kata pengecil dari *modo* yang artinya: sifat, cara. Model *selection is based on student learning styles the demand of the content, and teacher preference.*
- b. Model bahan ajar yang dimaksud dalam pembelajaran adalah untuk menggambarkan, menjelaskan atau menemukan cara pengajaran dalam pendidikan inklusif.

2. Modifikasi

Modifikasi berarti modus, ukuran, cara atau membuat dalam suatu organisasi yang bukan dari keturunan.

3. Pengembangan

Dimaksudkan sebagai kegiatan melakukan penyesuaian dari bahan ajar dasar yang terumuskan dalam standar isi pada sekolah umum ke dalam rumusan bahan ajar untuk siswa berkebutuhan khusus.

4. Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan bagian integral dalam kurikulum yang telah ditentukan standar isinya oleh Pemerintah melalui Permendiknas Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006.

Pada hakikatnya, isi kurikulum itu sendiri mengacu pada usaha pencapaian tujuan-tujuan intraksional bidang studi. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan inklusi meng-ajarkan anak sesuai dengan kemampuan heterogen. Dalam arti bahan ajar diberikan dengan pendekatan individual.

5. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Inklusi (*Inclusive*)

Inclusion is the practics of integrating students with disabilities fully into regular classrooms, definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa inklusi merupakan pendidikan yang praktis bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat bersekolah secara penuh di kelas umum pada siswa yang normal. Dengan demikian Inklusi berarti mengikutsertakan anak berkelainan di kelas umum bersama dengan anak-anak lainnya.

7. Pendidikan Inklusif

Berdasarkan konsep pengertian pendidikan inklusif dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusif adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah umum dengan menggabungkan anak didik yang memiliki kebutuhan khusus.

G. Unsur Pelaksana

Pelaksanaan pembelajaran inklusif sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas umum. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan model penempatan siswa yang berkebutuhan khusus. Unsur pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan in-

klusif adalah Guru umum dengan Guru Pendidikan Khusus (GPK) atau guru Sekolah Luar Biasa. Guru umum membutuhkan rekan kerja untuk membuat program dan berperan untuk memberikan dukungan dalam tim guru dalam arti mendiskusikan pada komite sekolah yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, tenaga medis dan tenaga ahli yang terkait.

1. Komponen Bahan Ajar

Unsur-unsur yang mendukung dalam pembelajaran inklusif adalah:

a. Perangkat Lunak:

- 1) Rencana Program Pengajaran
- 2) Pengembangan Kurikulum
- 3) Penyusunan Program Pembelajaran
- 4) Pelaksanaan Pembelajaran
- 5) Pengendalian Program Pembelajaran
- 6) Penilaian Program Pembelajaran
- 7) Perangkat kelas: jam kedatangan, kartu soal, pohon nilai, kantong
- 8) ilmu, pohon nilai, papan baca Braille, alat tulis Braille.

b. Perangkat Keras:

- 1) Gedung: ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, yang difasilitasi dengan sarana aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan siswa.
- 2) Mebeler: meja, kursi, lemari, papan tulis, papan kartu, papan pajangan, cermin, dan perangkat lain yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
- 3) Komputer, komputer dengan software Braille, scanner, CCTV, radio sekolah, tape recorder.
- 4) Fasilitas ruang sumber dan laboratorium.
- 5) Fasilitas ruang perpustakaan.

2. Prinsip Pengembangan/Modifikasi Bahan Ajar

Bahan ajar yang dikembangkan khusus untuk layanan pendidikan inklusif diharuskan memenuhi beberapa prinsip antara lain prinsip keterbaharuan bahan ajar. Artinya, bahan yang ditetapkan untuk pendidikan inklusif harus merupakan bahan yang tidak kedaluwarsa agar kemanfaatan bahan ajar bagi peserta didik dapat dinikmati di masa mendatang. Demikian juga bahan ajar harus memenuhi prinsip kecukupan. Dalam kaitan ini guru harus meyakinkan bahwa bahan ajar yang telah dipilih memang terjamin kecukupannya sehingga tidak bobot dan volumenya ada di bawah standar isi yang ditentukan. Kontrol terhadap prinsip kecukupan akan menjamin bahan ajar yang disajikan dalam pendidikan inklusif sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, modifikasi bahan

ajar yang dipilih juga harus memenuhi prinsip relevan artinya sesuai dengan kebutuhan siswa, kebutuhan stakeholders maupun tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam penerapan prinsip ini guru tidak boleh menetapkan bahan ajar berdasarkan kemauannya sendiri dan bahan yang dimiliki.

H. Model Modifikasi Bahan Ajar

Berdasarkan uraian di atas, model pengembangan/modifikasi bahan ajar dimaksud adalah bagaimana cara menemukan atau memberikan bahan ajar yang tepat dalam pendidikan inklusif sesuai dengan kemampuan individu (pendekatan individual). Terdapat tiga kegiatan utama dalam pengembangan/modifikasi bahan ajar dalam pendidikan inklusi yaitu menyeleksi bahan ajar, mengorganisasi bahan ajar dan mensintesa bahan ajar.

Kegiatan menyeleksi merupakan kegiatan memilih, menetapkan bahan ajar yang tepat bagi peserta didik. Pemilihan dan penetapan bahan ajar dilakukan oleh guru atas bahan ajar yang telah ada pada silabus sekolah umum. Apabila bahan ajar dari sekolah umum tidak tersedia, maka wajib guru untuk mengusahakannya dengan langsung memerinci dari SK dan KD mata pelajaran yang terkait.

Sedangkan kegiatan mengorganisasi bahan ajar dimaksudkan sebagai kegiatan guru menyusun dan membuat urutan susunan bahan ajar dengan tata urutan tertentu. Tata urutan bahan ajar ada yang berdasarkan kronologis, urutan prosedural, urutan logis maupun urutan hierarkhis. Pertimbangan pengurutan dapat menggunakan dasar tuntutan SK dan KD, atau dapat pula menggunakan dasar karakter mata pelajaran.

Setelah pengorganisasian bahan ajar dilakukan diteruskan dengan mensintesa bahan ajar. Kegiatan ini dimaksudkan agar guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran melakukan upaya agar bahan ajar yang telah tersusun dapat dipadukan dalam keseluruhan proses pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran kelas umum bukan terpisah namun terintegrasi.

Seorang guru pada sekolah umum harus mengenal kemampuan dan karakteristik seluruh siswa di dalam kelas umum termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap bahan ajar, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilaku, sehingga setiap kegiatan mendapat perhatian dan perilaku yang sesuai.

Di bawah ini dapat dilihat contoh model modifikasi bahan ajar sesuai dengan jenis siswa yang berkebutuhan khusus.

1. Modifikasi bahan ajar untuk anak didik Tunanetra

Dalam proses pembelajaran anak didik tunanetra di sekolah reguler, guru perlu memperhatikan bahwa peserta didik tunanetra dalam menyerap bahan ajar melalui pendengaran dan perabaan. Dengan menyadari kondisi seperti ini, maka dalam menyajikan bahan ajar guru dituntut untuk memodifikasi bahan ajar tersebut

Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk memodifikasi bahan ajar untuk peserta didik tunanetra antara lain seperti berikut.

- a. Bahan ajar dinarasikan atau diinformasikan. Pengalaman visual cenderung menyatukan informasi dari apa yang dilihat kemudian menghubungkannya dengan pikiran atau perasaan. Peserta didik tunanetra tidak akan mampu memahami situasi atau kondisi apabila dihadapkan pada suasana yang baru dikenalnya. Guru harus memberikan informasi yang jelas kepada peserta didik tunanetra agar anak didik mampu memahami situasi yang baru dikenalnya
- b. Bahan ajar divisualisasikan pada pengalaman nyata. Pengalaman nyata bagi peserta didik tunanetra merupakan pengalaman yang tidak mudah untuk dilupakan. Peserta didik tunanetra tidak hanya membutuhkan penjelasan ataupun informasi dari seorang guru, tetapi sebaiknya guru mengajak peserta didik untuk merasakan pengalaman nyata sesuai dengan bahan ajar yang disampaikan.
- c. Bahan ajar disajikan dalam bentuk benda-benda kongkrit atau benda-benda yang dibuat model tiruan, sehingga siswa dapat mengenal bentuk secara alamiah, mampu mengenal ukuran berat, sifat-sifat permukaan, kelenturan dan lain sebagainya.
- d. Bahan ajar diganti dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
- e. Bahan ajar dihilangkan atau tidak diberikan sama sekali, dengan pertimbangan apabila diberikan dapat membahayakan diri peserta didik.

2. Contoh model modifikasi bahan ajar seperti Bagan I sebagai berikut.

Bagan 1

MODEL MODIFIKASI BAHAN AJAR

Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Jenis Kekhususan : Tuna Netra

Model Modifikasi : IPA

Kelas : 3 / I

No	JENIS ABK	BAHAN AJAR	MODIFIKASI BAHAN AJAR
1	Tunanetra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penampakan permukaan bumi dan langit. 2. Mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi (daratan dan dataran air seperti laut, danau dan sungai) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk permukaan bumi dimodifikasi dengan menggunakan globe timbul. 2. Untuk dataran dan daratan menggunakan peta timbul yang menampilkan penampakan alam.

Bahan ajar di kelas harus dimodifikasi agar peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus dapat terlayani secara optimal. Sebagai contoh bahan ajar Mata Pelajaran IPA kelas 3 dengan pokok bahasan sifat-sifat benda padat dan benda cair untuk anak didik *low vision* dapat disimak pada bagan II sebagai berikut.

Bagan 2

MODEL MODIFIKASI BAHAN AJAR

Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar

Jenis Kekhususan : Low Vision

Model Modifikasi : IPA

Kelas : 3 / I

No	Jenis ABK	Bahan Ajar	Modifikasi
1	Low Vision	<p>Sifat-sifat benda padat dan benda-benda cair: Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar sifat-sifat benda padat dan benda cair 2. Mengelompokkan benda-benda yang telah dikenalnya sebagai benda padat atau benda cair. 3. Membandingkan sifat berbagai benda cair. 4. Membandingkan sifat berbagai benda padat <p>Peralatan: Kelereng, pensil, penggaris, meja, kursi, gelas, cangkir, botol, minyak, air, sirup, kecap dan sebagainya.</p>	<p>Sifat-sifat benda padat dan benda cair. Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat daftar sifat-sifat benda padat dan benda cair dengan bantuan CCTV atau LUV (kaca pembesar) 2. Benda-benda padat seperti kelereng, pensil, penggaris, meja, kursi dan sebagainya. Benda-benda cair seperti air, minyak, sirup, kecap, dan sebagainya. 3. Benda-benda cair: air, minyak, sirup, kecap bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. 4. Benda-benda padat: kelereng, pensil, penggaris, meja, kursi, bentuknya tetap. <p>Catatan: Untuk media pembelajaran disediakan dengan bentuk/ukuran lebih besar.</p>

Proses Pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus memerlukan media pembelajaran yang dapat membantu memudahkan pemahaman konsep. Siswa Tunarungu memiliki keterbatasan pendengaran baik ringan maupun sedang. Sehingga dalam pembelajaran membutuhkan media pembelajaran yang konkret, karena sulit berfikir abstrak. Dalam pembelajaran pada pendidikan inklusif peserta didik yang normal diharapkan dapat membantu memudahkan peserta didik tunarungu dalam menerima konsep atau materi pembelajaran. Karena peserta didik tuna rungu memiliki keterbatasan pendengaran sehingga bahan ajar disajikan dengan berbagai ragam gambar yang kooperatif atau gambar yang menampilkan kejadian atau peristiwa.

Contoh: "Kecelakaan di jalan".

Sebagai contoh pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 pada semester I. Dapat disimak pada bagan 3 sebagai berikut.

Bagan 3

MODEL MODIFIKASI BAHAN AJAR

Pendidikan Inklusif di Sekolah dasar

Jenis Kekhususan : Tuna Rungu

Model Modifikasi : Bahasa Indomesia

Kelas : 3 /I

No	Jenis ABK	Bahan Ajar	Modifikasi Bahan Ajar
1	Tuna-rungu	Indikator : <ul style="list-style-type: none"> - Membuat kalimat dengan membaca gabar. - Menulis & membuat kalimat sederhana dengan subyek,obyek predikat. - Komunikasi dengan lisan atau isyarat dengan membaca gambar atau kartu kosa kata dan kalimat. 	Bahan ajar dimodifikasi dengan gambar yang mengandung peristiwa. Kejadian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar yang menerangkan kejadian kata kerja. 2. Kartu kosa kata dan kartu kalimat sederhana. 3. Papan panel atau kartu papan yang dibuat dengan papan triplek yg bervariasi. 4. Kartu gambar dan susunan kalimat sederhana.

Peserta didik tunangrahitanya secara intelektual mempunyai intelegensi di bawah rata-rata anak seusianya. Akibat dari hambatan tersebut tugas akademik yang menggunakan intelektual, mereka sering menemui kesulitan bahkan kekurangan waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.

Dalam berpikir abstrak, mereka sulit untuk membayangkan sesuatu yang tidak bersifat nyata. Hal ini menuntut seorang guru sekolah umum untuk memikirkan sejauhmana hambatan ini bisa dicarikan jalan ke luarnya. Apabila bahan ajar atau materi yang disajikan terlalu berat untuk di sajikan kepada siswa, guru diberi wewenang untuk menurunkan materi atau bahan ajar kepada anak didik tunagrahita ringan.

Guru hendaknya mengembangkan sedapat mungkin seluruh potensi yang masih dimiliki peserta didik. Peserta didik tunagrahita ringan di kelas umum, bahan ajar yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan harus diberikan pelayanan individual. Contoh bahan ajar untuk peserta didik tunagrahita dapat disimak pada bagan 4 sebagai berikut;

Bagan 4

MODEL MODIFIKASI BAHAN AJAR

Pendidikan Inklusif Di Sekolah dasar

Jenis Kekhususan : Tuna Grahita Ringan

Model Modifikasi : Matematika

Kelas : 3 /I

A. Standar Kopetensi : Siswa mampu menjumlahkan bilangan 3 angka

B. Kompetensi dasar : Menjumlahkan bilangan 3 angka dengan cara susun ke bawah

C. Indikator : Menjumlah dengan teknik menyimpan

No	Jenis ABK	Bahan Ajar	Modifikasi Bahan Ajar
1	Tunagrahita/Lamban Belajar	1. 479 876 ----- +	Bahan ajar dimodifikasi dengan menurunkan bobot soal. 1. 124 237 ----- +

3. Evaluasi

Evaluasi bahan ajar dilaksanakan setelah guru melakukan proses pembelajaran di kelas. Evaluasi dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian proses pembelajaran. Hasil evaluasi dapat dijadikan umpan balik apakah bahan ajar yang diberikan siswa dapat yang dipakai secara optimal.

Kegiatan evaluasi diupayakan mampu mengukur dari keseluruhan pribadi peserta didik, bukan terbatas pada aspek kognitif. Cakupan evaluasi proses pembelajaran harus meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu guru dalam melaksanakan evaluasi diharapkan menggunakan evaluasi proses dan tidak terbatas pada tes formatif dan sumatif. Penggunaan berbagai jenis tes dan non tes sangat disarankan agar hasil evaluasi komprehensif.

I. Pelaksanaan

Guna mewujudkan tujuan pendidikan inklusif perlu adanya rambu-rambu bahan ajar yang dipakai sebagai pedoman dalam mewujudkan layanan pendidikan. Rambu-rambu bahan ajar tersebut harus memperharikan hal-hal seperti berikut.

1. Pengembangan dan peningkatan kualitas fisik dan psikhis peserta didik.
2. Kodrati peserta didik sebagai insan Tuhan, insan individu, insan sosial dan sekaligus sebagai warga bangsa/negara.
3. Keadaan dan perkembangan lingkungan terdekat sampai yang terjauh.
4. Penyiapan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan.
5. Dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasar pertimbangan di atas maka perlu langkah-langkah penanganan dan pelaksanaan yang berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan umum yang dilaksanakan selama ini. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam penyelenggaraannya, sehingga dalam potensi yang dimungkinkan mendukung dapat digali dan dimaksimalkan daya gunanya. Sedangkan segala yang berpotensi negatif dapat dihindarkan atau paling tidak dapat diminimalisir.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipilih bahan ajar yang tepat guna melayani kebutuhan peserta didik secara umum, peserta didik memulai kemampuan sesuai prinsip umum, dan yang memerlukan pelayanan khusus. Bahan ajar yang disajikan untuk seluruh peserta didik secara umum biasanya hal yang berkaitan dengan prinsip dasar kemanusiaan misalnya tentang makan, minum, berpakaian, bergaul, mempertahankan hidup dan lain-lain.

Untuk peserta didik yang mempunyai kemampuan khusus sesuai dengan prinsip standar umum disajikan bahan ajar seperti pada bahan ajar sekolah umum. Peserta didik yang membutuhkan pelayanan khusus, diperlukan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dalam hal ini diperlukan model dan modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan antara lain seperti berikut.

1. Peserta didik yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dilayani dengan bahan ajar yang tingkat kompleksitas, keluasan wawasan dan tingkat kemajuannya lebih tinggi dari pada bahan ajar yang disajikan untuk peserta didik yang

mempunyai kemampuan rata-rata. Untuk itu, dapat ditempuh cara pengayaan, pendalaman, dan penambahan.

2. Peserta didik yang mempunyai tingkat kecerdasan di bawah rata-rata peserta didik pada umumnya dilayani dengan sebaliknya.
3. Peserta didik yang mempunyai hambatan fisik tertentu misalnya tunanetra, tuna grahita, disajikan bahan ajar yang penyampaiannya dapat diterima sesuai dengan hambatan fisik yang disandanginya.
4. Peserta didik yang mempunyai keberbakatan khusus akan dilayani sesuai dengan macam atau bidang keberbakatannya. Guru dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang menyediakan pelayanan yang terkait.

J. Cara Melaksanakan Modifikasi Bahan Ajar

Melakukan modifikasi memerlukan mekanisme tersendiri agar alurnya dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan bahan ajar dapat dipertanggung jawabkan melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Identifikasi bahan ajar sekolah umum. Dalam langkah awal ini guru pendidikan inklusif harus mengkaji bahan ajar dari sekolah umum untuk diketahui pada bagian mana dari bahan ajar tersebut yang dimungkinkan sulit dikuasai oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Inventarisasi atas bahan ajar yang sulit dikuasai peserta didik berkebutuhan khusus tersebut nantinya diupayakan untuk dimodifikasi agar mudah dipelajari. Jalan yang ditempuh bisa dengan menyederhanakan, memberikan contoh konkret dan sebagainya.
2. Melakukan asesmen terhadap kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus sehingga diketahui dari sejumlah bahan ajar yang telah dikaji dari bahan ajar sekolah umum tersebut, bagian bahan ajar mana yang telah dikuasai peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen tersebut digunakan untuk memisahkan bagian mana dari bahan ajar yang benar-benar harus dimodifikasi. Langkah ini penting agar tidak semua bahan ajar langsung dimodifikasi.
3. Memodifikasi bahan ajar sesuai dengan karakter peserta didik berkebutuhan khusus. Kegiatan memodifikasi bahan ajar untuk peserta didik berkebutuhan khusus sangat dipengaruhi oleh karakter siswa, sehingga bentuk dan corak modifikasinya sangat tergantung pada target peserta didik yang dituju. Lebih lanjut contoh modifikasi dapat dilihat kembali pada bagan di atas.
4. Melakukan cek hasil modifikasi bahan ajar. Langkah ini bermanfaat ini mengendalikan agar hasil modifikasi memang tetap dalam kerangka standar yang ditetapkan dalam persyaratan isi. Bahan ajar yang telah dimodifikasi harus dicek dengan tuntutan standar isi maupun indikator.

5. Menentukan sumber belajar. Cara terakhir dari mekanisme memodifikasi bahan ajar adalah menentukan sumber bahan belajar yang nantinya dijadikan sumber perluasan dan pendalaman bahan ajar bagi peserta didik sehingga siswa dapat belajar lebih berhasil. Guru harus menentukan dari bahan ajar yang mana yang harus disediakan sumber belajar tertentu yang lebih tepat serta bagian bahan ajar yang lainnya untuk disediakan sumber belajar lainnya lagi.

K. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan instrumen atau unsur yang berpotensi, berdaya-guna, dan berhasil guna dalam proses pelaksanaan pembelajaran untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Antara lain seperti berikut.

1. Sumber Daya Manusia:

- a. Guru yang berkualifikasi dan profesional.
- b. Orang tua yang memahami kebutuhan pendidikan bagi anaknya.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
- d. Tutor sebaya
- e. Para ahli yang terkait: psikolog, pedagogi, terapis, psikoterapi dll.

2. Sarana Prasarana:

- a. Sarana meliputi: perangkat kepastakaan dan komponen-komponen pembelajaran yang telah diuraikan di atas.
- b. Tempat pembelajaran yang ramah terhadap pembelajaran yang kondusif dengan aksesibilitas.

L. Faktor Penghambat

Segala hal yang berpotensi menghambat, menekan bahkan mungkin menggagalkan tercapainya tujuan dalam proses pembelajaran, antara lain seperti berikut.

1. Perbedaan kemampuan individu dalam hal ini peserta didik yang "normal" dan peserta didik yang membutuhkan layanan khusus.
2. Kesiapan keterampilan dan kemampuan guru yang kurang variatif cenderung membosankan dan membuat pembelajaran pasif.
3. Pola keamanan guru mengakibatkan guru enggan untuk melakukan perubahan.
4. Keterbatasan kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan.
5. Pengetahuan guru yang terbatas.
6. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah.

M. Pengalaman

Pengalaman lapangan dapat disimak pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk anak Tunanetra di kelas 3 di SD Bunga Bangsa, Malang, Jawa Timur. Pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk pembelajaran tematik IPA dengan memperkenalkan benda cair dan benda padat. yang ada di lingkungan. Saat pembelajaran di lapangan dalam hal ini pembelajaran *out door* dengan menggabungkan pembelajaran tematik, yaitu pada saat olahraga, belajar orientasi mobilitas dan Pengetahuan Alam yang ada di sekitarnya.

Siswa yang normal dapat membantu menerangkan kondisi air yang ada di sekitar selokan ketika anak berada di luar kelas. Saat itu Agus (Tunanetra) mendengar gemericik air yang ada di selokan, bahwa air mengalir dari atas ke bawah dan dapat diterangkan dengan bersama-sama anak yang normal bahwa air mengalir ke bawah. Siswa Tunanetra secara nyata merasakan air adalah dingin. Pada saat yang bersamaan guru menerangkan kegunaan air serta jenis air adalah benda cair.

Ketika guru memberikan pembelajaran secara tematik sudah barang tentu orientasi mobilitas merupakan pendukung untuk memberikan pada peserta didik bagaimana cara mendeteksi air yang ada di selokan, hal ini dengan merasakan secara langsung.

N. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari modifikasi bahan ajar pendidikan inklusif adalah seperti berikut.

1. Baik peserta didik yang normal maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat menerima dan memahami bahan ajar dengan mudah.
2. Guru dapat menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik dengan tepat.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang

Program wajib belajar yang telah lama di canangkan pemerintah, perlu di-sambut dengan meningkatkan layanan pendidikan pada anak-anak berkebutuhan khusus baik secara kuantitas maupun kualitas. Prevalensi jumlah anak-anak berkebutuhan khusus sekitar 3% dari populasi anak usia sekolah, angka tersebut belum termasuk mereka yang tergolong autis, hiperaktif, berbakat dan kesulitan belajar. Hasil sensus pada tahun 2001 menggambarkan baru sekitar 3,7% (33.850 anak) yang terlayani di lembaga persekolahan, baik di sekolah umum maupun sekolah luar biasa (sekolah khusus).

Kenyataan ini menandakan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus (96,3%) yang berada di Indonesia belum memperoleh hak mendapatkan pendidikan. Hal ini di sebabkan oleh (1) kondisi ekonomi orang tua yang kurang menunjang; (2) jarak antara rumah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) cukup jauh; dan (3) sekolah umum (SD, SMP) tidak mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak normal, oleh karena itu perlu di-upayakan model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum.

Bersamaan dengan upaya peningkatan jumlah peserta didik anak berkebutuhan khusus, perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab kita terhadap pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan secara umum di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kurikulum, kualitas tenaga pendidik, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan dan proses pembelajaran. Di sini faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Kondisi ini dimungkinkan karena posisi guru yang sangat dominan dalam berinteraksi dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah inklusi, yang peserta didiknya terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, diperlukan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus (GPK) yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara optimal.

Sehubungan dengan minimnya Guru Pembimbing Khusus yang memiliki kompetensi memadai, maka perlu di upayakan pengangkatan dan pembinaan secara profesional sesuai kebutuhan sekolah.

B. Tujuan

Mempertimbangkan banyaknya permasalahan yang terkait dengan pengangkatan dan pembinaan tenaga kependidikan untuk sekolah inklusi, maka diperlukan adanya pedoman/rambu-rambu pengangkatan dan pembinaannya. Tujuan penerbitan Pedoman ini seperti berikut.

1. Menyediakan pedoman/acuan bagi instansi/lembaga yang ikut berpartisipasi dalam program pengangkatan dan pembinaan tenaga kependidikan untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi.
2. Dengan adanya buku pedoman ini diharapkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengangkatan dan pembinaan tenaga kependidikan akan memiliki persepsi yang sama.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tujuan

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan Tenaga pendidik dalam buku Pedoman ini adalah tenaga akademi (guru) pada satuan pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada sekolah umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, terdiri atas guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK).

Pengertian, tugas, dan kedudukan masing-masing dijelaskan seperti di bawah ini.

a. Guru Kelas

Guru kelas adalah pendidik/pengajar pada suatu kelas tertentu di Sekolah umum yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, bertanggungjawab atas pengelolaan pembelajaran dan administrasi di kelasnya. Kelas yang diampu tidak menetap, dapat berubah-ubah pada setiap tahun pelajaran sesuai dengan kondisi sekolah. Guru kelas biasanya ada pada kelas-kelas rendah, (kelas 1, 2 dan 3).

b. Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan. Di Sekolah umum, biasanya untuk mata pelajaran Pendidikan Agama serta mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di ajarkan oleh guru mata pelajaran, sedangkan mata pelajaran lain oleh guru kelas (untuk SD), untuk tingkat SMP dan SMA sebagian besar diampu oleh guru bidang studi.

c. Guru Pendidikan Khusus

Guru Pendidikan khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/Pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusi.

2. Tugas Guru

a. Tugas guru kelas antara lain sebagai berikut.

- 1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- 2) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya.
- 3) Menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK).
Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian untuk semua mata pelajaran (kecuali Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Memberikan program remedi pengajaran (*remedial teaching*), pengayaan/ percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.
- 5) Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Tugas guru mata pelajaran antara lain sebagai berikut.

- 1) Menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga anak-anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah.
- 2) Menyusun dan melaksanakan asesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya
- 3) Menyusun program pembelajaran individual (PPI) bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK).
- 4) Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Memberikan program Perbaikan (*remedial teaching*), pengayaan/percepatan bagi peserta didik yang membutuhkan.

- c. Tugas Guru Pendidikan Khusus antara lain seperti berikut.
- 1) Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
 - 1) Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik.
 - 2) Melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi.
 - 3) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan.
 - 4) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru.
 - 5) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

3. Kedudukan Guru

Guru berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci seperti berikut.

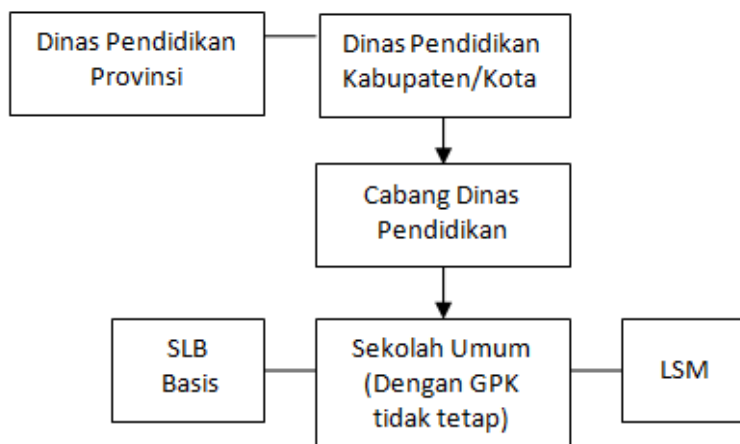
- a. Guru Kelas berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah.
- b. Guru mata pelajaran/bidang studi adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan di sekolah.
- c. Guru Pendidikan Khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. Secara administrasi status kepegawaian, ada beberapa alternatif yang memungkinkan.
 - 1) Alternatif 1

Guru Pendidikan khusus yaitu guru tetap pada satuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (SLB) sebagai basis kedudukannya dan atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap Pembina Guru pendidikan khusus adalah kepala SLB tersebut.

Sekolah umum tempat anak berkebutuhan khusus belajar, di upayakan yang jaraknya berdekatan dengan SLB atau secara akomodasi dari transportasi terjangkau, sehingga guru pendidikan khusus dari sekolah basis dapat melayani beberapa Sekolah umum yang ada anak berkebutuhan khusus

sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepadanya.

Secara organisatoris dapat dilihat pada diagram berikut.



Keterangan :

- = Garis Koordinasi
- = Garis Komando / Pembinaan
- GPK = Guru Pendidikan Khusus
- LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

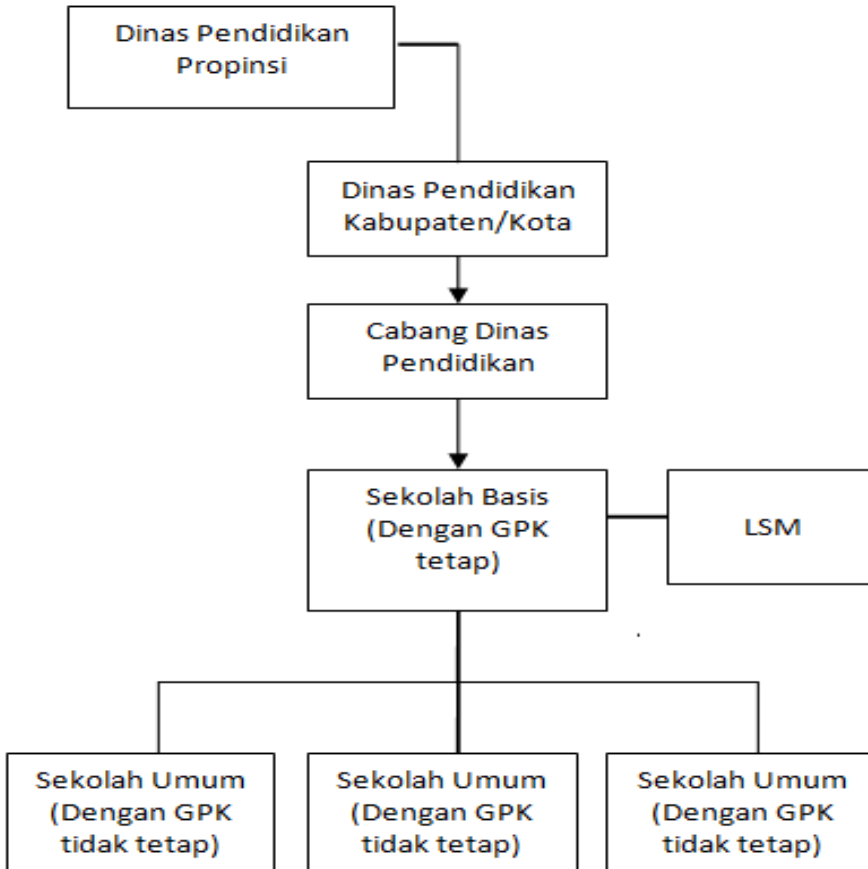
2) Alternatif 2

Guru Pendidikan khusus adalah Guru Tetap pada Sekolah umum, yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, atau latar belakang pendidikan umum namun telah mengikuti sertifikasi tentang pendidikan luar biasa.

Sekolah umum tempat kedudukannya disebut Sekolah Umum Basis. Dengan kedudukannya itu, atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap pembina Guru Pendidikan Khusus adalah Kepala Sekolah Basis.

Guru Pendidikan Khusus ini dapat melayani beberapa Sekolah Umum yang jaraknya terjangkau dari Sekolah Umum Basis. Guru pendidikan Khusus ini memperoleh tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota (Cabang Dinas Pendidikan) yang dibebankan kepadanya.

Secara organisatoris dapat dilihat pada diagram berikut.



Keterangan:

- = Garis Koordinasi
- = Garis Komando / Pembinaan
- GPK = Guru Pendidikan Khusus
- LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

3) Alternatif 3

Guru pendidikan khusus yaitu guru-guru yang ada di klinik-klinik pendidikan atau pusat-pusat pengembangan anak. Guru-guru ini lebih banyak berperan sebagai konsultan pendidikan. Anak-anak yang sering ditangani di klinik-klinik pendidikan ini biasanya yang mengalami gangguan perilaku, perhatian, komunikasi misalnya anak-anak autisme dan berkesulitan belajar. Klinik Pendidikan atau Pusat-pusat Pengembangan Anak, berkolaborasi dengan Sekolah Umum untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah tersebut. Guru pendidikan khusus bersama-

sama dengan guru kelas dan orang tua anak bersama-sama menyusun program pendidikan.

D. Sistem Ketenagaan Sekolah Inklusi

1. Jenis ketenagaan

- a. Kepala Sekolah. Kepala sekolah pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi memiliki tugas mengkoordinasi, mengakomodasi, dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Koordinasi juga dilakukan berkenaan dengan tugas-tugas dan pengembangan profesionalisme guru-guru yang menyangkut kompetensi umum dan khusus berkenaan dengan pelayanan anak berkebutuhan khusus.
- b. Guru Mata Pelajaran. Guru mata pelajaran pada sekolah inklusi mempunyai tugas sama dengan guru mata pelajaran pada umumnya, namun untuk guru mata pelajaran pada sekolah inklusi perlu dibekali dengan tambahan pengetahuan tentang pendidikan khusus. Guru mata pelajaran bersama-sama dengan guru pembimbing khusus menyusun rancangan pembelajaran adaptif sesuai dengan kondisi siswanya tanpa mengabaikan substansi mata pelajaran selanjutnya membelajarkan, memonitor dan mengevaluasi hasil belajar siswa.
- c. Guru Pembimbing Khusus. Masing-masing jenis tenaga kependidikan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi diharapkan memiliki guru pembimbing khusus yang bertugas mendampingi guru-guru mata pelajaran di sekolah inklusi dalam proses pembelajaran, memberikan pengayaan, melakukan terapi, dan membimbing anak-anak sesuai dengan kekhususannya. Apabila karena sesuatu hal terpaksa tidak memiliki, maka sekolah wajib mengangkat atau membina tenaga pendidik yang ada di sekolah sebagai Guru Pembimbing Khusus melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki program sertifikasi Guru Pendidikan khusus/Guru Pendidikan Luar Biasa.

2. Pengembangan

Untuk pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi pada hakikatnya sama dengan pengembangan ketenagaan pada sekolah-sekolah pada umumnya. Selain harus memiliki kualifikasi akademik

dan profesional mereka juga harus memiliki integritas kepribadian sebagai seorang pendidik.

Khusus bagi pendidik di sekolah inklusi yang di dalamnya ada anak-anak berkebutuhan khusus mereka harus mampu melayaninya secara akademis, psikologis dan pedagogis. Berkenaan dengan pengembangan kemampuan yang diperlukan pada sekolah inklusi perlu pengembangan profesional ketenagaan dapat ditempuh melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.

3. Kerjasama

Untuk mengembangkan kemampuan tenaga pendidik lembaga satuan pendidikan penyelenggara program inklusi wajib melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya yang memiliki program yang relevan dengan jenis kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan serta dikembangkan meliputi 4 kompetensi yakni kompetensi pedagogis, professional, kepribadian dan sosial serta kemampuan khusus yang berkenaan dengan pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kebutuhan satuan pendidikan penyelenggara.

Selain dengan perguruan tinggi tersebut, juga diperlukan kerja sama dengan lembaga lain seperti Direktorat terkait, Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pembinaan SLB, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kecamatan, Ditjen Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan Penataran Guru, dan Lembaga Penjamin Mutu (LPMP).

E. Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

1. Kualifikasi

Sebagai tenaga profesional, seorang guru dipersyaratkan dengan adanya kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen, bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui perguruan tinggi program Strata Satu (S1) dan/atau Diploma Empat (D4).

Kualifikasi akademik dimaksud, ditunjang dengan adanya kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kualifikasi yang dipersyaratkan ini juga berlaku bagi guru pembimbing khusus di sekolah yang menyelenggarakan program inklusi.

2. Kompetensi

Istilah kompetensi berhubungan dengan dunia profesi, yang mengandung pengertian mengenai pemilikan pengetahuan, kete-rampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu (Rustyah, 1982). Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan/atau latihan (Hery, 1998).

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan dan /atau latihan.

Dalam bidang kependidikan, kompetensi mengajar dapat dikatakan sebagai kemampuan dasar yang mengaplikasikan apa yang seharusnya dilaksanakan guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya.

a. Kompetensi guru umum

Seorang guru senantiasa dituntut untuk mengembangkan pribadi dan profesinya secara terus menerus, juga dituntut untuk mampu dan siap berperan secara profesional dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengembangkan empat aspek kompetensi bagi diri dan profesinya, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi dimaksud masing-masing dimaknai sebagai berikut:

- 1) Kompetensi pedagogik. Memiliki kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengoptimalkan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 2) Kompetensi kepribadian. Memiliki sikap kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, atau matang sehingga mampu berfungsi sebagai tokoh identitas bagi peserta didik, serta dapat menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat.
- 3) Kompetensi profesional. Memiliki kemampuan sebagai pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Selain keempat kompetensi tersebut, kompetensi profesi guru di Indonesia juga diharapkan memiliki 10 kompetensi guru yang meliputi sebagai berikut.

- a) Menguasai bahan, dalam bentuk materi/bahan mata pelajaran dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan pendalaman/aplikasi mata pelajaran.
- b) Mengelola program pembelajaran, seperti merumuskan tujuan pembelajaran, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, memilih, menyusun, melaksanakan program pembelajaran yang tepat, mengenal kemampuan (*entry behavior*) anak didik, serta merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial.
- c) Mengelola kelas, antara lain mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran, menciptakan iklim pembelajaran yang serasi
- d) Menggunakan media/sumber, dalam bentuk mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses pembelajaran, mengembangkan laboratorium, menggunakan perpustakaan dalam proses pembelajaran.
- e) Menguasai landasan-landasan kependidikan.
- f) Mengelola interaksi belajar mengajar.
- g) Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pengajaran.
- h) Mengetahui fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah, dan menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah.
- i) Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dalam bentuk mengetahui fungsi dan program administrasi sekolah, serta menyelenggarakan administrasi sekolah.
- j) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Sebagai pembandingan, berikut dikemukakan 15 kompetensi yang perlu dikembangkan oleh guru di Amerika, yaitu seperti berikut.

- a) Dapat mendiagnosis kebutuhan intelektual, emosi, sosial, dan fisik peserta didik.
- b) Dapat merumuskan tujuan-tujuan intruksional yang didasarkan atas kebutuhan peserta didik.
- c) Dapat merancang pelajaran sesuai dengan tujuan.
- d) Dapat merancang pelajaran sesuai dengan rancangan/ desain.
- e) Dapat melakukan evaluasi untuk menilai hasil belajar peserta didik dan efektivitas pengajaran.
- f) Mampu menginteraksikan pengajaran sesuai dengan latar belakang peserta didik.

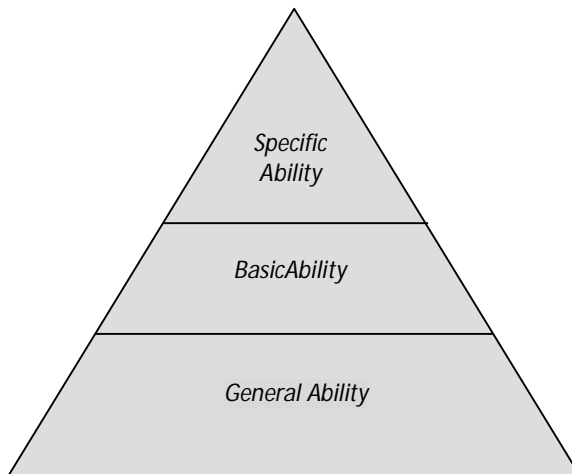
- g) Mampu melaksanakan model-model pembelajaran, dan dapat mengajarkan keterampilan menurut tujuan tertentu bagi peserta didik.
- h) Memerlihatkan komunikasi yang lebih efektif dalam kelas.
- i) Mampu menggunakan sumber-sumber yang sesuai untuk mencapai tujuan pengajaran.
- j) Mampu memonitor proses dan hasil belajar serta mampu mengadakan perbaikan pembelajaran.
- k) Menguasai mata pelajaran yang akan diajarkan.
- l) Memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas/ manajemen dan organisasi dalam mendorong peserta didik tumbuh secara menyeluruh (sosial, emosi, fisik, dan intelek).
- m) Sensitif atau peka terhadap kebutuhan dan perasaan diri sendiri dan kebutuhan serta perasaan orang lain.
- n) Mampu bekerja secara efektif dalam kelompok profesional.
- o) Mampu menganalisis efektivitas keprofesionalnya dan terus berusaha memperluas efektivitas tersebut.

Tampak bahwa kompetensi guru di Amerika sudah mengakomodasi pula pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, karena memang di Amerika pelaksanaan pendidikan inklusi sudah lama berlangsung. Oleh karena itu, guru disamping dituntut mampu mengajar anak normal juga harus mampu mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, dengan bantuan guru pembimbing khusus yang ada disekolahnya.

- 1) Kompetensi sosial. Kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekitarnya, termasuk dengan para peserta didik, orang tua/wali peserta didik, teman sejawat, atasan, dengan pegawai sekolah, dan dengan masyarakat luas.

b. Kompetensi Guru Pendidikan Khusus (Guru PLB)

Kompetensi Guru Pendidikan Khusus selain dilandasi oleh empat kompetensi utama (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu: (1) kemampuan umum (*general ability*); (2) kemampuan dasar (*basic ability*); dan (3) kemampuan khusus (*specific ability*), yang secara diagramatis seperti dibawah ini. Gambar Segitiga:



Kemampuan umum adalah kemampuan yang di perlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), sedangkan kemampuan dasar adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian kemampuan khusus adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (spesialis).

Berkenaan dengan hal tersebut, Guru Pendidikan Khusus diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut.

1) Kemampuan Umum (*general ability*):

- a) Memiliki ciri warga negara yang religius dan berkepribadian.
- b) Memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai warga negara.
- c) Memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesi sesuai dengan pandangan hidup bangsa.
- d) Memahami konsep dasar kurikulum dan cara pengembangannya.
- e) Memahami disain pembelajaran kelompok dan individual.
- f) Mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam melaksanakan dan mengembangkan profesinya.

2) Kemampuan Dasar (*basic ability*)

- a) Memahami dan mampu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus.
- b) Memahami konsep dan mampu mengembangkan alat asesmen serta melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus.
- c) Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
- d) Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus.

- e) Mampu melaksanakan manajemen pendidikan khusus
 - f) Mampu mengembangkan kurikulum Pendidikan Khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta dinamika masyarakat.
 - g) Memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek medis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus
 - h) Memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek psikologis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus
 - i) Mampu melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan khusus.
 - j) Memiliki sikap dan perilaku empati terhadap anak berkebutuhan khusus.
 - k) Memiliki sikap profesional di bidang pendidikan khusus
 - l) Mampu merancang dan melaksanakan program kampanye kepedulian PLB di masyarakat.
 - m) Mampu merancang program advokasi.
- 3) Kemampuan khusus (*specific ability*)

Kemampuan khusus merupakan kemampuan keahlian yang dipilih sesuai dengan minat masing-masing tenaga kependidikan. Pada umumnya masing-masing guru memiliki satu kemampuan khusus (*specific ability*). Kemampuan tersebut antara lain seperti berikut.

- a) Mampu melakukan modifikasi perilaku.
- b) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan penglihatan.
- c) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan pendengaran/komunikasi.
- d) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan intelektual.
- e) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan anggota tubuh dan gerakan.
- f) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan perilaku sosial.
- g) Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami kesulitan belajar.

4. Sertifikasi

Untuk menjaga kualitas profesional, seorang guru diwajibkan untuk memiliki sertifikasi, yang diperoleh melalui perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk pemerintah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap anggaran peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Beberapa hal yang terkait dengan sertifikasi guru, secara garis besar seperti berikut.

- a. Guru harus memiliki Sertifikat Pendidik yang ditempuh melalui pendidikan profesi guru (minimal 36 SKS di atas D-IV/S1)
- b. Pengembangan dan implementasi sertifikasi profesi guru secara bertahap dalam 10 tahun untuk guru yang sudah bertugas
- c. Sertifikasi pendidik dilakukan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah

F. Pembinaan Tenaga Pendidik

Sebagaimana diketahui bahwa tugas guru secara profesional meliputi mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan evaluasi peserta didik. Tugas-tugas tersebut harus selalu di tingkatkan karena guru dituntut selalu profesional dalam melaksanakan tugasnya. Memperhatikan kondisi di lapangan, khususnya kependidikan yang terlibat dalam pendidikan terpadu menuju inklusi sangat memerlukan pembinaan untuk menunjang keberhasilan dan terlaksananya program wajib belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus. Mengacu pada tugas yang diembannya, maka pembina pada tenaga kependidikan tersebut, difokuskan pada dua sasaran, yaitu (1) pembinaan profesi yaitu pembinaan profesi diarahkan pada peningkatan kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial); dan (2) pembinaan karir diarahkan pada peningkatan jenjang aktualisasi diri, mencakup penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

1. Pembinaan profesi

Pembinaan profesi, dibedakan atas pembinaan profesi yang bersifat umum (*general*) dan pembinaan yang bersifat khusus (*spesifikasi*). Sebelum kedua pembinaan itu diberikan, ada satu hal yang harus dimunculkan dan dikembangkan pada diri guru-guru yaitu kesadaran dan kemauan untuk maju, keinginan untuk berubah dan selalu mempunyai keinginan untuk berprestasi.

Pembinaan profesional yang bersifat umum berorientasi pada empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), dan secara substansial profesional lebih diarahkan pada kajian mengenai pengenalan dan pemahaman anak-anak berkebutuhan khusus secara komprehensif. Peningkatan profesi selain dilakukan secara formal dalam bentuk penyeteraan, sertifikasi, pelatihan ataupun

penataran, dapat juga dilakukan secara nonformal melalui organisasi profesi ataupun kelompok-kelompok kerja yang relevan. Untuk mendalami kajian anak-anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah, dan Kelompok Kerja Pengawas, dibawah koordinasi Kepala Cabang Dinas atau pun Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang dilakukan secara rutin dengan menggunakan strategi yang inovatif sehingga menumbuhkan kreativitas para pesertanya.

Tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah (1) menularkan ilmu yang telah diperolehnya kepada guru-guru di sekitarnya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para guru dalam meningkatkan mutu keterampilan mengajar anak berkebutuhan khusus; dan (2) mengadakan pertemuan guru-guru yang sama-sama mengikuti kegiatan untuk mendapatkan kesamaan langkah kesepakatan tentu yang berkaitan dengan layanan pendidikan, seperti pembuatan program, penggunaan metode-metode khusus, evaluasi pembelajaran, dan keterampilan melakukan asesmen pada anak-anak yang di didiknya.

Sedangkan pembinaan profesional yang bersifat spesifik, lebih ditekankan pada keterampilan khusus, seperti keterampilan berba-hasa, berkomunikasi dan mengelola perilaku anak-anak yang tergolong hiperaktif. Disamping menggunakan media pertemuan tersebut diatas ada model kajian yang dapat dilakukan oleh guru-guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus dibawah koordinasi kepala sekolah yaitu mengadakan pertemuan bersama secara rutin seminggu sekali kurang lebih satu jam, membahas hal-hal yang ditemui selama melakukan kegiatan pembelajaran.

Pada setiap pembelajaran bersama-sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus selalu menemukan masalah-masalah baru. Ada kalanya masalah tersebut dapat diatasi sendiri, tetapi seringkali menghendaki kajian bersama-sama antar guru dan juga perlu melibatkan orang tua anak. Kegiatan seperti ini dikalangan medis disebutnya dengan "*case conference*", yaitu membahas masalah-masalah secara bersama-sama sehingga dapat ditemukan solusinya.

Pembinaan profesi dapat pula dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menempuh pendidikan melalui program sertifikasi. Dalam menempuh program sertifikasi, guru-guru diberi dispensasi untuk mengajar pada hari-hari tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga terkait, dan jika kondisi sekolah memungkinkan guru yang mengambil program sertifikasi dibebaskan dari tugas-tugas mengajar.

2. Pembinaan Karir

Pembinaan karir yang diarahkan pada aktualisasi kemampuan guru diharapkan dapat mengembangkan tugas dan tanggung-jawabnya dengan keyakinan dan kepercayaan diri, yang terkait dengan (1) penugasan; (2) kenaikan pangkat; dan (3) promosi jabatan.

a. Penugasan

Penugasan bagi seorang guru selalu berkaitan dengan kompetensinya di bidang mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi akademiknya yang diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan. Penugasan seperti ini wajib senantiasa dipedomani oleh para pimpinan Departemen Pendidikan dan seluruh jajarannya secara vertikal. Dengan demikian penugasan guru yang sesuai dengan kualifikasinya akademiknya akan memiliki dampak langsung kepada kemampuan penyerapan dan penerimaan peserta didik sebagai subyek pendidikan.

b. Kenaikan pangkat

Kenaikan pangkat bagi guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS tetap menuntut adanya penghargaan terhadap pengabdianya sebagai tenaga pendidik. Penghargaan tersebut, bagi tenaga pendidik PNS diwujudkan dalam bentuk Kenaikan Pangkat dalam jabatan fungsional dan dalam bentuk Kenaikan pangkat/golongan. Kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik non PNS dilakukan mengikuti aturan intern kepegawaian sesuai dengan kebijakan masing-masing Pengelola Satuan Pendidikan. Kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik, baik PNS maupun non PNS, tetap menjadi sesuatu yang di harapkan tenaga pendidik. Kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik tetap harus mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

c. Promosi

Promosi merupakan salah satu bagian dari karier seorang pendidik yang dicita-citakan. Promosi pada dasarnya merupakan suatu penghargaan atas prestasi yang dicapai oleh seorang pendidik, baik PNS maupun non PNS atas kinerjanya. Oleh sebab itu promosi bagi seorang pendidik harus jelas aturannya sebab apabila terdapat kesalahan dalam promosi akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pendidik itu sendiri yang akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang dihasilkan. Bagi seorang pendidik yang prestasi kerjanya baik, maka mereka dimungkinkan untuk mendapat promosi jabatan lain yang lebih tinggi. namun harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Selain itu, harus mempertimbangkan nilai positif dan negatifnya baik bagi dirinya sendiri maupun dunia pendidikan pada umumnya.

BAB V

PENERAPAN PEMBELAJARAN DALAM MODEL PENDIDIKAN INKLUSI

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan dan penyempurnaan semua potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak mengenal ruang dan waktu, ia tidak dibatasi oleh tebalnya tembok sekolah dan juga sempitnya waktu belajar di kelas. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja manusia dan mampu melakukan proses kependidikan (*life long education*).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) yang berbunyi "Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Pemerintah telah memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan adanya lembaga pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah menyediakan satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan, baik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 133, yang berbunyi:

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. Sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. Sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

(4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan siswa reguler. Selain pada satuan pendidikan khusus, siswa berkebutuhan khusus juga dapat menempuh pendidikan pada sekolah terpadu. Sekolah terpadu merupakan sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, sarana prasarana yang sama untuk seluruh peserta didik. Sekolah terpadu saat ini lebih dikenal dengan sekolah inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dengan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan. Pendidikan inklusif juga mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan umum, akan tetapi cara penerapannya agak berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan inklusif adalah pendidikan terbuka, dimana semua anak yang berkeinginan sekolah bisa melanjutkan ke pendidikan inklusif. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, semua siswa memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran di kelas. Hanya saja untuk siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (GPK).

Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang mengemban pendidikan inklusif, mengingat cukup banyaknya jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad, jumlah total ABK di Indonesia pada November 2015 mencapai 1,6 juta anak. Akan tetapi masih sedikit anak berkebutuhan khusus yang mau menempuh pendidikan, hanya sekitar 10-11 persen ABK yang mendapatkan layanan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, di antaranya anak yang tidak ingin bersekolah, orang tua yang kurang mendukung pendidikan untuk anaknya, serta akses sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal ABK.

Banyak orang tua yang merasa malu untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kekurangan ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Adanya pendidikan inklusif dapat menjadi alternatif bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kekurangan ke sekolah-sekolah reguler. Akan tetapi tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK, karena pendidikan inklusif hanya diselenggarakan oleh sekolah-sekolah yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Meskipun telah banyak sekolah inklusif di Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pula sekolah inklusif yang belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif tersebut. Seperti permasalahan yang ada di SDN

Bangunrejo II Yogyakarta, di sekolah tersebut terdapat 60 siswa ABK sedangkan guru pendamping khusus yang dimiliki sekolah hanya satu, itupun datang ke sekolah hanya seminggu dua kali (www.solopos.com, 21 Juni 2015). Hal tersebut menunjukkan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif masih sangat kurang.

Hasil penelitian dari Ni'matuzahroh (2015) menyimpulkan bahwa beberapa kendala yang ada dalam penyelenggaraan kelas inklusif yaitu pemahaman terhadap kurikulum berdiferensiasi, sarana prasarana, pengetahuan tentang inklusif yang minim, penolakan keberadaan siswa ABK, penolakan siswa reguler belajar bersama dengan ABK, dan pengetahuan guru yang minim tentang cara memperlakukan ABK. Dimana kurikulum berdiferensiasi merupakan kurikulum nasional yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa ABK, dengan adanya penekanan pada materi secara esensial sehingga dapat memacu dan memberikan wadah bagi pengembangan spiritual, logika, etika dan estetika, serta kreatifitas siswa ABK. Selain itu, siswa ABK juga memerlukan perlakuan khusus dari guru, misalnya saja siswa tuna netra yang hanya bisa membaca dengan menggunakan bantuan huruf braille, maka guru harus menyiapkan soal ulangan dalam bentuk braille atau membacakan setiap soal yang harus dikerjakan siswa. Oleh karena itu, siswa ABK tidak dapat diberikan perlakuan yang sama dengan siswa reguler karena adanya keterbatasan yang dimiliki. Sedangkan belum semua guru kelas inklusif memiliki pengetahuan yang baik tentang penanganan siswa ABK di kelas. Maka dari itu, masih banyak hal yang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebelum sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Persiapan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tugas sekolah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Berdasarkan uraian di atas, studi ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Guru Pendamping Khusus (GPK) pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Indonesia.

B. Komponen Pendidikan Inklusi

1. Manajemen Kesiswaan. Siswa merupakan salah satu komponen utama dalam proses pendidikan. Siswa dalam pendidikan inklusif sangat beragam karakteristik dan juga jenis ketunaan. Siswa yang dapat diterima dalam pendidikan inklusif adalah siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus yaitu meliputi:
 - a. siswa dengan gangguan penglihatan
 - b. siswa dengan gangguan pendengaran

- c. siswa dengan gangguan bicara
 - d. siswa dengan gangguan fisik
 - e. siswa dengan gangguan kesulitan belajar
 - f. siswa dengan gangguan lambat belajar
 - g. siswa dengan gangguan pemusatan perhatian
 - h. siswa cerdas istimewa
 - i. siswa bakat istimewa
 - j. siswa yang memiliki kebutuhan khusus secara social
2. Manajemen Kurikulum. Anak berkebutuhan khusus (ABK) memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Hal ini dikarenakan mengingat mereka memiliki hambatan internal antara lain fisik, kognitif dan sosial-emosional. Pendidikan bagi siswa tersebut dapat dilakukan baik dalam sistem segregatif di sekolah luar biasa (SLB) maupun sistem inklusif pada sekolah umum/reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kurikulum pada penyelenggara pendidikan inklusif harus mencakup kurikulum nasional yang merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusif adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa (Tarmansyah, 2007: 169).
3. Manajemen Tenaga Pendidik
- Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kelas minimal terdiri dari tiga orang tenaga pendidik, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendamping khusus. Seorang guru harus memiliki empat kompetensi dasar guru, yaitu kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial. Mudjito, dkk (2012: 53) mengemukakan bahwa kompetensi guru inklusif selain dilandasi oleh empat kompetensi utama, secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama lain, yaitu kemampuan umum (*ability*), kemampuan dasar (*basic ability*), dan kemampuan khusus (*specific ability*). Selain itu, Mudjito, dkk (2012:54) juga mengemukakan bahwa kompetensi guru inklusif adalah kemampuan guru untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus, dan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus jenis tertentu dalam bentuk:
- a. menyusun instrumen penilaian pendidikan khusus;
 - b. melaksanakan pendampingan untuk pendidikan kebutuhan khusus;
 - c. memberikan bantuan layanan khusus;
 - d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk siswa berkebutuhan khusus; dan
 - e. memberikan bantuan kepada siswa berkebutuhan khusus.

4. **Manajemen Sarana Prasarana.** Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sarana prasarana yang dibutuhkan akan lebih bervariasi, karena siswa berkebutuhan khusus juga memerlukan beberapa sarana prasarana khusus penunjang proses pembelajaran, yang menyesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus siswa. Sekolah inklusif harus menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang bagi siswa berkebutuhan khusus. Misalnya: buku-buku pelajaran dalam bentuk *braille*, buku audio atau *talking-books* untuk siswa tunanetra, dan peralatan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
5. **Manajemen Keuangan/Dana.** Manajemen keuangan pada sekolah inklusif harus mengalokasikan sebagian dananya untuk berbagai keperluan khusus, seperti: penilaian, modifikasi kurikulum, media, metode dan insentif bagi tenaga ahli yang terlibat. Sebab pada dasarnya kelas inklusif memiliki perbedaan dengan kelas reguler, baik dari segi fasilitas, guru, maupun materi. Oleh karena itu, kebutuhan dana sekolah inklusif akan lebih besar daripada sekolah reguler. Sekolah harus betul-betul mempersiapkan segala kebutuhan pendidikan inklusif agar pelayanan yang diberikan pada siswa dapat optimal.
6. **Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dan Masyarakat)** Penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab banyak pihak, yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat. Sekolah perlu melakukan suatu upaya untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar mau turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Misalnya saja dengan mengundang tokoh masyarakat dalam pertemuan yang membahas tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, serta mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan sekolah.
7. **Manajemen Layanan Khusus.** Manajemen layanan khusus merupakan suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus yang diberikan oleh sekolah meliputi: bimbingan dan konseling, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, koperasi, kantin, dan kelas inklusif.

C. Pengembangan Model Pembelajaran di Sekolah Inklusi

1. Perubahan Praktis

Inklusi merupakan perubahan praktis yang memberi peluang kepada anak dengan latar belakang dan kemampuan berbeda bisa berhasil dalam belajar. Per-

ubahan ini tidak hanya menguntungkan anak yang sering tersisihkan, seperti anak berkebutuhan khusus (*child with special needs*), tetapi semua anak dan orang tuanya, semua guru dan administrator sekolah, dan setiap anggota masyarakat.

Inklusi berarti bahwa sebagai guru bertanggungjawab untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak yang ada di masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, pemimpin masyarakat dll.

2. Mengikutsertakan semua anak tanpa kecuali

Selama ini istilah "inklusi" diartikan dengan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (*child with special needs*) di kelas umum dengan anak-anak lainnya. Inklusi dalam tulisan ini diartikan secara lebih luas. Inklusi berarti mengikutsertakan anak berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lamban dalam belajar. Secara lebih luas inklusi juga berarti melibatkan seluruh peserta didik tanpa kecuali, seperti berikut.

- a. Anak yang menggunakan bahasa ibu, dan bahasa minoritas yang berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas.
- b. Anak yang beresiko putus sekolah karena korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau tidak berprestasi dengan baik.
- c. Anak yang berasal dari golongan agama atau kasta yang berbeda.
- d. Anak yang sedang hamil.
- e. Anak yang bersiko putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/ penyakit kronis seperti asma, jantung, alergi, terinfeksi HIV dan AIDs.
- f. Anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah.

Di beberapa tempat, semua anak mungkin masuk sekolah, tetapi masih terdapat beberapa anak yang terpisahkan dari keikutsertaan dalam pembelajaran di kelas, misalnya:

- a. Anak yang menggunakan bahasa ibu yang berbeda dengan buku-buku pelajaran dan bacaan yang digunakan.
- b. Anak yang tidak pernah diberikan kesempatan ikut aktif dalam kelas.
- c. Anak yang tidak pernah mendapatkan bantuan ketika mengalami hambatan belajar.

3. Ramah terhadap Pembelajaran

Sekolah yang ramah terhadap anak merupakan sekolah dimana semua anak memiliki hak untuk belajar mengembangkan semua potensi yang dimilikinya secara optimal di dalam lingkungan yang nyaman dan terbuka. Menjadi "ramah"

apabila keterlibatan dan partisipasi semua pihak dalam pembelajaran tercipta secara alami dengan baik.

Sekolah bukan hanya tempat anak belajar, tetapi guru pun juga ikut belajar dari keberagaman anak didiknya. Lingkungan pembelajaran yang ramah berarti ramah kepada anak dan guru, artinya:

- a. anak dan guru belajar bersama sebagai suatu komunitas belajar;
- b. menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran;
- c. mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar, dan
- d. guru memiliki minat untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik.

Model pembelajaran pendidikan inklusif bertujuan memberikan layanan pembelajaran optimal terhadap semua anak dalam mengembangkan potensinya. Dalam pengembangan pembelajarannya, model pembelajaran inklusif bertitik tolak dari kondisi realita potensi anak yang sangat beragam, yaitu dengan mengembangkan program pendidikan (pembelajaran) yang diindividualisasikan (*Individualized Educational Program*). Dalam pengembangan program ini, anak dapat belajar secara klasikal atau individual sesuai dengan potensi dan kapasitasnya.

4. Esensi Program Pembelajaran yang Diindividualisasikan

Program pembelajaran yang diindividualisasikan (PPI) diadopsi dari istilah *Individualized Educational Program* (IEP), dalam tulisan ini IEP akan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Program Pembelajaran Individual (PPI). Digunakan istilah ini didasarkan kepada kenyataan dimana secara operasional inti persoalan dalam IEP pada dasarnya lebih menyangkut kepada kepentingan proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya dalam tulisan ini akan digunakan istilah Program Pembelajaran Individual (PPI), dan bukan program pendidikan yang diindividualisasikan (IEP) sebagai alih bahasa dari *Individualized Educational Program*.

PPI merupakan dokumen tertulis yang dikembangkan dalam suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (*child with special need*). Mercer and Mercer (1989), mengemukakan bahwa "program individualisasi merujuk kepada suatu program pengajaran dimana siswa bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya". Sejalan dengan pendapat tersebut dikemukakan oleh Lynch (1994) mengemukakan bahwa IEP merupakan suatu kurikulum atau suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada gaya, kekuatan dan kebutuhan-kebutuhan khusus anak dalam belajar. Ini menunjukkan bahwa PPI pada prinsipnya adalah suatu program pembelajaran yang didasarkan kepada setiap kebutuhan individu (anak). Kedua pandangan di atas mengandung pe-

ngertian bahwa siswalah yang harus mengendalikan program, bukan program yang mengendalikan siswa.

Para ahli pendidikan sepakat bahwa salah satu pijakan dalam penyusunan program hendaknya bertitik tolak dari kebutuhan anak, karena anak yang akan dibelajarkan. Untuk itu, masalah kebutuhan, perkembangan dan minat anak menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program. PPI bertolak dari suatu pandangan yang mengakui manusia merupakan makhluk individu atau suatu kesatuan dari jiwa dan raga (*a whole being*) yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dikenal sebagai organisme. Dalam organisme terdapat dorongan (*drives*) yang bersumber pada kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic need*) dan merupakan daya penggerak (*motivation*) untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya (*survive*). Dorongan, kebutuhan dan motivasi inilah sifatnya berbeda-beda, atau memiliki ciri khas tersendiri antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Pandangan pandangan tersebut intinya menghendaki agar kegiatan proses pembelajaran lebih bersifat individual.

Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidup individu merupakan hal yang sangat mendasar, dan kebutuhan belajar pada hakikatnya merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu, PPI merupakan cara yang tepat di dalam proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus, permasalahan dan hambatan belajarnya sangat kompleks serta perbedaan satu sama lainnya sangat tajam, ini membawa konsekuensi kepada kompetensi guru didalam menyusun rencana pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Kegagalan-kegagalan dalam mengakomodasi kebutuhan anak dapat berakibat buruk terhadap proses pembelajaran lebih lanjut. Oleh karena itu didalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, keberadaan PPI sangat penting, karena PPI merupakan cara yang senantiasa berupaya mengakomodasi kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus.

Banyak fakta menunjukkan bahwa perbedaan individu pada anak berkebutuhan khusus sangat besar walaupun dalam tingkat IQ yang sama. Misalnya: anak tunagrahita yang memiliki IQ sama (70), tingkat kelas dan pelajaran sama pula, dan keduanya sama-sama belajar aritmatika, merujuk kepada kurikulum, kedua anak tersebut akan sama-sama menyelesaikan/mempelajari masalah pengurangan, tetapi ternyata kedua anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda, yang satu sudah sampai masalah pengurangan sedangkan yang satunya baru memahami konsep bilangan.

Apabila kepada kedua anak tersebut diperlakukan sama sudah dapat dipastikan pembelajarannya akan menemukan kegagalan dan akan menimbulkan permasalahan baru, karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. PPI pada dasarnya untuk menghindari kegagalan kegagalan dalam proses pembelajaran dan untuk meningkatkan kemampuan anak sesuai dengan potensinya. Hasil penelitian Arravey (dalam Lynch, 1994) menunjukkan bahwa kelompok eksperimen (*treatment*) pada 32 orang anak dengan menggunakan IEP secara signifikan lebih tinggi dari kelompok kontrol. Anak anak pada kelompok eksperimen lebih interes dalam belajar. Ini dapat dipahami bahwa proses pembelajaran yang didasarkan kepada masalah dan kebutuhan anak lebih membantu pencapaian tujuan pembelajaran anak

D. Langkah-langkah Operasional Penyusunan PPI

PPI disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran setiap anak dalam upaya mengembangkan potensinya. Menurut Kitano and Kirby (1986) ada lima langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan program pembelajaran yang diindividualisasikan, yaitu: (1) pembentukan tim PPI; (2) asesmen (menilai) kebutuhan khusus anak; (3) mengembangkan tujuan jangka panjang dan pendek; (4) merancang metode dan prosedur pembelajaran; dan (5) melakukan evaluasi kemajuan belajar anak

1. Pembentukan Tim PPI

Penyusunan program diawali dengan membentuk tim, tim ini disebut Tim PPI. Tim ini memiliki tugas merancang dan menyusun program pembelajaran yang akan dikembangkan di kelas. Anggota tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja dan memiliki informasi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penyusunan program, misalnya: guru, kepala sekolah, psikolog, orang tua, konselor, speech therapist, pediatrik dan konselor. Kepala sekolah dalam hal ini memegang posisi sentral karena bertugas sebagai koordinator dan konsultan bagi anggota tim yang lainnya. Mendudukan kepala sekolah dalam posisi sebagai koordinator dan konsultan dimaksudkan agar para anggota khususnya orang tua dan guru memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan temuannya. Tim ini duduk bersama dan mendiskusikan serta mencari kesepakatan-kesepakatan serta solusi atas program yang akan dikembangkan.

Dua hal penting yang harus disiapkan sekolah sebelum membentuk tim yang akan menyusun (mendiskusikan) program, yaitu:

- a. Sekolah harus sudah menyiapkan gambaran umum masing-masing anak yang diperoleh berdasarkan hasil asesmen, untuk dikonfirmasi lebih lanjut kepada orang tua. Ini sangat penting untuk mencocokkan dan melengkapi temuan orang tua dan hasil asesmen yang dilakukan sekolah. Informasi orang tua sangat penting sekali, karena orang tua yang paling memahami secara detail tentang perilaku, kemampuan dan kelemahan anaknya. Memberikan informasi tentang alasan-alasan perlu dibentuknya tim PPI berikut tujuan, sasaran, serta posisi orang tua dalam tim tersebut sangat penting
- b. Menyiapkan angket mengenai harapan-harapan orang tua dan gambaran mengenai anak-anaknya, sehingga pada akhir pertemuan diharapkan tercapai kesepakatan-kesepakatan mengenai prioritas dan sasaran yang akan ditetapkan dalam PPI.

2. Menilai Kebutuhan

Langkah awal tim PPI yaitu melakukan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan anak. Informasi ini akan menjadi data penting dan pertama yang harus ditemukan untuk selanjutnya dikonfirmasi dengan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh sekolah, dan hasil penilaian ini akan dijadikan dasar-dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran.

Kegiatan awal ini biasanya dilakukan oleh guru sebagai tim PPI, dan dalam pelaksanaan pengumpulan datanya dapat dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, atau dengan daftar pertanyaan yang berbentuk format-format, misalnya format untuk riwayat hidup, perkembangan bahasa, perkembangan motorik, perilaku dll.

3. Mengembangkan Tujuan Pembelajaran

Proses mengembangkan tujuan pembelajaran dilakukan dengan cara menyesuaikan standar kompetensi dalam kurikulum dengan temuan tim PPI dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh sekolah. Hasil asesmen dapat ditempatkan di atas, di tengah atau di bawah kompetensi yang terdapat dalam buku kurikulum. Hal tersebut akan bergantung kepada kondisi kemampuan anak. Dalam IEP tujuan pembelajaran disebut dengan istilah tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka panjang identik dengan tujuan instruksional umum dan tujuan jangka pendek identik dengan tujuan instruksional khusus.

Tujuan jangka panjang adalah tujuan yang harus dicapai dalam waktu yang relatif lama, seperti: tujuan akhir semester, akhir program atau tujuan akhir setelah belajar di sekolah itu. Sedangkan tujuan jangka pendek adalah tujuan yang menuntut terjadinya perubahan perilaku yang diharapkan dalam waktu yang relatif

singkat, misalnya tujuan setelah proses pembelajaran (TIK) atau tujuan setelah satu atau dua kali pertemuan. Untuk itu, rumusan tujuan jangka pendek harus spesifik dan operasional serta mudah diukur.

4. Merancang Metode dan Prosedur Pembelajaran

Proses pembelajaran dalam rancangan PPI harus betul-betul dapat menggambarkan setiap tujuan pembelajaran dapat dikerjakan dan diselesaikan, serta penilaian yang dikembangkan betul-betul dapat menggambarkan perilaku anak atau keberhasilan pembelajaran anak. Pelaksanaan proses pembelajarannya mungkin dirancang dengan cara mengelompokkan anak berdasarkan kondisi dan karakteristik bahan yang akan diproses secara kooperatif, mungkin sangat heterogen dan dikelola lebih individual.

Proses pembelajaran secara kooperatif harus dikelola guru sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik yang dihadapinya. Perubahan strategi atau metode sangat mungkin terjadi. Untuk itu, dalam mengelola proses pembelajaran, kreativitas guru menjadi sangat menentukan

5. Menentukan Evaluasi Kemajuan

Evaluasi kemajuan belajar dimaksudkan untuk mengukur derajat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam setiap tujuan jangka pendek. Hal penting dalam melakukan evaluasi keberhasilan siswa adalah melihat terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa sendiri sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung, dan bukan membandingkan keberhasilan tingkat pencapaian tujuan belajar siswa satu dengan lainnya di kelas itu. Metodenya dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk (lisan, tulisan, perbuatan, observasi saat proses berlangsung). Evaluasi keberhasilan dilakukan dengan dua sisi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kedua evaluasi ini memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Evaluasi proses, penting dalam kaitannya dengan melakukan berbagai perubahan dalam strategi pembelajaran, sedangkan evaluasi hasil untuk melihat tingkat pencapaian keberhasilan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Laporan evaluasi kemajuan siswa hendaknya bersifat kualitatif, melalui cara penilaian ini akan memberi gambaran yang nyata, riil dan tidak akan mengaburkan gambaran kemampuan yang sesungguhnya dicapai siswa. Laporan kemajuan siswa secara kuantitatif sering membingungkan orang tua karena memberikan gambaran yang tidak jelas. Misalnya, pemberian angka 8 tidak memberikan makna apa-apa, bahkan mungkin menyesatkan. PPI dalam pelaksanaannya sebaiknya diperbaiki secara terus menerus, setiap perubahan hendaknya merujuk

kepada pencapaian tujuan yang telah dan sedang dicapai serta temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan observasi selama proses pembelajaran berlangsung.

E. Sistem Pendukung (*Support System*)

Beberapa sistem pendukung yang diperlukan guna memperlancar model pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pendidikan yang diindividualisasikan, seperti berikut.

1. Sekolah dan Guru Ramah

Sekolah ramah (*welcoming school*) dan guru yang ramah (*welcoming teacher*) merupakan syarat utama dalam mengembangkan model layanan pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan. Sekolah dan guru ramah adalah sekolah dan guru yang tidak diskriminatif terhadap kondisi kecerdasan, fisik, sosial, emosi, kepercayaan, ras atau suku, golongan keyakinan, serta memahami dan menerima kebegaraman, mengutamakan pengembangan potensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan karakteristiknya.

Sekolah dan guru ramah merupakan sekolah dan guru yang mengakui keberagaman manusia sebagai anugerah Yang Maha Kuasa – sekolah dan guru yang mengakui eksistensi manusia, sekolah dan guru dan memiliki keyakinan bahwa semua individu manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan memahami bahwa setiap individu manusia memiliki harapan, bakat, minat yang berbeda-beda. Sekolah dan guru demikian akan melayani dan memperlakukan siswa dalam pembelajarannya sesuai dengan harapan, bakat, minatnya.

2. Pusat Sumber (*Resource Center*) dan sarpras

Sekolah ramah (*welcoming school*) dan guru ramah (*welcoming teacher*) sebagai syarat utama layanan pembelajaran pendidikan inklusif melalui program pengajaran yang diindividualisasikan, pelayanan pembelajaran akan berjalan semakin mulus apabila didukung oleh pusat sumber yang dapat membantu memberikan bantuan teknis kepada sekolah yang didalamnya ada anak berkebutuhan khusus.

Tugas dan fungsi pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan kebutuhan khusus yang profesional yang disebut sebagai guru kunjung (*iteneran teacher*). Tugas guru kunjung membantu guru sekolah reguler dalam membantu melakukan asesmen dan merancang pembelajaran serta memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, di samping itu, pusat sumber mempunyai tugas di samping menyediakan guru kunjung, juga menyediakan alat/

media belajar yang diperlukan anak berkebutuhan khusus, seperti penyediaan buku teks braille bagi tunanetra, memberikan pelatihan dan pendampingan tertentu bagi guru sekolah reguler, orang tua maupun anak berkebutuhan khusus. Pusat sumber merupakan tempat berkumpulnya para profesional.

Sekolah dan guru ramah adalah sekolah yang memiliki dan menyediakan prasarana asesibilitas yang memadai sehingga memudahkan anak dalam melakukan mobilitas, misalnya: tersedia jalan untuk anak yang menggunakan kursi roda, tersedia jalan yang tidak membahayakan anak yang mengalami gangguan penglihatan, penggunaan huruf-huruf braille pada setiap pintu ruangan.

3. Perluasan Peran dan Tugas SLB

Dalam perspektif layanan pendidikan inklusif melalui model pembelajaran yang diindividualisasikan, peran dan tugas SLB adalah sebagai pusat sumber bagi sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusif. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, pemerintah propinsi atau kabupaten kota harus dapat mengkoordinasikan antara sekolah reguler yang mengembangkan pendidikan inklusif dengan SLB. Misalnya, pembuatan SK guru SLB untuk melakukan sebagian waktu tugasnya di sekolah reguler yang mengembangkan pendidikan inklusif atau menugaskan untuk menjadi *iteneran teacher*. Perluasan peran dan tugas SLB dibangun melalui kemitraan dengan sekolah-sekolah yang mengembangkan pendidikan inklusif. Dengan demikian, tugas SLB tidak hanya melayani pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya (SLB), tetapi juga melayani pendidikan di sekolah-sekolah reguler yang mengembangkan pendidikan inklusif.

4. Kemitraan dengan lembaga terkait (Dinas Kesehatan, Depsos/Dinsos, Depag, Perindustrian, Hukum dan HAM)

Penyelenggaraan pendidikan inklusif akan semakin mulus dalam pelaksanaannya apabila sekolah mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait atau departemen-departemen terkait, misalnya dengan departemen kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan fisik, departemen sosial dalam bantuan asesibilitas, departemen perindustrian dalam mengembangkan kecakapan vokasional, departemen hukum dan HAM dalam perlindungan hukum.

5. Dukungan orang tua

Dukungan orang tua dan kerjasama dengan sekolah sangat diperlukan dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah dalam upaya optimalisasi potensi anak, kerjasama yang erat antara orang tua dan guru dapat menghasilkan solusi terbaik dalam melayani kebutuhan belajar anak di sekolah (Kremer, 1991). Keter-

libatan orang tua secara aktif terhadap pendidikan anak di sekolah, sangat penting dalam kaitannya dengan negosiasi dalam mencari solusi berkenaan dengan pendidikan anak, baik di sekolah maupun di rumah.

Keterlibatan orang tua dalam pendidikan, biasanya terbatas pada urusan pembiayaan operasional sekolah, kurang menyentuh pengembangan kebutuhan pembelajaran anak. Oleh karena itu, keterlibatan atau dukungan orang tua perlu dikembangkan terhadap persoalan pendidikan yang lebih luas, apabila akses orang tua ke sekolah lebih terbuka, permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi anak segera dapat ditanggulangi.

6. Kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam mengembangkan layanan pendidikan model pendidikan inklusif. Misalnya, pemerintah membuat regulasi yang mengatur sistem penerimaan siswa baru (PSB) bagi anak berkebutuhan khusus melalui satu pintu masuk, yaitu melalui sekolah reguler yang terdekat dengan lingkungan anak. Pemerintah membuat kebijakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota sebagai payung kekuatan yang dapat dijadikan landasan bergerak bagi sekolah, guru dan staff dalam memperlancar dan memuluskan pengembangan pembelajaran model pendidikan inklusif melalui program pembelajaran yang diindividualisasikan.

F. Kendala-kendala Implementasi Pendidikan Inklusi

Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental.

Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki ketrampilan yang

cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Alih-alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusi, justru menciptakan kondisi eksklusifisme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa difabel.

Sekolah inklusi yang berhubungan langsung dengan Angka Kredit sebagai bahan untuk kenaikan pangkat. Disisi lain, GPK disamping bertugas di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai sekolah induknya, mereka juga harus datang ke sekolah inklusi yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak jarang, jarak yang ditempuh tidaklah dekat, artinya tidak bisa hanya dengan berjalan kaki. Berkaitan dengan hal tersebut tidak dipungkiri mereka harus mengeluarkan biaya perjalanan. Hal ini diharapkan menjadi perhatian, khususnya dari pemangku tugas yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

Hal lain yang juga mesti jadi perhatian bagi penyelenggara sekolah inklusi adalah, penerimaan dan pengakuan warga sekolah terhadap keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah inklusi. Kehadiran mereka dinantikan dan dibutuhkan oleh warga sekolah khususnya guru kelas dan guru mata pelajaran. Mereka dalam bertugas bukan berdiri sendiri, namun saling berkolaborasi dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Tidak jarang terjadi *misunderstanding* antara pihak sekolah inklusi mengenai peran dari Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolahnya. Tanggung jawab terhadap anak berkebutuhan khusus di kelasnya tetap dipegang oleh guru kelas, bukan diserahkan sepenuhnya kepada GPK. Melainkan antara guru kelas dan GPK saling bekerjasama dalam melayani anak berkebutuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi anak, mengasesmen anak, sampai kepada menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) bagi anak tersebut. Program Pembelajaran Individual (PPI) ini terkadang juga tidak semua anak berkebutuhan khusus membutuhkannya. Di sinilah GPK berperan yaitu sebagai tempat berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, karena tidak semua guru di sekolah siapa dan bagaimana menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus serta apa pembelajaran yang dibutuhkan mereka sesuai dengan kekhususan anak tersebut.

Rendahnya peran berupa kinerja guru inklusif, dalam hal ini GPK, guru kelas dan guru mata pelajaran, diperkuat oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Tim Helen Keller Internasional (2011) di beberapa provinsi, salah satunya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Menjelaskan bahwa guru dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan hanya melalui program sosialisasi. Dalam konteks birokrasi program sosialisasi lebih ditujukan untuk persamaan persepsi dalam pelaksanaan suatu program daripada peningkatan kompetensi. Artinya guru belum men-

dapat bekal kompetensi yang memadai dalam mengajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada sekolah penyelenggara inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada Anak Berkebutuhan Khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak pada umumnya di kelas yang sama.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK). Dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Inklusi, ada 8 (delapan) komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan (stakeholder) sekolah inklusif, yaitu : (1) peserta didik; (2) kurikulum; (3) tenaga pendidik; (4) kegiatan pembelajaran; (5) penilaian dan sertifikasi; (6) manajemen sekolah; (7) penghargaan dan saksi; dan (8) pemberdayaan masyarakat. Tenaga Pendidik yang terdapat dalam point ke tiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi.

Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran, (Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkualifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusif. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi/latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan Anak Berkesulitan Belajar (ABK) dan guru kelas/mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya (Subagya, 2011).

Dengan demikian, mengingat pentingnya peran dan tugas dari Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, yang mencakup segala permasalahan Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah. Maka antara kewajiban dan hak mereka semestinyalah adanya keseimbangan. Sesuatu yang telah seimbang, alhasilnya akan dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK) sesuai kapasitasnya sebagai GPK, maka sekolah inklusi yang sebenarnya akan terwujud, bukan sekedar pelabelan dan formalitas semata.

1. Anak Yang Berhak Mendapatkan Pendidikan Inklusi

Anak yang memiliki hak di dalam layanan pendidikan inklusi merupakan semua anak dan tidak terkecuali dengan anak berkebutuhan khusus. Menurut Cassia Divina (2011) Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi atau fisik. Sedangkan menurut Mega Iswari (2008:40) anak berkebutuhan khusus adalah segolongan anak yang memiliki kelainan atau perbedaan sedemikian rupa dari anak rata-rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri itu dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal.

Mega Iswari (dalam Depdiknas, 2003) klasifikasi anak berkebutuhan khusus untuk keperluan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a. Tunagrahita (*mental retardation*)
- b. Kesulitan Belajar (*learning disabilities*)
- c. Gangguan perilaku atau gangguan emosional (*behavior disorder*)
- d. Gangguan bicara dan bahasa (*speech and language disorder*)
- e. Kerusakan pendengaran (*hearing impairments*)
- f. Kerusakan penglihatan (*vision impairments*)
- g. Kerusakan fisik dan gangguan kesehatan (*physical and other health impairments*)
- h. Cacat berat atau cacat ganda (*severe and multiple handicap*)
- i. Bekecerdasan luar biasa atau berbakat (*gifted and talented*)

Selain itu, juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa dikemukakan anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut.

- a. Kelainan Fisik, meliputi :
 - 1) Tunanetra (hambatan penglihatan)
 - 2) Tunarungu, (hambatan pendengaran)
 - 3) Tunadaksa (hambatan alat gerak tubuh)
- b. Kelainan Mental, meliputi:
 - 1) Tunagrahita ringan
 - 2) Tunagrahita sedang
 - 3) Tunagrahita berat
- c. Kelainan perilaku meliputi tunalaras
- d. Kelainan ganda atau tunaganda

Jadi menurut beberapa pendapat tersebut, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang diberikan kepada semua tanpa ada pengecualian, baik itu bagi anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan ini merupakan pendidikan yang menghilangkan labelisasi dan diskriminasi dimana semua anak berhak untuk menuntut ilmu di manapun dan kapanpun.

2. Hal-Hal Yang Diperlukan Dalam Penerapan Pendidikan Inklusi

Beberapa hal yang diperlukan dalam penerapan pendidikan inklusi disekolah meliputi 2 aspek. Menurut Ahmad Sopandi (Vaughn, Bos & Schumn, 2000) alternatif penempatan anak berkebutuhan khusus disekolah inklusi adalah sebagai berikut.

1. Alternatif Penempatan

- a. Kelas Reguler (kelas inklusi penuh). Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari dikelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama.
- b. Kelas Reguler dengan clusterk berkelainan belajar bersama anak normal dikelas reguler dalam kelompok khusus.
- c. Kelas reguler dengan *pull out*. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal lain dikelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- d. Kelas reguler dengan cluster dan *pull out*. Anak berkebutuhan khusus belajar dengan anak normal lainnya dikelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
- e. Kelas khusus dengan berbagai macam pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar didalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) dikelas reguler.
- f. Kelas khusus penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar didalam kelas khusus pada sekolah reguler, dengan demikian pendidikan inklusi tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada dikelas reguler setiap saat dengan semua pelajarannya.

Setiap sekolah inklusi dapat memilih model mana yang akan diterapkan, terutama bergantung kepada:

- a. Jumlah anak berkebutuhan khusus yang akan dilayani
- b. Jenis kelainan masing-masing anak
- c. Tingkat kelainan anak

- d. Ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan
- e. Sarana-prasarana yang tersedia

2. Komponen yang diperlukan

Mutu pendidikan dipengaruhi oleh mutu proses belajar mengajar, sementara itu, mutu proses belajar mengajar ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terikat antara satu sama lain, yaitu: (1) input siswa; (2) kurikulum; (3) tenaga kependidikan; (4) sarana prasarana; (5) dana; (6) pengelolaan; dan (7) lingkungan.

Selain konsep pendidikan harus ramah terhadap anak, pendidikan inklusi harus juga dilihat dan diperhatikan dari beberapa segi atau aspek yang menunjang. Hal yang menunjang bisa berupa penyediaan ruang kelas untuk belajar dan sarana penunjang lainnya. Selain itu komponen dalam pelaksanaannya juga harus tetap diperhatikan seperti guru pendamping khusus, dana dan lingkungan sehingga pendidikan inklusi dapat berkembang dengan baik. Apabila seluruh hal yang dibutuhkan dengan baik tersebut dapat tercapai. Pendidikan inklusi akan mampu berjalan sehingga menghapus paradigma bahwa pendidikan disekolah reguler hanya dapat dilakukan bagi anak-anak normal.

G. Manajemen Kelas dalam Pembelajaran di Sekolah Inklusi

1. Penataan Kelas

Penataan kelas yang sesuai dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Penataan kelas didesain berbentuk "U" lebih disarankan daripada membentuk sejajar pada saat pembelajaran. Dengan penataan berbentuk "U", akan memfasilitasi gerak anak lebih leluasa, kontak guru dengan anak yang memiliki hambatan pendengaran seperti tuna rungu, bagi anak hambatan tunanetra mempermudah mendengarkan penjelasan guru, bagi anak pengguna kursi roda akan memberi gerak yang lebih leluasa.

Penataan kelas bisa juga dilakukan tanpa meja dan kursi, ketika guru akan memberikan cerita atau permainan dalam kegiatan pembelajaran. Anak dapat dengan leluasa duduk di lantai dengan menggunakan tikar atau karpet.

Penataan kelas juga dapat didesain dengan menggabungkan meja dalam bentuk kelompok, saat akan memberikan diskusi sehingga interaksi antar siswa dan guru dapat terfasilitasi dengan baik dan terjadi kerjasama antar siswa.

Pembelajaran di luar kelas, sebaiknya juga perlu dilakukan untuk menghindari situasi yang monoton sehingga membosankan bagi anak-anak maupun guru. Disarankan agar guru memberikan instruksi yang jelas pada saat akan me-

lakukan pembelajaran di luar kelas, sehingga anak dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan terarah, sehingga akan memudahkan guru dalam memantau dan tetap dalam pendampingan guru.

Penataan kelas yang dilakukan secara variatif akan memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Guru sebaiknya mengatur penataan kelas secara periodik untuk menghindari kejenuhan guru dan anak. Ciptakan kondisi kelas yang nyaman, bersih, sehat, dan indah. Perputaran duduk antar anak juga perlu dilakukan pergantian secara periodik, dan disosialisasikan pada saat awal masuk sekolah, bahwa secara periodik akan berganti posisi tempat duduk, agar saling bersosialisasi dengan semua teman di kelas agar tercipta harmoni. Strategi ini juga dapat menjadikan pembelajaran berharga bagi anak non berkebutuhan khusus untuk membantu atau mendampingi kawannya yang berkebutuhan khusus dalam belajar dan saling kerjasama.

Pendampingan, motivasi dan bantuan dari anak non berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran lebih efektif dan menguatkan karena anak dapat mengutarakan pemahaman dari cara pandang anak dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Pemahaman, kemampuan dan penanaman yang baik bagi anak non berkebutuhan khusus untuk membantu dan memiliki rasa empati akan mendukung anak yang berkebutuhan khusus memiliki percaya diri. Dukungan dari guru, tanggapan positif dari guru terhadap anak berkebutuhan khusus akan berdampak positif pada anak non berkebutuhan khusus untuk turut serta berperan memberikan dukungan dan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus. Peran guru sebaiknya berpikir positif dan bersikap baik terhadap anak berkebutuhan khusus agar dapat dengan mudah beradaptasi dengan mereka sehingga mereka dapat tampil percaya diri dan termotivasi untuk belajar sesuai kemampuan anak.

Membangun situasi kelas yang ramah bagi anak berkesulitan belajar di kelas reguler memerlukan kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru yang mulia, ikhlas, memiliki kompetensi sosial yang tinggi, bersikap terbuka dan positif terhadap perbedaan anak, memiliki kemauan dan kemampuan serta percaya diri sebagai guru yang multi talenta karena memerlukan strategi pembelajaran yang khusus dan mendesain kelas yang disesuaikan dengan karakteristik anak yang memiliki kesulitan belajar dalam gangguan bahasa, gangguan perhatian dan aktivitas, gangguan memori, gangguan kognitif, gangguan sosial dan emosi. Guru berupaya menciptakan rasa senang dan ramah di kelas akan berdampak positif.

Situasi kelas yang nyaman bagi anak berkebutuhan khusus secara signifikan memberikan kenyamanan juga bagi anak non berkebutuhan khusus. Guru yang bisa menghargai perbedaan anak yang beragam apa adanya, dapat memotivasi

anak untuk mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan senang. Hal ini, seharusnya selalu diupayakan secara terus menerus oleh guru, sehingga guru akan merasakan perasaan yang nyaman dalam mengajar dan berdampak positif bagi psikologis guru itu sendiri, karena tidak merupakan beban yang berat dan melelahkan. Atmosfer kelas yang rileks akan menciptakan suasana yang saling menguntungkan bagi guru dan anak.

Penataan kelas dalam proses pembelajaran membutuhkan penataan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, antara lain seperti berikut.

1. Tunanetra. Untuk peserta didik yang tunanetra diperlukan ruang dan atau tempat untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, orientasi dan mobilitas.
2. Tunarungu. Untuk peserta didik yang tunarungu/gangguan komunikasi diperlukan ruang untuk melaksanakan latihan bina wicara, bina persepsi bunyi dan irama.
3. Tunagrahita. Untuk peserta didik yang tunagrahita/lamban belajar diperlukan ruang untuk melaksanakan latihan sensomotoris dan bina diri.
4. Tunadaksa. Untuk peserta didik yang tunadaksa diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan bina gerak dan bina diri.
5. Tunalaras. Untuk peserta didik yang tunalaras diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, dan latihan perilaku.
6. Anak Cerdas Istimewa. Untuk peserta didik yang anak cerdas istimewa diperlukan ruang untuk asesmen.

Penataan kelas atau pengaturan tempat duduk dalam proses belajar dapat mendukung interaksi belajar mengajar dan motivasi belajar anak. Artinya, pembelajaran berlangsung efektif dapat dimulai dari iklim kelas yang dapat menciptakan suasana belajar kondusif sehingga dapat memotivasi terjadinya interaktif antar siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa.

H. Metode Pembelajaran

Desain dan rencanakan pembelajaran di kelas untuk semua anak sejak jauh hari dan pastikan bahwa semua materi, media belajar yang diperlukan sudah disiapkan. Guru menyampaikan pembelajaran mengacu pada standar proses dengan menerapkan strategi dan menggunakan media yang variatif serta melaksanakan paikem sesuai karakteristik kebutuhan anak yang beragam.

Memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada peserta didik mengenai jenis hambatan, misalnya infeksi pada mata atau telinga yang dapat menyebabkan hambatan pada anak untuk melihat dan mendengar. Hambatan tersebut tidak

menular karena bukan penyakit. Salah satu metode untuk menjelaskan hal ini akan lebih efektif dengan mengundang narasumber untuk berkunjung ke kelas dan menjelaskan di kelas, sehingga anak dapat bersikap baik, ramah dan positif, bagi pembelajar yang memiliki hambatan khusus akan termotivasi, lebih percaya diri untuk meraih masa depannya sesuai dengan talentanya. Guru di sekolah reguler membantu dan menghantarkan anak ke masa depan yang lebih layak.

Guru memberikan tugas-tugas atau lembar pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak-anaknya. Pada prinsipnya pembelajaran di sekolah inklusif didesain berdasarkan program pembelajaran individual (PPI) yaitu sesuai dengan kemampuan anaknya. Bagi pembelajar reguler yang tidak memiliki hambatan khusus tetap menggunakan standar penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 tahun 2014.

Guru memberikan teladan untuk anak reguler dalam bersikap yang positif dan guru memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam belajar. Guru memberikan kesempatan kepada semua anak untuk berkembang dan berkolaborasi. Guru memiliki harapan yang positif terhadap masa depan anaknya, dengan memberikan motivasi kepada anak mengatakan tidak ada kata gagal dalam hal belajar. Guru memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan berbagai metode dan pendekatan yang bervariasi, pendekatan mengajar yang terstruktur dengan baik dan memiliki kepercayaan diri sebagai guru yang siap membantu anak.

I. Layanan Kebutuhan Khusus Dalam Pembelajaran di Sekolah Inklusif

Sekolah bertanggung jawab menyiapkan anak menjadi manusia dewasa yang memiliki ketrampilan sesuai talentanya, memiliki kompetensi yang sesuai standar nasional pendidikan. Sekolah adalah sebuah tim pencetak anak yang berkarakter Indonesia, berwawasan global, menyiapkan menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Tim pencetak dalam hal ini adalah guru sebagai ujung tombak di kelas yang mendampingi anak, perlu memiliki wawasan tentang proses layanan pembelajaran yang siap melayani kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan karakteristik dan setiap kebutuhan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus maupun yang non kebutuhan khusus.

Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang menjadi tim terdepan di sekolah perlu memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Layanan pendidikan di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap anak, berikut layanan bagi anak.

1. Anak Tunanetra (*Visually Impaired*)

Anak Tunanetra (*Visually Impaired*) adalah mereka yang penglihatannya menghambat untuk menfungsikan dirinya untuk berinteraksi. Dengan demikian diperlukan akses lingkungan yang mengarah pada usaha untuk menghilangkan batas-batas yang menyebabkan keterbatasan pada anak tunanetra. Tunanetra perlu pendampingan dalam dalam menguasai konsep. Konsep merupakan basis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya.

Alat pendidikan khusus anak tunanetra antara lain: (1) reglet dan pena; (2) mesin tik Braille; (3) computer dengan program Braille, (4) printer Braille; (5) abacus; (6) calculator bicara; (7) kertas braille; (8) penggaris Braille; (9) kompas bicara. Alat bantu pendidikan bagi anak tunanetra sebaiknya menggunakan materi perabaan dan pendengaran. Alat bantu perabaan sebagai sumber belajar menggunakan buku-buku dengan huruf Braille. Alat bantu pendengaran sebagai sumber belajar di antaranya *talking books* (buku bicara).

Alat peraga audio yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Alat peraga tersebut antara lain: (1) benda asli: makanan, minuman, binatang peliharaan; (2) benda asli yang diawetkan: binatang liar atau buas; (3) benda asli yang dikeringkan (insektarium); (4) benda/model tiruan, model kerangka manusia, model alat pernafasan, dan lain-lain; (5) gambar timbul sesuai dengan bentuk asli; grafik, diagram dan lain-lain; (6) gambar timbul skematik; rangkaian listrik, denah, dan lain-lain; (7) peta timbul; provinsi, pulau, negara, daratan, benua, dan lain-lain; (8) globe timbul; dan (9) papan baca.

2. Anak Tunadaksa

Anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan segi anatominya (istilah yang digunakan dalam kedokteran). Fungsi fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan disabilitas dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sosialnya. Guru memperhatikan latar belakang medisnya, kemampuan gerakannya, bagaimana komunikasinya, bagaimana keadaan anak tersebut apakah menggunakan alat bantu sehingga guru dapat mempersiapkan lingkungan yang mudah diakses oleh anak tunadaksa.

3. Anak Tunarungu

Anak tunarungu ditandai dengan gejala sering mengeluh tentang sakit telinganya, sering meminta diulang apa yang diucapkan pembicara, artikulasi berbicaranya kurang jelas, secara sederhana peserta didik tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi bagi kehidupan sehari-hari. Guru disarankan hendaknya berdiri di tengah paling depan kelas sehingga anak me-

miliki peluang untuk mudah membaca gerakan bibir guru. Guru berbicara hendaknya jangan membelakangi anak, usahakan posisi guru berhadapan dan bila memungkinkan diupayakan kepala guru searah dengan kepala anak.

4. Anak Tunagrahita

Anak tunagrahita ditandai dengan fungsi intelektual umum yang secara signifikan di bawah rata-rata normal. Dalam belajar keterampilan membaca, keterampilan motorik, keterampilan lainnya adalah sama seperti anak normal pada umumnya. Guru mendampingi anak melakukan keterampilan yang diminatinya dan terus memberikan dukungan dan jangan dibatasi oleh jumlah waktu. Jika anak tunagrahita mempunyai kesulitan dapat berkoordinasi dengan narasumber atau akan mendapat bimbingan dari Guru Pembimbing Khusus (GPK) dari pusat sumber terdekat.

5. Anak Tunalaras

Anak tunalaras ditandai dengan hambatan tingkah laku (*behavioral disorders*). Tingkah laku yang menyimpang dari standar yang diterima umum. Guru melakukan pendekatan dan melakukan interaksi yang baik terhadap anak tunalaras sehingga pendekatan yang dilakukan guru akan mengatasi masalah disabilitas tingkah laku pada anak. Interaksi dan pendekatan yang bersahabat akan menjadikan solusi terbaik agar membantu anak yang mengalami hambatan tingkah-laku sosial dan emosi, agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam menggalakkan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja.

6. Anak Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (CIBI)

Anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa ditandai dengan kemampuan intelektual yang tinggi dan kreativitas yang tinggi. Guru memberikan program pengayaan untuk mengembangkan kemampuan eksplorasinya. Guru memberikan kesempatan yang luas untuk menjelajahi sendiri bidang yang diminati dan terus memberikan dukungan dan jangan dibatasi oleh jumlah waktu.

J. Pedoman Praktis di Kelas Sekolah Inklusi

Sekolah bertanggung jawab menyambut semua anak dalam lingkungan belajar yang aman, bebas dari hukuman fisik, menghargai keragaman dan perbedaan dasar seperti bahasa, gender, ekonomi, kasta dan kemampuan, dengan

merespon positif terhadap berbagai perbedaan yang ada sehingga tercipta sekolah yang ramah anak. Keterlibatan orang tua dan anggota masyarakat dalam pendidikan menjadi salah satu percepatan mencapai tujuan pendidikan.

Tujuan pendidikan akan tercapai jika sistem pendidikan memberikan kesempatan yang melayani kebutuhan pembelajaran siswa yang beragam latar belakang sosial dan budaya, serta karakteristik individu dalam hal motivasi, kemampuan, gaya dan irama belajar sehingga siswa dapat terakomodir keterampilan dan pengetahuannya. Guru sebagai profesi di lembaga/sekolah yaitu melayani siswa di kelas mampu menerima perbedaan dan keberagaman dalam kelas serta memfasilitasi kebutuhan setiap siswa.

Pendidikan untuk semua membutuhkan komitmen yang kuat, konsisten dan terpadu. Deskriminasi yang berhubungan dengan etnis, bahasa, gender, kesejahteraan, kemampuan individu menjadi hambatan dan kegagalan dalam mensukseskan tujuan pendidikan bagi setiap warga negara. Berikut ini syarat fundamental bagi guru sebagai pilar yang kokoh untuk memutuskan berbagai kesenjangan dan perbedaan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang menghargai perbedaan melalui pengembangan budaya di sekolah seperti berikut.

1. Guru menciptakan iklim belajar yang kondusif sehingga tercipta rasa nyaman bagi anak dan guru.
2. Guru memiliki percaya diri yang penuh dengan kemampuannya memberikan bantuan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi dan pengayaan.
3. Guru memiliki optimisme dan harapan yang tinggi untuk menjembatani anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas memiliki masa depan yang lebih baik.
4. Guru menyusun program pembelajaran individual (PPI) bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum.
5. Guru berupaya keluar zona nyaman dengan mengembangkan kompetensi mempelajari dasar-dasar keterampilan khusus seperti baca tulis Braille dan bahasa isyarat dari guru SLB atau berbagai sumber.
6. Guru melibatkan anak reguler untuk berperan aktif menjadi teman sebaya untuk mendukung dan membantu menciptakan suasana yang nyaman.
7. Guru mengelola kelas sesuai dengan karakteristik anak dan mengupayakan pembelajaran di kelas agar tidak monoton atau membosankan bagi guru dan anak serta memperhatikan kemudahan interaksi dan komunikasi antara guru dan anak serta antara anak dan anak.

8. Guru menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang aktif dan kreatif sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis.
9. Guru membuka jejaring dengan *stakeholder* dan sumberdaya lain untuk mendukung pengajaran.
10. Guru melaporkan kepada Kepala Sekolah baik secara informal maupun formal (laporan tertulis) mengenai kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan terkait aksesibilitas, materi, perkembangan belajar anak, sumber daya manusia dari Pusat Sumber, dan lain lain.

BAB VI

KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang

Sekolah inklusi adalah sekolah yang menyediakan layanan pendidikan bagi semua peserta didik normal maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus di kelas yang sama. Sekolah inklusif merupakan tempat pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk mendapat perlakuan secara proporsional dari semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsekuensi dari kondisi sekolah inklusif menuntut adanya penyesuaian strategi pembelajaran dalam upaya melaksanakan kurikulum yang telah disahkan secara nasional.

Adanya pelaksanaan strategi pembelajaran yang relatif bervariasi akan berdampak pada penyiapan jumlah, kualifikasi, sertifikasi tenaga pendidik, penyiapan sarana dan prasarana terutama untuk menunjang peserta didik yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Untuk itu, sekolah inklusif perlu menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan jenis ABK.

Kebutuhan sarana dan prasarana dikemas dalam buku pedoman Kebutuhan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusi. Dalam buku ini disajikan kebutuhan peralatan, sumber belajar dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

1. Anak Tunanetra

Peralatan yang dibutuhkan meliputi: alat assesmen penglihatan, alat orientasi dan mobilitas, alat bantu pelajaran/akademik, alat bantu visual, alat bantu auditif, dan alat latihan fisik.

2. Anak Tunarungu

Peralatan yang dibutuhkan meliputi: alat assesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi dan irama, alat bantu pelajaran/akademik, dan alat latihan fisik.

3. Anak Tunagrahita

Peralatan yang dibutuhkan meliputi: alat assesmen kemampuan akademik dan penyesuaian diri, alat latihan bina diri, alat dan pengembangan konsep dan simbol bilangan, alat pengembangan kreativitas, daya pikir dan kon-sentrasi, alat pengajaran bahasa, dan latihan perseptual motorik.

4. Anak Tunadaksa

Peralatan yang dibutuhkan meliputi: alat Assesmen, alat latihan fisik, alat bina diri dan bina gerak, alat *orthotic* dan *prothetic*, dan alat bantu pelajaran/ akademik.

5. Anak Tunalaras

Peralatan yang dibutuhkan meliputi: alat assesmen gangguan perilaku, alat terapi perilaku, dan alat terapi permainan.

6. Anak Berbakat

Peralatan yang dibutuhkan meliputi: alat assesmen, dan alat bantu pelajaran/ akademik antara lain: laboratorium IPA, bahasa, komputer.

7. Anak Berkesulitan Belajar

Peralatan yang dibutuhkan meliputi: alat assesmen kemampuan belajar, dan alat bantu belajar/ akademik (kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar bahasa, kesulitan belajar menulis, kesulitan belajar matematika).

B. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Mekanisme

Dalam menentukan kebutuhan dan pengelolaan sarana prasarana perlu memperhatikan mekanisme berikut.

- a. SLB Pembina dan atau SLB terdekat dijadikan tempat sebagai *center assesment* bagi anak yang diduga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Penempatan layanannya dirujuk ke sekolah biasa (sekolah inklusif) yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
- a. Pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan pada sekolah inklusif adalah hanya yang bersifat prioritas utama (mudah dioperasikan/tidak memerlukan tenaga operasional khusus, dan relatif mudah diadakan/murah serta dapat dibuat sendiri oleh pengelola pendidikan ABK).
- b. Penentuan jumlah sarana dan prasarana didasarkan pada rasio pengguna dengan sarana yang diadakan (berprinsip pada faktor guna tinggi).
- c. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan yang ada pada SD reguler dapat dimanfaatkan anak berkebutuhan khusus (ABK), hanya memerlukan sedikit modifikasin dalam penggunaannya.
- d. Guru sekolah biasa yang menangani anak berkebutuhan khusus hanya guru yang telah dibekali pengetahuan dan kemampuan menangani ABK termasuk dalam pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana.

- e. Cara pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana dapat melihat pada SLB terdekat atau memanggil guru SLB untuk datang memberi contoh mengenai penggunaan alat yang terdapat di sekolah inklusif.
- f. Jumlah guru reguler di sekolah inklusi tidak perlu ditambah tetapi disediakan guru pendidikan khusus (GPK) dari SLB yang dijadikan *center* (bisa SLB pembina atau SLB terdekat).

2. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah inklusif tidak berbeda dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah reguler pada umumnya, seperti berikut.

- a. Ruang kelas beserta perlengkapannya (perabot dan peralatan)
- b. Ruang praktikum (laboratorium) beserta perangkatnya (perabot dan peralatan).
- c. Ruang perpustakaan beserta perangkatnya (perabot/peralatan).
- d. Ruang serbaguna beserta perlengkapannya (perabot/peralatan).
- e. Ruang BP/BK beserta perlengkapannya (perabot dan peralatan)
- f. Ruang UKS beserta perangkatnya (perabot dan peralatan)
- g. Ruang kepala sekolah, guru, dan tata usaha, beserta perabotnya (perabot dan peralatan).
- h. Lapangan olahraga, beserta peralatannya (perabot dan peralatan)
- i. Ruang ibadah, beserta perangkatnya (perabot dan peralatan)
- j. Toilet, ruang kantin, dan sebagainya.
- k. Ruang sumber (tempat alat bantu belajar ABK)

3. Sarana Khusus untuk ABK

Penentuan sarana khusus untuk setiap jenis kelainan didasarkan pada skala prioritas artinya mengacu pada kondisi dan kebutuhan peserta didik.

a. Anak Tunanetra

1) Alat Asesmen

Bervariasinya kelainan penglihatan pada anak tunanetra menuntut adanya pemeriksaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Asesmen kelainan penglihatan dilakukan untuk mengukur kemampuan penglihatan dalam bentuk geometri, mengukur kemampuan penglihatan dalam mengenal warna, serta mengukur ketajaman penglihatan. Alat yang digunakan untuk assesmen penglihatan anak tunanetra dapat seperti di bawah ini.

- a) Snellen Chart (alat untuk mengetes ketajaman penglihatan dalam bentuk huruf dan simbol E).
- b) Ishihara Test (alat untuk mengetes buta warna).
- c) SVR (*Trial Lens Set*) (alat untuk mengukur ketajaman penglihatan).
- d) Snellen Chart Electronic (alat untuk mengetes ketajaman penglihatan sistem elektronik-bentuk huruf dan simbol E).

2) Orientasi dan Mobilitas

Pada umumnya anak tunanetra mengalami gangguan orientasi mobilitas baik sebagian maupun secara keseluruhan. Untuk pengembangan orientasi mobilitasnya dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat berikut ini.

- a) Tongkat panjang (alat bantu mobilitas berupa tongkat panjang yang terbuat dari alumunium).
- b) Tongkat Lipat (alat bantu mobilitas berupa tongkat yang dapat dilipat terbuat dari alumunium).
- c) Bola bunyi (bola sepak yang mengeluarkan bunyi).
- d) Pelindung kepala (alat pengaman kepala dari benturan/helm sport).

3) Alat Bantu Pembelajaran /Akademik

Layanan pendidikan untuk anak tunanetra selain membaca, menulis, berhitung juga mengembangkan sikap, pengetahuan dan kreativitas. Akibat kelainan penglihatan anak tunanetra mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung.

Untuk membantu penguasaan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti berikut ini.

Peta Timbul (peta tiga dimensi bentuk relief).

- a) Abacus (alat bantu berhitung).
- b) Penggaris Braille (penggaris skala ukur bentuk relief).
- c) Blokies (sejumlah dadu dengan simbol Braille dengan papan berkotak)
- d) Papan Baca (alat untuk melatih membaca).
- e) Meteran Braille (alat untuk mengukur panjang/lebar dengan skala ukur dengan simbol Braile).
- f) Kompas Braille (pengukur posisi arah angin dengan tanda Braille).
- g) *Talking Watch* (jam tangan elektronik dapat mengeluarkan suara).
- h) Gelas Rasa (gelas untuk mengukur tingkat sensitifitas rasa).
- i) Botol Aroma (botol berisi cairan untuk mengukur tingkat sensitifitas bau).
- j) *Braille Kit* (perlengkapan pengenalan huruf dan angka Braile).
- k) Mesin tik Braille (mesin tik dengan huruf Braile).
- l) Kompas bicara (penunjuk arah angin dengan suara).
- m) Kamus bicara (kamus yang dapat mengeluarkan suara berbentuk CD).

- n) Jam tangan Braille (jam tangan dengan huruf Braille).
- o) *Puzzle Ball* (puzzle bentuk potongan bola/lingkaran).
- p) Model Anatomi Mata (Model anatomi mata tiga dimensi dan dapat dirakit).
- q) Globe Timbul (bola dunia tiga dimensi).
- r) Puzzle Buah-buahan (puzzle bentuk potongan buah-buahan).
- s) Puzzle Binatang (puzzle bentuk potongan binatang).
- t) Bentuk-bentuk Geometri (puzzle bentuk potongan geometris/ peraturan).
- u) *Collor Sorting Box* (alat untuk melatih ketajaman penglihatan melalui diskriminasi warna).
- v) *Reglet & Stylus* (alat tulis Braille).
- w) Komputer dan Printer Braille (komputer dan printer huruf Braille).

4) Alat Bantu Visual (alat bantu penglihatan)

Kelainan penglihatan anak tunanetra bervariasi dari yang ringan (*low vision*) sampai yang total (*total blind*). Untuk membantu memperjelas penglihatannya pada anak tunanetra jenis *Low vision* dapat digunakan alat bantu sebagai berikut.

- a) Magnifier Lens Set (alat bantu penglihatan bagi *low vision* bentuk hand and standing berbagai ukuran).
- b) CCTV (Closed Circuit Television/alat bantu baca untuk anak *low vision* berupa TV monitor).
- c) View Scan (alat bantu baca untuk anak *low vision* berupa scanner).
- d) Televisi (TV monitor/pesawat penerima gambar jarak jauh).
- e) Prism monocular (alat bantu melihat jauh).

5) Alat Bantu Auditif (alat bantu pendengaran)

Untuk melatih kepekaan pendengaran anak tunanetra dalam mengikuti pelajaran dapat digunakan alat-alat seperti berikut.

- a) Tape Rekorder Doble Dek (alat rekam/tampil suara model dua tempat kaset).
- b) Alat Musik Pukul (alat-alat musik jenis pukul/perkusi).
- c) Alat Musik Tiup (alat-alat musik jenis tiup).

6) Alat Latihan Fisik

Pada umumnya anak tunanetra mengalami kesulitan dan kelambanan dalam melakukan aktivitas fisik/motorik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan fisiknya yang dapat menimbulkan kerentanan terhadap kesehatannya.

Untuk mengembangkan kemampuan fisik alat yang dapat digunakan untuk anak tunanetra adalah sebagai berikut.

- a) Catur tunanetra (papan catur dengan permukaan tidak sama untuk kotak hitam dan putih, sehingga buah catur tidak mudah bergeser).
- b) Bridge tunanetra (kartu bridge dilengkapi huruf Braile).
- c) Sepak bola dengan bola berbunyi (bola sepak yang dapat menimbulkan bunyi).
- d) Papan Keseimbangan (papan titian untuk melatih keseimbangan pada saat berjalan).
- e) *Power Rider* (alat untuk melatih kecekatan motorik).
- f) *Static Bicycle* (speda permanen/tidak dapat melaju).

b. Tunarungu/gangguan komunikasi

1) Alat Asesmen

Bervariasinya tingkat kehilangan pendengaran pada anak tunarungu/gangguan komunikasi menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Asesmen kelainan pendengaran dilakukan untuk mengukur kemampuan pendengaran, atau untuk menentukan tingkat kekuatan suara/sumber bunyi. Alat yang digunakan untuk asesmen pendengaran anak tunarungu adalah seperti berikut.

- a) Scan Test (alat untuk mendeteksi pendengaran tanpa memerlukan ruang khusus).
- b) Bunyi-bunyian (alat yang dapat menimbulkan berbagai jenis bunyi).
- c) Garputala (alat pengukur getar bunyi/suara atau tinggi nada).
- d) *Audiometer & Blanko Audiogram* (alat kemampuan pendengaran dengan akurasi tinggi melalui tes audiometri).
- e) *Mobile Sound Proof* (kotak kedap suara sebagai perangkat tes audiometri).
- f) *Sound level meter* (alat pengukur kuat suara).

2) Hearing Aids (Alat Bantu Dengar)

Anak tunarungu mengalami gangguan pendengaran baik dari ringan sampai berat/total. Untuk membantu pendengarannya dapat dilakukan menggunakan alat bantu dengar (*hearing aid*) seperti berikut ini.

- a) Model saku (alat bantu dengar model saku).
- b) Model belakang Telinga (alat bantu dengan model ditempel di belakang telinga).
- c) Model dalam Telinga (alat bantu dengan model dimasukkan langsung ke dalam telinga).

d) Model kacamata (alat bantu dengar model-kacamata yang diperuntukan sekaligus kelainan penglihatan).

Sementara itu, untuk membantu pendengaran dalam proses pembelajaran dapat digunakan alat-alat berikut.

- a) *Hearing Group* (alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran)
- b) *Loop Induction System* (alat bantu dengar yang dapat dipergunakan secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran dilengkapi head sets).

3) Latihan Bina Persepsi Bunyi dan Irama

Pada umumnya anak tunarungu mengalami gangguan pendengaran baik ringan maupun secara keseluruhan/total sehingga mengakibatkan gangguan atau hambatan komunikasi dan bahasa. Untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi, bahasa dapat dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut.

- a) Cermin (alat untuk memantulkan gambar/bercermin).
- b) Alat latihan meniup (seruling, kapas, terompet, peluit untuk merangsang pernafasan dalam rangka persiapan perbaikan bicara).
- c) Alat musik perkusi (gong, gendang, tamborin, triangle, drum, kentongan).
- d) Sikat getar (sikat dengan bulu-bulu khusus untuk melatih kepekaan terhadap bunyi/getaran).
- e) Lampu aksen (kontrol suara dengan lampu indikator).
- f) Meja latihan wicara (meja tempat anak belajar berbicara)
- g) *Speech and Sound Simulation* (alat pelatihan bina bicara yang dilengkapi meja dan cermin).
- h) *Spatel* (alat bantu untuk membetulkan posisi organ artikulasi terbuat dari stainless steel).
- i) TV/VCD.

4) Alat Bantu Belajar /Akademik

Layanan pendidikan untuk anak tunarungu mencakup mem-baca, menulis, berhitung, mengembangkan perilaku positif, pengetahuan, dan kreativitas. Karena mengalami kelainan pada pendengarannya, maka anak tunarungu mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik anak tunarungu antara lain seperti berikut.

- a) Miniatur benda (bentuk benda sebenarnya dalam ukuran kecil).
- b) *Finger Alphabet* (bentuk simbol huruf dengan isyarat jari tangan).
- c) Silinder (bentuk-bentuk benda silindris).
- d) Kartu kata (kartu yang bertuliskan kata).
- e) Kartu kalimat (kartu yang bertuliskan kalimat singkat).
- f) Menara segitiga (susunan bentuk segi tiga dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar).
- g) Menara lingkaran (susunan gelang dari diameter kecil sampai besar).
- h) Menara segi empat (susunan bentuk segi empat dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar).
- i) Peta dinding (peta batas wilayah, batas pulau dan batas negara yang dapat ditempel di dinding).
- j) Model geometri (model-model bentuk benda beraturan).
- k) Anatomi telinga (alat bantu menerangkan susunan bagian telinga).
- l) Model telinga (model bagian telinga tiga dimensi).
- m) Torso setengah badan (model anatomi tubuh setengah badan).
- n) Puzzle buah-buahan (potongan-potongan bagian dari buah-buahan).
- o) Puzzle binatang (puzzle bentuk potongan binatang).
- p) Puzzle konstruksi (puzzle bentuk konstruksi/rancang bangun sederhana).
- q) Atlas (peta batas wilayah, batas pulau dan batas Negara).
- r) Globe (bola dunia yang menggambarkan benua dan batas-batas negara di dunia).
- s) Miniatur Rumah Adat (contoh rumah-rumah adat dalam ukuran kecil dan proporsional).
- t) Miniatur Rumah ibadah (contoh rumah-rumah ibadah dalam ukuran kecil dan proporsional).

5) Alat Latihan Fisik

Untuk mengembangkan kemampuan fisik anak tunarungu, alat-alat yang dipergunakan adalah sebagai berikut.

- a) Bola dan Net Volley
- b) Bola Sepak
- c) Meja Pingpong
- d) Raket, Net Bulutangkis dan *Suttle Cock*
- e) *Power Rider* (alat untuk melatih kecepatan motorik)
- f) *Static Bicycle* (sepeda statis)

c. Anak Tunagrahita/Anak Lamban Belajar

1) Alat asesmen

Bervariasinya tingkat intelegensi dan kognitif anak tunagrahita, menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Asesmen pada anak tunagrahita dilakukan untuk mengukur tingkat intelegensi dan kognitif, baik secara individual maupun kelompok. Alat untuk asesmen anak tunagrahita dapat digunakan seperti berikut.

- a) Tes Intelegensi WISC-R (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang model WISC-R).
- b) Tes Intelegensi Stanford Binet (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang model Stanford Binet).
- c) *Cognitive Ability test* (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dikuasai).

2) Latihan Sensori Visual

Tingkat kecerdasan anak tunagrahita bervariasi dari yang ringan sampai yang berat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berpikir abstrak dan mengalami kesulitan dalam membedakan warna dan mengenali bentuk. Untuk membantu sensori visual anak tunagrahita dapat digunakan alat sebagai berikut.

- a) Gradasi Kubus (bentuk-bentuk kubus dengan ukuran yang bervariasi untuk melatih kemampuan/pemahaman volume kubus).
- b) Gradasi Balok 1 (bentuk-bentuk balok dengan ukuran yang bervariasi satu warna).
- c) Gradasi Balok 2 (bentuk-bentuk balok dengan ukuran yang bervariasi berbagai warna).
- d) Silinder 1 (bentuk-bentuk silinder untuk melatih motorik mata-tangan untuk usia dini).
- e) Silinder 2 (bentuk-bentuk silinder dengan ukuran yang bervariasi).
- f) Silinder 3 (bentuk-bentuk silinder dengan ukuran, warna dan bahan yang bervariasi).
- g) Menara segitiga (susunan bentuk segi tiga dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar).
- h) Menara lingkaran (susunan gelang dari diameter kecil sampai besar).
- i) Menara segi empat (susunan bentuk segi empat dengan ukuran berurut dari kecil sampai besar).
- j) Kotak Silinder (tempat menyimpan silinder-silinder alat bantu mengajar/belajar).

- k) Multi sensori (alat untuk melatih sensori seperti pemahaman bentuk, ukuran, warna atau klasifikasi objek dan tekstur).
- l) Puzzle Binatang (puzzle bentuk potongan gambar binatang).
- m) Puzzle Konstruksi (puzzle bentuk konstruksi/rancang bangun sederhana).
- n) Puzzle Bola (puzzle bentuk potongan bola/lingkaran).
- o) Boks Sortir Warna (alat bantu untuk melatih persepsi penglihatan melalui diskriminasi warna).
- p) Geometri Tiga Dimensi (model-model bentuk benda beraturan tiga dimensi).
- q) Papan Geometri (Roden Set) (papan latih bentuk beraturan model Roden).
- r) Kotak Geometri (Box Shape) (kotak berpenutup berlubang sesuai bentuk-bentuk beraturan).
- s) Konsentrasi Mekanis (alat latih konsentrasi gerak mekanik).
- t) *Formmenstockbox Mit* (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik mata-tangan dan konsep ruang).
- u) *Formmenstockbox* (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik mata-tangan dan konsep ruang).
- v) *Scheiben-Stepel Puzzle* (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik pergelangan tangan untuk kesiapan menulis).
- w) *Formstec-Stepel Puzzle* (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih motorik dan konsentrasi).
- x) *Fadeldreicke* (alat untuk melatih ketajaman penglihatan dan koordinasi mata-tangan).
- y) *Schmetterling Puzzle* (melatih hubungan ruang dan bentuk dalam kesatuan objek).
- z) Puzzle Set (berbagai puzzle untuk mengembangkan kreativitas, konsep ruang dan melatih ingatan).

3) Latihan Sensori Perabaan

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk membedakan dan mengenali bentuk. Untuk membantu sensori perabaan anak tunagrahita dapat digunakan alat sebagai berikut.

- a) Keping Raba 1 (keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur bervariasi).
- b) Keping Raba 2 (Gradasi Keping) (keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur/tingkat kehalusan tinggi).
- c) Keping Raba 3 (Gradasi Kain) (berbagai kain dengan tingkat kekasaran/pakan/serat kain yang bervariasi).
- d) Alas Raba (*Tactile foot*) (melatih kepekaan kaki pada lantai yang dikasarkan/dilapis lantai bertekstur kasar).

- e) *Fub and Hand* (Siluet tangan dan kaki).
- f) *Puzzle Pubtastplatten* (plat fuzle dengan siluet).
- g) *Tactila* (melatih kepekaan perabaan melalui diskriminasi taktual dan visual).
- h) *Balance Labirinth Spirale* (alat latihan keseimbangan gerak tangan pada arah yang berbeda berbentuk spiral timbul).
- i) *Balance Labirinth Maander* (alat latihan keseimbangan gerak tangan pada arah berbeda berbentuk segi empat timbul).

4) Sensori Pengecap dan Perasa

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk membedakan rasa dan membedakan aroma/bau. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan sensori pengecap dan perasa. Alat yang digunakan melatih sensori pengecap dan perasa dapat berupa:

- a) Gelas Rasa (gelas yang berisi cairan/serbuk untuk mengukur tingkat sensitifitas rasa).
- b) Botol Aroma (botol berisi cairan/serbuk untuk mengukur tingkat sensitifitas bau).
- c) *Tactile Perception* (untuk mengukur analisis perabaan).
- d) *Aesthesiometer* (untuk mengukur kemampuan rasa kulit).

5) Latihan Bina Diri

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk merawat diri sendiri. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan bina diri. Alat yang digunakan latihan bina diri dapat berupa:

- a) Berpakaian 1 (bentuk kancing)
- b) Berpakaian 2 (bentuk resleting)
- c) Berpakaian 3 (bentuk tali)
- d) Dressing Frame Sets (rangka pemasangan pakaian-kancing, resleting dan tali dikemas dalam satu bingkai)
- e) Sikat Gigi
- f) Pasta Gigi dan lain sebagainya

6) Konsep dan Simbol Bilangan

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk memahami konsep dan simbol bilangan. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan memahami konsep dan simbol bilangan. Alat yang digunakan melatih konsep dan simbol bilangan dapat berupa:

- a) Keping Pecahan (peraga bentuk lingkaran menunjukkan bagian benda, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, dst).

- b) Balok Bilangan 1 (alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan satuan).
- c) Balok Bilangan 2 (alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan puluhan).
- d) Geometri Tiga Dimensi (berupa bentuk-bentuk geometri tiga dimensi yaitu: bulat, lonjong, segitiga, segiempat, limas, piramid).
- e) Abacus (alat untuk melatih pemahaman konsep bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan nilai tempat).
- f) Papan Bilangan (Cukes) (berfungsi untuk melatih kemampuan memahami bilangan dan dasar-dasar operasi hitung).
- g) Tiang Bilangan (*Seguin Bretter*) (papan bersekat dengan angka puluhan dan nilai tempat, berfungsi melatih kemampuan memahami bilangan puluhan dan nilai tempat).
- h) Kotak Bilangan (kotak bersekat dilengkapi angka-angka 1 s.d 10 dengan lubang sekat 50, berfungsi memperkenalkan konsep nilai dan simbol bilangan 1 sampai dengan 10).

7) Kreativitas, Daya Pikir dan Konsentrasi

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berkreaitivitas dan pada daya pikirnya. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan memahami kreativitas, daya pikir dan konsentrasi. Alat yang digunakan dapat berupa:

- a) Tetris (kotak berisi potongan kayu untuk disusun beraturan sesuai petunjuk gambar).
- b) Box konsentrasi mekanis (alat latih konsentrasi gerak mekanik bentuk kotak/ boks).
- c) Fuzle konstruksi (puzzle bentuk konstruksi/rancang bangun sederhana).
- d) Rantai persegi (mata rantai persegi yang dapat disusun/ dirangkai menjadi bentuk bangun).
- e) Rantai bulat (mata rantai bulat yang dapat disusun/dirangkai menjadi bentuk bangun bola).
- f) Lego/Lazi (potongan-potongan dengan kaki dan kepala yang dapat saling dipasangkan membuat bangun tertentu).

8) Alat Pengajaran Bahasa

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan berbahasa. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan berba-hasa. Alat yang digunakan melatih berbahasa dapat berupa:

- a) Alphabet Loweincase (simbol alphabet/abjad huruf besar).
- b) Alphabet Fibre Box (melatih membaca permulaan dengan cara merangkai huruf menjadi kalimat bahan dari fibre).

- c) Pias Kata (simbol kata untuk disusun menjadi kalimat).
- d) Pias Kalimat (pias-pias kata dan kalimat dilengkapi dengan gambar).

9) Latihan Perseptual Motor

Keterbatasan intelegensi dan kognitif mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam perseptual motornya. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan perseptual motor. Alat yang digunakan melatih perseptual motor dapat berupa:

- a) Bak Pasir (melatih kreativitas bentuk).
- b) Papan Keseimbangan (papan untuk melatih keseimbangan tubuh).
- c) Gradasi Papan Titian (papan untuk melatih keseimbangan tubuh dalam bentuk bertingkat).
- d) Keping Keseimbangan (tangga bertali –papan berpenopang).
- e) *Power Rider* (alat untuk melatih kecekatan motorik).
- f) *Balancier Zehner* (berfungsi melatih keseimbangan gerak tubuh yang terdiri dari untaian objek bentuk lingkaran).
- g) *Balamcierbrett* (berfungsi melatih dinamisasi tubuh berben-tuk lingkaran yang diberi torehan melingkar menaruh bola).
- h) *Balancierwippe* (berfungsi melatih keseimbangan tubuh melalui gerak kaki berbentuk bilah papan diberi torehan).
- i) *Balancier Steg* (melatih keseimbangan untuk beberapa anak sekaligus yang terdiri dari bilah-bilah papan dan balok yang dapat dirubah).

d. Anak Tunadaksa

1) Alat Asesmen Kemampuan Gerak

Pada umumnya anak tunadaksa mengalami gangguan perkembangan intelegensi motorik dan mobilitas, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Ber-variasinya kondisi fisik dan intelektual anak tunadaksa, menuntut adanya penge-lolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimili-kinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan apa yang dibutuhkan dapat men-dapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya.

Asesmen dilakukan pada anak tunadaksa dilakukan untuk mengetahui keada-an postur tubuh, keseimbangan tubuh, kekua-tan otot, mobilitas, intelegensi, serta perabaan. Alat yang digunakan untuk assesmen anak tunadaksa seperti berikut.

- a) *Finger Goniometer* (alat ukur sendi- daerah gerak).
- b) *Flexiometer* (alat ukur kelenturan).
- c) *Plastic Goniometer* (alat ukur sendi terbuat dari plastik).

- d) *Reflex Hammer* (palu untuk mengukur gerak reflex kaki).
- e) *Posture Evaluation Set* (pengukur postur tubuh mengukur kelainan posisi tulang belakang).
- f) *TPD Aesthesiometer* (mengukur rasa permukaan kulit pada tubuh).
- g) *Ground Rhytem Tibre Instrument* (alat ukur persepsi bunyi).
- h) *Cabinet Geometric Insert* (lemari geometris).
- i) *Color Sorting Box* (kotak sortasi warna).
- j) *Tactile Board Sets* (papan latihan perabaan sets).

2) Alat Latihan Fisik/Bina Gerak

Pada umumnya anak tunadaksa mengalami hambatan dalam pindah diri (ambulasi), dan koordinasi/keseimbangan tubuh. Agar anak tunadaksa dapat melakukan kegiatan hidup sehari-hari diperlukan latihan.

Alat-alat yang dapat digunakan dapat berupa :

- a) *Pulley Weight* (untuk menguatkan otot tangan dan perut).
- b) *Kanavel Table* (untuk menguatkan otot tangan, pergelangan dan jari tangan).
- c) *Squeeze Ball* (untuk latihan daya remas tangan).
- d) *Restorator Hand* (untuk menguatkan otot lengan).
- e) *Restorator Leg* (untuk menguatkan otot kaki, tungkai).
- f) *Treadmill Jogger* (untuk menguatkan otot kaki, tungkai dan jantung).
- g) *Safety Walking Strap* (sabuk pengaman ketika berlatih jalan).
- h) *Straight* (tangga) (alat latihan memanjat).
- i) *Sand-Bag* (pemberat beban pada latihan gerak sendi).
- j) *Exercise Mat* (latihan mobilisasi gerak tidur, berguling).
- k) *Incline Mat* (latihan untuk merangkak).
- l) *Neuro Development Rolls* (latihan untuk merangkak dan keseimbangan dalam posisi duduk).
- m) *Height Adjustable Crawler* (latihan untuk merangkak).
- n) *Floor Sitter* (untuk latihan duduk tegak di lantai).
- o) *Kursi CP* (untuk latihan duduk tegak posisi normal).
- p) *Individual Stand-in Table* (untuk latihan berdiri tegak dan aktivitas tangan).
- q) *Walking Paralel* (untuk latihan jalan dengan pegangan memajang kiri dan kanan).
- r) *Walker Khusus CP* (untuk latihan mobilitas berjalan).
- s) *Vestibular Board* (meja goyang untuk latihan keseimbangan).
- t) *Balance Beam Set* (papan titian untuk latihan keseimbangan).
- u) *Dynamic Body and Balance* (latihan keseimbangan dan meloncat).
- v) *Kolam Bola-bola* (untuk latihan koordinasi mata, kaki dan tangan).

- w) Vibrator (untuk mengatasi kekakuan otot).
- x) *Infra-Red Lamp* (Infra Fill) (melancarkan peredaran darah dan relaksasi otot).
- y) *Dual Speed Massager* (alat pijat double kecepatan).
- z) *Speed Training Devices* (alat latihan kecepatan gerakan mulut pada saat bicara).

3) Alat Bina Diri

Anak tunadaksa mengalami hambatan dalam pindah diri (ambulasi), dan koordinasi/ keseimbangan tubuh. Keterbatasan atau hambatan tersebut mengakibatkan anak tunadaksa mengalami kesulitan untuk merawat diri sendiri. Agar anak tuna daksa dapat melakukan perawatan diri dan kegiatan hidup sehari-hari (*activity of daily living*), maka perlu latihan. Alat-alat yang dapat digunakan dapat berupa:

- a) *Swivel Utensil* (sendok khusus dimodifikasi untuk anak CP).
- b) *Dressing Frame Set* (rangka pemasangan pakaian).
- c) *Lacing Shoes* (kaus kaki).
- d) *Deluxe Mobile Commade* (alat latihan buang air WC berjalan).

4) Alat Orthotic dan Prosthetic

Anak tunadaksa mengalami hambatan dalam pindah diri (ambulasi), dan koordinasi/keseimbangan tubuh, karena kondisi tubuh mengalami kelainan. Agar anak tuna daksa dapat melakukan ambulasi dan kegiatan hidup sehari-hari (*activity of daily living*), maka perlu alat bantu (*orthonic dan prosthetic*). Alat-alat yang dapat digunakan meliputi:

- a) *Cock-Up Resting Splint* (meluruskan tangan dan jari).
- b) *Rigid Immobilitation Elbow Brace* (untuk mengatasi gerakan siku pada posisi fleksi 90 derajat).
- c) *Flexion Extention* (untuk membantu gerakan sendi siku).
- d) *Back Splint* (untuk menahan sendi lutut agar tidak melenting kebelakang dan sebagai penguat kaki pada saat berjalan).
- e) *Night Splint* (untuk mengistirahatkan kaki dalam posisi normal dan mencegah salah bentuk).
- f) *Denish Browns Splint* (mengoreksi telapak kaki yang salah bentuk).
- g) X Splint (mengoreksi bentuk kaki bentuk X).
- h) Splint (mengoreksi bentuk kaki bentuk O).
- i) *Long Leg Brace Set* (menopang kaki yang layu agar kuat berjalan/berdiri).
- j) *Ankle or Short Leg Brace* (untuk meluruskan tendon yang memendek atau meluruskan kaki serang).
- k) *Original Thomas Collar* (penyangga leher).

- l) *Simple Cervical Brace* (untuk mengoreksi leher dan menegakkan bahu).
- m) *Corsett* (mengoreksi kelainan tulang punggung).
- n) *Crutch* (kruk) (untuk menopang tubuh).
- o) *Clubfoot walker Shoes* ((mengoreksi bentuk kaki yang tidak terkendali pada saat jalan).
- p) *Thomas Heel Shoes* (sepatu dengan hak yang bisa miring kiri-kanan)
- q) *Wheel Chair* (kursi roda).
- r) Kaki Palsu Sebatas Lutut.
- s) Kaki Palsu Sampai Paha.

5) Alat Bantu Belajar/Akademik

Layanan pendidikan untuk anak tunadaksa mencakup membaca, menulis, berhitung, pengembangan sikap, pengetahuan dan kreativitas. Akibat mengalami kelainan pada motorik dan intelegensinya, maka anak tunadaksa mengalami kesulitan dalam menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung. Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan dan peralatan khusus. Alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik pada anak tunadaksa dapat berupa:

- a) Kartu Abjad untuk pengenalan huruf.
- b) Kartu Kata untuk pengenalan kata.
- c) Kartu Kalimat untuk pengenalan kalimat.
- d) Torso Seluruh Badan untuk pengenalan bagian anggota tubuh manusia.
- e) Geometri Sharpe untuk pengenalan bentuk dan untuk menyortir bentuk geometri.
- f) Menara Gelang untuk latihan koordinasi mata dan tangan.
- g) Menara Segitiga untuk pengenalan bentuk segitiga.
- h) Menara Segiempat untuk pengenalan bentuk segi empat.
- i) Gelas Rasa untuk membedakan macam-macam rasa.
- j) Botol Aroma untuk membedakan macam-macam bau/aroma.
- k) Abacus dan Washer untuk belajar berhitung.
- l) Papan Pasak untuk belajar berhitung dan koordinasi.
- m) Kotak Bilangan untuk belajar berhitung.

e. Tunalaras

1) Asesmen Gangguan Perilaku

Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan penyimpangan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terganggunya perilaku anak tunalaras, menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan apa yang dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya.

Asesmen dilakukan pada anak tunalaras untuk mengetahui penyimpangan perilaku anak. Alat yang digunakan untuk assesmen anak tunalaras seperti berikut.

- a) *Adaptive Behavior Inventory for Children*
- b) *AAMD Adaptive Behavior Scale*

2) Alat Terapi Perilaku

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak tunalaras cenderung untuk merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk mereduksi perilaku yang menyimpang, maka dibutuhkan peralatan khusus. Alat-alat tersebut dapat berupa:

- a) *Pretend Game* (untuk membantu anak dalam bersosialisasi dengan orang lain).
- b) *Hide-Way* (untuk bermain sembunyi-sembunyian).
- c) *Put me a tune* (untuk latihan menuangkan air ke cangkir).
- d) *Copy cats* (untuk menjalin interaksi dengan orang lain).
- e) *Jig-saw puzzle* (teka-teki untuk melatih memecahkan masalah).
- f) *Puppen house* (untuk melatih bermain peran).
- g) *Hunt the Timble* (permainan sulap untuk mengingatkan kembali permainan yang telah lalu).
- h) Sarung tinju (terbuat dari kulit untuk menyalurkan rasa emosional).
- i) Hoopla (untuk latihan koordinasi mata dan tangan).
- j) *Sand Pits* (untuk melatih gerakan tangan dengan menggunakan tangan atau memasukan jari kakinya).
- k) *Animal Matching Games* (untuk latihan mencocokkan gambar binatang).
- l) Organ (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapre-siasikan musik).
- m) Tambur dengan Stick dan Tripod (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapresiasi musik).
- n) Rebana (untuk melatih kepekaan, kesenian dan menga-presiasikan musik).
- o) Flute (untuk melatih kepekaan, kesenian dan mengapre-siasikan musik).
- p) Torso (untuk mengenal organ tubuh manusia).
- q) *Constructive Puzzle* (melatih kemampuan pemecahan masalah).
- r) *Animal Puzzle* (untuk mengenal berbagai jenis binatang).
- s) *Fruits Puzzle* (untuk mengenal berbagai jenis buah-buahan).
- t) Basket Mini (untuk melatih ketangkasan dan sosialisasi).
- u) Konsentrasi Mekanis (untuk melatih daya konsentrasi).

3) Alat Terapi Fisik

Untuk mengembangkan kemampuan motorik/fisik anak tuna-laras, alat yang dapat digunakan seperti berikut ini:

- 1) Matras
- 2) *Straight-Type Staircase*
- 3) Bola Sepak
- 4) Bola, Net Volley
- 5) Meja Pingpong
- 6) *Power Rider*
- 7) *Strickleiter*
- 8) *Trecksando* (5 flat)
- 9) Rope Lader

f. Anak Berbakat

1) Alat Asesmen

Anak berbakat mempunyai kemampuan yang istimewa dibandingkan teman sebayanya. Istimewanya kondisi anak berbakat menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya menentukan apa yang dibutuhkan dapat memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

Asesmen dilakukan pada anak berbakat untuk mengetahui. Keberbakatan dan menilai tentang kebutuhannya untuk menempatkan dalam program-program pendidikan sesuai dengan dan dalam rangka mengembangkan potensinya. Alat yang digunakan untuk assesmen anak berbakat seperti berikut.

- a) Tes Intelegensi WISC-R (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang model WISC-R).
- b) Tes Intelegensi Stanford Binet (alat isian untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang model Stanford Binet).
- c) Cognitive Ability Tes (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dikuasai).
- d) Differential Aptitude Test (alat atau instrumen isian untuk mengukur tingkat sikap).

2) Alat Bantu Ajar/Akademik

Anak berbakat memiliki sifat selalu haus pengetahuan dan tidak puas bila hanya mendapat penjelasan dari orang lain, mereka ingin menemukan sendiri dengan cara *trial and error* (mengadakan percobaan) di laboratorium atau di

masyarakat. Untuk itu sekolah inklusif hendaknya perlu mengusahakan sarana yang lengkap. Sarana-sarana belajar tersebut meliputi:

a) Sumber belajar:

- 1) Buku paket
- 2) Buku Pelengkap
- 3) Buku referensi
- 4) Buku bacaan
- 5) Majalah
- 6) Koran
- 7) Internet
- 8) Modul
- 9) Lembar kerja
- 10) Kaset Video
- 11) VCD
- 12) Museum
- 13) Perpustakaan
- 14) CD-ROM dan lain sebagainya.

b) Media pembelajaran

- 1) Radio
- 2) *Cassette recorder*
- 3) TV
- 4) OHP
- 5) *Wireless*
- 6) *Slide projector*
- 7) LD/VCD/DVD player
- 8) Chart
- 9) Komputer, dan lain sebagainya

g. Anak yang Mengalami Kesulitan Belajar

1) Alat Asesmen

Anak yang mengalami kesulitan belajar merupakan kondisi kronis yang diduga bersumber neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan, integrasi, dan/atau kemampuan verbal dan/atau non verbal. Kesulitan belajar dapat berupa kesulitan berbahasa, membaca, menulis dan/atau matematika. Bervariasinya kesulitan belajar, menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Hal ini penting dalam upaya me-

netukan apa yang dibutuhkan dapat mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya.

Asesmen pada anak yang mengalami kesulitan belajar dilakukan untuk mengetahui bentuk kesulitan belajar dan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajarannya.

Alat yang digunakan untuk assesmen anak yang mengalami kesulitan belajar seperti berikut ini:

- a) Instrumen ungkap riwayat kelainan
- b) Tes Inteligensi WISC

2) Alat Bantu Ajar/Akademik

a) Kesulitan Belajar Membaca (Disleksi)

Sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar membaca (remedial membaca) meliputi:

- (1) Kartu Abjad
- (2) Kartu Kata
- (3) Kartu Kalimat

b) Kesulitan Belajar Bahasa

Sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar bahasa (remedial bahasa) meliputi:

- (1) Kartu Abjad
- (2) Kartu Kata
- (3) Kartu Kalimat

3) Kesulitan Belajar Menulis (Disgrafia)

Sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar menulis (remedial menulis) meliputi:

- a) Kartu Abjad
- b) Kartu Kata
- c) Kartu Kalimat
- d) Balok bilangan 1
- e) Balok bilangan 2

4) Kesulitan Belajar Matematika (Diskalkulia)

Sarana khusus yang diperlukan oleh anak yang mengalami kesulitan belajar matematika (remedial matematika) meliputi:

- a) Balok bilangan 1; balok bilangan 2

- b) Pias angka
- c) Kotak bilangan
- d) Papan bilangan

C. Pra Sarana Khusus

1. Anak Tunanetra

Untuk peserta didik tunanetra diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, orientasi dan mobilitas, *remedial teaching*, menulis braille, latihan mendengar, Latihan Fisik, Keterampilan, dan penyimpanan alat.

2. Anak Tunarungu/Gangguan Komunikasi

Untuk peserta didik tunarungu/Gangguan Komunikasi diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan Asesmen, konsultasi, Latihan Bina Wicara, Bina Persepsi Bunyi dan Irama, Remedial Teaching, Latihan Fisik, Keterampilan, dan penyimpanan alat.

3. Anak Tunagrahita/Anak Lamban Belajar

Untuk peserta didik Tunagrahita/Anak Lamban Belajar diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan Assesmen, konsultasi, Latihan sensori, Bina diri, *Remedial Teaching*, Latihan Perseptual, Keterampilan, dan penyimpanan alat.

4. Anak Tunadaksa

Untuk peserta didik Tunadaksa diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan Assesmen, konsultasi, Latihan fisik, Bina diri, *Remedial Teaching*, Keterampilan, dan penyimpanan alat.

5. Anak Tunalaras

Untuk peserta didik Tunalaras diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan Assesmen, konsultasi, Latihan perilaku, Terapi permainan, Terapi fisik, *Remedial Teaching*, penyimpanan alat.

6. Anak Berbakat

Di samping memberdayakan atau mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada apabila di sekolah inklusif peserta didiknya ada yang berbakat, prasarana khusus yang perlu disediakan adalah ruang assesmen.

7. Anak yang Mengalami Kesulitan Belajar

Untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan Assesmen, Remedial.

D. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Khusus

Berdasarkan kurikulum pendidikan inklusif, keberadaan sarana dan prasarana diperlukan dalam menunjang pencapaian pengembangan potensi peserta didik/

ABK. Pengelolaan sarana dan prasarana khusus di sekolah inklusif dilakukan secara terpadu oleh guru pembimbing khusus (GPK), guru kelas dan tim dari berbagai profesi yang terkait (antara lain, dokter mata, psikolog, ahli pendidikan luar biasa, ahli olahraga anak luar biasa, *social worker*, konselor, dokter ahli THT, ahli terapi wicara, neurolog, dokter spesialis anak, dokter ortopedi, ortotis protetis, fisio-terapis, okupasional terapis, ahli bahasa (ahli remedial bahasa/menulis) sesuai jenis dan tingkat ABK.

Penggunaan sarana dan prasarana bersifat fleksibel artinya tidak dikhususkan untuk setiap anak dan tiap bidang pengajaran, akan tetapi dapat digunakan oleh anak-anak lain dan dalam bidang studi yang berbeda dan dalam kelas yang berbeda. Jadi dalam hal ini sangat dibutuhkan kreativitas pengelola dalam menentukan jenis alat serta penentuan tujuan penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

Dapat pula dikatakan bahwa penggunaan sarana tersebut terintegrasi dalam setiap aspek pengembangan, maksudnya dalam sekali melakukan kegiatan, penggunaannya dapat membelajarkan semua aspek (fisik, intelektual, sosial, dan emosi) dari ABK. Sebagai contoh, penggunaan alat latih sensori motor selain untuk melatih ketajaman indera dapat pula melatih kemampuan berbicara, bersosialisasi ataupun keseimbangan. Di sinilah dapat kita lihat bahwa penggunaan alat sangat tergantung pada kedalaman pemahaman pengelola akan sarana yang ada serta kebutuhan ABK.

Sarana dan prasarana yang tercantum dalam buku pedoman ini merupakan pedoman alat minimal maksudnya sarana dan prasarana dapat diciptakan oleh pengelola sendiri dengan memperhatikan kebutuhan ABK, keadaan lingkungan, perkembangan dan tujuan pembelajaran.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya meningkatkan komunikasi dengan orang tua mengenai keberadaan sarana dan prasarana yang ada agar tercipta kelanjutan penggunaan alat-alat ini di lingkungan keluarga sehingga orang tua dapat membantu meningkatkan pembelajaran anaknya di rumah.

BAB VII

KEGIATAN PEMBELAJARAN SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang

Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum. Mutu pendidikan dan atau mutu lulusan banyak dipengaruhi oleh mutu kegiatan pembelajaran. Jika mutu kegiatan pembelajarannya bagus, dapat diprediksi bahwa mutu lulusan bagus; atau sebaliknya, jika mutu kegiatan pembelajarannya tidak bagus, maka mutu lulusannya juga tidak bagus. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus dirancang dengan baik, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap individu siswa dan didukung oleh kompetensi guru, media, sumber dan strategi pembelajaran yang memadai, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Seiring dengan kemajuan jaman, sudah banyak pembaharuan sistem strategi dan kelembagaan yang melayani anak berkebutuhan khusus. Pada masa-masa sebelumnya bentuk kelembagaan yang melayani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih banyak yang bersifat segregasi (eksklusif) yang terpisah dari masyarakat. Tetapi memasuki akhir milenium dua, visi dan misi kelembagaan sudah cenderung lebih humanis dan terintegrasi (inklusif) dengan masyarakat.

Pendidikan inklusif adalah suatu bentuk sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan oleh karena itu strategi pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik.

Fakta menunjukkan bahwa di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif para siswa memiliki kemampuan yang heterogen, karena peserta didik di sekolah inklusi di samping anak-anak normal juga terdapat anak-anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki keragaman kelainan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis.

Pembelajaran di sekolah inklusi yang kemampuan siswanya sangat heterogen, berbeda dengan pembelajaran di sekolah reguler yang memiliki kemampuan homogen. Para guru reguler, pada umumnya tidak dipersiapkan untuk mengajar siswa yang mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus, sehingga sering kali mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka sebagai langkah awal perlu disusun Buku Pedoman Kegiatan pembelajaran, yang diharapkan dapat diper-

gunakan oleh para guru yang bertugas pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

B. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

1. Rancangan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan dan karakteristik peserta didik, serta mengacu kepada kurikulum yang dikembangkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran pada sekolah inklusi antara lain seperti di bawah ini.

a. Menyusun Rencana Pembelajaran

- 1) Merencanakan pengelolaan kelas; termasuk mengatur lingkungan fisik dan sosial.
- 2) Merencanakan pengorganisasian bahan/materi; topik apa yang ingin disampaikan.
- 3) Merencanakan strategi pendekatan kegiatan pembelajaran; bagaimana bentuk kegiatannya, apakah peserta didik mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam pembelajaran.
- 4) Merencanakan prosedur kegiatan pembelajaran; bagaimana bentuk dan urutan kegiatannya, apakah kegiatan itu sesuai untuk semua peserta didik, dan bagaimana peserta didik mencatat, mendokumentasikan, dan menampilkan hasil belajarnya.
- 5) Merencanakan penggunaan sumber dan media belajar; sumber belajar mana akan digunakan, media apa yang sesuai dengan peserta didik, dan apakah media tersebut tidak membahayakan.
- 6) Merencanakan penilaian; bagaimana cara peserta didik telah menyelesaikan tugasnya dalam suatu proses pembelajaran, dan apa bentuk tindak lanjut yang diinginkan.

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

- 1) Melaksanakan apersepsi.
- 2) Menyajikan materi/bahan pelajaran.
- 3) Mengimplementasikan metode, sumber/media belajar, dan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan kompetensi pembelajaran.
- 4) Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif.
- 5) Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan.

- 6) Mengelola pembelajaran kelompok yang kooperatif.
- 7) Membina hubungan antarpribadi, bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa, menampilkan kegairahan dan kesungguhan, dan mengelola interaksi antar pribadi.

c. Melaksanakan evaluasi

- 1) Melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan setelah kegiatan pembelajaran, baik secara lisan, tertulis, maupun melalui pengamatan.
- 2) Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, penilaian dilakukan dengan membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan prestasi sebelumnya.
- 3) Mengadakan tindak lanjut.

2. Prinsip-prinsip Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai kompetensi dasar mata pelajaran. Agar kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif dan efisien, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran di kelas inklusif secara umum sama dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang berlaku bagi anak pada umumnya.

Namun demikian, karena di dalam kelas inklusif terdapat anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan baik fisik, intelektual, sosial, emosional, dan/atau sensoris neurologis, maka guru yang mengajar di kelas inklusif, di samping menerapkan prinsip-prinsip umum pembelajaran juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak berkebutuhan khusus.

a. Prinsip Umum

- 1) Prinsip motivasi. Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
- 1) Prinsip latar/konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak.
- 2) Prinsip keterarahan. Setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat.

- 3) Prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan pembelajaran, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah.
- 4) Prinsip belajar sambil bekerja
Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada anak untuk melakukan praktik atau percobaan, atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya.
- 5) Prinsip individualisasi
Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak menadapat perhatian dan perlakuan yang sesuai.
- 6) Prinsip menemukan
Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan/ atau emosional.
- 7) Prinsip pemecahan masalah
Guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan/problem yang ada di lingkungan sekitar, dan anak dilatih untuk merumuskan, mencari data, menganalisis, dan memecahkannya sesuai dengan kemampuannya.

b. Prinsip Khusus

1) Tunanetra

- a) Prinsip kekonkretan. Anak Tunanetra belajar terutama melalui pendengaran dan perabaan. Bagi mereka, untuk mengerti dunia sekelilingnya harus bekerja dengan benda-benda konkret yang dapat diraba dan dapat dimanipulasikan. Melalui observasi perabaan benda-benda riil, dalam tempatnya yang alamiah, mereka dapat memahami bentuk, ukuran, berat, kekerasan, sifat-sifat permukaan, kelenturan, suhu dan sebagainya. Dengan menyadari kondisi seperti ini, maka dalam proses pembelajaran guru dituntut semaksimal mungkin dapat menggunakan benda-benda konkret sebagai alat bantu atau media dan sumber pencapaian tujuan pembelajaran.
- b) Prinsip Pengalaman yang Menyatu. Pengalaman visual cenderung menyatukan informasi. Seorang anak normal yang masuk ke toko, tidak saja melihat rak-rak dan benda-benda ril, tetapi juga dalam sekejap mampu melihat hubungan antara rak-rak dengan benda-benda di ruangan. Anak Tunanetra

tidak mengerti hubungan-hubungan ini kecuali jika guru menyajikannya dengan mengajar anak untuk "mengalami" suasana tersebut secara nyata dan menerangkan hubungan-hubungan tersebut.

- c) Prinsip belajar sambil melakukan. Prinsip ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip belajar sambil bekerja. Perbedaannya adalah bagi anak tunanetra melakukan sesuatu adalah pengalaman nyata yang tidak mudah terlupakan seperti anak normal melihat sesuatu sebagai kebutuhan utama dalam menangkap informasi. Anak normal belajar mengenai keindahan lingkungan cukup hanya dengan melihat gambar atau foto. Anak Tunanetra menuntut penjelasan dan penjelajahan secara langsung di lingkungan nyata. Prinsip ini menuntut guru agar dalam proses pembelajaran tidak hanya bersifat informatif akan tetapi semaksimal mungkin anak diajak ke dalam situasi nyata sesuai dengan tuntutan tujuan yang ingin dicapai dan bahan yang diajarkannya.

1) Tunarungu/Gangguan Komunikasi

- a) Prinsip keterarahan wajah. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengarannya (kurang dengar atau bahkan tuli). Sehingga organ pendengarannya kurang/tidak berfungsi dengan baik. Bagi yang sudah terlatih, mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan cara melihat gerak bibir (*lip reading*) lawan bicaranya. Oleh karena itu ada yang menyebut anak tunarungu dengan istilah "permata". Karena matanya seolah-olah tanpa berkedip melihat gerak bibir lawan bicaranya.

Prinsip ini menuntut guru ketika memberi penjelasan hendaknya menghadap ke anak (*face to face*) sehingga anak dapat melihat gerak bibir guru. Demikian pula halnya dengan anak yang mengalami gangguan komunikasi, karena organ bicaranya kurang berfungsi sempurna, akibatnya bicaranya sulit dipahami (karena kurang sempurna) oleh lawan bicaranya. Agar guru dapat memahaminya, maka anak diminta menghadap guru (*face to face*) ketika berbicara.

- b) Prinsip keterarahan suara. Setiap kali ada suara, pasti ada sumber suara/bunyi. Dengan sisa pendengarannya, anak hendaknya dibiasakan mengkonsentrasikan sisa pendengarannya ke arah sumber suara/bunyi, sehingga anak dapat merasakan adanya getaran suara. Suara/bunyi yang dihayatinya sangat membantu proses pembelajaran anak terutama dalam pembentukan sikap, pribadi, tingkah laku, dan perkembangan bahasanya.

Dalam proses pembelajaran, ketika berbicara guru hendaknya menggunakan lafal/ejaan yang jelas dan cukup keras, sehingga arah suaranya dapat

dikenali anak. Demikian pula, bagi anak yang mengalami gangguan komunikasi, agar bicaranya dapat dipahami oleh lawan bicaranya maka anak hendaknya ketika berbicara selalu menghadap ke arah lawan bicaranya agar suaranya terarah.

- c) Prinsip Keperagaan. Anak tunarungu karena mengalami gangguan organ pendengarannya, maka mereka lebih banyak menggunakan indera penglihatannya dalam belajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran hendaknya disertai peragaan (menggunakan alat peraga) agar lebih mudah dipahami anak, disamping dapat menarik perhatian anak.

2) Anak Berbakat

1) Prinsip Percepatan (Akselerasi) Belajar

Anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan (inteligensi), kreativitas, dan tanggung jawab (*task commitment*) terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Salah satu karakteristik yang sangat menonjol adalah mereka memiliki kecepatan belajar di atas kecepatan belajar anak seusianya. Dengan diterangkan sekali saja oleh guru, mereka telah dapat menangkap maksudnya; sementara anak-anak yang lainnya masih perlu dijelaskan lagi oleh guru. Pada saat guru mengulangi penjelasan kepada teman-temannya itu, mereka memiliki waktu luang. Bila tidak diantisipasi oleh guru, kadang-kadang waktu luang tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas sekehendaknya, misalnya melempar benda-benda kecil kepada teman dekatnya, mencubit teman kanan-kirinya, dan sebagainya.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki, dalam proses pembelajaran hendaknya guru dapat memanfaatkan waktu luang anak berbakat dengan memberi materi pelajaran tambahan (materi pelajaran berikutnya). Sehingga kalau terakumulasi semua, mungkin materi pelajaran selama satu semester dapat selesai dalam waktu 4 bulan; materi 1 tahun selesai dalam waktu 8 bulan; materi 6 tahun selesai dalam waktu 4 tahun. Hal ini disebut dengan istilah percepatan (akselerasi) belajar.

- 2) Prinsip Pengayaan (*Enrichment*). Ada anak berbakat yang tidak tertarik dengan program percepatan belajar. Mereka kurang berminat mempelajari materi berikutnya dan mendahului teman-temannya. Mereka merasa lebih menikmati dengan tetap berada bersama dengan teman sekelasnya. Materi yang diberikan lebih diperdalam dan diperluas dengan mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi (analisis, sintesis, evaluasi, dan pemecahan masalah). Anak berbakat tidak hanya mengembangkan proses berfikir

tingkat rendah (pengetahuan dan pemahaman), tetapi mereka lebih menonjol dalam proses berfikir tingkat tinggi.

Hal ini menuntut guru agar dalam kegiatan pembelajaran dapat memanfaatkan waktu luang dengan cara memberi program-program pengayaan kepada mereka, dengan mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi mereka.

4) Anak Tunagrahita

a) Prinsip Kasih Sayang

Tunagrahita adalah anak yang mengalami kelainan dalam segi intelektual, inteligensi mereka di bawah rata-rata. Akibatnya, dalam tugas-tugas akademik yang menggunakan intelektual, mereka sering mengalami kesulitan. Dalam kegiatan pembelajaran, anak tunagrahita membutuhkan kasih sayang yang tulus dari guru. Guru hendaknya berbahasa yang lembut, sabar, rela berkorban, dan memberi contoh perilaku yang baik, ramah, dan supel, sehingga tumbuh kepercayaan dari siswa, yang pada akhirnya mereka memiliki semangat untuk melakukan kegiatan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru.

b) Prinsip Keperagaan

Kelemahan anak tunagrahita antara lain adalah dalam hal kemampuan berfikir abstrak, mereka sulit membayangkan sesuatu. Dengan segala keterbatasannya itu, siswa tunagrahita akan lebih mudah tertarik perhatiannya apabila dalam kegiatan pembelajaran menggunakan benda-benda konkret maupun berbagai alat peraga (model) yang sesuai.

Hal ini menuntut guru agar dalam kegiatan pembelajaran selalu mengaitkan relevansinya dengan kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, anak perlu dibawa ke lingkungan sosial, maupun lingkungan alam. Bila tidak memungkinkan, guru dapat membawa berbagai alat peraga.

c) Prinsip Habilitasi dan Rehabilitasi

Meskipun dalam bidang akademik anak tunagrahita memiliki kemampuan yang terbatas, namun dalam bidang-bidang lainnya mereka masih memiliki kemampuan atau potensi yang masih dapat dikembangkan.

Habilitasi adalah usaha yang dilakukan seseorang agar anak menyadari bahwa mereka masih memiliki kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan meski kemampuan atau potensi tersebut terbatas.

Rehabilitasi adalah usaha yang dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan cara, sedikit demi sedikit mengembalikan kemampuan yang hilang atau belum berfungsi optimal. Dalam kegiatan pembelajaran, guru hendak-

nya berusaha mengembangkan kemampuan atau potensi anak seoptimal mungkin, melalui berbagai cara yang dapat ditempuh.

5) Anak Tunadaksa

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bagi anak tunadaksa tidak lepas dari tiga bentuk pelayanan.

a) Pelayanan medik

Sebelum masa sekolah terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari dokter agar tidak salah penempatan.

(1) Menentukan bentuk terapi dan frekuensi latihan.

(2) Menjalin kerjasama dengan guru yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelayanan dengan tepat. Contoh: posisi duduk, posisi menulis, posisi jalan dan lain-lain.

b) Pelayanan pendidikan

(1) Mendorong anak untuk pergi ke psikolog sampai mendapatkan rekomendasi penempatan anak disekolah. Contoh: tunadaksa ringan (D) atau tuna daksa sedang (D1).

(2) Pembuatan program pendidikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak.

(3) Pelayanan sosial dilakukan dalam upaya pengembangan diri, dimana anak dilatih bagaimana cara bergaul, berkomunikasi sehingga anak memiliki rasa percaya diri.

6) Anak Tunalaras

a) Prinsip Kebutuhan dan Keaktifan

Anak tunalaras selalu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya itu, ia menggunakan kesempatan yang ada tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kalau perlu melanggar semua peraturan yang ada meskipun ia harus mencuri misalnya. Hal ini jelas merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.

Oleh karena itu, guru hendaknya mendorong peserta didik untuk lebih aktif agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan mempertimbangkan norma-norma sosial, agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b) Prinsip Kebebasan yang Terarah

Anak tunalaras memiliki sikap tidak mau dikekang. Ia selalu menggunakan peluang untuk berbuat sesuatu. Oleh karena itu, guru harus memperhitungkan

kan tindakan yang akan dilakukannya dalam membina peserta didik yang tuna laras. Di samping itu, guru hendaknya mengarahkan dan menyalurkan segala perilaku anak ke arah positif yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

c) Prinsip Penggunaan Waktu Luang

Anak tunalaras biasanya tidak bisa diam. Ada saja yang dikerjakan, bahkan seolah-oleh mereka kekurangan waktu sehingga lupa tidur, istirahat dan sebagainya. Oleh karena itu, guru harus membimbing anak dengan mengisi waktu luangnya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

d) Prinsip Kekeluargaan dan Kepatuhan

Anak tunalaras biasanya berasal dari keluarga yang tidak harmonis, atau hubungan orang tua retak (*broken home*). Akibatnya emosinya kurang stabil, jiwanya tidak tenang, rasa kekeluargaannya tidak berkembang, merasa hidupnya tidak berguna. Akibat lebih jauh mereka bersifat perusak, dan benci kepada orang lain.

Oleh karena itu, guru harus dapat menyelami anak, di mana letak ketidakselarasan kehidupan emosinya. Selanjutnya, mengembalikannya kepada kehidupan emosi yang tenang, laras, sehingga rasa kekeluargaannya menjadi pulih kembali. Misalnya, siswa disuruh membaca cerita yang edukatif, memelihara binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya.

e) Prinsip Setia Kawan dan Idola serta Perlindungan

Karena tinggal di rumah tidak tahan, anak tunalaras biasanya lari keluar rumah. Kemudian ia bertemu dengan orang-orang (kelompok) yang dirasa dapat membuat dirinya merasa aman. Di dalam kelompok tersebut ia merasa menemukan tempat berlindung menggantikan orang tuanya, ia merasa tenteram, timbul rasa setia kawan. Karena setianya kepada kelompok, ia berbuat apa saja sesuai perintah ketua kelompoknya yang dijadikan idolanya.

Oleh karena itu, guru hendaknya secara pelahan-lahan berupaya menggantikan posisi ketua kelompoknya, menjadi tokoh idola siswa, dengan cara melindungi siswa, dan berangsur-angsur kelompoknya berganti dengan teman-teman sekelasnya, dan setia kawannya berganti kepada teman-teman sekelasnya, yang pada akhirnya mereka akan merasa senang bersekolah.

f) Prinsip Minat dan Kemampuan

Guru harus memperhatikan minat dan kemampuan anak terutama yang berhubungan dengan pelajaran. Jangan sampai karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak, akhirnya justru mereka benci kepada

guru atau benci kepada pelajaran tertentu. Sebaliknya, guru harus menggali minat dan kemampuan siswa terhadap pelajaran, untuk dijadikan acuan untuk memberi tugas-tugas tertentu. Dengan memberi tugas yang sesuai, mereka akan merasa senang, yang pada akhirnya lama-kelamaan mereka akan terbiasa belajar.

g) Prinsip Emosional, Sosial, dan Perilaku

Karena problem emosi yang disandang anak tunalaras, maka ia mengalami ketidaksinambungan emosi. Akibatnya siswa berperilaku menyimpang baik secara individual maupun secara sosial dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, guru harus berusaha mengidentifikasi problem emosi yang disandang anak, kemudian berupaya menghilangkannya untuk diganti dengan sifat-sifat yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan cara diberi tugas-tugas tertentu, baik secara individual maupun secara kelompok.

h) Prinsip Disiplin

Pada umumnya anak tunalaras ingin memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memenuhi keinginannya, tanpa mengindahkan norma-norma yang berlaku, sehingga ia hidup lepas dari disiplin. Sikap ketidak taatan dan lepas dari aturan merupakan sikap hidupnya sehari-hari.

Oleh karena itu, guru perlu membiasakan siswa untuk hidup teratur dengan selalu diberi keteladanan dan pembinaan dengan sabar.

i) Prinsip Kasih Sayang

Anak tunalaras umumnya haus akan kasih sayang, baik dari orang tua maupun dari keluarganya. Akibatnya anak akan selalu mencari kasih sayang dan menumpahkan keluhannya di luar rumah. Kalau ia tidak menemukannya akan menjadi agresif, cenderung hiperaktif, atau sebaliknya ia menjadi rendah diri, pendiam, atau menyendiri.

Oleh karena itu, pendekatan kasih sayang, dan kesabaran yang dilakukan guru diharapkan dapat mengisi kekosongan jiwa anak. Dengan pendekatan kasih sayang akan membuat anak merasa nyaman sehingga mereka akan rajin ke sekolah dan merasa ada tempat untuk mencurahkan perasaannya yang pada akhirnya mereka akan patuh pada guru.

C. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada seting inklusi secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas reguler. Namun demikian,

karena di dalam seting inklusi terdapat peserta didik yang sangat heterogen, maka dalam kegiatan pembelajarannya di samping menerapkan prinsip-prinsip umum juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah setempat sehingga dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan model penempatan yang dipilih. Seperti dijelaskan pada buku 1 (*mengenal Pendidikan Inklusif*), penempatan anak luar biasa di sekolah inklusif dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut:

1. Kelas reguler (inklusi penuh)
2. Kelas reguler dengan cluster
3. Kelas reguler dengan pull out
4. Kelas reguler dengan cluster dan pull out
5. Kelas khusus dengan berbagai pengintergrasian
6. Kelas khusus penuh

Kegiatan pembelajaran dalam seting inklusi akan berbeda baik dalam strategi, kegiatan, media, dan metode. Dalam seting inklusi, guru hendaknya dapat mengakomodasi semua kebutuhan siswa di kelas yang bersangkutan termasuk membantu mereka memperoleh pemahaman yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing.

Hambatan belajar dapat berasal dari kesulitan menentukan strategi belajar dan metode belajar lainnya sebagai akibat dari faktor-faktor biologis, psikologis, lingkungan, atau gabungan dari beberapa faktor tersebut. Sebagai contoh gangguan sensoris seperti hilangnya penglihatan atau pendengaran, merupakan hambatan dalam memperoleh masukkan informasi dari luar. Disfungsi minimal otak mungkin akan berakibat yang cukup serius terhadap konsentrasi.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada model kelas tertentu mungkin berbeda dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada model kelas yang lain. Pada model Kelas Reguler (Inklusi Penuh), bahan belajar antara anak luar biasa dengan anak normal mungkin tidak berbeda secara signifikan; namun pada model Kelas Reguler dengan Cluster, bahan belajar antara anak luar biasa dengan anak normal biasanya tidak sama, bahkan antara sesama anak luar biasa pun dapat berbeda.

Oleh karena itu, setelah ditetapkan model penempatan anak luar biasa, yang perlu dilakukan berikutnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas inklusi.

D. Merencanakan Kegiatan Pembelajaran

1. Merencanakan Kegiatan pembelajaran

a. Menetapkan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai merupakan tahap awal merencanakan kegiatan pembelajaran.

a. Merencanakan Pengelolaan Kelas

- 1) Menentukan penataan ruang kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran;
- 2) Menentukan cara pengorganisasian siswa agar setiap siswa dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya:
 - a) Individual
 - b) Berpasangan
 - c) Kelompok kecil
 - d) Klasikal

b. Merencanakan Pengorganisasian Bahan

- 1) Menetapkan bahan utama (pokok) yang akan diajarkan
- 2) Menentukan bahan pengayaan untuk siswa yang pandai
- 3) Menentukan bahan remidi untuk siswa yang kurang pandai

c. Merencanakan Pengelolaan Kegiatan pembelajaran

- 1) Merumuskan tujuan pembelajaran
- 2) Menentukan metode mengajar
- 3) Menentukan urutan/langkah-langkah mengajar, misalnya
 - 1) Pembukaan/apersepsi
 - 2) Kegiatan inti
 - 3) Penutup/evaluasi

d. Merencanakan Penggunaan Sumber Belajar

- 1) Menentukan sumber bahan pelajaran (misalnya Buku Paket, Buku Pelengkap, dan sebagainya)
- 2) Menentukan sumber belajar (misalnya globe, foto, benda asli, benda tiruan, lingkungan alam, dan sebagainya)

e. Merencanakan Penilaian

- 1) Menentukan bentuk penilaian (misalnya tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan)
- 2) Membuat alat penilaian (menuliskan soal-soalnya)
- 3) Menentukan tindak lanjut

2. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran

a. Berkomunikasi dengan siswa

- 1) Melakukan apersepsi.

- 2) Menjelaskan tujuan mengajar.
 - 3) Menjelaskan isi/materi pelajaran.
 - 4) Mengklarifikasi penjelasan apabila siswa salah mengerti atau belum paham.
 - 5) Menanggapi respon atau pertanyaan siswa.
 - 6) Menutup pelajaran (misalnya merangkum, meringkas, menyimpulkan, dan sebagainya).
- b. Mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan Latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
- 1) Menggunakan metode mengajar yang bervariasi (misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan sebagainya).
 - 2) Menggunakan berbagai sumber belajar (misalnya globe, foto, benda asli, benda tiruan, lingkungan alam, dan sebagainya).
 - 3) Memberikan tugas/latihan dengan memperhatikan perbedaan individual
 - 4) Menggunakan ekspresi lisan dan/atau penjelasan tertulis yang dapat mempermudah siswa untuk memahami materi yang diajarkan.
- c. Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif
- 1) Memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif (misalnya dengan mengajukan pertanyaan, memberi tugas tertentu, mengadakan percobaan, berdiskusi secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, belajar berkooperatif).
 - 2) Memberi penguatan kepada siswa agar terus terlibat secara aktif.
 - 3) Memberikan pengayaan (tugas-tugas tambahan) kepada siswa yang pandai.
 - 4) Memberikan latihan-latihan khusus (remidi) bagi siswa yang dianggap memerlukan.
- d. Mendemonstrasikan penguasaan materi dan relevansinya dalam kehidupan
- 1) Mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran secara meyakinkan (tidak ragu-ragu); dengan menggunakan media yang sesuai.
 - 2) Menjelaskan relevansinya materi pelajaran yang sedang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari.
- e. Mengelola waktu, bahan, dan perlengkapan pengajaran
- 1) Menggunakan waktu pengajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan.
 - 2) Mengelola ruang kelas sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran.
 - 3) Menggunakan bahan pengajaran (misalnya bahan praktikum), secara efisien.

- 4) Menggunakan perlengkapan pengajaran (misalnya peralatan percobaan) secara efektif dan efisien.

3. Mengelola Pembelajaran Kelompok yang Kooperatif

Pembelajaran yang efektif berarti mengkombinasikan berbagai pendekatan dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran seperti ini diharapkan dapat menjadikan kelas lebih hidup, penuh tantangan dan menyenangkan.

Berbagai pendekatan dalam kelompok:

- a. Pembelajaran langsung pada seluruh kelas

Pendekatan ini cocok untuk memperkenalkan berbagai topik. Guru menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Guru dapat menggunakan kelas untuk bercerita atau menunjukkan karya mereka seperti membuat puisi, lagu, bercerita atau membuat permainan secara bersama-sama. Guru harus berupaya menciptakan strategi pembelajaran dengan materi yang sesuai yang dapat mengakomodasi semua keragaman. Untuk dapat mendorong semua siswa aktif, guru dapat memberikan tugas yang berbeda pada setiap kelompok atau memberikan tugas yang sama dengan hasil yang diharapkan berbeda.

- b. Pembelajaran Individual

Pembelajaran individual diberikan pada peserta didik tertentu untuk membantu mereka menyelesaikan masalahnya seperti pada peserta didik berbakat dengan mendorong mereka memberikan tugas yang lebih menantang.

- c. Pembelajaran untuk kelompok kecil

Guru membagi peserta didik dalam kelompok kecil dengan menggunakan strategi yang efektif yang dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Guru dapat mendorong peserta didik agar dapat bekerja lebih kooperatif.

- f. Pembelajaran yang kooperatif

Pembelajaran yang kooperatif terjadi ketika peserta didik berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Guru hendaknya berupaya menghindari pembelajaran yang kompetitif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memegang peranan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar sehingga peserta didik merasa mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri dan merasa dihargai.

- e. Pembelajaran yang kooperatif dapat membantu peserta didik meningkatkan pemahaman dan rasa senang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, terhadap kelompoknya, dan terhadap pekerjaannya. Setiap peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilannya

seperti peserta didik perempuan menjadi presenter, dan peserta didik laki-laki menjadi notulis dan kegiatan lainnya sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari aktivitas kerja kelompok yang kooperatif.

4. Melakukan evaluasi

- a. Melakukan penilaian selama kegiatan pembelajaran berlangsung (baik secara lisan, tertulis, maupun pengamatan).
- b. Mengadakan tindak lanjut hasil penilaian.

5. Membina Hubungan Antar Pribadi

- a. Bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa
 - 1) Menunjukkan sikap terbuka (misalnya mendengarkan, menerima, dan sebagainya) terhadap pendapat siswa.
 - 2) Menunjukkan sikap toleran (mengerti) terhadap siswa.
 - 3) Menunjukkan sikap simpati (misalnya menunjukkan hasrat untuk memberikan bantuan) terhadap permasalahan/kesulitan yang dihadapi siswa.
 - 4) Menunjukkan sikap santun tidak kasar (tidak mudah marah) dan kasih sayang terhadap siswa.
- b. Menampilkan kegairahan dan kesungguhan
 - 1) Menunjukkan kegairahan dalam mengajar.
 - 2) Merangsang minat siswa untuk belajar.
 - 3) Memberikan kesan kepada siswa bahwa ia menguasai bahan yang diajarkan.
- c. Mengelola interaksi antarpribadi
 - 1) Memberikan penghargaan (*reward*) terhadap siswa yang berhasil.
 - 2) Memberikan bimbingan khusus terhadap siswa yang belum berhasil.
 - 3) Memberikan dorongan agar terjadi interaksi antarsiswa.
 - 4) Memberikan dorongan agar terjadi interaksi antara siswa dengan guru.

BAB VIII

MANAJEMEN SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk men-dayagunakan sumber-sumber baik personal maupun material secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik, kemampuan dan *task commitment* (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal.

Manajemen berbasis sekolah, memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah, yang meliputi input peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan pembelajaran .

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu disusun Buku Manajemen Sekolah, khususnya berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah inklusi, yang menguraikan tentang berbagai hal yang perlu dilakukan oleh Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka menyelenggarakan pendidikan inklusi secara efektif dan efisien.

B. Konsepsi Manajemen Sekolah

1. Pengertian

Istilah manajemen sekolah acapkali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan berbeda. Pertama, mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi). Kedua melihat manajemen lebih luas daripada administrasi

(administrasi merupakan inti dari manajemen) dan ketiga yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi.

Dalam buku ini, istilah manajemen diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. Tugas dan fungsi pokok administrasi dan manajemen seperti berikut.

- a. Merencanakan (*Planning*)
- b. Mengorganisasikan (*organizing*)
- c. Mengarahkan (*directing*)
- d. Mengkoordinasikan (*coordinating*)
- e. Mengawasi (*controlling*), dan
- f. Mengevaluasi (*evaluation*)

2. Ruang Lingkup

Adapun komponen atau ruang lingkup manajemen pendidikan inklusi adalah:

- a. Kepeserta didikan
- b. Kurikulum
- c. Pembelajaran
- d. Tenaga kependidikan
- e. Sarana- prasarana
- f. Pembiayaan
- g. Lingkungan (hubungan sekolah dengan masyarakat) dan kegiatan.

3. Prinsip Umum

- a. Manajemen sekolah bersifat praktis dan fleksibel, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di sekolah.
- b. Manajemen sekolah berfungsi sebagai pengendali mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta sumber informasi peningkatan mutu proses pembelajaran.
- c. Manajemen sekolah dilaksanakan dengan suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum.

4. Kriteria Pemimpin Sekolah

Dalam pengelolaan sekolah diperlukan seorang pimpinan yang berpandangan luas dan kemampuan manajerial. Kriteria pimpinan sekolah yang manajerial meliputi hal-hal seperti berikut.

- a. Memiliki pengetahuan tentang administrasi pendidikan/sekolah.

- b. Memiliki pengetahuan tentang konsep dan kaidah pendidikan khusus, yang meliputi sistem pendidikan segregasi, integrasi, dan inklusi. Khususnya perbedaan antara sistem pendidikan integrasi dengan sistem pendidikan inklusi.
- c. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas, fungsi manajemen.
- d. Menghargai peraturan-peraturan serta melaksanakannya.
- e. Menghargai cara berpikir yang rasional, demokratis, dinamis, kreatif, dan terbuka terhadap pembaharuan pendidikan serta bersedia menerima kritik yang membangun.
- f. Saling mempercayai sebagai dasar dalam pembagian tugas dan pelaksanaannya.

C. Pelaksanaan Manajemen Sekolah Inklusif

1. Manajemen Komponen Pendidikan

a. Manajemen kepeserta didikan

Manajemen kepesertadidikan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen kepeserta didikan meliputi: (1) penerimaan peserta didik baru, meliputi aspek identifikasi, assesmen dan penempatan peserta didik; (2) program bimbingan dan konseling; (3) pengelompokan belajar peserta didik; (4) kehadiran peserta didik; (5) mutasi peserta didik; (6) papan statistik peserta didik yang menggambarkan secara holistik tentang basis data kepeserta didikan; (7) buku induk peserta didik.

Penerimaan peserta didik baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Untuk tahap awal, agar memudahkan pengelolaan kelas, seyogyanya setiap kelas inklusi dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis kekhususan, dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) peserta didik.

b. Manajemen Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum reguler yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara memodifikasi alokasi waktu atau isi/materi. Manajemen kurikulum di antaranya dapat dilakukan melalui: (1) menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar; (2) menyusun silabus; dan (3) menetapkan kalender pendidikan dan jumlah jam pelajaran. Bagi sekolah yang sudah melak-

sanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, maka penyusunan silabus yang diantaranya memuat langkah-langkah pembel-ajaran dan indikator pencapaian harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sehingga setiap peserta didik bisa tersentuh oleh layanan pendidikan yang bermutu.

c. Manajemen Proses Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari pengelolaan sekolah, oleh sebab itu semua kegiatan pendukung lainnya harus diarahkan pada terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM).

Manajemen pembelajaran dapat dilakukan melalui: (1) menjabarkan kalender pendidikan; (2) menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar; (3) mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran persemester dan persiapan pelajaran; (4) mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler, (5) mengatur pelaksanaan penilaian; (6) mengatur pelaksanaan kenaikan kelas; (7) membuat laporan kemajuan belajar peserta didik; dan (8) mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran.

d. Manajemen Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi Tenaga Pendidik (Guru), Pengelola Satuan Pendidikan, Pustakawan, Laboran, dan Teknisi sumber belajar. Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Guru Pembimbing Khusus.

Manajemen tenaga kependidikan meliputi: (1) inventarisasi pegawai; (2) pengusulan formasi pegawai; (3) pengusulan pengangkatan pegawai; (4) kenaikan pangkat; (5) kenaikan gaji berkala; (6) mutasi; dan (7) mengatur pembagian tugas.

Kekhasan manajemen tenaga pendidik pada sekolah inklusi adalah dalam pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antara guru pembimbing khusus dengan guru reguler.

Guru reguler bertanggung jawab dalam pembelajaran bagi semua peserta didik di kelasnya. Sedangkan guru pembimbing khusus bertanggung jawab memberikan layanan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, baik yang berada pada kelas reguler maupun pada kelas khusus. Dalam keadaan tertentu guru pembimbing khusus dapat mendampingi peserta didik pada saat peserta didik mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru reguler.

e. Manajemen Sarana Prasarana

Anak berkebutuhan khusus memerlukan sarana prasarana dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi meliputi peserta didik: (1) tunanetra/*low vision*; kaca mata, teleskop, riglet, huruf Braille, mesin ketik Braille; (2) tunarungu seperti; alat bantu dengar, alat pengukur tingkat pendengaran, kamus sistem isyarat bahasa Indonesia; (3) tunagrahita dan berkesulitan belajar; alat bantu belajar mengajar; (4) tunadaksa, seperti: ramp (lantai landai sebagai pengganti tangga), kursi roda; (5) berbakat (*gifted and talented*) berbagai sarana lainnya seperti: buku-buku referensi, alat praktek, laboratorium, alat kesenian dan olahraga yang memadai untuk memenuhi rasa ingin tahu dan minat anak berbakat.

Manajemen sarana-prasarana sekolah berfungsi: merencanakan mengorganisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan pembelajaran.

f. Manajemen Pembiayaan

Komponen biaya merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan pembelajaran bersama komponen-komponen lain. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) kegiatan identifikasi dan assesmen peserta didik berkebutuhan khusus; (2) modifikasi kurikulum; (3) insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat; (4) pengadaan sarana prasarana; (5) pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap perintisan sekolah inklusi, diperlukan dana bantuan sebagai stimulasi, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Namun untuk penyelenggaraan program selanjutnya diusahakan agar sekolah bersama-sama orang tua peserta didik dan masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), serta pemerintah daerah dapat menanggunginya.

Dalam pelaksanaannya, manajemen pembiayaan mencakup pula manajemen keuangan yang menganut asas pemisahan tugas dan fungsi sebagai: (1) otorisator; (2) ordonator; dan (3) bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

g. Manajemen Lingkungan (Hubungan dengan Masyarakat)

Masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan agar tumbuhkan "rasa ikut memiliki" atas keberadaan lembaga pendidikan di sekitarnya. Maju mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat sehingga bukan hanya Kepala Sekolah dan dewan guru yang memikirkan maju mundurnya sekolah, tetapi masyarakat setempat terlibat pula memikirkannya.

Untuk menarik simpati masyarakat agar bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan cara pemberitahuan mengenai program-program sekolah baik program yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif, maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan terutama dalam rangka melakukan sosialisasi sekolah inklusif. Pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus akan sangat besar pengaruhnya terhadap upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pemahaman dan kepedulian masyarakat seperti ini akan berimbas secara positif terhadap sikap peserta didik lainnya yang belajar bersama-sama dengan anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian akan tercipta iklim belajar yang kondusif bagi anak berkebutuhan khusus dan peserta didik peserta didik lainnya di sekolah inklusif.

2. Manajemen Pelayanan Khusus

Oleh karena peserta didik sekolah inklusif terdiri atas peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus maka bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan manajemen pelayanan khusus. Dengan demikian keperluan-keperluan anak berkebutuhan khusus tidak terabaikan dalam proses pembelajaran. Manajemen pelayanan khusus ini mencakup manajemen kepeserta didikan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, penda-naan, dan lingkungan.

Kepala Sekolah dapat menunjuk stafnya, terutama yang memahami tentang Pendidikan Khusus, untuk melaksanakan manajemen layanan khusus. Dalam pelaksanaan manajemen pelayanan khusus ini tenaga kependidikan khusus bertanggung jawab dalam hal seperti berikut.

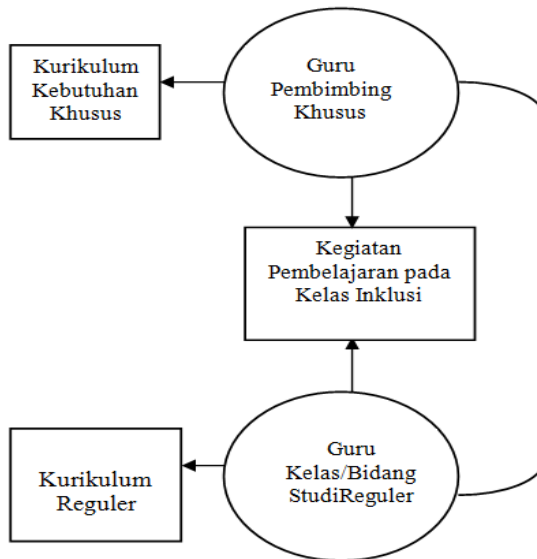
a. Manajemen Kepeserta didikan

Manajemen kepeserta didikan ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan assesmen baik asesmen psikologis, akademis dan fisik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka membuat profile anak. Profile ini sangat berguna dalam memahami kebutuhan khusus anak serta dalam rangka penyusunan kebutuhan layanan pembelajaran individual.

Selanjutnya manajemen pembelajaran, yang berkenaan dengan sistem dan strategi belajar, meliputi metode dan teknis pembelajaran, pengelolaan kelas, dan sistem evaluasinya, tetap disesuaikan dengan prinsip-prinsip layanan pembelajaran individual.

b. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan khusus anak, data tentang kebutuhan khusus anak dapat diperoleh dari profile tiap peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. Secara diagramatis manajemen kurikulum pada sekolah inklusif dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Sistem Manajemen Sekolah Inklusif

c. Sarana dan Prasarana

Anak berkebutuhan khusus memerlukan sarana prasarana khusus dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya sarana-prasarana tersebut memerlukan manajemen tersendiri. Sarana prasarana ini meliputi, gedung dan atau bangunan, media pembelajaran dan lingkungan belajar di sekolah yang mudah di akses (memenuhi prinsip aksesibilitas) peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. Pengadaan sarana dan prasarana ini tentunya disesuaikan dengan tiap-tiap jenis kelainan anak berkebutuhan khusus.

D. Manajemen Mutu Total

Dalam pelaksanaan sekolah inklusi, pengelolaannya dilandasi oleh pola manajemen mutu total, meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut.

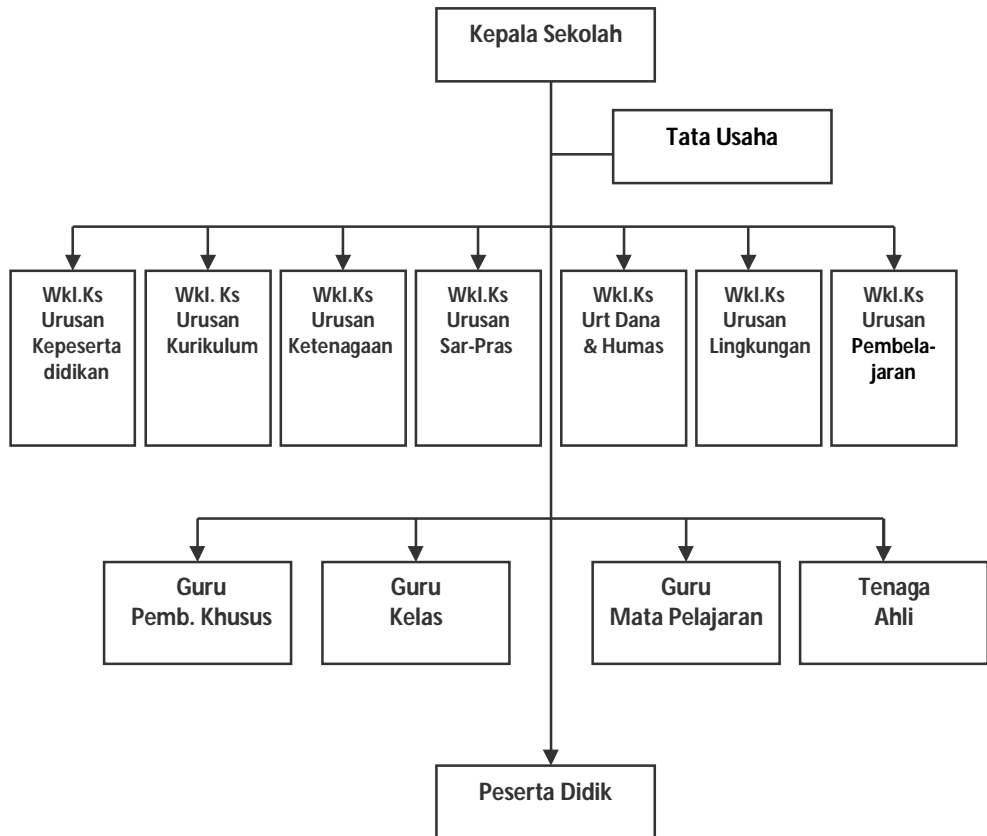
- 1. Pengutamakan Kepuasan Pelanggan.** Pelanggan utama dalam sekolah inklusi ini antara lain adalah seluruh peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Sekolah harus dapat memberikan jaminan kepuasan, terutama kepuasan menikmati proses pembelajaran di sekolah.
- 2. Perbaikan Terus Menerus.** Seluruh pengelola dan penyelenggara sekolah inklusi harus senantiasa melakukan evaluasi program sebagai bahan pelaksanaan perbaikan terus menerus dilakukan. Setiap tahap dan proses selalu dievaluasi keterlaksanaannya, sehingga kendala-kendala yang mungkin timbul segera dapat dikenali dan diberikan solusinya. Sikap untuk mau melakukan perbaikan terus menerus harus terwujud dalam perilaku setiap personil yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.
- 3. Kebiasaan Berbicara dengan Fakta.** Manajemen yang bermutu selalu ditandai dengan kebiasaan para *stakeholder* yang selalu berbicara dan komunikasi dengan fakta. Untuk dapat membangun kebiasaan ini maka sekolah harus mampu melakukan pengoleksian data (*Colecting data*), pengolahan data dan penyajian data, yang diantaranya, meliputi data-data tentang kepesertadidikan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keuangan, kurikulum dan sistem evaluasi.
- 4. Sikap Menghargai Orang Lain.** Budaya untuk senantiasa menghargai orang lain, dalam penyelenggaraan sekolah inklusi akan berpengaruh terhadap mutu layanan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam sebuah sistem tidak ada orang yang paling penting, dan yang paling tidak penting, karena semua unsur menjadi penting. Oleh karena itu, budaya saling menghargai ini harus ditumbuhkan agar setiap orang dapat memaksimalkan karyanya. Khusus bagi murid, berkenaan dengan sikap menghargai orang lain ini diwujudkan

dalam suasana sekolah yang akrab dan ramah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

E. Struktur Organisasi Sekolah

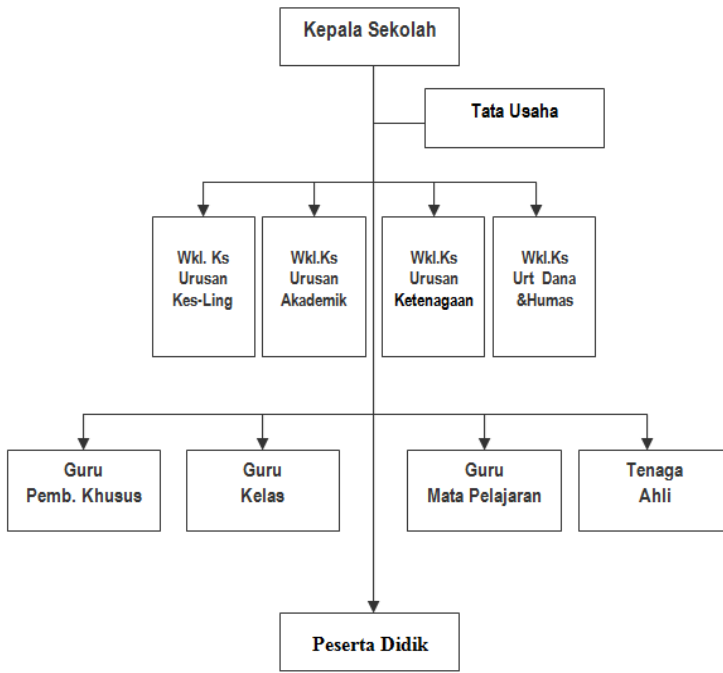
Agar semua komponen di atas dapat dilaksanakan sebaik mungkin, struktur organisasi sekolah inklusi dapat dibuat seperti alternatif di bawah ini.

Alternatif 1: Terutama untuk sekolah besar yang memiliki lebih dari 12 rombongan belajar.



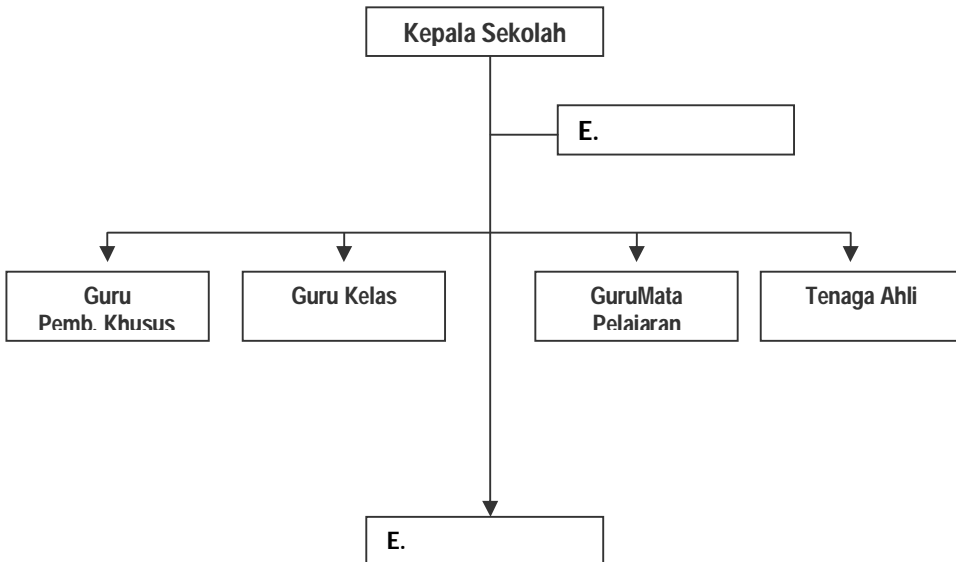
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekolah Inklusi Model 1

Alternatif 2: Terutama untuk sekolah cukup besar, yang memiliki lebih dari 6 rombongan belajar.



Gambar 4. Struktur Organisasi Sekolah Inklusif Model 2

Alternatif 3: Terutama untuk sekolah kecil, yang memiliki tidak lebih 6 rombongan belajar



Gambar 5. Struktur Organisasi Sekolah Inklusif Model 3

F. Pembagian Tugas Pimpinan Sekolah

Pimpinan sekolah terdiri dari, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tata usaha sekolah.

1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah berfungsi dan bertugas sebagai manajer, administrator, edukator, dan supervisor.

- a. Kepala Sekolah adalah penanggung jawab pelaksana pendidikan di sekolah termasuk di dalamnya adalah penanggung jawab pelaksanaan administrasi sekolah.
- b. Kepala Sekolah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan di sekolah meliputi aspek edukatif dan administratif, yaitu pengaturan:
 - 1) Administrasi kepeserta didikan
 - 2) Administrasi kurikulum
 - 3) Administrasi ketenagaan
 - 4) Administrasi sarana-prasarana
 - 5) Administrasi keuangan
 - 6) Administrasi hubungan dengan masyarakat
 - 7) Administrasi kegiatan pembelajaran

Agar tugas dan fungsi Kepala Sekolah berjalan baik dan dapat mencapai sasaran perlu adanya jadwal kerja Kepala Sekolah yang mencakup:

- 1) Kegiatan harian
- 2) Kegiatan mingguan
- 3) Kegiatan bulanan
- 4) Kegiatan semesteran
- 5) Kegiatan akhir tahun pelajaran, dan
- 6) Kegiatan awal tahun pelajaran

2. Wakil Kepala Sekolah

Tugas Wakil Kepala Sekolah adalah membantu tugas kepala sekolah, dan dalam hal tertentu mewakili Kepala Sekolah baik di dalam maupun ke luar, bila Kepala Sekolah berhalangan. Sesuai dengan banyaknya cakupan tugas, tugas wakil kepala sekolah meliputi hal-hal seperti berikut.

- a. Urusan Kepesertadidikan ruang lingkupnya mencakup:
 - 1) pengarahan dan pengendalian peserta didik dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah termasuk menciptakan suasana belajar dan bermain antar peserta didik yang kooperatif;

- 2) pembinaan dan pelaksanaan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan (6K); dan
- 3) pengabdian masyarakat.

b. Urusan Kurikulum

Ruang lingkupnya meliputi pengurusan kegiatan pembelajaran, baik kurikuler, ekstra kurikuler, maupun kegiatan pengembangan kemampuan guru melalui kelompok Kerja Guru (KKG) atau pendidikan dan pelatihan (diklat), serta pelaksanaan penilaian kegiatan sekolah. Dalam pelaksanaannya Wakil Kepala Sekolah berkoordinasi dan atau memberikan tugas dan atau kewenangan khusus kepada guru pembimbing khusus untuk mengembangkan kurikulum bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, terutama dalam pengembangan *Individual Educational Program (IEP)* atau program pendidikan yang diindividualkan (PPI) sebagai ciri khas pelayanan pendidikan pada sekolah inklusif. Di samping itu, guru pembimbing khusus juga diberikan wewenang untuk memberikan bimbingan kepada guru lainnya, dalam rangka memahami peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus yang meliputi aspek pengertian, jenis, klasifikasi dan karakteristik tiap-tiap anak yang membutuhkan pendidikan khusus, dengan maksud untuk memberi kemudahan para guru saat bersama guru pembimbing khusus mengembangkan kurikulum khususnya program pendidikan yang diindividualkan bagi tiap-tiap anak yang membutuhkan pendidikan khusus.

c. Urusan Ketenagaan

Ruang lingkupnya mencakup merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), mengawasi (*controlling*), dan mengevaluasi (*evaluation*). Hal-hal yang berkaitan dengan ketenagaan. Implementasi dari manajemen ketenagaan ini adalah bagaimana membangun sinergia antara guru-guru reguler dengan guru pembimbing khusus, sehingga terjadi sebuah kolaborasi yang kooperatif dalam rangka memberikan layanan pembelajaran optimal kepada seluruh peserta didik.

d. Urusan Sarana-prasarana

Ruang lingkupnya mencakup merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), mengawasi (*controlling*), dan mengevaluasi (*evaluation*), hal-hal yang berkaitan sarana-prasarana sekolah.

Di samping sarana dan prasarana pada umumnya, yang harus diperhatikan adalah pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana khusus (*aksesibilitas*) peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus.

e. Urusan Keuangan

Ruang lingkupnya mencakup merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), mengawasi (*controlling*), dan mengevaluasi (*evaluation*), hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.pendanaan sekolah.

f. Urusan Hubungan dengan Masyarakat (Humas) ruang lingkupnya mencakup:

- 1) Memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan sekolah, situasi, dan perkembangan sekolah sesuai dengan pende-legasian Kepala Sekolah.
- 2) Menampung saran-saran dan pendapat masyarakat untuk memajukan sekolah.
- 3) Membantu mewujudkan kerjasama dengan lembaga yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan pengabdian masyarakat.
- 4) Melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan sekolah mitra atau pusat-pusat sumber (sekolah khusus terdekat yang dirujuk).

g. Urusan Kegiatan Pembelajaran

Ruang lingkupnya mencakup mengorganisasikan (*organizing*), mengarahkan (*directing*), mengkoordinasikan (*coordinating*), mengawasi (*controlling*), dan mengevaluasi (*evaluation*), hal-hal yang berkaitan dengan guru. Kegiatan pembelajaran dalam kelas-kelas inklusi harus tercipta suasana belajar yang kooperatif antara peserta didik peserta didik biasa dengan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Anak-anak biasa harus dikondisikan untuk memiliki sikap empati terhadap anak yang membutuhkan pendidikan khusus, dengan demikian anak yang membutuhkan pendidikan khusus akan merasa nyaman belajar bersama-sama dengan anak-anak sebaya lainnya, yang akhirnya tidak merasa *inferior* (rendah diri).

G. Tata Usaha

Ruang lingkup tugas Tata Usaha adalah membantu Kepala Sekolah dalam menangani pengaturan:

1. Administrasi kepeserta didikan
2. Administrasi kurikulum
3. Administrasi ketenagaan
4. Administrasi sarana-prasarana
5. Administrasi keuangan
6. Administrasi hubungan dengan masyarakat
7. Administrasi kegiatan pembelajaran

H. Berbagai Guru Sekolah Inklusi

1. Guru Pembimbing Khusus (GPK)

Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang berkualifikasi sarjana (S1) pendidikan luar biasa (ortopedagog) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pendamping, dan bekerja sama dengan guru kelas atau guru bidang studi dalam memberikan assesmen, menyusun program pengajaran individu. Disamping itu GPK bertugas memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif.

Materi yang menjadi tanggung jawab GPK meliputi layanan pembelajaran pra-akademik, layanan kekhususan dan layanan pendidikan bagi ABK yang mengalami hambatan dalam pembelajaran akademik. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka GPK haruslah berlatar belakang pendidikan khusus atau guru reguler yang telah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Guru Kelas

Guru kelas adalah guru yang mengikuti kelas pada satuan pendidikan sekolah dasar atau yang sederajat, yang bertugas melaksanakan pembelajaran seluruh mata pelajaran pada satuan pendidikan tersebut, kecuali pendidikan agama dan olahraga.

3. Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran adalah guru yang bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat, serta Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan.

4. Tenaga Ahli

Tenaga ahli pada sekolah inklusif adalah tenaga profesional pada disiplin ilmu tertentu yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran pada sekolah inklusif. Tenaga ahli tersebut antara lain pedagog, psikolog, psikiater, dokter spesialis, serta rohaniwan.

5. Peserta Didik

Peserta didik adalah seseorang yang sedang mengikuti pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tertentu sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.

6. Komite Sekolah

Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri non-profit dan non-politis yang mewadai peran serta masyarakat sebagai mitra sekolah, yang dibentuk

berdasarkan musyawarah oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tertentu yang merepresentasikan dari berbagai unsur masyarakat.

Peran utama komite sekolah adalah untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan, baik pada satuan pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

7. Guru Bimbingan Penyuluhan

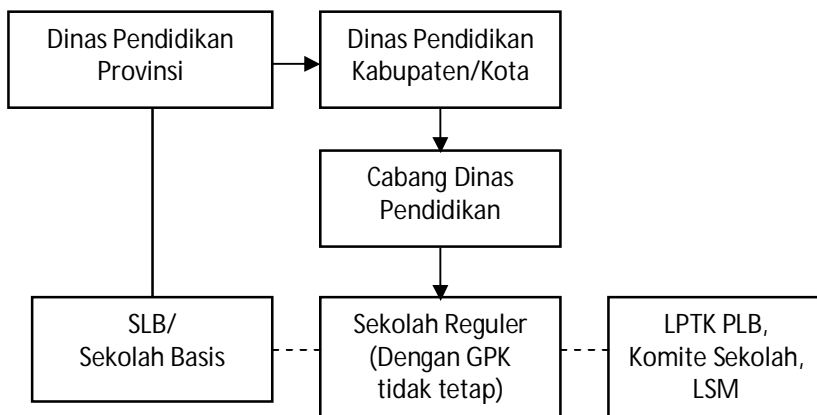
Guru bimbingan dan konseling adalah guru yang bertanggung jawab untuk mencari solusi bagi semua peserta didik pada sekolah inklusif. yang mengalami kesulitan dalam belajar, sosialisasi, perilaku sosial, emosi, etika sosial sesuai dengan irama perkembangan anak.

I. Pembinaan Sekolah Inklusi

1. Alternatif 1

Sekolah reguler (SD) yang menyatakan sebagai sekolah inklusi bila belum memiliki guru pembimbing khusus (Guru Tetap), bisa meminta guru pembimbing khusus dari Sekolah Luar Biasa yang berlokasi tidak lebih dari 5 Km dari Sekolah Dasar yang bersangkutan. Dengan demikian Guru Sekolah Luar Biasa yang diberi tugas sebagai Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi (mungkin beberapa sekolah) merasa tidak terlalu jauh, sehingga dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif.

Secara organisator, pola pembinaan sekolah inklusi ini sama dengan sekolah reguler (SD), yang secara diagramatis seperti di bawah ini.

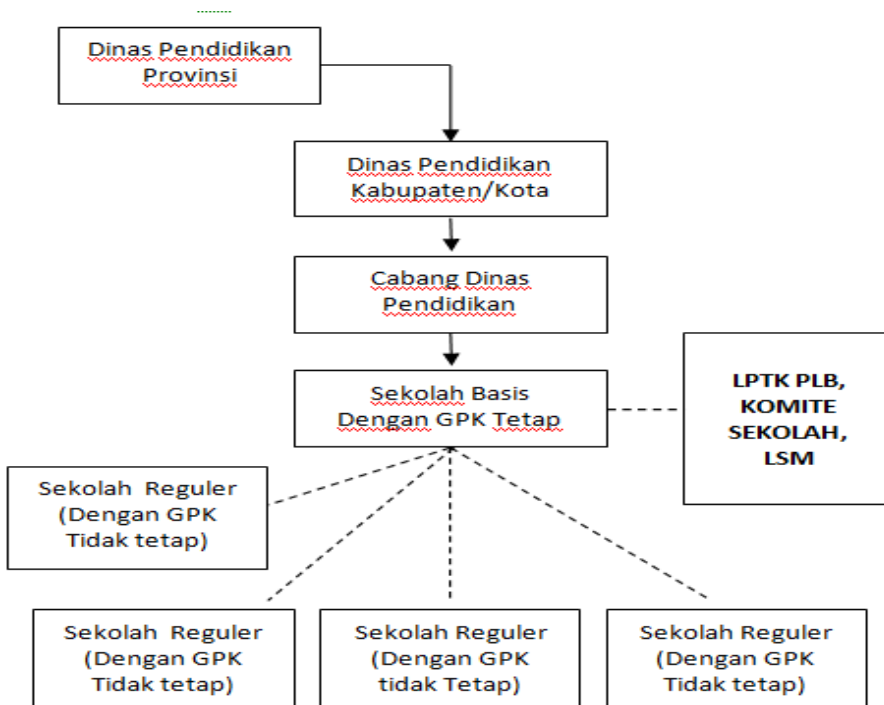


Keterangan : ----- = Garis Koordinasi
 —————> = Garis Komando/Pembinaan
 GPK = Garis Koordinasi
 LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

2. Alternatif 2

Sekolah reguler yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi memiliki Guru Pembimbing Khusus (Guru Tetap) yang berlatar belakang pendidikan luar biasa atau berlatar belakang pendidikan umum tetapi sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang ke PLB-an, sehingga faktor jarak dan lokasi Sekolah Khusus tidak menjadi pertimbangan, karena sekolah ini sudah dapat mandiri. Sekolah ini disebut Sekolah Inklusi Basis (memiliki guru pembimbing khusus tetap)

Secara organisatoris, pola pembinaan sekolah inklusi ini sama dengan sekolah reguler yang secara diagramatis seperti di bawah ini.



Keterangan : ----- = Garis Koordinasi
 ----- = Garis Komando/Pembinaan
 GPK = Guru Pendidikan Khusus
 LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi era IPTEK yang global sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pendidikan. Dengan demikian pendidikan harus mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi individu untuk mencapai suatu kesejahteraan melalui: *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), *Learning to be* (belajar untuk menjadi), *Learning to do* (belajar untuk mengerjakan sesuatu), dan *Learning to live together* (belajar untuk dapat mengaktualisasikan diri).

Meskipun telah diketahui bahwa salah satu usaha untuk mengembangkan potensi manusia adalah melalui pendidikan, namun sampai saat ini, pendidikan belum banyak dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Padahal salah satu dari tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik pribadi maupun masyarakat dan berlangsung seumur hidup (*live long education*), akibatnya tanggung jawab dalam bidang pendidikan yang seharusnya didukung bersama oleh pemerintah, masyarakat dan para orang tua peserta didik, kenyataannya hanya dibebankan kepada salah pihak saja.

Peran pemerintah dalam memajukan pendidikan sudah cukup banyak seperti menyelenggarakan sarana dan prasarana, ketenagaan, finansial dan kurikulum. Walaupun peran beberapa orang tua dalam bidang pendidikan banyak yang aktif, dalam membantu mengajar di lingkungan perumahan kumuh, namun peranannya masih terbatas pada pemberian sumbangan dana melalui Komite Sekolah. Sementara itu masyarakat luas, belum berperan secara optimal.

Perubahan sistem Pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menghendaki peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah daerah termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini tercantum dalam tujuan otonomi daerah, yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat,
2. Meningkatkan peran serta masyarakat,
3. Meningkatkan sumber dana, dan
4. Terlibat dalam penyelenggaraan.

Peranan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan antara lain:

1. Pemberian pertimbangan dan/atau masukan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan daerahnya.
2. Pendukung antara lain dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat daerahnya dan pendanaannya
3. Pengontrol dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang berlaku di daerahnya dan dalam penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
4. Mediator antara pemerintah baik pusat dan/atau daerah dengan anggota dan atau kelompok masyarakat termasuk pendidikan.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dana atau secara kelembagaan, namun peranan masyarakat tidak terlepas dari budaya daerah setempat yang merupakan ciri dan berlangsung turun temurun. Hal ini berdampak pada sikap dan tingkah-laku mereka dalam menghadapi dan mengupayakan suatu usaha pendidikan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, bidang pendidikan adalah termasuk hal yang penting. Perkembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) secara global dan pasar bebas menghendaki persaingan di segala bidang, tidak saja di tingkat regional, tetapi nasional dan internasional.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka potensi masyarakat perlu dibina dan diberdayakan sebagai suatu sumber daya yang berkualitas, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan persaingan global untuk membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensinya.

Pendidikan harus mencakup semua orang tanpa terkecuali, yaitu tidak memandang ras, suku, etnik, agama, diskriminasi antara mereka yang pada umumnya dengan yang memiliki kebutuhan khusus, antara perempuan dan laki-laki, serta antara masyarakat yang kurang mampu dengan masyarakat yang mampu dalam bidang ekonomi.

Pada beberapa budaya tertentu, perilaku pendidikan individu tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Pada masyarakat Indonesia dimana sistem keluarga besar dan suku menjadi dominan maka untuk memberdayakan masyarakat hendaknya harus memberdayakan sistem lingkungan seperti pada skala mikro dan makro.

Pada mikro lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat terdekat menjadi wadah interaksi sosial, sedangkan pada skala makro merupakan budaya dari suatu bangsa yang menjadi identitas suatu bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat lebih terbuka untuk menerima berbagai informasi dan mempertimbangkan kemampuan mereka berperan aktif dalam setiap kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Saat ini dalam dunia pendidikan dikenal sistem inklusif yang merupakan satu alternatif pendidikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, meskipun pendidikan ini telah dilaksanakan di beberapa negara maju. Keberhasilan pendidikan inklusif tidak dapat berjalan dengan baik apabila penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan pendidikan ini tidak didukung oleh masyarakat. Untuk itu, diperlukan usaha memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan inklusif di Indonesia.

Membangun pendidikan inklusif harus melalui hubungan antar masyarakat dengan berbagai pertimbangan yang dipengaruhi oleh berbagai pengalaman, kepercayaan, dan sikap masyarakat, sehingga kesuksesan pendidikan inklusif tergantung pada keterkaitan antara kepercayaan, nilai dan sikap dari semua elemen yang merupakan suatu ikatan kuat termasuk orang tua, guru, sistem yang mendukung, kurikulum, siswa dan masyarakat.

Penerapan pendidikan inklusif yang baik akan meningkatkan sosialisasi, *self esteem* atau kepercayaan diri, akademik dan sumber daya siswa, baik yang memerlukan pendidikan khusus maupun yang tidak. Hal ini juga sesuai dengan falsafah Negara kita Bhineka Tunggal Ika (keberagaman dalam suatu kesatuan).

Agar masyarakat dapat diberdayakan dalam usaha mengembangkan dan menyukseskan pendidikan inklusif, diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) BAB III Pasal 4 Ayat (6) yang menyatakan bahwa: Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Peran serta masyarakat luas terhadap pendidikan inklusif akan lebih berhasil dan tepat guna bila ada suatu pedoman sebagai landasan pemberdayaan. Untuk itu perlu disusun Buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan atau peran serta seseorang dan atau kelompok dalam suatu aktivitas tertentu atau obyek tertentu. Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Partisipasi seseorang dan/atau suatu kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif tergantung pada pengetahuan dan/atau persepsi tentang pendidikan inklusif, sehingga partisipasi tersebut akan terlihat pada:

- a. Cara anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- b. Reaksi anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- c. Sikap anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan tindakan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bentuk tingkah laku yang hendak dilakukannya terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan keyakinan-keyakinan yang ada tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut.
- d. Kebutuhan anggota masyarakat dan atau kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Namun demikian pengetahuan dan persepsi masyarakat juga sangat tergantung pada apakah dalam anggota keluarga mereka terdapat anak atau individu yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini sangat berhubungan dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat itu sendiri.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

- a. Tingkat keterlibatan, mulai dari sekedar mengetahui sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga maupun materi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keterlibatan ini dipengaruhi pula oleh lingkungan dari individu atau kelompok masyarakat tersebut.
- b. Prakarsa keterlibatan yang terdiri dari keterlibatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara spontan sampai melalui suatu usaha persuasif.
- c. Organisasi keterlibatan, yang terdiri dari keterlibatan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif.
- d. Sikap anggota masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam keterlibatan, mulai dari mendukung setuju, sampai menentang terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif.

Menurut Lang dan Berberich (1995) dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif, partisipasi anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat sangat penting. Dalam membangun atmosfir pendidikan inklusif sangat diperlukan suatu rentangan yang luas dari hubungan antara anggota masyarakat dan berbagai pertimbangan yang semuanya dipengaruhi dari berbagai pengalaman, kepercayaan dan sikap. Dengan kata lain atmosfir pendidikan inklusif

tidak dapat terbentuk tanpa dukungan dari berbagai pihak termasuk partisipasi masyarakat. Sikap, nilai-nilai, kepercayaan dari masyarakat dan orang tua menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan karena dalam era desentralisasi masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan segala potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan inklusif. Partisipasi masyarakat dimasa sekarang diarahkan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan.

Bentuk partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain seperti berikut.

- a. Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, SMA/SMK/MAN.
- b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga pendidik untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan proses pembelajaran, pengajaran, bimbingan, dan/atau pelatihan peserta didik.
- c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan proses pembelajaran.
- d. Berpartisipasi dalam membuat program-program untuk dilaksanakan dalam pendidikan inklusif. Dalam pembuatan rencana program masyarakat sekitar dapat dilibatkan, karena masyarakat mengetahui jenis kebutuhan pendidikan yang diperlukan oleh peserta didik. Sehingga program-program pendidikan akan lebih bervariasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pendidikan di lingkungannya.
- e. Pengadaan dana pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis.
- f. Pengadaan dana dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan proses pembelajaran.
- g. Pengadaan dana dan pemberian bantuan buku pelajaran, peralatan pendidikan inklusif untuk pelaksanaan proses pembelajaran.
- h. Pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk magang dan/atau latihan di dunia kerja serta menyalurkan lulusan ke lembaga-lembaga yang terkait sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya.

- i. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan inklusif.
- j. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
- k. Mengawasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan, karena masyarakat adalah sebagai salah satu penanggung jawab dari keberhasilan pendidikan inklusif. Dengan terlibatnya masyarakat maka hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dapat segera diatasi.
- l. Mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bersama-sama dengan pihak yang terkait. Meskipun evaluasi penyelenggaraan dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi masukan dari masyarakat sangat berarti bagi keberhasilan pendidikan inklusif. Evaluasi dari masyarakat dapat meningkatkan mutu dari pendidikan inklusif, karena umumnya penilaian masyarakat bersifat obyektif, terbuka, dan transparan

3. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan masih belum maksimal. Meskipun beberapa elemen masyarakat telah melibatkan diri dalam penyelenggaraan pendidikan tetapi sifatnya masih belum permanen, karena penanaman modal bidang pendidikan belum banyak menghasilkan keuntungan seperti di dunia usaha.

Tidak dapat disangkal dunia pendidikan masih tertinggal dengan dunia ekonomi padahal dunia pendidikan merupakan landasan manusia berlaku ekonomi. Sampai saat ini hanya anggota masyarakat dan atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertarik dengan permasalahan pendidikan dan berupaya untuk mengatasi bersama dengan pemerintah. Biasanya anggota atau kelompok masyarakat pemerhati bidang pendidikan yang terlibat dalam pendidikan pernah memiliki pengalaman atau berasal dari keluarga pemerhati pendidikan.

Demikian pula dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, biasanya keterlibatan mereka karena memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan inklusif harus diberdayakan, karena masih sedikit yang tahu tentang pentingnya pendidikan inklusif dalam rangka usaha memeratakan dan menyamakan hak dan martabat semua peserta didik sebagai anggota masyarakat yang berhak ikut dalam mengembangkan dan memajukan negara.

Pada saat ini ditengah krisis ekonomi yang belum teratasi dengan tuntas, terdapat sejumlah industri telah menaruh perhatian positif terhadap pendidikan.

Perhatian ini harus secara khusus karena ternyata tidak semua pelaku industri tidak acuh terhadap dunia pendidikan. Beberapa pelaku dunia usaha sebenarnya berkeinginan untuk membantu, tetapi tidak semua dari mereka tahu cara dan dalam bentuk apa sehingga bantuan itu menjadi lebih efektif dan langsung hasilnya dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pendidikan. Sehingga pelaku pendidikan harus tanggap dalam menyebutkan usaha dan niat pelaku industri yang berniat membantu dalam pengembangan dunia pendidikan.

Konsep dan keunggulan dari pendidikan inklusif diinformasikan agar masyarakat industri memperoleh gambaran positif dan benar tentang pendidikan inklusi. Sehingga diharapkan mereka mau untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan finansial pada penyelenggara pendidikan inklusif.

Beberapa dari kelompok masyarakat industri telah memberikan berbagai perhatian dalam bentuk: pemberian beasiswa, menjadi orang tua asuh, perbaikan gedung dan fasilitas lain seperti perpustakaan keliling. Bentuk partisipasi masyarakat industri ini hendaknya diberdayakan dan ditindaklanjuti agar diikuti oleh elemen masyarakat lain untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan.

Untuk lebih memotivasi partisipasi dari masyarakat industri terlibat dalam tanggung jawab kesuksesan pendidikan inklusif di Indonesia, pemerintah dapat mengupayakan beberapa hal, yaitu:

- a. Memberikan berbagai insentif seperti kemudahan perizinan dalam penyelenggaraan usaha.
- b. Pemberian penghargaan kepada dunia usaha/industri yang berperan aktif dalam membantu pendidikan.

Bantuan dari dunia industri ini dapat diarahkan oleh pemerintah dengan membuat undang dan/atau peraturan seperti keharusan penyediaan jumlah tertentu dari anggaran pengeluarannya untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif atau pemberian kesempatan kepada siswa termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk menggunakan berbagai fasilitas industri untuk mengembangkan keterampilan dalam usaha pembelajaran dan sosialisasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam skala tertentu hendaknya menjangkau masyarakat sekitar sekolah dan/atau lembaga pendidikan dijadikan sebagai suatu komunitas sekolah. Masyarakat sekitar sekolah dapat dilibatkan dalam:

- a. Membuat suatu kebijakan dan/atau program-program pendidikan inklusif.
- b. Selain itu mereka dapat terlibat dalam pengevaluasian program dan produk lembaga baik persekolahan dan non persekolahan inklusif agar keterandalan program inklusif tetap terpelihara dan berkesinambungan.

Lembaga-lembaga seperti pondok pesantren, tempat-tempat ibadah, lingkungan keluarga kecil dan atau keluarga besar, lembaga-lembaga adat, dan partai-partai politik perlu diberi informasi dan pemberian motivasi agar lebih menyadari potensi peran dan tanggungjawabnya dalam melakukan pendidikan inklusif bagi anak-anak bangsa yang memiliki kebutuhan khusus. Apabila masyarakat Indonesia telah peduli dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan inklusif maka hasil dari pendidikan ini akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain meskipun mereka memiliki kebutuhan khusus.

Beberapa upaya dalam memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka dapat terlibat dalam upaya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif antara lain:

- a. Sosialisasi tentang konsep, penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif kepada para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan agar mereka memiliki persepsi yang sama. Kegiatan sosialisasi bisa berbentuk seminar, workshops, diskusi-diskusi ilmiah, temu wicara, sampai pada acara pertemuan warga desa.

Sosialisasi tidak hanya pada masyarakat pendidikan dan atau yang berpendidikan tetapi harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Bahasa yang digunakan juga bervariasi tergantung pada bahasa setempat, sederhana dan mudah dipahami.

Tujuan sosialisasi akan tercapai apabila menggunakan bahasa yang baik dan menarik. Sebaiknya dalam pemberian informasi tidak terkesan memaksakan kehendak, tetapi lebih kearah pemahaman dan menggunakan logika ilmiah yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat.

- b. Upaya lain dalam memberdayakan partisipasi masyarakat adalah dengan memfasilitasi berbagai kegiatan satuan pendidikan inklusif dengan cara:
 - 1) Masyarakat diberi kesempatan membantu dalam melaksanakan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus sekaligus mengetahui akan pentingnya pendidikan inklusif untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut.
 - 2) Masyarakat dilibatkan dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar. hal ini akan menghasilkan suatu keuntungan karena kurikulum dan bahan ajar dikembangkan secara bersama sehingga program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kreatif. Di samping pengembangan bahan ajar hendaknya masyarakat juga dilibatkan dalam pembuatan media pembelajaran yang bernuansa IPTEKS, agar kualitas pendidikan inklusif dapat ditingkatkan.

- 3) Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan. Disatu sisi penyelenggara pendidikan inklusif terbantu karena lebih efektif menggunakan masyarakat lingkungan sekitar, disisi lain mengurangi angka pengangguran.
 - 4) Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan manajemen sekolah, pengadaan dan pengelolaan sarana-prasarana. Hal ini dilakukan apabila terdapat anggota masyarakat yang memiliki kemampuan manajerial.
 - 5) Masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan aktivitas peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini perlu ditingkatkan menggunakan teknologi modern seperti pembelajaran melalui televisi, telepon dan internet.
 - 6) Memberdayakan masyarakat dalam upaya mensosialisasikan pendidikan inklusif kepada masyarakat lain.
- c. Pemerintah bersama penyelenggara pendidikan inklusif melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis melalui berbagai media elektronik dan cetak tentang:
- 1) Konsep dan perlunya penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang sama.
 - 2) Program Pemerintah tentang sistem pendidikan inklusif baik yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan.
 - 3) Hasil-hasil penelitian dalam bidang pendidikan inklusif baik di dalam maupun di luar negeri.
- d. Pemerintah membuat video, film, sinetron, iklan layanan dan sejenisnya tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di dalam dan di luar negeri. Dengan demikian masyarakat dapat memper-timbangkan dalam membuat keputusan partisipasi mereka terhadap pendidikan inklusif. Keberhasilan-keberhasilan dalam pendidikan inklusif di luar negeri dan hambatan-hambatan yang terjadi harus diinformasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia.
- e. Pemerintah secara berkala dan berkesinambungan memberikan informasi tentang kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pemberian informasi ini didasarkan pada pengalaman peserta didik dalam satuan pendidikan inklusif.

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan inklusif dapat dikembangkan menjadi hubungan simbiosis antara sekolah, masyarakat, pemerintah. Hubungan simbiosis ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia.

Sementara itu, kalangan *stakeholders* pendidikan hendaknya perlu dikembangkan kesadaran untuk tidak mengambil keuntungan finansial semata dari pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang mendapat dana dari penyelenggaraan pendidikannya perlu didorong menggunakan semua dana untuk investasi bagi peningkatan mutu pendidikan inklusif.

Hubungan simbiosis tersebut perlu difasilitasi melalui strategi antara lain sebagai berikut.

1. Dikembangkan wadah yang memungkinkan banyak pihak saling bertemu, berdiskusi, dan membangun komitmen bersama. Wadah tersebut berfungsi melembagakan hubungan simbiosis tersebut sehingga hubungan itu tidak hanya terjadi secara insidental, melainkan secara berkesinambungan.
2. Dilakukan regulasi yang mempunyai kekuatan hukum, mengatur kewenangan dan kekuasaan pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa yang antara lain mengatur sanksi atas pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah tetap memainkan peranan yang strategis dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif pada era otonomi daerah.
3. Dikembangkan upaya-upaya untuk memotivasi orang tua, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan inklusif untuk menjalin hubungan sinergis dan saling menguntungkan dengan pemerintah. Bentuk wadah bersama tersebut dapat berupa organisasi struktural atau organisasi informal yang lebih bersifat fungsional.

C. Wadah Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu diwadahi agar dapat dikelola dan dikoordinasikan dengan baik dan bermakna bagi sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan. Wadah partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut.

1. Dewan Pendidikan

Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 dan Kepmendiknas Nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dimana dalam pasal 1 Kepmendiknas tersebut dinyatakan bahwa (1) pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten kota. (2) pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Dalam lampiran 1 Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa dewan pendidikan adalah: badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa: Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografis dan nilai-nilai daerah setempat, hingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kemudian dalam Lampiran 1 Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa tujuan terbentuknya Dewan Pendidikan adalah:

- a. Mewadahi serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

2. Keanggotaan Dewan Pendidikan

Keanggotaan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, yang di daerahnya terdapat satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif, sama halnya seperti keanggotaan Dewan Pendidikan pada umumnya. Dalam Lampiran 1 Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:

a. Unsur masyarakat dapat berasal dari:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan.
2. Tokoh masyarakat.
3. Tokoh pendidikan.
4. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, Madrasah, Pesantren).
5. Dunia usaha/industri/asosiasi profesi.
6. Organisasi profesi tenaga kependidikan.
7. Komite sekolah.

b. Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 orang dan jumlah asal

Dari kutipan di atas dapat ditafsirkan bahwa keanggotaan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang di daerahnya menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka keanggotaan dewan pendidikan tersebut hendaknya dari unsur-unsur yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan termasuk pendidikan inklusif.

c. Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan kabupaten/kota yang di daerahnya terdapat satuan Pendidikan Inklusif mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan Dewan Pendidikan kabupaten/kota pada umumnya, seperti tercantun dalam Lampiran 1 Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa:

Dewan Pendidikan berperan sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (legislatif) dengan masyarakat.

Dewan Pendidikan berfungsi sebagai:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan, diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai:
 - a) Kebijakan dan program-program dalam pendidikan.
 - b) Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan.
 - c) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
 - d) Kriteria fasilitas pendidikan.
 - e) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Melihat peran dan fungsi Dewan Pendidikan pada umumnya di atas, maka Dewan Pendidikan kabupaten /kota yang di daerahnya terdapat satuan pendidikan inklusif, hendaknya memiliki peran dan fungsi yang lebih menekankan kepada pengembangan pendidikan inklusif.

2. Komite Sekolah

Sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa Komite Sekolah adalah: badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah inklusif sama seperti komite sekolah reguler hendaknya ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk kekuatan hukum maka Komite Sekolah reguler, dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintah setempat seperti Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota.

Sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, komite sekolah bertujuan untuk:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan komite sekolah inklusif tidak berbeda dengan tujuan komite sekolah reguler.

a. Keanggotaan Komite Sekolah Inklusif

Susunan keanggotaan Komite Sekolah inklusif sama halnya dengan keanggotaan Komite Sekolah reguler yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Men-

diknas nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun terdapat penegasan komitmen terhadap pendidikan inklusi. Keanggotaan dari komite sekurang-kurangnya sama seperti jumlah komite sekolah reguler, yaitu 9 orang dan jumlahnya gasal, terdiri atas:

- 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - a) Orang tua/wali peserta didik. (peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik pada umumnya).
 - b) Tokoh masyarakat yang ditunjuk dan/atau berminat untuk mengabdikan dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
 - c) Tokoh pendidikan yang mempunyai pandangan yang luas dan luwes tentang pendidikan inklusif.
 - d) Dunia usaha/industri yang mempunyai keinginan untuk terlibat pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
 - e) Organisasi profesi tenaga kependidikan yang handal dan memahami konsep dan penyelenggaraan serta pelaksanaan pendidikan inklusif.
 - f) Wakil alumni yang memiliki pengetahuan dan kemauan dalam kemajemukan pendidikan serta mau terlibat dalam pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.
 - g) Wakil peserta didik yang terdiri dari peserta didik 'normal' dan yang berkebutuhan khusus.
- 2) Unsur dewan guru dan yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu Badan Pertimbangan Desa dapat dilibatkan pula sebagai anggota komite sekolah inklusif (maksimal 3 orang).

b. Peran dan Fungsi Komite Sekolah Inklusif

Peran dan fungsi komite sekolah inklusif sama halnya seperti peran dan fungsi komite sekolah reguler seperti yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu:

Komite Sekolah berperan sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*supporting agency*). Baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a) Kebijakan dan program pendidikan.
 - b) Rencana Anggaran Pendidikan Belanja Sekolah (RAPBS).
 - c) Kriteria tenaga kependidikan pada sekolah.
 - d) Kriteria tenaga kependidikan pada sekolah.
 - e) Kriteria fasilitas pendidikan.
 - f) Hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sekolah.
- 7) Melakukan evaluasi pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah.

Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif maka peran dan fungsi komite sekolah pada satuan pendidikan inklusif, hendaknya lebih menekankan pada peningkatan dan pengembangan terlaksananya pendidikan inklusif yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan masyarakat.

c. Akuntabilitas Komite Sekolah

Komite sekolah inklusif mempunyai akuntabilitas yang seperti komite sekolah reguler yaitu:

- 1) Menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholders secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.

- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak) maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

4. Forum Orang tua Anak Berkebutuhan Khusus

Peran orang tua anak berkebutuhan khusus sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Orang tua adalah pihak yang pertama dalam memahami, dan menemukan permasalahan tentang kondisi anak baik pada segi sosial, emosional, maupun fisik. Pemahaman terhadap kondisi kelainan anak secara dini dan perkembangan pendidikannya di sekolah inklusif serta tindak lanjut tugas-tugas di rumah perlu menjadi perhatian yang serius. Demikian juga komitmen dalam membantu pengembangan potensi anak antar orang tua anak berkebutuhan khusus merupakan hal yang esensial yang harus dikedepankan.

Dalam rangka ikut mengembangkan potensi yang dimiliki anak orang tua dapat melakukan dengan cara memahami kondisi anak secara utuh baik mental, sosial, dan fisik, menindaklanjuti tugas yang diberikan guru kepada anak selama di rumah serta mendata permasalahan lain yang muncul baik secara temporer maupun permanen. Untuk meningkatkan keterampilan tersebut maka antar orang tua anak berkebutuhan khusus dapat membentuk wadah forum orang tua anak berkebutuhan khusus.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh forum orang tua anak berkebutuhan khusus seperti:

- a. Dialog dengan pihak sekolah tentang perkembangan anak.
- b. Diskusi tentang pemahaman anak berkebutuhan khusus dengan mendatangkan nara sumber.
- c. Memecahkan masalah aktual yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan pihak yang berkompeten.

Kegiatan forum orang tua anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan secara periodik mingguan/bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota, sedangkan biaya operasional kegiatan ditanggung bersama antar anggota dan dapat pula diperoleh dari donatur yang sifatnya tidak mengikat.

5. Forum Guru Peduli Pendidikan Inklusi

Berbagai ragam dan tingkat kesulitan yang dirasakan guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama oleh guru-guru reguler. Sesuai dengan tugas keprofesionalannya, guru merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Guru yang menangani pendidikan inklusif hendaknya mampu mengemban tugas sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki

yaitu membawa peserta didik mampu mengoptimalkan potensinya sesuai yang diharapkan. Untuk itu guru perlu memfasilitasi proses pembelajaran dan memperhatikan perkembangan anak berkebutuhan khusus dalam berbagai dimensi yang mengarah pada kepemilikan dan perkembangan inteligensi, keterampilan belajar, sikap, keterampilan bekerja, dan kemandirian sosial.

Dalam rangka peningkatan kompetensi guru pendidikan inklusif tersebut diperlukan upaya dan komitmen bersama antara guru reguler dan guru pembimbing khusus melalui agenda berbagai kegiatan yang dapat dirancang bersama-sama melalui wadah forum guru peduli pendidikan inklusif.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang peduli pendidikan inklusif dapat berupa: pelatihan, seminar, diskusi seperti;

- a. Identifikasi, asesmen dan intervensi pada anak-anak berkebutuhan khusus.
- b. Pemahaman anak berkebutuhan khusus.
- c. Rekayasa media pembelajaran.
- d. Teknik pembelajaran.
- e. Memecahkan masalah aktual yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Kegiatan forum guru peduli pendidikan inklusif dapat dilakukan secara periodik (bulanan/triwulanan) sesuai dengan kesepakatan anggota, sedangkan biaya operasional kegiatan ditanggung bersama antar anggota dan dapat pula diperoleh dari donatur yang sifatnya tidak mengikat.

6. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Inklusi

Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif agar dapat berjalan lancar sesuai harapan adalah menuntut adanya perhatian yang seimbang dari pemerintah, simultan dan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat. Seperti apapun kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini adalah kenyataan yang dapat diartikan sebagai modal dan pijakan upaya peningkatan layanan pada anak berkebutuhan khusus. Komitmen bersama antar unsur masyarakat yang terlibat dalam pendidikan inklusif merupakan kunci utama dan sebagai modal dasar yang harus dikedepankan agar kebutuhan peserta didik dapat terlayani sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pendidikan inklusif harus memiliki kesamaan visi, bersinergi membangun kekuatan bersama, menanggalkan tirani keberpihakan dan berfokus pada komitmen pengembangan pendidikan inklusif. Keanggotaan forum masyarakat peduli pendidikan inklusif bersifat terbuka bagi siapa saja seperti; guru khusus dan reguler, orang tua siswa, ahli pendidikan khusus, mahasiswa, dosen, tokoh-tokoh masyarakat, birokrat

pemerintahan, profesi lain yang terkait dengan pendidikan inklusif serta pihak lain yang peduli pendidikan inklusif.

Tujuan forum masyarakat peduli pendidikan inklusif antara lain:

- a. Memecahkan masalah aktual yang dihadapi orang tua anak berkebutuhan khusus.
- b. Memecahkan masalah yang dirasakan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi para profesional yang terkait dengan pendidikan inklusif (dokter, fisioterapis, okupasi terapis, speech therapist, psikolog),
- d. Mengkaji, mendesiminasikan, mengimplementasikan konsep-konsep pendekatan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Kegiatan forum masyarakat peduli pendidikan inklusif dapat berupa diskusi dan workshop yang dilakukan secara periodik (bulanan/triwulanan/catur wulanan) sesuai dengan kesepakatan anggota. Sedangkan kegiatan insidental berupa seminar. workshop dengan melibatkan forum/lembaga lain baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

Materi kajian utama membahas tentang: (1) asesmen, (2) strategi pembelajaran; (3) alat bantu pembelajaran; (4) sistem evaluasi; (5) habilitasi; dan (6) vokasional. Sedangkan materi kajian lain dapat dipilih dan ditentukan atas kesepakatan bersama yang dianggap urgen dan strategis, seperti manajemen pendidikan.

Dana pendukung operasional kegiatan ditanggung bersama (anggota), dan dapat pula digali dari lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun internasional.

BAB X

PENILAIAN HASIL BELAJAR MODEL SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilaian pendidikan terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian terdiri atas penilaian eksternal dan penilaian internal. Penilaian eksternal merupakan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melaksanakan proses pembelajaran. Penilaian eksternal dilakukan oleh suatu lembaga, baik dalam maupun luar negeri dimaksudkan antara lain untuk pengendali mutu. Adapun penilaian internal adalah penilaian yang dilakukan dan direncanakan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung dalam rangka penjaminan mutu.

Penilaian yang dimaksudkan pada pedoman ini merupakan penilaian internal (*internal assessment*) terhadap hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru di kelas atas nama sekolah untuk menilai kompetensi peserta didik pada tingkat tertentu pada saat dan akhir pembelajaran. Penilaian ini lebih dikenal dengan penilaian kelas. Kurikulum menghendaki adanya cara penilaian sehingga dapat diketahui perkembangan dan ketercapaian berbagai kompetensi peserta didik. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan pedoman penilaian tersendiri yang berlandaskan pada modifikasi pedoman penilaian standar yang disesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus.

B. Konsep Dasar Penilaian Kelas

1. Pengertian Penilaian Kelas

Penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan. Dengan kata lain, keputusan-keputusan pendidikan dibuat berdasarkan hasil analisis dan interpretasi atas informasi yang terkumpul. Informasi yang dikumpulkan dapat dalam bentuk angka melalui tes dan atau deskripsi verbal (melalui observasi).

Penilaian menjawab pertanyaan seberapa baik unjuk kerja peserta didik? Dalam konteks pendidikan inklusif baik tidaknya unjuk kerja peserta didik didasarkan atas kriteria yang mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dan seberapa peningkatan unjuk kerja peserta didik yang dikenai program pembelajaran individual (PPI). Anak berkebutuhan khusus dapat dinilai melalui dua kriteria yaitu terhadap anak berkebutuhan khusus yang setelah kurikulum, metode, strategi, media dimodifikasi sedemikian rupa sehingga anak dapat mengikuti kurikulum reguler, maka pedoman penilaiannya mengacu pada pedoman penilaian reguler, sedangkan terhadap anak berkebutuhan khusus yang terpaksa tidak dapat mengikuti kurikulum reguler dan diterapkan PPI, maka penilaiannya menggunakan modifikasi tersendiri.

Penilaian kelas adalah suatu bentuk kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran tertentu. Penilaian kelas diperlukan sebagai informasi yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keputusan tersebut berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi.

Data yang diperoleh guru selama pembelajaran berlangsung dapat dijamin dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang akan dinilai. Oleh sebab itu, penilaian kelas lebih merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk memberikan keputusan, dalam hal ini nilai terhadap hasil belajar peserta didik berdasarkan tahapan belajarnya. Dari proses ini, diperoleh potret/profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dicapai.

Digunakannya istilah penilaian kelas tidak berarti bahwa penilaian hanya dilakukan di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, secara formal dan informal, atau dilakukan secara khusus. Penilaian kelas dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar-mengajar.

Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti tes tertulis, penilaian hasil kerja peserta didik melalui kumpulan hasil kerja peserta didik (*portofolio*), penilaian produk, penilaian proyek dan penilaian unjuk kerja (*performance*) peserta didik.

2. Manfaat Penilaian Kelas

Manfaat penilaian kelas antara lain:

- a. Untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi, sehingga termotivasi untuk meningkatkan dan memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Pengumpulan informasi kemajuan belajar baik formal maupun informal diadakan dalam suasana yang menyenangkan dan memungkinkan adanya kesempatan yang terbaik bagi peserta didik untuk menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakannya. Prestasi belajar peserta didik tidak dibandingkan dengan prestasi kelompok, tetapi dengan prestasi atau kemampuan yang dimiliki sebelumnya; dengan demikian peserta didik tidak merasa dihakimi tetapi dibantu untuk mencapai apa yang diharapkan.
- a. Untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Pengumpulan informasi menentukan ada tidaknya kemajuan belajar dan perlu tidaknya bantuan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan, berdasarkan fakta dan bukti yang memadai. Kriteria penilaian karya peserta didik dapat dibahas guru dengan para peserta didik sebelum karya itu dikerjakan; dengan demikian peserta didik mengetahui patokan penilaian yang akan digunakan atau secara tidak langsung peserta didik terdorong agar berusaha mencapai harapan guru. Dengan demikian, peserta didik diberi kesempatan memperbaiki prestasi belajarnya.
- b. Untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan.
- c. Untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan belajar sedemikian rupa sehingga para peserta didik dapat mencapai kompetensi dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan.
- d. Untuk memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan sehingga partisipasi orang tua dan komite sekolah dapat ditingkatkan.

3. Fungsi Penilaian Kelas

Penilaian kelas memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Menggambarkan sejauhmana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi.
- b. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik

untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan (sebagai bimbingan).

- c. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu guru menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan.

1. Rambu-rambu Penilaian Kelas

a. Kriteria Penilaian Kelas

1) Validitas

Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dan alat penilaian yang digunakan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan isinya mencakup semua kompetensi yang terwakili secara proporsional.

Dalam pelajaran bahasa misalnya, guru menilai kompetensi berbicara. Penilaian valid jika menggunakan tes lisan. Jika menggunakan tes tertulis penilaian tidak valid.

2) Reliabilitas

Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi (keajegan) hasil penilaian. Penilaian yang reliabel (ajeg) memungkinkan perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi. Misal, guru menilai dengan proyek, penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian yang reliabel petunjuk pelaksanaan proyek dan penskorannya harus jelas.

3) Terfokus pada kompetensi

Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan), bukan pada penguasaan materi (pengetahuan).

4) Keseluruhan/Komprehensif

Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara, didukung alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik, sehingga tergambar adanya profil kemampuan peserta didik.

5) Objektivitas

Penilaian harus dilaksanakan secara objektivitas. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, menggunakan bahasa yang dapat dipahami peserta didik, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pembuatan keputusan atau pemberian angka (skor).

6) Mendidik

Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik.

b. Prinsip Penilaian Kelas

Dalam melaksanakan penilaian, guru seyogyanya:

- 1) Memandang penilaian dan kegiatan belajar-mengajar secara terpadu.
- 2) Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri.
- 3) Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik.
- 4) Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus dari peserta didik.
- 5) Mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik.
- 6) Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat pencapaian peserta didik. Penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, dan tingkah laku.

Agar penilaian objektif, guru berupaya secara optimal untuk:

- a) Memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dan tingkah laku dari sejumlah penilaian yang dilakukan dengan berbagai cara dan alat penilaian.
- b) Membuat keputusan yang adil tentang penguasaan kemampuan peserta didik dengan mempertimbangkan hasil kerja (karya) yang dikumpulkan dan perubahan tingkah laku.

Penilaian kelas dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini berarti suatu aktivitas penilaian dapat dilakukan setelah peserta didik mempelajari setiap kompetensi. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan informasi yang telah diperoleh melalui penilaian untuk masing-masing kompetensi.

Guru menetapkan tingkat pencapaian peserta didik berdasarkan hasil belajarnya pada kurun waktu tertentu dan dalam berbagai rentang situasi. Pada akhir satuan waktu (semester atau tahun), guru perlu membuat keputusan akhir tentang kemampuan yang telah dikuasai peserta didik berkaitan dengan indikator pencapaian yang telah ditetapkan secara nasional dalam kurikulum.

C. Teknik Penilaian

1. Prinsip penilaian ABK di sekolah inklusif

- a. Penilaian terhadap anak berkebutuhan khusus dengan modifikasi pembelajaran tidak menimbulkan masalah (tidak memerlukan PPI), maka kriteria penilaiannya menggunakan kriteria siswa reguler.

- b. Terhadap anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu memenuhi target kurikulum reguler sekalipun telah dimodifikasi sehingga menggunakan kurikulum PPI, maka kriteria penilaiannya berdasarkan seberapa daya serap atau pencapaian tujuan yang telah disusun dalam PPI, itulah nilai yang diperoleh.
- c. Jika setiap anak berkebutuhan khusus di kelas itu memerlukan PPI yang berbeda, maka penilaiannya atas dasar pencapaian tujuan masing-masing PPI untuk masing-masing anak. Hal ini dimungkinkan setiap anak mendapatkan nilai yang baik, sekalipun kemampuannya berbeda-beda.
- d. Penilaian kuantitatif dalam PPI harus dilampiri dengan penilaian narasi yang menjelaskan kompetensi yang telah dicapai anak berkebutuhan khusus.

2. Jenis Teknik penilaian

Terdapat tujuh teknik yang dapat digunakan, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri.

a. Penilaian Unjuk Kerja

1) Pengertian

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini tepat digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan unjuk kerja. Teknik penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Unjuk kerja yang dapat diamati seperti: bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/deklamasi, menggunakan peralatan laboratorium, dan atau mengoperasikan suatu alat.

Penilaian unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut.

- 1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
- b) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
- c) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
- d) Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati.
- e) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati
- f) Unjuk kerja terhadap anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan jenis dan tingkat kelainan anak.

2) Teknik Penilaian Unjuk Kerja

Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Untuk menilai kemampuan berbicara peserta didik, misalnya, perlu dilakukan pengamatan atau observasi berbicara yang beragam, seperti: diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan melakukan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Untuk mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan alat atau instrumen berikut.

a) Daftar Cek

Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek (*ya - tidak*). Pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati - tidak dapat diamati. Dengan demikian tidak terdapat nilai tengah. Berikut contoh daftar cek.

Contoh *checklists*

Format Penilaian Pidato Bahasa Inggris (Menggunakan Daftar Tanda Cek)

Nama peserta didik : _____
 Jenis kelainan : _____
 Kelas : _____

No	Aspek Yang Dinilai*)	Ya	Tidak
1.	Berdiri tegak		
2.	<i>Pronunciation</i> / lafal baik		
3.	Sistematika baik		
4.	Intonasi baik		
5.	Penyampaian gagasan jelas		
Skor yang dicapai			
Skor maksimum			

*) Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis dan tingkat kelainan.

b) Skala Rentang

Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu

karena pemberian nilai secara kontinu dengan kategori nilai lebih dari dua. Skala rentang tersebut, misalnya, *sangat kompeten - kompeten - agak kompeten - tidak kompeten*.

Penilaian sebaiknya dilakukan oleh lebih dari satu penilai agar faktor subjektivitas dapat diperkecil dan hasil penilaian lebih akurat. Berikut contoh skala rentang.

Contoh *rating scales*

Format Penilaian Pidato Bahasa Indonesia (Menggunakan Skala Penilaian)

Nama Siswa : _____

Jenis kelainan : _____

Kelas : _____

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai			
		1	2	3	4
1.	Berdiri tegak				
2.	<i>Pronunciation</i>				
3.	Sistematika				
4.	Intonasi				
5.	Kejelasan gagasan				
Jumlah					
Skor Maksimum		20			

Kriteria Penskoran nomor 1 dan 2:

1 = bila tidak pernah melakukan

2 = bila jarang melakukan

3 = bila kadang-kadang melakukan

4 = bila selalu melakukan

Kriteria penskoran nomor 3 dan 5, semakin baik penampilan siswa semakin tinggi skor yang diperoleh.

b. Penilaian Sikap

1) Pengertian

Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni: komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh

seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap.

Sikap berangkat dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk untuk terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan.

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut.

- a) **Sikap terhadap materi pelajaran.** Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.
- b) **Sikap terhadap guru/pengajar.** Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
- c) **Sikap terhadap proses pembelajaran.** Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.
- d) **Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan dengan suatu materi pelajaran.** Misalnya kasus atau masalah lingkungan hidup, berkaitan dengan materi Biologi atau Geografi. Peserta didik juga perlu memiliki sikap yang tepat, yang dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap kasus lingkungan tertentu (kegiatan pelestarian/kasus kerusakan lingkungan hidup). Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap program perlindungan satwa liar. Dalam kasus yang lain, peserta didik memiliki sikap negatif terhadap kegiatan ekspor kayu glondongan ke luar negeri.

e) **Sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran.**

Sikap berkaitan dengan perbedaan yang dialami peserta didik, baik anak berkebutuhan khusus terhadap anak lain di kelasnya ataupun anak lain terhadap anak berkebutuhan khusus.

2) Teknik Penilaian Sikap

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain: observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Teknik-teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Observasi perilaku

Perilaku anak pada umumnya menunjukkan kecenderungan anak dalam sesuatu hal. Misalnya anak yang biasa membolos sebagai kecenderungannya anak yang suka melanggar tata tertib sekolah. Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didik yang dibinanya. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan.

Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah. Berikut contoh format buku catatan harian.

Contoh isi Buku Catatan Harian:

No.	Hari/ tanggal	Nama peserta didik	Kejadian (positif atau negatif)

Catatan dalam lembaran buku tersebut, selain bermanfaat untuk merekam dan menilai perilaku peserta didik sangat bermanfaat pula untuk menilai sikap peserta didik serta dapat menjadi bahan dalam penilaian perkembangan peserta didik secara keseluruhan.

Selain itu, dalam observasi perilaku dapat juga digunakan daftar cek (*Checklist*) yang memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul dari peserta didik pada umumnya atau dalam keadaan tertentu. Berikut contoh format Penilaian Sikap.

Contoh Format Penilaian Sikap dalam praktek IPA:

No.	Nama	Perilaku				Nilai	Keterangan
		Bekerja sama	Berinisiatif	Penuh perhatian	Bekerja sistematis		
1.	Ratna						
2.	Talisa						
3.						

Catatan:

Kolom perilaku diisi dengan angka yang sesuai:

1 = sangat kurang

2 = kurang

3 = sedang

4 = baik

5 = amat baik

b) Pertanyaan langsung

Kita juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap anak berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik.

c) Laporan pribadi

Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang anak berkebutuhan khusus. Dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya.

c. Penilaian Tertulis

1) Pengertian

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes Tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta didik tidak selalu merespon

dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, isyarat, dan lain sebagainya.

2) Teknik Penilaian

Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu:

- a) Soal dengan memilih jawaban
 - (1) pilihan ganda
 - (2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak)
 - (3) menjodohkan
- b) Soal dengan mensuplai jawaban.
 - (1) isian atau melengkapi
 - (2) jawaban singkat atau pendek
 - (3) soal uraian

Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memilih jawaban benar-salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat (pengetahuan). Tes pilihan ganda dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Pilihan ganda mempunyai kelemahan, yaitu peserta didik tidak mengembangkan sendiri jawabannya tetapi cenderung hanya memilih jawaban yang benar dan jika peserta didik tidak mengetahui jawaban yang benar, maka peserta didik akan menerka.

Hal ini menimbulkan kecenderungan peserta didik tidak belajar untuk memahami pelajaran tetapi menghafalkan soal dan jawabannya. Alat penilaian ini kurang dianjurkan pemakaiannya dalam penilaian kelas karena tidak menggam-barkan kemampuan peserta didik yang sesungguhnya.

Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut peserta didik untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal yang sudah dipelajari, dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Alat ini dapat menilai berbagai jenis kemampuan, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kelemahan alat ini antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas.

Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut.

- (a) Materi, misalnya kesesuaian soal dengan indikator pada kurikulum.
- (b) Konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas.

- (c) Bahasa, misalnya rumusan soal hendaknya menggunakan kata/kalimat yang efisien dan efektif sehingga tidak ditafsirkan berbeda dengan maksudnya. Khusus untuk anak tunarungu dan anak tunagrahita hendaknya digunakan kata-kata yang sudah dipahami anak dengan kalimat yang pendek.

d. Penilaian Projek

1) Pengertian

Penilaian projek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data.

Penilaian projek dapat digunakan, diantaranya untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu, dan kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas.

Dalam penilaian projek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- a) **Kemampuan pengelolaan.** Kemampuan peserta didik dalam memilih topik dan mencari informasi serta dalam mengelola waktu pengumpulan data dan penulisan laporan.
- b) **Relevansi.** Kesesuaian dengan mata pelajaran, dalam hal ini mempertimbangkan tahap pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam pembelajaran.
- c) **Keaslian.** Projek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru pada projek peserta didik, dalam hal ini petunjuk atau dukungan.

2) Teknik Penilaian Projek

Penilaian cara ini dapat dilakukan mulai perencanaan, proses selama pengerjaan tugas, dan terhadap hasil akhir projek, sehingga guru perlu menetapkan hal-hal atau taha-pan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, kemudian menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitiannya juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian ini dapat menggunakan instrumen penilaian berupa daftar cek (*checklist*) ataupun skala rentang (*rating scale*). Beberapa contoh kegiatan peserta didik dalam penilaian projek:

- a) penelitian sederhana tentang air di rumah; dan
- b) Penelitian sederhana tentang perkembangan harga sembako.

e. Penilaian Produk

1) Pengertian

Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja tetapi juga proses pembuatannya.

Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam.

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan dalam setiap tahapan perlu diadakan penilaian yaitu:

- a) Tahap persiapan, meliputi: menilai kemampuan peserta didik merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
- b) Tahap pembuatan (produk), meliputi: menilai kemampuan peserta didik menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- c) Tahap penilaian (*appraisal*), meliputi: menilai kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan.

2) Teknik Penilaian Produk

Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik.

- a) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal.
- b) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.

f. Penilaian Portofolio

1) Pengertian

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi perkembangan peserta didik tersebut dapat berupa karya peserta didik (hasil pekerjaan) dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didiknya, hasil tes (bukan nilai), piagam penghargaan atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta

didik melalui karya peserta didik, antara lain: karangan, puisi, surat, komposisi, musik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan portofolio di sekolah, antara lain seperti berikut.

- a) **Saling percaya antara guru dan peserta didik.** Dalam proses penilaian guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling percaya, saling memerlukan dan saling membantu sehingga terjadi proses pendidikan berlangsung dengan baik.
- b) **Kerahasiaan bersama antara guru dan siswa.** Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan peserta didik perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga memberi dampak negatif proses pendidikan.
- c) **Milik bersama (*joint ownership*) antara peserta didik dan guru.** Guru dan peserta didik perlu mempunyai rasa memiliki berkas portofolio sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus meningkatkan kemampuannya.
- d) **Kepuasan.** Hasil kerja portofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang memberikan dorongan peserta didik untuk lebih meningkatkan diri.
- e) **Kesesuaian.** Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum.
- f) **Penilaian proses dan hasil.** Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik.
- g) **Penilaian dan pembelajaran.** Penilaian portofolio merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik.

2) Teknik Penilaian Portofolio

Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio, yaitu tidak semata-mata merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik sendiri. Dengan melihat portofolionya peserta didik dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Proses ini tidak akan terjadi secara spontan, tetapi membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk belajar meyakini hasil penilaian mereka sendiri.

- b) Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu dan yang lain bisa sama bisa berbeda. Misalnya, untuk kemampuan menulis peserta didik mengumpulkan karangannya. Untuk kemampuan menggambar, peserta didik mengumpulkan gambar-gambar buatannya.
- c) Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu map atau folder.
- d) Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu.
- e) Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio peserta didik beserta pembobotannya bersama para peserta didik agar dicapai kesepakatan. Diskusikan dengan para peserta didik bagaimana menilai kualitas karya mereka. Contoh; untuk kemampuan menulis karangan, kriteria penilaiannya misalnya: penggunaan tata bahasa, pemilihan kosa-kata, kelengkapan gagasan, dan sistematika penulisan. Sebaiknya kriteria penilaian suatu karya dibahas dan disepakati bersama peserta didik sebelum peserta didik membuat karya tersebut. Dengan demikian, peserta didik mengetahui harapan (standar) guru dan berusaha mencapai harapan atau standar itu.
- f) Mintalah peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat membimbing peserta didik tentang bagaimana cara menilai dengan memberi keterangan tentang kelebihan atau kekurangan karya tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada saat membahas portofolio.
- g) Setelah suatu karya dinilai dan ternyata nilainya belum memuaskan, kepada peserta didik dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki lagi. Namun, antara peserta didik dan guru perlu dibuat kontrak/perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan, misalnya setelah 14 hari karya yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada guru.
- h) Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika dianggap perlu, undanglah orang tua peserta didik untuk diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan portofolio sehingga orang tua dapat membantu dan memotivasi anaknya.

g. Penilaian Diri

1) Pengertian

Penilaian diri (*self assessment*) adalah suatu teknik penilaian, di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan,

status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu.

Teknik penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian, yang berkaitan dengan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam proses pembelajaran di kelas, berkaitan dengan kompetensi kognitif, misalnya: peserta didik dapat diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikir sebagai hasil belajar dalam mata pelajaran tertentu, berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Berkaitan dengan kompetensi afektif, misalnya, peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek sikap tertentu. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Berkaitan dengan kompetensi psikomotorik, peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya sebagai hasil belajar berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan.

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang.

Keuntungan penggunaan teknik ini dalam penilaian di kelas antara lain sebagai berikut.

- a) Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri.
- b) Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
- c) Dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.

2) Teknik Penilaian

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan dengan cara yang objektif. Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai.
- b) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
- c) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala rentang.
- d) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri.

- e) Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif.
- f) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak.

Perlu dicatat bahwa tidak ada satu pun alat penilaian yang dapat mengumpulkan informasi prestasi dan kemajuan belajar peserta didik secara lengkap. Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan informasi tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap seseorang. Lagi pula, interpretasi hasil tes tidak mutlak dan abadi karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang dialaminya.

Alat penilaian tertulis seperti pilihan ganda yang mengarah kepada hanya satu jawaban yang benar (*convergent thinking*), tidak mampu menilai keterampilan/kemampuan lain yang dimiliki peserta didik. Hal ini amat menghambat penguasaan beragam kompetensi yang tercantum pada kurikulum secara utuh. Alat penilaian pilihan ganda kurang mampu memberikan informasi yang cukup untuk dijadikan umpan balik guna mendiagnosis atau memodifikasi pengalaman belajar.

Karena itu, guru hendaknya mengembangkan alat-alat penilaian yang membedakan antara jenis-jenis kompetensi yang berbeda dari tiap tingkat pencapaian. Hasil penilaian dapat menghasilkan rujukan terhadap pencapaian peserta didik dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga hasil tersebut dapat menggambarkan profil peserta didik secara lengkap.

D. Pengelolaan Hasil Penilaian

1. Data Penilaian Unjuk Kerja

Data penilaian unjuk kerja adalah skor yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan terhadap penampilan peserta didik dari suatu kompetensi. Skor diperoleh dengan cara mengisi format penilaian unjuk kerja yang dapat berupa daftar cek atau skala rentang.

Nilai yang dicapai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan unjuk kerja adalah skor pencapaian dibagi skor maksimum dikali 10 (untuk skala 0 -10) atau dikali 100 (untuk skala 0 -100). Misalnya, dalam suatu penilaian unjuk kerja pidato, ada 8 aspek yang dinilai, antara lain: berdiri tegak, menatap kepada hadirin, penyampaian gagasan jelas, sistematis, dan sebagainya.

Apabila seseorang mendapat skor 6, skor maksimumnya 8, maka nilai yang akan diperoleh adalah $6 : 8 = 0,75 \times 10 = 7,5$. Nilai 7,5 yang dicapai peserta didik mempunyai arti bahwa peserta didik telah mencapai 75% dari kompetensi ideal

yang diharapkan untuk unjuk kerja tersebut. Apabila ditetapkan batas ketuntasan penguasaan kompetensi minimal 70%, maka untuk kompetensi tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Dengan demikian, peserta didik tersebut dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya.

2. Data Penilaian Sikap

Data penilaian sikap bersumber dari catatan harian peserta didik berdasarkan pengamatan/observasi guru mata pelajaran. Data hasil pengamatan guru dapat dilengkapi dengan hasil penilaian berdasarkan pertanyaan langsung dan laporan pribadi.

Seperti telah diutarakan sebelumnya, hal yang harus dicatat dalam buku Catatan Harian peserta didik adalah kejadian-kejadian yang menonjol, yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan unjuk kerja peserta didik, baik positif maupun negatif. Yang dimaksud dengan kejadian-kejadian yang menonjol adalah kejadian-kejadian yang perlu mendapat perhatian, atau perlu diberi peringatan dan penghargaan dalam rangka pembinaan peserta didik.

Pada akhir suatu semester, guru mata pelajaran merumuskan sintesis, sebagai deskripsi dari sikap, perilaku, dan unjuk kerja peserta didik dalam semester tersebut untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Deskripsi dari sikap, perilaku, dan unjuk kerja peserta didik ini menjadi bahan atau pernyataan untuk diisi dalam kolom Catatan Guru pada rapor peserta didik untuk semester dan mata pelajaran yang berkaitan. Selain itu, berdasarkan catatan-catatan tentang peserta didik yang dimilikinya, guru mata pelajaran dapat memberi masukan pula kepada Guru Bimbingan Karier untuk merumuskan catatan, baik berupa peringatan atau rekomendasi, sebagai bahan bagi wali kelas dalam mengisi kolom deskripsi perilaku dalam rapor. Catatan Guru mata pelajaran menggambarkan sikap atau tingkat penguasaan peserta didik berkaitan dengan pelajaran yang ditempuhnya dalam bentuk kalimat naratif. Demikian juga catatan dalam kolom deskripsi perilaku, menggambarkan perilaku peserta didik yang perlu mendapat penghargaan/pujian atau peringatan dalam semester tersebut.

3. Data Penilaian Tertulis

Data penilaian tertulis adalah skor yang diperoleh peserta didik dari hasil berbagai tes tertulis yang diikuti peserta didik. Soal tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, uraian, jawaban singkat.

Soal bentuk pilihan ganda diskor dengan memberi angka 1 (satu) bagi setiap butir jawaban yang benar dan angka 0 (nol) bagi setiap butir soal yang salah. Skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tes pilihan ganda dihitung

dengan prosedur: jumlah jawaban benar, dibagi jumlah seluruh butir soal, dikali dengan 10. Prosedur ini juga dapat digunakan dalam menghitung skor perolehan peserta didik untuk soal berbentuk benar salah, menjodohkan, dan jawaban singkat. Keempat bentuk soal terakhir ini juga dapat dilakukan penskoran secara objektif dan dapat diberi skor 1 untuk setiap jawaban yang benar.

Soal bentuk uraian dibedakan dalam dua kategori, uraian objektif dan uraian non-objektif. Uraian objektif dapat diskor secara objektif berdasarkan konsep atau kata kunci yang sudah pasti sebagai jawaban yang benar. Setiap konsep atau kata kunci yang benar yang dapat dijawab peserta didik diberi skor 1. Skor maksimal butir soal adalah sama dengan jumlah konsep kunci yang dituntut untuk dijawab oleh peserta didik. Skor capaian peserta didik untuk satu butir soal kategori ini adalah jumlah konsep kunci yang dapat dijawab benar, dibagi skor maksimal, dikali dengan 10.

Soal bentuk uraian non objektif tidak dapat diskor secara objektif, karena jawaban yang dinilai dapat berupa opini atau pendapat peserta didik sendiri, bukan berupa konsep kunci yang sudah pasti. Pedoman penilaiannya berupa kriteria-kriteria jawaban. Setiap kriteria jawaban diberikan rentang nilai tertentu, misalnya 0 - 5. Tidak ada jawaban untuk suatu kriteria diberi skor 0. Besar kecilnya skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu kriteria ditentukan berdasarkan tingkat kesempurnaan jawaban dibandingkan dengan kriteria jawaban tersebut.

Sama dengan penilaian unjuk kerja, skor atau data penilaian yang diperoleh dengan menggunakan berbagai bentuk soal tertulis perlu digabung menjadi satu kesatuan nilai penguasaan kompetensi dasar dan standar kompetensi mata pelajaran. Dalam proses penggabungan dan penyatuan nilai, data yang diperoleh dengan masing-masing bentuk soal tersebut juga perlu diberi bobot, dengan mempertimbangkan tingkat kesukaran dan kompleksitas jawaban yang dituntut untuk dijawab oleh peserta didik. Nilai akhir semester ditulis dalam rentang 0 sampai 10, dengan dua angka di belakang koma. Nilai akhir semester yang diperoleh peserta didik merupakan deskripsi tentang tingkat atau persentase penguasaan Kompetensi Dasar dalam semester tersebut. Misalnya, nilai 6,50 dapat diinter-pretasikan peserta didik telah menguasai 65% unjuk kerja berkaitan dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran dalam semester tersebut.

4. Data Penilaian Projek

Data penilaian projek meliputi skor yang diperoleh dari tahap-tahap: perencanaan/persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data/laporan. Dalam menilai setiap tahap, guru dapat menggunakan skor yang terentang dari 1 sampai 4. Skor 1 merupakan skor terendah dan skor 4 adalah

skor tertinggi untuk setiap tahap. Jadi total skor terendah untuk keseluruhan tahap adalah 4 dan total skor tertinggi adalah 16.

Berikut tabel yang memuat contoh deskripsi dan penskoran untuk masing-masing tahap.

Tahap	Deskripsi	Skor
Perencanaan/ persiapan	Memuat: topik, tujuan, bahan/alat, langkah-langkah kerja, jadwal, waktu, perkiraan data yang akan diper- oleh, tempat penelitian, daftar pertanyaan atau format pengamatan yang sesuai dengan tujuan.	1, 2, 3, 4
Pengumpulan data	Data tercatat dengan rapi, jelas dan lengkap. Ketepatan menggunakan alat/bahan	1, 2, 3, 4
Pengolahan data	Ada pengklasifikasian data, penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian.	1, 2, 3, 4
Penyajian data/ laporan	Merumuskan topik, merumuskan tujuan peneliti- an, menuliskan alat dan bahan, menguraikan cara kerja (langkah-langkah kegiatan) Penulisan laporan sistematis, menggunakan bahasa yang komunikatif. Penyajian data lengkap, memuat kesimpulan dan saran.	1, 2, 3, 4
	Total Skor	

Semakin lengkap dan sesuai informasi pada setiap tahap semakin tinggi skor yang diperoleh.

5. Data Penilaian Produk

Data penilaian produk diperoleh dari tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan (produk), dan tahap penilaian (appraisal). Informasi tentang data penilaian produk diperoleh dengan menggunakan cara holistik atau cara analitik. Dengan cara holistik, guru menilai hasil produk peserta didik berdasarkan kesan keseluruhan produk dengan menggunakan kriteria keindahan dan kegunaan produk tersebut pada skala skor 0 - 10 atau 1 - 100. Cara penilaian analitik, guru menilai hasil produk berdasarkan tahap proses pengembangan, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap penilaian.

Berikut tabel contoh penilaian analitik dan penskorannya.

Tahap	Deskripsi	Skor
Persiapan	Kemampuan merencanakan seperti: <ul style="list-style-type: none"> • menggali dan mengembangkan gagasan. • mendesain produk, menentukan alat dan bahan. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pembuatan Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan menyeleksi dan menggunakan bahan. • Kemampuan menyeleksi dan menggunakan alat. • Kemampuan menyeleksi dan menggunakan teknik. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Penilaian produk	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaan/fungsinya. • Produk memenuhi kriteria keindahan. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kriteria penskoran:

- menggunakan skala skor 0 - 10 atau 1 - 100
- semakin lengkap informasi dan baik kemampuan yang ditampilkan, semakin tinggi skor yang diperoleh.

6. Data penilaian Portofolio

Data penilaian portofolio peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian portofolio meliputi: (1) catatan guru; (2) hasil pekerjaan peserta didik; dan (3) profil perkembangan peserta didik. Hasil catatan guru mampu memberi penilaian terhadap sikap peserta didik dalam melakukan kegiatan portofolio. Hasil pekerjaan peserta didik mampu memberi skor berdasarkan kriteria (1) rangkuman isi portofolio; (2) dokumentasi/data dalam folder; (3) perkembangan dokumen; (4) ringkasan setiap dokumen; (5) presentasi; dan (6) penampilan. Hasil profil perkembangan peserta didik mampu memberi skor berdasarkan gambaran perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik pada selang waktu tertentu. Ketiga komponen ini dijadikan suatu informasi tentang tingkat kemajuan atau penguasaan kompetensi peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran.

Berdasarkan ketiga komponen penilaian tersebut, guru menilai peserta didik dengan menggunakan acuan patokan kriteria yang artinya apakah peserta

didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan dalam bentuk persentase (%) pencapaian atau dengan menggunakan skala 0 - 10 atau 0 - 100. Penskoran dilakukan berdasarkan kegiatan unjuk kerja, dengan rambu-rambu atau kriteria penskoran portofolio yang telah ditetapkan. Skor pencapaian peserta didik dapat diubah ke dalam skor yang berskala 0 - 10 atau 0 - 100 dengan patokan jumlah skor pencapaian dibagi skor maksimum yang dapat dicapai, dikali dengan 10 atau 100. Dengan demikian akan diperoleh skor peserta didik berdasarkan portofolio masing-masing.

7. Data Penilaian Diri

Data penilaian diri adalah data yang diperoleh dari hasil penilaian tentang kemampuan, kecakapan, atau penguasaan kompetensi tertentu, yang dilakukan oleh peserta didik sendiri, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Pada taraf awal, hasil penilaian diri yang dilakukan oleh peserta didik tidak dapat langsung dipercayai dan digunakan, karena dua alasan utama. Pertama, karena peserta didik belum terbiasa dan terlatih, sangat terbuka kemungkinan bahwa peserta didik banyak melakukan kesalahan dalam penilaian. Kedua, ada kemungkinan peserta didik sangat subjektif dalam melakukan penilaian, karena terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu, pada taraf awal, guru perlu melakukan langkah-langkah telaahan terhadap hasil penilaian diri peserta didik. Guru perlu mengambil sampel antara 5% s.d. 10% untuk ditelaah, dikoreksi, dan dilakukan penilaian ulang. Apabila hasil koreksi ulang yang dilakukan oleh guru menunjukkan bahwa peserta didik banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan koreksi, guru dapat mengembalikan seluruh hasil pekerjaan kepada peserta didik untuk dikoreksi kembali, dengan menunjukkan catatan tentang kelemahan-kelemahan yang telah mereka lakukan dalam koreksian pertama. Dua atau tiga kali guru melakukan langkah-langkah koreksi dan telaahan seperti ini, para peserta didik menjadi terlatih dalam melakukan penilaian diri secara baik, objektif, dan jujur.

Apabila peserta didik telah terlatih dalam melakukan penilaian diri secara baik, objektif, dan jujur, hal ini akan sangat membantu dalam meringankan beban tugas guru. Hasil penilaian diri yang dilakukan peserta didik juga dapat dipercaya serta dapat dipahami, diinterpretasikan, dan digunakan seperti hasil penilaian yang dilakukan oleh guru.

E. Interpretasi Hasil Penilaian dalam Menetapkan Ketuntasan Belajar

Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi mengacu ke indikator yang telah ditentukan. Tidak semua indikator harus dinilai guru. Sekolah menetapkan minimal 75% indikator yang dianggap sangat penting dan mewakili masing-masing kompetensi dasar dan hasil belajarnya untuk dinilai. Untuk mengumpulkan informasi apakah suatu indikator telah tampil pada diri peserta didik, maka dilakukan penilaian pada sewaktu pembelajaran berlangsung atau setelah pembelajaran.

Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal/tugas. Selain itu, sebuah tugas dapat dirancang untuk menjaring informasi tentang ketercapaian beberapa indikator. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% -100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Namun sekolah dapat menetapkan kriteria/tingkat pencapaian indikator, apakah 50%, 60% atau 70%. Penetapan disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik dan guru serta ketersediaan prasarana dan sarana.

Yang perlu diperhatikan adalah kualitas sekolah akan dinilai oleh pihak luar secara berkala, misalnya melalui ujian akhir nasional. Hasil penilaian ini akan menunjukkan peringkat sekolah dibandingkan dengan sekolah lain (*benchmarking*). Melalui peningkatan sekolah ini diharapkan sekolah terpacu untuk meningkatkan kualitasnya, dalam hal ini meningkatkan kriteria pencapaian indikator semakin mendekati 100%.

Bagi peserta didik yang belum berhasil mencapai kriteria tersebut dapat diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan remedial yang berupa tatap muka dengan guru atau diberi kesempatan untuk belajar sendiri, kemudian dilakukan evaluasi dengan cara: menjawab pertanyaan sesuai dengan topiknya, membuat rangkuman pelajaran, atau mengerjakan tugas mengumpulkan data. Apabila semua indikator yang telah ditetapkan sudah memenuhi kriteria ketuntasan, peserta didik dapat diinterpretasikan telah menguasai kompetensi dasar.

Untuk mendapatkan nilai suatu kompetensi dasar atau hasil belajar dari kriteria ketuntasan indikator yang berbeda, guru dapat melihat profil peserta didik dari kecenderungan setiap indikator

Berikut contoh penghitungan nilai hasil belajar dan kompetensi dasar.

Kompetensi Dasar	Hasil Belajar	Indikator	Kriteria ketuntasan	Nilai peserta didik	Ketuntasan
Menyimpulkan bahwa tiap wujud benda memiliki sifatnya masing-masing dan dapat mengalami perubahan	Mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas	Mendeskripsikan benda padat berdasarkan sifatnya	60%	70	Tuntas
		Menunjukkan bukti tentang sifat benda cair.	60%	70	Tuntas
		Menunjukkan bukti tentang sifat benda gas	50%	55	Tuntas
	Mendemonstrasikan bahwa beberapa benda dapat melarutkan benda Lainnya	Menunjukkan benda padat yang dapat dilarutkan pada benda cair.	60%	61	Tuntas
		Mengidentifikasi kasi benda cair yang dapat melarutkan benda padat.	70%	80	Tuntas
		Mengartikan larutan dan pelarut	60%	90	Tuntas

Nilai indikator pada hasil belajar 1 cenderung 70. Jadi nilai hasil belajar 1 adalah 70 atau 7.

Nilai indikator pada hasil belajar 2 bervariasi sehingga dihitung nilai rata-rata indikator. Jadi nilai hasil belajar 2 :

$$\frac{61 + 80 + 90}{3} = 77 \text{ atau } 7,7$$

Dengan demikian nilai Kompetensi dasar = $\frac{70 + 77}{2} = 73,5$

Berikut contoh penghitungan ketuntasan belajar suatu indikator.

Kompetensi Dasar	Hasil Belajar	Indikator	Kriteria Ketuntasan	Nilai peserta didik	Ketuntasan
Mendes kripsikan beberapa sumber energi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari	Mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di lingkungan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari contoh alat-alat rumah-tangga yang menghasilkan panas, bunyi, dan cahaya. • Menunjuk kan sumber energi yang menghasilkan panas, bunyi, dan cahaya. • Mencari con toh alat ru-mahtangga yang menggunakan energi listrik 	70%	75	Tuntas
			60%	63	Tuntas
			55%	50	Belum tuntas

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa peserta didik belum mencapai kriteria ketuntasan untuk indikator terakhir, yaitu: Mencari contoh alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Jadi peserta didik harus mengikuti remedial untuk indikator yang belum tuntas tersebut.

F. Pemanfaatan dan Pelaporan Hasil Penilaian Kelas

Penilaian kelas yang menghasilkan informasi tentang kemajuan pencapaian kompetensi menyeluruh setiap peserta didik dengan menggunakan berbagai teknik bermanfaat untuk antara lain (1) perbaikan (remedial) bagi anak yang kurang prestasinya; (2) pengayaan bagi peserta didik cepat; (3) perbaikan program dan proses pembelajaran; (4) pelaporan; dan (5) penentuan kenaikan kelas.

1. Pemanfaatan Hasil Penilaian

a. Bagi peserta didik yang berprestasi kurang (Remedial)

Semua guru harus percaya bahwa setiap peserta didik dalam kelasnya dapat mencapai kompetensi yang ditentukan secara tuntas asalkan peserta didik mendapat bantuan yang tepat. Misalnya, bentuk bantuan yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan diberikan pada saat yang tepat, sehingga tidak menunggu sampai kesulitan dan kegagalan menumpuk. Terhadap peserta didik

dengan kurikulum PPI remedial dilakukan jika belum mencapai tujuan seperti yang telah dirumuskan dalam PPI.

Penilaian kelas dilakukan untuk mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik, sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki. Bila kesulitan dapat terdeteksi lewat penilaian kelas sedini mungkin, peserta didik tidak sempat merasa frustrasi, kehilangan motivasi, dan sebaliknya peserta didik merasa mendapat perhatian yang optimal dan bantuan yang berharga dalam proses pembelajarannya.

Tindakan perbaikan atau remedial dilakukan oleh guru mata pelajaran, guru kelas, guru pembimbing khusus atau guru lain yang memiliki kemampuan membimbing anak dan mengetahui kekurangan peserta didik. Waktu perbaikan diatur berdasarkan kesepakatan antara peserta didik dan guru yang bersangkutan. Remedial dilakukan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar pada indikator tertentu. Jadi yang mendapat remedial hanya indikator yang belum tuntas. Remedial dilaksanakan setiap saat baik pada jam efektif maupun di luar jam efektif, tergantung bentuk penugasannya maupun bentuk proses belajar mengajar yang ditetapkan oleh guru. Penilaian kegiatan remedial dapat berupa tes maupun penugasan yang lain seperti menjawab pertanyaan sesuai topiknya, membuat rangkuman pelajaran, atau tugas mengumpulkan data.

b. Bagi Peserta Didik yang Berprestasi Baik dan Cepat

Penilaian kelas dapat memberikan informasi tentang peserta didik dalam suatu kelas yang mencapai penguasaan kompetensi yang ditargetkan lebih cepat dari peserta didik lainnya, atau yang telah mencapai ketuntasan belajar ketika sebagian besar peserta didik yang lain belum. Peserta didik-peserta didik berprestasi baik perlu mendapat kegiatan belajar tambahan agar tidak merasa bosan dan mencegah peserta didik tersebut mengganggu kelasnya. Salah satu kegiatan yang dapat diberikan adalah memberikan materi tambahan, latihan tambahan atau tugas-tugas individual lainnya yang bertujuan untuk memperkaya kompetensi yang telah dicapai atau untuk mengoptimalkan pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengayaan dapat dilaksanakan setiap saat baik pada jam efektif maupun di luar jam efektif tergantung bentuk penugasannya maupun bentuk proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Penguatan kompetensi ini dapat diberikan dalam bentuk tugas kegiatan, misalnya membantu peserta didik lainnya yang sangat lemah di dalam atau di kelas lainnya. Hasil penilaian kegiatan pengayaan dapat menambah nilai peserta didik pada matapelajaran bersangkutan.

Bagi peserta didik cepat ini apabila secara konsisten selalu cepat, dapat hendaknya diberikan program akselerasi, yaitu kegiatan tambahan berdasarkan

urutan kompetensi yang harus dicapai dalam seluruh programnya. Perhatian terhadap kecepatan anak dalam mencapai seluruh kompetensi ini adalah salah satu tuntutan kurikulum. Adapun yang perlu dicermati adalah pengaturan waktu dan teknis untuk melayani anak yang kecepatannya beragam dalam menguasai kompetensi.

c. Program Perbaikan Oleh Guru dalam Pembelajaran

Guru dapat memanfaatkan hasil penilaian berdasarkan informasi kemajuan belajar secara berkelanjutan sehingga guru dapat mengambil keputusan terbaik dan cepat untuk memberikan bantuan optimal kepada kelas dalam mencapai kompetensi yang telah ditargetkan dalam kurikulum. Atas dasar hasil penilaian kelas mungkin guru harus mengulang pelajaran dengan mengubah strategi pembelajaran, atau memperbaiki program pembelajarannya. Oleh karena itu, program yang telah dirancang, strategi pembelajaran yang telah disiapkan, dan bahan yang telah disiapkan perlu dievaluasi, direvisi, atau mungkin diganti atau diperbaiki apabila ternyata tidak efektif membantu peserta didik dalam mencapai penguasaan kompetensi tersebut. Perbaikan program, penggantian strategi belajar mengajar, pengaturan kembali penggunaan materi atas dasar informasi kurang efektifnya pencapaian kompetensi tidak perlu menunggu sampai akhir semester, karena bila dilakukan pada akhir semester bisa saja perbaikan itu akan sangat terlambat.

2. Pelaporan Hasil Penilaian Kelas

a. Laporan sebagai akuntabilitas publik

Unsur utama dalam manajemen berbasis sekolah adalah pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik. Atas dasar itu, laporan kemajuan hasil belajar peserta didik harus dibuat sebagai pertanggungjawaban lembaga sekolah kepada orang tua atau wali peserta didik, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Laporan kemajuan hasil belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi dan sarana kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat yang bermanfaat baik bagi kemajuan belajar peserta didik maupun pengembangan sekolah.

Pelaporan hasil belajar hendaknya seperti berikut.

- 1) Merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik.
- 2) Memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat.
- 3) Menjamin orang tua akan diberitahu secepatnya bilamana anaknya bermasalah dalam belajar.

b. Bentuk laporan

Bentuk laporan kemajuan belajar peserta didik dapat disajikan dalam data kuantitatif dan kualitatif. Informasi data kuantitatif disajikan dalam angka (skor), misalnya seorang peserta didik mendapat nilai 6 pada mata pelajaran matematika. Baik peserta didik maupun orang tua kurang memahami makna angka tersebut karena terlalu umum. Hal ini membuat orang tua sulit menindaklanjuti apakah anaknya perlu dibantu dalam bidang aritmetika, aljabar, geometri, statistika, atau hal lain.

Agar peran serta masyarakat semakin meningkat, bentuk laporan harus disajikan dalam bentuk yang lebih komunikatif sehingga "profil" atau tingkat kemajuan belajar peserta didik mudah terbaca dan dapat dipahami oleh orang tua atau pihak yang berkepentingan (stakeholder) lainnya. Dengan demikian dari laporan tersebut, orang tua dapat mengidentifikasi kompetensi apa saja yang belum dimiliki anaknya. Berdasarkan laporan tersebut, orang tua dapat menentukan jenis bantuan apa yang diperlukan untuk membantu anaknya, sedangkan di pihak anak, yang bersangkutan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya serta aspek mana yang perlu ditingkatkan.

3. Isi Laporan

Pada umumnya orang tua menginginkan jawaban dari pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah secara akademik, fisik, sosial dan emosional?
- 2) Sejauh mana anak berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah?
- 3) Apa kemampuan/ kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai dengan baik?
- 4) Apa yang menjadi keterbatasan yang dimiliki anak?
- 5) Apa yang harus orang tua lakukan untuk membantu dan mengembangkan anak lebih lanjut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, informasi yang diberikan kepada orang tua hendaknya seperti berikut.

- a) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- b) Menitikberatkan kekuatan dan apa yang telah dicapai anak.
- c) Memberikan perhatian pada pengembangan dan pembelajaran anak.
- d) Berkaitan erat dengan hasil belajar yang harus dicapai dalam kurikulum.
- e) Berisi informasi tentang tingkat pencapaian hasil belajar.
- f) Hasil penilaian yang sah dan ajeg.

a. Rapor

Rapor adalah laporan kemajuan belajar peserta didik dalam kurun waktu satu semester. Laporan prestasi mata pelajaran, berisi informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

Laporan disajikan dalam bentuk yang lebih rinci agar orang tua dapat mengetahui hasil belajar anaknya dalam menguasai kompetensi mata pelajaran. Di samping itu, ada catatan guru tentang pencapaian kompetensi tertentu sebagai masukan kepada anak dan orang tuanya untuk membantu meningkatkan kinerjanya.

Untuk anak berkebutuhan khusus yang dikenai PPI semua laporan nilai kuantitatif harus dilampiri narasi yang menjelaskan kompetensi dasar yang telah dicapai anak. Untuk model rapor, masing-masing sekolah boleh menetapkan sendiri model rapor yang dikehendaki asalkan menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran yang diperoleh dari ketuntasan indikatornya.

Nilai pada rapor merupakan gambaran kemampuan peserta didik, karena itu kedudukan atau bobot nilai harian dan nilai sumatif (nilai akhir program) sama. Nilai sumatif (nilai akhir semester atau tahun) merupakan kumpulan nilai harian (SK, KD, HB, dan Indikator), sehingga penilaian sumatif di setiap akhir semester atau tahun tidak harus dilakukan jika guru/sekolah telah memperoleh gambaran tentang ketuntasan belajar peserta didik dari nilai hariannya. Untuk mendapatkan nilai akhir semester dapat diperoleh dari penilaian kemajuan belajar setiap peserta didik (Contoh Format Penilaian Kemajuan Belajar lihat lampiran 1 untuk narasi nilai kuantitatif). Untuk mengisi format tersebut perkembangan peserta didik harus dipantau terus menerus sampai batas waktu yang ditetapkan.

b. Penentuan Kenaikan Kelas

Apabila kegiatan penilaian kelas dilakukan secara berkesinambungan sehingga tindakan perbaikan dan pengayaan diberikan saat dini dan tepat waktu diharapkan tidak ada anak yang tidak mencapai kompetensi yang ditargetkan walaupun dengan kecepatan dan gaya belajar yang berbeda satu dengan lainnya. Kalau setiap anak bisa dibantu secara optimal sesuai dengan keperluannya mencapai kompetensi tertentu, maka tidak perlu ada anak yang tidak naik kelas (*otomatic promotion*).

Terhadap peserta didik yang dikenai PPI apabila karena alasan yang kuat misalnya kealpaannya (ketidakhadiran karena alpa) mencapai 10%, maka hasil penilaian kelas bisa menjadi dasar peserta didik tersebut tinggal kelas.

Otomatic promotion, adalah semua indikator, hasil belajar (HB), kompetensi dasar (KD), dan standar kompetensi (SK) suatu mata pelajaran telah terpenuhi ketuntasannya, maka peserta didik dianggap telah layak naik ke kelas berikutnya. Jika peserta didik masih belum menuntaskan indikator, HB, KD, dan SK pada lebih dari 4 mata pelajaran sampai batas akhir tahun ajaran, maka peserta didik tersebut harus mengulang di kelas yang sama.

Untuk memudahkan administrasi maka peserta didik yang tidak naik kelas diharapkan mengulang semua mata pelajaran beserta SK, KD, HB dan indikatornya dan sekolah mempertimbangkan mata pelajaran, SK, KD, HB, dan indikator yang telah tuntas pada tahun ajaran sebelumnya apabila nilai mata pelajaran yang telah tuntas mendapat nilai kurang baik.

BAB XI

MODEL BIMBINGAN KONSELING SISWA ABK DI SEKOLAH INKLUSI

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan bimbingan sangat dipengaruhi oleh faktor: filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, demokratisasi dalam pendidikan, dan perluasan program pendidikan. Latar belakang filosofis berkaitan dengan pandangan tentang hakekat tentang manusia. Salah satu filsafat yang berpengaruh besar terhadap timbulnya semangat memberikan bimbingan adalah filsafat humanisme. Aliran ini berpandangan bahwa manusia memiliki potensi untuk dapat dikembangkan seoptimal mungkin, termasuk anak berkebutuhan khusus yang belajar bersama di kelas reguler.

Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusif perlu keseriusan guru bimbingan dan atau guru pembimbing khusus dan pihak lain yang terlibat di dalamnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus dalam berbagai aspek di sekolah, yaitu latar belakang psikologis berkaitan erat dengan proses perkembangan manusia yang sifatnya unik, berbeda dari individu lain dalam perkembangannya. Implikasi dari keragaman ini ialah bahwa individu memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih dan mengembangkan diri sesuai dengan keunikan dan potensi masing-masing tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungannya. Dari sisi keunikan dan keragaman individu bimbingan diperlukan untuk membantu setiap individu mencapai perkembangan yang sehat di dalam lingkungannya.

Kehidupan sosial budaya suatu masyarakat adalah sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan sistem lain. Diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi aktif dengan lingkungannya.

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, kesempatan kerja berkembang dengan cepat pula, sehingga para siswa memerlukan bantuan dari pembimbing untuk menyesuaikan minat dan kemampuannya terhadap kesempatan dunia kerja yang selalu berubah dan meluas.

Sistem pemerintahan yang semakin demokratis berdampak positif terhadap seluruh aspek kehidupan. Kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi, sekolah-sekolah menampung siswa dari berbagai asal usul dan latar belakang kehidupan yang berbeda. Keadaan ini menimbulkan masalah yang dihadapi seseorang yang terlibat dalam ke-

lompok campuran. Dalam keadaan semacam ini pelayanan bimbingan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi masalah tersebut.

Perluasaan program pendidikan memberikan kesempatan kepada siswa berkebutuhan khusus untuk mencapai tingkat pendidikan setinggi mungkin sesuai dengan kemampuannya. Arah ini menimbulkan kebutuhan akan bimbingan yaitu dalam memilih kelanjutan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus yang paling tepat, serta menilai kemampuan siswa yang bersangkutan, memung-kinkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan bimbingan untuk menanggulangnya secara sistematis.

B. Konsep Dasar Bimbingan Konseling

1. Pengertian Bimbingan Konseling

Berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28/90 bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Kalimat tersebut mengandung arti sebagai berikut.

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi maksudnya agar peserta didik mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri, serta menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan maksudnya agar peserta didik mengenal secara objektif lingkungan, baik lingkungan sosial dan ekonomi, lingkungan budaya maupun lingkungan fisik, dan menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara positif dan dinamis pula. Pengenalan lingkungan meliputi lingkungan rumah, sekolah, alam dan masyarakat sekitar.

Bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan, maksudnya agar peserta didik mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang dirinya sendiri, baik yang menyangkut bidang pendidikan bidang karier, maupun bidang budaya, keluarga dan kemasyarakatan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya Bimbingan Konseling memungkinkan peserta didik mengenal dan menerima diri sendiri serta mengenal dan menerima lingkungan secara positif dan dinamis, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mewujudkan diri sendiri secara efektif dan produktif sesuai dengan peranan yang diinginkan di masa depan.

2. Tujuan bimbingan konseling

Bimbingan Konseling bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya, yaitu aspek pribadi sosial, aspek belajar dan aspek perkembangan karier.

Adapun ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Aspek pribadi sosial

Dalam aspek tugas perkembangan ini, layanan Bimbingan Konseling membantu siswa agar :

- 1) memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya;
- 2) dapat mengembangkan sikap positif;
- 3) membuat pilihan secara tepat;
- 4) mampu menghargai orang lain;
- 5) memiliki rasa tanggung jawab;
- 6) mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi;
- 7) dapat menyelesaikan konflik; dan
- 8) dapat membuat keputusan.

b. Aspek tugas perkembangan belajar

Dalam aspek perkembangan ini, layanan Bimbingan Konseling membantu siswa agar dapat :

- 1) melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif;
- 2) merencanakan tujuan dan perencanaan pendidikan;
- 3) mampu belajar secara efektif; dan
- 4) memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi evaluasi.

c. Aspek tugas perkembangan karier

Dalam aspek perkembangan, layanan Bimbingan Konseling membantu siswa agar:

- 1) mampu membentuk identitas karier, dengan cara mengenal ciri-ciri pekerjaan di dalam berbagai lingkungan kerja;
- 2) mampu merencanakan masa depan;
- 3) dapat membentuk pola yaitu kecenderungan arah karier; dan
- 4) mengenal keterampilan, kemampuan dan minat yang dimiliki.

3. Fungsi Bimbingan Konseling

Berdasarkan pengertian dan tujuan yang ingin dicapai, layanan bimbingan konseling memiliki fungsi pemahaman, pencegahan, perbaikan, pemeliharaan pengembangan.

Adapun fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Fungsi pemahaman

Fungsi ini menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kebudayaan pengembangan siswa, yang meliputi:

- 1) Pemahaman tentang diri siswa, baik oleh siswa sendiri maupun oleh orang tua, guru dan pembimbing.
- 2) Pemahaman tentang diri siswa, baik oleh siswa itu sendiri maupun oleh orang tua, guru dan pembimbing.
- 3) Pemahaman lingkungan "yang lebih luas".

b. Fungsi pencegahan

Fungsi ini dapat menghindarkan siswa dari berbagai masalah yang dapat mengganggu atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan.

c. Fungsi perbaikan

Fungsi ini dapat membantu mengantisipasi dan mengatasi masalah yang dialami siswa.

d. Fungsi pemeliharaan pengembangan

Fungsi ini dapat memelihara dan mengembangkan potensi dan kondisi positif siswa secara mantap dan berkelanjutan.

4. Jenis bimbingan

Dilihat dari masalah individu, ada empat jenis bimbingan yaitu:

- a. **Bimbingan akademik.** Bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah Akademik, yaitu: pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan/konsentrasi cara belajar, penyelesaian tugas-tugas dan latihan, pencarian dan penggunaan sumber belajar, perencanaan pendidikan lanjutan, dan lain-lain.
- b. **Bimbingan sosial pribadi.** Bimbingan ini untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi, meliputi masalah hubungan dengan sesama teman, dosen, staf, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyelesaian konflik.
- c. **Bimbingan karier.** Bimbingan ini untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karier seperti: pemahaman terhadap jabatan dan tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karier, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah karier yang dihadapi.
- d. **Bimbingan keluarga.** Bimbingan ini untuk membantu para individu sebagai pemimpin/anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan

dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia.

5. Prinsip bimbingan konseling

Untuk mendasari gerak langkah penyelenggaraan Bimbingan Konseling dibutuhkan prinsip-prinsip Bimbingan Konseling. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- a. Prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan
 - 1) Melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi.
 - 1) Berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis.
 - 2) Memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu.
 - 3) Memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan.
- b. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu
 - 1) Berurusan dengan hal-hal yang menyangkut kondisi mental/ fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu.
 - 2) Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- c. Prinsip yang berkenaan dengan program layanan

Bimbingan Konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik.

 - 1) Program Bimbingan Konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, kondisi lembaga.
 - 2) Program Bimbingan Konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah, sampai tertinggi.
 - 3) Isi dan pelaksanaan program bimbingan perlu penilaian yang teratur dan terarah.
- b. Prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan
 - 1) Bimbingan Konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapinya masalahnya.
 - 2) Keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan dan desakan dari pembimbing atau pihak lain.

- 3) Permasalahan individu harus ditangani oleh ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- 4) Kerjasama antara pembimbing, guru dan orang tua. Pengembangan program pelayanan Bimbingan Konseling melalui pemanfaatan yang maksimal dari pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dengan program Bimbingan Konseling itu sendiri.

6. Asas-asas Bimbingan Konseling

Asas Bimbingan Konseling meliputi :

- a. **Asas kerahasiaan.** Guru pembimbing berkewajiban menjaga data tentang siswa sehingga terjamin kerahasiannya.
- b. **Asas kesukarelaan.** Guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan sikap kerelaan siswa.
- c. **Asas Keterbukaan.** Siswa maupun guru pembimbing bersikap terbuka, dapat menghargai dan mengembangkan sikap keterbukaan siswa.
- d. **Asas Kegiatan.** Guru pembimbing perlu mendorong siswa untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Konseling yang diperuntukan baginya.
- e. **Asas Kemandirian.** Guru pembimbing mampu mengarahkan layanan Bimbingan Konseling bagi perkembangan kemandirian siswa.
- f. **Asas Kekinian.** Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lalu, hendaknya dihubungkan dengan apa yang ada dan dapat diperbuat sekarang.
- g. **Asas Kedinamisan.** Isi layanan terhadap siswa selalu berkembang dan berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- h. **Asas Keterpaduan.** Adanya koordinasi yang baik antara guru pembimbing dengan pihak lain yang ada hubungannya dengan layanan bimbingan konseling.
- i. **Asas Kenormatifan.** Layanan bimbingan konseling harus dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat memahami, menghayati dan mengamalkan norma-norma agama, hukum, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku.
- j. **Asas Keahlian.** Para pelaksana layanan Bimbingan Konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang Bimbingan Konseling.
- k. **Asas Alih Tangan.** Apabila ada pihak-pihak tertentu yang tidak dapat menangani masalah siswa, dapat mengalih tangankan masalah tersebut kepada pihak lain secara tepat dan tuntas.
- l. **Asas Tut Wuri Handayani.** Bimbingan Konseling dapat menciptakan suasana yang mengayomi, dapat menimbang rasa aman, dapat menciptakan keteladanan, serta dapat memberikan dorongan pada siswa untuk maju.

7. Pendekatan dan Teknik Bimbingan

1) Pendekatan bimbingan meliputi:

- 1) Pendekatan krisis atau kuratif. Pendekatan bimbingan ini diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah, dengan tujuan mengatasi krisis atau masalah-masalah yang dialami individu.
- 2) Pendekatan Remedial. Pendekatan bimbingan ini diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan, dengan tujuan untuk membantu memperbaiki kekurangan/ kelemahan yang dialami individu.
- 3) Pendekatan Preventif. Pendekatan bimbingan ini diarahkan pada antisipasi masalah umum individu mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu.
- 4) Pendekatan Perkembangan. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal.

b. Teknik Bimbingan

Ada beberapa macam tehnik bimbingan yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan individu seperti berikut.

- 1) **Konseling.** Konseling merupakan bantuan yang bersifat terapeutis yang diarahkan untuk merubah sikap dan perilaku individu. Konseling dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan individu.
- 2) **Nasehat.** Pemberian nasehat hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a) Didasarkan atas masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh individu.
 - b) Diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
 - c) Nasehat yang diberikan bersifat alternatif yang dapat dipilih oleh individu, disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan.
 - d) Penentuan keputusan diserahkan kepada individu, alternatif mana akan diambil.
 - e) Individu hendaknya mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya.
- c. **Bimbingan kelompok.** Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok, berupa penyampaian informasi atau aktifitas kelompok membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial.
- d. **Konseling Kelompok.** Konseling kelompok merupakan bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya.

- e. Belajar Bernuansa Bimbingan. Secara umum bimbingan dapat diberikan guru sambil mengajar yaitu:
- 1) Mengenal dan bimbingan individu secara mendalam.
 - 2) Memberikan perlakuan dengan memperhatikan perbedaan individual.
 - 3) Memperlakukan individu secara manusiawi.
 - 4) Memberi kemudahan untuk mengembangkan diri secara optimal.
 - 5) Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan.

C. Pelaksanaan Bimbingan Konseling

1. Pelaksanaan program bimbingan konseling

Kegiatan layanan bimbingan akan terlaksana dengan baik dan efektif apabila diawali dengan perencanaan yang sistematis terarah dan terpadu dalam program sekolah secara keseluruhan. Perencanaan menyeluruh tersebut sekaligus akan merupakan acuan dasar untuk membuat program pelaksanaan kegiatan satuan-satuan layanan bimbingan. Untuk menjamin adanya keterpaduan dan kesinambungan, maka perencanaan hendaknya dibuat bersama oleh seluruh tenaga kependidikan disekolah sehingga menghasilkan suatu program utuh.

Dalam tahapan perencanaan program bimbingan konseling ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti berikut.

- a. Pengumpulan berbagai informasi kebutuhan layanan bimbingan yang diperoleh sebagai bahan dasar bagi penyusunan program termasuk potensi daerah yang dijadikan bahan pengembangan muatan lokal.
- b. Penyusunan program bimbingan konseling yang dilakukan secara bersama dengan seluruh tenaga kependidikan disekolah dibawah koordinasi kepala sekolah. Dalam program ini hendaknya cukup jelas permasalahan yang dihadapi tujuan dan sasaran yang akan dicapai, bentuk kegiatan dan tehnik pelaksanaan, petugas yang akan melaksanakan, waktu/jadwal pelaksanaan serta sarana yang diperlukan.
- c. Koordinasi pelaksanaan dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk memahami program serta peranan masing-masing.
- d. Penyediaan fasilitas yang diperlukan seperti ruangan, sarana, alat penunjang teknis, perlengkapan administrasi dan sebagainya.

2. Pelaksanaan Bimbingan Konseling

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Konseling tidak terlepas dari program yang telah disusun dalam tahapan perencanaan. Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan adalah hal-hal yang menyangkut: jenis-jenis layanan Bim-

bingan Konseling misi layanan Bimbingan Konseling ,cara dan tehnik pelaksanaan, waktu dan tempat pelaksanaan.

Pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah pada satuan pendidikan luar biasa antara TK/RA, SD/MI/, SMP/MTS, SMA/MA, maupun SMK/MAK, pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Perbedaan pokok terletak pada isi layanan bimbingan, untuk itu pada uraian berikut yang dibedakan berdasarkan satuan pendidikan, hanya mengenai bagian yang membahas tentang isi layanan bimbingan.

3. Jenis Layanan Bimbingan Konseling

Berdasarkan pada fungsi dan prinsip Bimbingan Konseling maka kerangka kerja layanan Bimbingan Konseling dikembangkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan esponsif, layanan perencanaan individual dan dukungan sistem.

- a. Layanan Dasar Bimbingan bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan yang mengacu pada tugas perkembangan peserta didik. Layanan dasar bimbingan ini diorientasikan untuk seluruh peserta didik dan dengan disajikan menggunakan strategi klasikal dan dinamika kelompok.
- b. Layanan responsif bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini bersifat preventif atau kuratif. Strategi yang digunakan adalah Bimbingan Konseling individual, kelompok dan konsultasi. Adapun isi layanan responsif ini yaitu :
 - a) Bidang Pendidikan
 - b) Bidang Belajar
 - c) Bidang Sosial
 - d) Bidang Pribadi
 - e) Bidang Karier
 - f) Bidang Tata tertib
 - g) Bidang Prilaku Sosial
 - h) Bidang Kehidupan Lainnya
- c. Layanan perencanaan Individu bertujuan membantu seluruh peserta didik mebuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Tujuan utama layanan ini untuk membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan perkem-bangannya sendiri, kemudian merencanakan dan mengaplikasikannya. Strategi peluncurannya adalah konsultasi dan konseling. Isi layanan perencanaan individual yaitu:

- a) Bidang pendidikan dengan topik belajar yang efektif, belajar memantapkan program keahlian yang sesuai dengan bakat, minat dan karakteristik kepribadiannya.
- b) Bidang karir dengan topik mengidentifikasi kesempatan karir yang ada di lingkungan masyarakat, mengembangkan sikap yang positif terhadap dunia kerja, dan merencanakan kehidupan karirnya.
- c) Bidang sosial pribadi dengan topik mengembangkan konsep diri yang positif, mengembangkan keterampilan sosial yang tepat, belajar menghindari konflik dengan teman, dan belajar memahami perasaan orang lain.
- d. Dukungan sistem yaitu kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memenatapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli, masyarakat yang berkompeten, manajemen program, penelitian dan pengembangan.

Kegiatan layanan utama yang disebutkan di atas, dalam implementasinya didukung dengan beberapa jenis layanan bimbingan konseling. Berbagai jenis layanan dan kegiatan perlu dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan bimbingan terhadap sasaran layanan, yaitu peserta didik. Layanan dan kegiatan pokok tersebut seperti berikut.

- 1) Layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik (terutama orang tua) memahami lingkungan (seperti sekolah) yang baru dimasukinya, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya siswa dilingkungan yang baru.
- 2) Layanan informasi, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik menerima dan memahami informasi (seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.
- 3) Layanan bimbingan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan bimbingan yang tepat (misalnya penempatan/ penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan/ program khusus, kegiatan ekstrakurikuler) sesuai dengan prestasi, bakat, dan minat, serta kondisi pribadi, maupun kelainanya.
- 4) Layanan bimbingan belajar, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Hal

ini berarti peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dapat menyelesaikan masa belajarnya dengan cepat.

- 5) Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung melalui tatap muka dengan pembimbing dalam rangka pembahasan dan pemecahan masalahnya.
- 6) Layanan bimbingan kelompok layanan bimbingan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara berkelompok memperoleh berbagai nara sumber tertentu (pembimbing) yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari sebagai individu dan pelajar serta untuk pertimbangan atau pengambilan keputusan tertentu.
- 7) Layanan Konseling kelompok yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik berkesempatan untuk membahas permasalahan melalui kegiatan kelompok.
- 8) Layanan bimbingan waktu luang yaitu layanan berupa bimbingan di luar jam sekolah dan pelaksanaannya :
 - a) Bagi peserta didik yang tinggal diasrama oleh ibu asrama.
 - b) Bagi peserta didik dilingkungan keluarga oleh orang tua/wali.
 - c) Kegiatan penunjang yaitu berbagai kegiatan bimbingan yang memungkinkan diperoleh berbagai data keterangan dan kemudahan bagi terlaksananya jenis-jenis layanan serta terwujudnya fungsi-fungsi di atas.

Adapun kegiatan penunjang layanan tersebut antara lain :

- (1) Penggunaan instrumen bimbingan yaitu kegiatan bimbingan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik (baik secara individual maupun kelompok) keterangan tentang lingkungan anak dan lingkungan yang luas pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen baik tes maupun non tes.
- (2) Penyelenggaraan himpunan data yaitu kegiatan bimbingan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik secara individual. Himpunan data perlu diselenggarakan secara sistematis, konverensif, terpadu dan sifatnya tertutup.
- (3) Pembahasan kasus yaitu kegiatan bimbingan yang membahas permasalahan yang alami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang dapat memberikan bahan keterangan dan kemudahan bagi upaya pemecahan permasalahan tersebut. Pertemuan dalam rangka pembahasan kasus bersifat terbatas dan tertutup.

- (4) Kunjungan rumah yaitu kegiatan bimbingan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan optimal atas permasalahan yang dialami oleh peserta didik melalui kunjungan rumah. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua, guru pembimbing khusus, dan peserta didik itu sendiri.
- (5) Alih tangan kasus yaitu kegiatan bimbingan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan optimal atas permasalahan yang dialami peserta didik dengan memin-dahkan penanganan kasus ke pihak yang lebih berkompeten. Kegiatan ini memerlukan kerja sama yang erat dan mantap antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan atas penanganan masalah peserta didik (terutama orang tua, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus dan ahli-ahli lain diluar bidang bimbingan).

Layanan bimbingan tersebut kesemuanya saling terkait dan saling menunjang baik langsung maupun tidak langsung. Saling keterkaitan dan tunjang menunjang antara layanan dan kegiatan itu menyangkut pula fungsi-fungsi yang di emban oleh masing-masing layanan. Sebagaimana telah dikemukakan diatas setiap layanan bimbingan harus mengandung muatan fungsi bimbingan tertentu.

4. Kegiatan Layanan Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan hendaknya disesuaikan dengan tujuan dan sasaran layanan bimbingan, serta karakteristik tujuan dan perkembangan siswa dalam aspek pribadi, sosial, pendidikan dan karier. Disamping itu sebaiknya diperhatikan pola pula kebutuhan siswa dari masing tingkatan pendidikan peserta didik. Layanan bimbingan disekolah untuk satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Bimbingan pribadi-sosial

- 1) Mengenalkan anggota badan, nama dan fungsinya
- 2) Mengenalkan nilai baik, buruk, terpuji, dan tercela.
- 3) Mengenalkan cara hidup sehat dan bersih.
- 4) Mengenalkan nilai Ketuhanan.
- 5) Mengenalkan perlunya kerjasama
- 6) Mengenalkan aktifitas hidup sehari-hari
- 7) Mengenalkan perlunya persahabatan
- 8) Mengenalkan perbedaan dirinya dengan orang lain
- 9) Mengenalkan Kedisiplinan
- 10) Mengenalkan lingkungan dan warga sekolah
- 11) Mengenalkan cara berkomunikasi dengan orang lain

- 12) Mengenalkan hak milik sendiri dengan hak milik orang lain
- 13) Melatih kemampuan senso - motorik
- 14) Mengenalkan perasaan kasih sayang pada sesama lingkungan
- 15) Melatih mengenalkan tanggung jawab
- 16) Melath dan mengenalkan kemandirian
- 17) Mengenalkan sebab akibat dari setiap tingkatan merugikan

b. Bimbingan belajar

- 1) Membiasakan mengucapkan salam
- 2) Membiasakan berdoa setiap akan melakukan kegiatan
- 3) Membiasakan mematuhi waktu
- 4) Membiasakan berpakaian seragam sekolah
- 5) Memotivasi anak agar senang pergi ke sekolah

c. Bimbingan karier

- 1) Mengenalkan nilai mata uang
- 2) Mengenalkan tugas dan peran orang tua
- 3) Mengenalkan tugas murid
- 4) Mengenalkan tugas-tugas profesi
- 5) Mengenalkan perlunya menghemat/menabung
- 6) Membimbing, mencintai pelajaran

d. Bimbingan penggunaan waktu luang

- 1) Mengenalkan pentingnya waktu
- 2) Mengenalkan macam-macam waktu dan tanda-tandanya
- 3) Mengenalkan perlunya pembagian waktu
- 4) Mengenalkan pentingnya menghargai waktu
- 5) Mengenalkan/mengarahkan banyak bermain yang baik untuk mengisi waktu.

5. Cara dan Teknik Pelaksanaan Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan dapat dilaksanakan dalam beberapa cara tergantung kepada sifat permasalahan, jumlah peserta didik, kesiapan tenaga pembimbing, tersedianya waktu dan tempat serta fasilitas yang tersedia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka cara yang ditempuh antara lain seperti berikut.

- a. Dengan cara klasikal, yaitu untuk melayani peserta didik yang sama kebutuhannya tanpa perlu pemisahan.
- b. Dengan cara, kelompok, yitu untuk melayani peserta didik yang sama kebutuhannya, namun tidak sesuai untuk sebagian peserta didik, misalnya karena perbedaan kelamin, agama, usia, dan sebagainya.

- c. Dengan cara individual, yaitu pelayanan secara individual sesuai dengan keadaan masalah dan karakteristiknya.
- d. Dengan cara alih tangan yaitu, meminta bantuan pihak lain yang dipandang lebih berwenang, misalnya dokter, psikolog, guru mata pelajaran, ulama, dan sebagainya.

Cara-cara tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan menggunakan tehnik-tehnik tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Beberapa tehnik yang dapat digunakan antara lain : konseling, wawancara, diskusi kelompok, simulasi, bermain peran permainan, konsultasi, kunjungan rumah, kegiatan individual atau individual, demonstrasi, ceramah, karya wisata, narasumber, pustaka, dan sebagainya.

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bimbingan Konseling

a. Waktu

Agar layanan bimbingan dapat terlaksana secara efektif, maka kegiatannya memerlukan pengaturan tertentu baik secara terjadwal ataupun tidak terjadwal (insidental). Pelaksanaan layanan bimbingan mempunyai arti dan keperluan yang sama dengan kegiatan pengajaran. Pengaturan waktu layanan bimbingan perlu diatur secara terpadu tidak agar tidak saling mengganggu dengan kegiatan pengajaran dan latihan. Hal ini dapat dilakukan pada saat pengembangan program baik program tahunan, caturwulan, bulanan, mingguan, ataupun harian.

Beberapa kemungkinan pengaturan waktu dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut.

- 1) Terjadwal seperti jam pelajaran. Cara ini digunakan terutama untuk memberikan bimbingan yang dibutuhkan oleh semua siswa secara klasikal atau kelompok. Misalnya ditetapkan seminggu sekali atau dua minggu sekali.
- 2) Terjadwal sendiri secara individual. Biasanya digunakan untuk membimbing siswa-siswa tertentu yang membutuhkan perhatian khusus. Cara ini dikordinasikan dengan baik bersama guru mata pelajaran apabila akan mengambil waktu belajar.
- 3) Mengambil waktu di luar jam pelajaran akan tetapi pada hari-hari sekolah. Ini harus sesuai dengan kesempatan antara guru pembimbing khusus dengan siswa misalnya waktu belajar.

b. Tempat Pelaksanaan

Kegiatan layanan bimbingan memerlukan pengaturan secara baik dan tepat. Kegiatan bimbingan dapat dilakukan di ruang yang disiapkan secara khusus untuk keperluan itu tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan di ruang

kelas, perpustakaan, laborotarium atau tempat lain yang disepakati bersama dengan peserta didik.

7. Penilaian Bimbingan Konseling

Dalam keseluruhan kegiatan layanan, penilaian diperlukan untuk memperoleh informasi timbal balik terhadap keefektifan layanan bimbingan yang telah dilaksanakan. Dengan informasi ini dapat diketahui sampai sejauh mana derajat keberhasilan layanan bimbingan. Berdasarkan informasi ini dapat ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program untuk selanjutnya.

Ada dua macam kegiatan penilaian program bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain seperti berikut.

- a. Kesesuaian antara program dan pelaksanaan
- b. Keterlaksanaan program
- c. Hambatan-hambatan yang muncul
- d. Dampak layanan bimbingan dan konseling terhadap kegiatan belajar mengajar.
- e. Respon peserta didik, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan.
- f. Perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar.
- g. Keberhasilan peserta didik setelah menamatkan sekolah baik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun kehidupannya di masyarakat.

Penilaian di tingkat sekolah di bawah tanggung jawab kepala sekolah yang dibantu oleh guru pembimbing khusus dan personil sekolah lainnya. Sumber informasi untuk keperluan penilaian antara lain peserta didik kepala sekolah, para wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, tokoh masyarakat, para pejabat dinas pendidikan, dan organisasi profesi bimbingan. Penilaian dilakukan dengan melakukan berbagai cara dan alat, seperti: wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, tes, analisis hasil kerja peserta didik, dan sebagainya.

Penilaian perlu diprogramkan secara sistematis dan terpadu. Hasil penilaian baik mengenai proses maupun hasil perlu dianalisis untuk kemudian dijadikan dasar dalam tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan program layanan bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Mulyono. 2003. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alimin, Z. 2005. *Mamahami pendidikan inklusi dan anak berkebutuhan khusus*. Makalah tidak diterbitkan. Bandung: Jurusan PLB FIP UPI.
- Ashman, A. & Elkins, J. 1994. *Educating Children With Special Needs*. New York: Prentice Hall.
- Achmad Juntika Nurihsan dkk. 2005. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMP (Kurikulum 2004)*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Achmad Juntika Nurihsan. 2003. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Mutiara.
- Asep Ahmad Sopandi. 2009. *Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Setting Pendidikan Inklusif*. Seminar Nasional Pendidikan tentang Pendidikan Inklusi Sebagai Pendidikan Tanpa Batas yang diselenggarakan BEM UNP Padang 13 Juni 2009 : Padang
- Abdul Haris. 2003. "Meningkatkan Kemampuan Sosialisasi Siswa Berkebutuhan Khusus Melalui Aplikasi Pembelajaran Berbasis Inklusif di Sekolah Reguler". *Jurnal Rehabilitasi Remidiasi*, 13, 102-10
- Amsori. Februari 2008. *Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Tentang Model Pendidikan Inklusi*. Makalah. Disampaikan Pada Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Prayudisium Program Studi
- Ahmadi Abu & Uhbiyati Nur. 2002. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rumka Cipta.
- Amin Jantimet, Moh. 1994. *Peningkatan Layanan Pendidikan bagi Anak Luar Biasa di Indonesia*. Bandung: IKIP Bandung.
- Anwar. 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education) Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Australian Institute of Health and Welfare (AIHW). 2004. *Children with Disabilities in Australia*. No. DIS 38. Canberra: AIHW.
- Agustyawati dan Solicha. 2009. *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.

- Al Imam Abi Husain Muslim bin Al Hajjaj. 2001. *Shahih Muslim*. Kairo: Daar Ibnu Al Haitam.
- Ahmad Ibn Hanbal. tt. *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal*. Kairo: Muassasah Qurtubah, juz 5, h. 411.
- Aefasky, F. 1995. *Inclusion Confusion. A Guide to Educating Students with Exceptional Needs*. California: Corwin Press.
- Bandi Delphie. 2006 *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Brinker, R.P. 1985. *Interactions between Severely Mentally Retarded Students and Other Students in Integrated and Segregated Public School Settings*. American Journal of Mental Deficiency, 89, 587-594.
- Befring, Edvard. 2001. *The Enrichment Perspective. A Special Educational Approach to an Inclusive School*. Article in Johnsen, Berit H. & Skjørten, Miriam D. (ed). Educational: An Introduction. Oslo, Unipub.
- Befring, Edvard. 2001. *Introduction to History of Special Needs Education towards Inclusive*. Article in Johnsen, Berit H. & Skjørten, Miriam D. (ed). Educational-Special Needs Education: An Introduction. Oslo, Unipub.
- Bratanata, SA. 1995. *Pengertian-Pengertian Dasar dalam Pendidikan Luar Biasa*. Bandung: Fa. SUMATRA.
- Bogdan, Robert C, Biklen, Knopp Sari. 1982. *Qualitative Research fo Eduactin, An Introduction to Theory and Methods*. Boston London: Allyn and Bacon.
- Borg R Walter, Gall Mredith D. 1989. *Educational Research, an Introduction*. New York: Routledge.
- Baker, E.T. 1994. *Metaanalysis evidence for non-inclusive Educational practices*. Disertasi. Temple University.
- Baker, E.T., Wang, M.C. & Walberg, H.J. 1994/1995. *The Effects of Inclusion on Learning*. Educational Leadership. 52(4) 33-35.
- Budiyanto. 2006. *Sistem Pendidikan Inklusi Berbasis Budaya Pendidikan Lokal*. Bandung: UPI.
- Brent Hardin dan Maria Hardin. 2004. *Into the Mainstream: Practical Strategies for Teaching in Inclusive Environments*, dalam Kathleen M. Cauley (ed.), *Educational Psychology*, (New York: McGraw-Hill/Dushkin, 2004), h. 46-48.
- Bandi Delphie. 2006. *Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Carlberg, C. & Kavale, K. *The Efficacy of Special Class vs Regular Class Placement for Exceptional Children: a Metaanalysis*. The Journal of Special Education.
- Colley, Helen. 2003. *Mentoring for Social Inclusion*. Kondon : Routledge Falmer
- Cavallaro, C.C. & Haney, M. 1999. *Preschool Inclusion*. Paul H. Brookes Publishing Co. Baltimore: Maryland.
- Colletta, Nat J. And Gillian Perkins. 1995. *Participation in Education*. Environment Department Papers. Paper No.001. Participation Series. Washington, DC: The World Bank.
- Doolittle, William G. Camp. 1999. *Constructivism: the Career and Technical Education Perspective*. Virginia Polytechnic Institute & State University Volume 16, Number 1 Fall 1999.
- Denzin Lincoln. 2000. *Handbook of Qualitative Research*, Second Edition, Publication, Inc. International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks, London, New Delhi.
- Departemen Tenaga Kerja. 1998. *Penyaluran dan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat*. Laporan Penelitian.
- Depdiknas. 2001. *Bimbingan dan Konseling (Materi Penataran Tertulis Penyegaran Guru SLTP) PPPG Tertulis*. Jakarta
- Depdiknas. 2002. *Kurikulum Pendidikan Luar Biasa (Pedoman Bimbingan di Sekolah)*. Jakarta.
- Depdiknas. 2002. *Kurikulum Pendidikan Luar Biasa (Pedoman Rehabilitasi)*. Jakarta.
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2008. *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008, Departemen Pendidikan Nasional, h. 6-9.
- Daniel P. Hallahan dkk., 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Boston: Pearson Education Inc.
- Depdiknas. 2002. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Modul Bimbingan Karir Pendidikan Inklusif Bagi Guru, dan Pengawas Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA*.

- Danim, Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Danumihardja, Mintarsih. 2001. *Peran Guru Sebagai Inovator*. Bandung: Jurnal Formasi No. 5, Tahun III.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran*. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. 2008. *Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan dalam Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Dit PSLB Depdiknas.
- Endang Rochyadi. 2001. *Penerapan Program Pembelajaran Individual bagi Anak Tunagrahita*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Evans, I.M., Salisbury, C.L., Palombaro, M. M., Berryman, J., & Hollowood, T. M. 1992. *Peer Interactions and Social Acceptance of Elementary-Age Children with Severe Disabilities in an Inclusive School*. *Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps*, 17, 205 – 212.
- Ekodjitmiko Sukarso. 2007. *Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Tunalaras Korban Narkoba, dan HIV/AIDS pada Jenjang Pendidikan Menengah*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Evans, I.M., Salisbury, C.L., Palombaro, M. M., Berryman, J., & Hollowood, T. M. 1992. *Peer Interactions and Social Acceptance of Elementary-Age Children with Severe Disabilities in an Inclusive School*. *Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps*, 17, 205 – 212.
- Rita Jordan. 1977. *Educating of Children and Young People With Autism*. Birmingham: University United Kingdom.
- Fish, J. 1985. *Educational Opportunities for All*. London: Inner London Education Authority.
- Gavin Reid. 2005. *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Assessment, Teaching and Learning*. London: David Fulton Publisher.
- George S. Morrison. 2009. *Early Childhood Education Today*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Gunarhadi. 2001. *Mengenal Pendekatan Inklusi Dalam Pendidikan Luar Biasa*. *Jurnal Rehabilitasi Remidiasi*.

- Hameed, Abdul. 2005. *Pendidikan Inklusif Satu-Satunya Cara Untuk Memberantas Ketidaksetaraan dan Ketidak Adilan*. ENet Asia Newsletter.
- Hidayat. 2003. *Kelompok Kerja (POKJA) Pengkajian Implementasi Pendidikan Inklusif*. Makalah. Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional tentang Model Pendidikan Inklusif di Indonesia dan Implementasinya di Jawa Tengah, di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- HKI. 2008a. *Penelitian Pendidikan Inklusi Berbasis Sekolah*. Hasil Presentasi. Disajikan dalam Sosialisasi Inklusi.
- Henry Clay Lindgren. 1967. *Educational Psychology in the Classroom*. Tokyo: Charles E. Tuttle Company.
- Hellen Keller International. 2013. *Materi bacaan Pelatihan Pemateri Pendidikan Inklusif*.
- Hadis, Fawzia Aswin. 2005. *Toward Inclusive, Inclusive Education in Indonesia: a Country Report, Presented at Seisa University, Ashibetsu-shi Hokkaido Japan*.
- Hobbs, T. & Westling, D.L. 1998. Promoting Successful Inclusion through Collaborative Problem Solving. *Teaching Exceptional Children*, Sept/Oct, 12-19.
- Hunt, P., Farron- Davis, F., Beckstead, S., Curtis, D., & Goetz, L. 1994. *Evaluating the Effects of Placement of Students with Severe Disabilities in General Education Versus Special Classes*. *Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps*, 19, 200-214.
- Hassan Shadily. 1991. *Ensiklopedi Indonesia 1*. Jakarta : PT Ichtar Baru-Van Hove.
- Hallahan, DP & Kauffman, JM. 1988. *Exceptional children, introduction to special education*, 4 th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Haryanto. 1997. *Evaluasi Pelaksanaan Model Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Playen Gunungkidul dan Pengasih Kulonprogo*. Yogyakarta: Tesis.
- _____. 2007. *Model Rehabilitasi Penyandang Cacat di Pedesaan*. Laporan Penelitian. PLB FIP UNY.
- Johnsen, Berit H. 2001. *Curricula for the Plurality of Individual Learning Needs*. Article in Johnsen, Berit H. & Skjørten, Miriam D. (ed). *Educational-Special Needs Education: An Introduction*. Oslo, Unipub.
- Johnsen, B.H. and Skjorten, M.D. (eds). 2001. *Education-Special Needs education; An Introduction*. Oslo: Unipub Forlag.
- Johnsen, B.H. & Skjorten, M.D. 2003. *Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar*, judul Asli Education – Special Needs Education An.

- J. David Smith. 2006. *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Karten, T.J. 2005. *Inclusion Strategies That Work*. California: Corwin Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Tengah. 2006. *Guru Ideal Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi*. Makalah. Disajikan Dalam Rangka Dies Natalis UNS ke XXXIX, di Universitas Sebelas Maret.
- Kompedium. 2006. *Perjanjian, Hukum dan Peraturan Menjamin Semua Anak : Memperoleh Kesamaan Hak Untuk Kualitas Pendidikan dalam Cara Inklusif, Respon Sektor Pendidikan Terhadap HIV dan AIDS*. .Dikembangkan Braillo Norway dan IDP Norway.
- Loreman, T, Deppeler. J, and Harvey, D. 2010. *Inclusive Education*. London and New York: Routledge, Taylor and Francis group.
- Lynch, James. 1994. *Proyection for Children with Special Need Education in Asian Region*. USA: The World Bank.
- Mercer, Cecil D & Mercer, Ann R. 1989. *Teaching Student with Learning Problems*, Aus: Merill Publishing Company A Bell & Howel Information Company.
- MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmn. 2006. *Memahami dan Membantu Anak ADHD*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marthan, Lay Kekeh. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas.
- Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Penerbit: Baduose Media.
- Moelyono. 2008. *Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan*. Makalah. Disampaikan Pada Acara Seminar Sehari Dalam Rangka Prayudisium Program Studi PLB- FKIP- UNS, di Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mulyono Abdurrahman. 2006. Implikasi Pendidikan Inklusi Dalam Penyiapan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan, *Jurnal Rehabilitasi Remidiasi*, 15, 33 – 53.
- _____. 1996. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Perguruan Tinggi.
- Mumpuniarti. 2001. Modifikasi Kurikulum Dalam Model Pendidikan Inklusi. *Jurnal Rehabilitasi Remidiasi*, 2, 72-76.
- Mudyahardjo, Redja. 2002. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Margaret McLaughlin. 2003. *Special Education in the School Community*, University of Maryland at College Park P.O. Box 1492 Washington, DC 2013 Volume 2, No. 2, 2003.
- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Mitsue Uemura. 1999. *Community Participation in Education: What Do We Know*. Summary of 23 World Bank Education Projects With Community Participation Components.
- Muhadjir Noeng. 2007. *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyono Abdulrahman. 2003. *Landasan Pendidikan Inklusif dan Implikasinya dalam penyelenggaraan LPTK*. Makalah disajikan dalam pelatihan penulisan buku ajar Bagi Dosen jurusan PLB yang diselenggarakan oleh Ditjen Dikti. Yogyakarta, 26 Agustus 2002.
- Moch. Soleh Y.A. Ichrom dan Terje Magnusson Watterdal. 2004. *Mengenal Pendidikan Inklusi*. Jakarta: UNESCO.
- Nurkolis. 2002. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Luar Biasa*. Direktorat Pendidikan Luar Biasa. Jakarta : 01 Mei 2002.
- Nurdin Widodo. 2002. *Penelitian Profil dan Peranan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Balitbang Kesos.
- Nasichin. April 2003. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pendidikan Inklusif*. Makalah. Disampaikan Pada Acara Semnar Nasional tentang Model Pendidikan Inklusif di Indonesia dan Implementasinya di Jawa Tengah, di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Nana Sudjana & Ibrahim. 2004. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ni'matuzahroh. 2015. *Analisis Kesiapan Guru dalam Pengelolaan Kelas Inklusi*. *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*.
- Nasichin. 2001. *Kebijakan Direktorat Pendidikan Luar Biasa*. A Paper delivered in Seminar of Special Education Department, Makasar 9-11 October 2001.
- Peg Lamb. 2003. *The Role of the Vocational Rehabilitation Counselor in Procuring Technology to Facilitate Success in Postsecondary Education for Youth with Disabilities*. *Journal of Special Education Technology*. Nashville: Fall 2003. Vol. 18, Iss.4; pg.53, 12 pgs.

- Pusat Rehabilitasi Remidiasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2003. *Panduan Praktis Pengelolaan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar*. Makalah Disampaikan dalam lokakarya PPRR-LEMLIT, di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Permendiknas Nomor 70. 2009. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pokja Pendidikan Inklusif Kota Metro. 2015. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Metro*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pasal 7.
- Porter, Gordon. 2001. *Disability and Inclusive Education*, A Paper prepared for the InterAmerican Development Bank Seminar on Inclusion and Disability Santiago, Chile, March 16, 2001.
- Ravik Karsidi. 2005. *Arah Kebijakan UNS/LPTK dalam Implementasi Pendidikan Inklusi*. Makalah. Disampaikan dalam *Seminar Rekomendasi International Symposium Inclusion And Removal Barries To Learning Participation And Development*, Bukittinggi, Sumatra Barat, di Sumatra Barat.
- Salim, A. C.H, Munawir Yusuf dan Munzayanah. 2003. *Model Pendidikan Inklusi di Indonesia dan Implementasinya di Propinsi Jawa Tengah*. Laporan Seminar Nasional, Surakarta : PPRR, LPPM, UNS.
- Skjorten, Miriam. 2001. *Menuju Inklusi dan Pengayaan (Kumpulan Artikel)*". Tempat penerbit tidak tercantum

- Smith, J. David. 2006. *Inklusi, Sekolah Ramah Anak* (Edisi terjemahan oleh: M. Sugiarmun, MIF. Baihaqi). Bandung: Nuansa.
- Soebagyo Brotosedjati. 2003. *Rintisan Pendidikan Inklusi di Jawa Tengah*. Makalah. Disampaikan Pada Acara Semnar Nasional tentang Model Pendidikan Inklusif di Indonesia dan Implementasinya di Jawa Tengah, Surakarta, di Universitas Sebelas Maret.
- Sunardi. 2003. Pendekatan Inklusif Implikasi Managerialnya. *Jurnal Rehabilitasi Remidiasi*, 13, 144-153.
- Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Somantri, S. 1995. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Saifuddin Azwar. 2006. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sekolah Inklusi: Kurang Guru, Sekolah Inklusi Tolak Siswa Berkebutuhan Khusus*
- Smith, J. David. 2006. *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa.
- Stainback, W. and Sianback, S. 1990. *Support Network for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Baltimore: Paul H, Brooks.
- Staub, D. & Peck, C.A. 1995. *What are the Outcomes for Nondisabled Students? Educational Leadership*. Baltimore: Paul H. Brooks.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, I.A, & Sudarto, Z. *Persepsi Guru Reguler terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMPN Se-Kota Madya Surabaya*. *Jurnal Pendidikan Khusus*. Unesa.
- Rye, Henning. 2001. *Helping Children and Families with Special Needs: A Resource-Oriented Approach*. Article in Johnsen, Berit H. & Skjørten, Miriam D. (ed). Educational – Special Needs Education: An Introduction. Oslo, Unipub.
- Skjørten, Miriam D. 2001. *Toward Inclusion and Enrichment*. Article in Johnsen, Berit H. & Skjørten, Miriam D. (ed). Educational-Special Needs Education: An Introduction. Oslo, Unipub.
- Sunardi. 1994. *Mainstreaming Salah Satu Alternatif Pendidikan Semua Anak Cacat*. Makalah pada Seminar Nasional PLB di Indonesia. Bandung: HISPELBI.
- Skidmare, David. 2004. *Inclusion the Dynamic of School Development* New York: Open University Press.
- Stainback, W. & Sianback, S. 1990. *Support Networks for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Baltimore: Paul H.Brooks.

- Staub, D. & Peck, C.A. 1994/1995. *What are the Outcomes for Nondisabled Students? Educational Leadership*. 52 (4) 36-40.
- Sri Esti Wuryani Djiwandono. 2005. *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Topping, Keith and Sheelagh Maloney. 2005. *The Routledge Falmer Reader In Inclusive Education*. New York : Routledge Falmer.
- Tangyong. A.F. ed. 1986. *Pelayanan Pendidikan Luar Biasa, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita*.
- Tarmansyah. 2007. *Inklusi Pendidikan untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Trianto. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.
- UN. 1991. *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
- UN. 1994. *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disability*. New York: United Nations.
- UNESCO. 1991. *Education for all I, II & III*. Jomtien, Thailand World Conference on Education for all.
- UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Paris: UNESCO.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Unesco, Toolkit. 2007. *Merangkul Perbedaan: Perangkat Untuk Menciptakan Lingkungan Inklusif, Ramah Pembelajaran*. Unesco.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997. *Tentang penyandang cacat*. Jakarta: Media Elektronika Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. 1994. *The Salamanca Statement and Framework For Action on Special Needs Education*. Paris: Author.
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2006. Jakarta: Asa Mandiri.
- Vaughn, S., Bos, C.S. & Schumn, J.S. 2000. *Teaching Exceptional, Diverse, and at Risk Student in the General Educational Classroom*. Boston: Allyn Bacon.
- Vaughn, S., Bos, C.S. & Schumn, J.S. 2000. *Teaching Exceptional, Diverse, and at Risk Student in the General Educational Classroom*. Boston: Allyn Bacon.

- Van Schaick, Jeffrey K. 1996. *Vocational Education Teachers' Perceptions of Their Use of Assessment Methods*, Publication Title: The CPA Journal. New York: Nov 1996. Vol. 66, Iss. 11; pg. 46, 5 pgs.
- Warnock, H.M. 1978. *Special Educational Needs: Report of The committee of Enquiry into the Education of Handicapped Young People*. London: Her Majesty's Stationary Office.
- Wallace, G & Larsen, SC. 1978. *Educational Assesment of Learning Problems: Testing for Teaching*. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
- Williams, James H. 1994. *The role of the community in education. In the forum for advancing basic education and literacy*. Volume 3, Issue 4, September 1994. Cambridge: Harvard Institute for International Development.
- Waldron, Karen, A. 2001. *Introduction to a Special Education the Inclusive Classroom*. New York: Delmar, Publiatur.
- Yusufhadi Miarso, Etal. 1986. *Teknologi Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Zainal Arifin. 2011. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zaenal Alimin & Permanarian S. 2004. *Jassi Anakku*, Jurnal Asesmen dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Drs. H. Sukadari, SE, SH, MM. lahir di Bantul 13 Juli 1957, Sekolah Dasar Lulus Tahun 1970, SMP Lulus 1973, SMK Lulus 1976, dan melanjutkan kuliah di SGPLB (Setara D2) lulus tahun 1979, Pendidikan S1 FKIP Prodi PLB UNS lulus 1982, S1 Fakultas Ekonomi tahun 2004, S1 Ilmu Hukum 2008 di UWMY, S2 Magister Managemen di UII Yogyakarta tahun 2000, menyelesaikan program Doktor (S3) dalam bidang Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

tahun 2014.

Selain menjadi Dosen Negeri yang diperkerjakan (DPK) di Universitas PGRI Yogyakarta juga mengajar di beberapa perguruan tinggi. Jabatan yang pernah diduduki yaitu menjadi ketua program studi PPB STKIP Catur Sakti Yogyakarta tahun 1995-1999. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama tahun 1999-2007 dan Pembantu Ketua II Bidang Kepegawaian dan Administrasi Keuangan tahun 2007-2010. Menjadi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Universitas PGRI Yogyakarta tahun 2013-2017 dan tahun 2018 diangkat menjadi Staf Ahli Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.

Beberapa karya ilmiah telah diterbitkan berupa buku maupun beberapa jurnal. Pernah memenangkan kompetisi proposal jurnal integritas yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk 10 besar terbaik se-Indonesia dan jurnal telah diterbitkan tahun 2018. Beberapa kali memenangkan hibah penelitian dan PKM yang diselenggarakan Kemenristekdikti Republik Indonesia.

